

DINAS KOMINFO JAYAWIJAYA



STATISTIK SEKTORAL

TAHUN 2024

KABUPATEN JAYAWIJAYA



LAMBANG KABUPATEN





VISI DAN MISI

VISI KABUPATEN JAYAWIJAYA

**“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera,
Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”**

Penjelasan Visi:

- **Sejahtera**, dimaksudkan suatu kondisi dimana tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, damai dan bahagia.
- **Mandiri** secara ekonomi dimaksudkan bahwa Kabupaten Jayawijaya, mampu bertumbuh dan berkembang diatas potensi dirinya dan lingkungannya sebagai rahmat Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana, dipelihara dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing.
- **Berkualitas** dimaksudkan bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu teknologi, mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (*intelligentsia Question*), emosional (*emotional Question*), dan spiritual (*spiritual Question*) serta sehat jasmani dan rohani dan mampu daya saing.
- **Berbudaya** dimaksudkan bahwa rakyat Jayawijaya senantiasa akan tumbuh dalam norma-norma kehidupan yang lebih baik, yang diambil dari budaya leluhurnya, memiliki cinta kasih sayang, menghargai sesamanya sebagai mahluk ciptaan Tuhan, memiliki tenggang rasa, mengedepankan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan, serta senantiasa menyadari pentingnya keharmonisan hubungan dengan sesama, lingkungan dan Tuhan sebagai pencipta.



MISI KABUPATEN JAYAWIJAYA

Untuk mewujudkan visi pembangunan sebagaimana dikemukakan di atas maka dirumuskan misi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel;
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya;
- Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;
- Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);
- Mengembangkan sektor jasa dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur berkelanjutan dan memadai.



Thony M. Mayor, S.Pd., MM
Pj. Bupati Jayawijaya



Pilatus Lagowan, SE
Pj. Sekretaris Daerah Jayawijaya



Arklus Windesi, S.Sos., M.Si
Kepala Dinas Kominfo Jayawijaya



SAMBUTAN BUPATI JAYAWIJAYA

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik upaya penerbitan Buku Statistik Sektoral Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 sebagai salah satu wujud penyediaan informasi Statistik Sektoral.

Buku Statistik Sektoral Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 merupakan buku yang berisikan data sektoral yang dihimpun dari seluruh perangkat daerah dan beberapa instansi vertikal di Kabupaten Jayawijaya. Buku ini menerangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan publik di Kabupaten Jayawijaya, terdiri dari aspek administrasi pemerintahan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, sosial, ekonomi, infrastruktur, kependudukan dan geografi.

Hadirnya buku ini didasarkan pada amanat Presiden sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwasanya Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata bertugas untuk menyebarluaskan data.

Melalui buku Statistik Sektoral Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan serta pemahaman menyeluruh kepada pembaca terkait data sehingga sudut pandang pembaca selaras dengan intepretasi yang tepat dari data yang tersedia. Upaya pemutakhiran informasi yang ada dalam Buku ini akan kami



lakukan secara berkesinambungan tiap tahunnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya sehingga memungkinkan terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan dan bahan evaluasi pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.

Wamena, 08 Oktober 2024

**Pj. BUPATI
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

THONY M. MAYOR, S.Pd., MM



SAMBUTAN KEPALA DINAS

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami persembahkan buku “Statistik Sektoral Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024”. Buku ini merupakan hasil kolaborasi intensif antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, yang bertujuan untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

Pentingnya statistik sektoral dalam mendukung kebijakan publik tidak dapat dipungkiri. Data yang disajikan dalam buku ini mencakup berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial, hingga demografi, yang semuanya berperan krusial dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pembangunan yang efektif dan efisien.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, serta semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam pengumpulan dan penyajian data. Kerjasama yang baik ini sangat kami harapkan dapat terus berlanjut demi terwujudnya data yang berkualitas dan dapat diandalkan.

Selain itu, kami juga berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kondisi terkini Kabupaten Jayawijaya, serta menjadi alat evaluasi yang efektif untuk mengukur keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, kita dapat terus melakukan perbaikan dan inovasi demi kesejahteraan masyarakat Jayawijaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung



terbitnya buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Wamena, 08 Oktober 2024

**Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Jayawijaya,**

Arklaus Windesi, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197108061997121001



KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan, kami persembahkan buku “Statistik Sektoral Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024” kepada para pembaca yang budiman. Buku ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya dengan berbagai instansi terkait, serta dukungan yang tak ternilai dari masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan data statistik yang akurat dan terpercaya.

Buku ini menyajikan data statistik dari berbagai sektor yang mencakup aspek ekonomi, sosial, demografi, dan infrastruktur di Kabupaten Jayawijaya. Data yang disajikan dalam buku ini tidak hanya dalam bentuk tabel, tetapi juga dilengkapi dengan grafik, diagram, dan infografis yang menarik dan informatif. Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami data yang disajikan serta memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan daerah ini. Dengan penyajian data yang lebih visual, kami berharap dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pembaca dalam menganalisis informasi yang tersedia.

Setiap deskripsi data dalam buku ini disertai dengan analisis yang komprehensif serta saran pengembangan yang dapat dijadikan acuan bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. Analisis yang mendalam ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada, serta merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Kami percaya bahwa dengan analisis yang tepat, data statistik dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk data, informasi,



maupun dukungan lainnya. Tanpa kerjasama yang baik, buku ini tidak akan terwujud. Kami juga mengapresiasi upaya semua pihak yang telah bekerja keras untuk memastikan bahwa data yang disajikan dalam buku ini akurat, relevan, dan up-to-date.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, peneliti, akademisi, dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi statistik yang akurat dan terpercaya. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan relevansi data yang kami sajikan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jayawijaya.

Akhir kata, semoga buku “Statistik Sektorial Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024” ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam berbagai bidang, dan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih efektif di masa depan.

Wamena, 08 Oktober 2024

**Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Jayawijaya,**

Arklaus Windesi, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I -
NIP. 197108061997121001



DAFTAR ISI

LAMBANG KABUPATEN.....	2
VISI DAN MISI.....	3
SAMBUTAN BUPATI JAYAWIJAYA	8
SAMBUTAN KEPALA DINAS	10
KATA PENGANTAR	12
DAFTAR ISI.....	14
DAFTAR GAMBAR	19
DAFTAR TABEL.....	23
BAB I GAMBARAN UMUM	27
BAB II PEMERINTAHAN	32
2.1. DPRD Kabupaten Jayawijaya.....	32
2.1.1. Daftar Anggota DPRD.....	33
2.1.2. Susunan dan Komposisi Komisi A DPRD	34
2.1.3. Susunan dan Komposisi Komisi B DPRD	35
2.1.4. Susunan dan Komposisi Komisi C DPRD	36
2.1.5. Susunan dan Komposisi Badan Musyawarah DPRD	37
2.1.6. Susunan dan Komposisi Badan Anggaran DPRD	39
2.1.7. Susunan dan Komposisi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD	40
2.1.8. Susunan dan Komposisi Badan Kehormatan DPRD	41
2.2. Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya.....	42
2.2.1. Nilai IKM OPD Jayawijaya Tahun 2022-2023	42
2.2.2. Mutu Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya.....	45
2.3. Inspektorat.....	47
2.4. Hukum dan Perundang-Undangan.....	62
2.5. Protokol dan Pimpinan Kabupaten Jayawijaya	64
2.5.1. Jenis Surat Kabar yang Masuk Jayawijaya Tahun 2023	65
2.5.2. Kunjungan Kerja Tamu Pemda Jayawijaya Tahun 2023	67
2.5.3. Jumlah Kerjasama Media Massa Jayawijaya Tahun 2023	68



2.6. Bappeda Kabupaten Jayawijaya	69
--	-----------

BAB III SOSIAL, KEMASYARAKATAN, DAN KESEJAHTERAAN	74
--	-----------

3.1. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya.....	74
---	-----------

3.1.1. Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	76
--	----

3.1.2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	78
---	----

3.1.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan.....	79
---	----

3.2. Dinas Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya.....	82
--	-----------

3.2.1. Gambaran Umum Kinerja Dinas Olah Raga dan Pemuda.....	83
--	----

3.2.2. Struktur Pemuda Berdasarkan Pendidikan	84
---	----

3.2.3. Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan.....	87
--	----

3.2.4. Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga	89
--	----

3.2.5. Jumlah Prasarana Olahraga Berdasarkan Kondisi.....	90
---	----

3.2.6. Jenis dan Jumlah Klub Olahraga.....	93
--	----

3.3. Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya.....	95
--	-----------

3.3.1. Jumlah Penduduk Rawan Sosial dan Sarana	97
--	----

3.3.2. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100
--	-----

3.3.3. Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	101
--	-----

3.3.4. Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP	103
---	-----

3.3.5. Jumlah Pelayanan Ketenagakerjaan	104
---	-----

3.4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.....	106
--	------------

3.4. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Kabupaten Jayawijaya	122
--	------------

BAB IV PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	150
--	------------

4.2. Sarana dan Prasarana Produktifitas Pertanian	158
--	------------

4.3. Perkembangan Perkebunan	163
---	------------

4.4. Perkembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	165
---	------------

4.5. Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia	169
--	------------

4.6. Produktifitas Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi	171
--	------------

4.7. Perkembangan Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein	174
--	------------

4.8. Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan	176
---	------------



4.9. Pergudangan.....	180
4.10. Data Ketersediaan Pangan Utama.....	182
4.11. Produktifitas Perikanan	185
BAB V PERHUBUNGAN DAN INFRASTRUKTUR	190
5.1. Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya	190
5.1.1. Jumlah Kendaraan Pribadi	191
5.1.2. Jumlah Moda Angkutan Barang/Orang	192
5.1.3. Jumlah Jembatan Timbang.....	192
5.1.4. Jumlah Moda Angkutan Umum.....	193
5.1.5. Jumlah Perusahaan Angkutan Umum.....	194
5.1.6. Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (Kir) Angkutan Umum	195
5.1.7. Jumlah Terminal	195
5.1.8. Jumlah Moda Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan	197
5.1.9. Perkeretaapian.....	197
5.1.10. Transportasi Udara.....	197
5.2. Dinas Perumahan dan Pemukiman.....	198
5.2.1. Luas Pemukiman	199
5.2.2. Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi	200
5.2.3. Jumlah Rumah Berdasarkan Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah	201
5.2.4. Jumlah Untuk MBR	202
5.2.5. Jumlah dan Luas Tempat Pemakaman Umum	202
5.2.6. Jumlah dan Luas Taman Makam Pahlawan	203
5.2.7. Jumlah Ruang Terbuka Hijau	203
5.2.8. Jumlah Kawasan Pemukiman Kumuh	203
5.2.9. Jumlah Rumah Dinas.....	204
5.3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya	205
5.3.1. Panjang Jalan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Menurut Distrik	206
5.3.2. Panjang Jalan Kabupaten/Kota	206
5.4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jayawijaya	208
5.5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jayawijaya	219



BAB VI PERDAGANGAN, INDUSTRI, KOPERASI, DAN MODAL	230
6.1. Dinas PERINDAGKOP Kabupaten Jayawijaya.....	230
6.2. Dinas DPMPSTP Kabupaten Jayawijaya	237
BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.....	279
7.1. Data Pendapatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023	280
7.2. Anggaran Belanja Kabupaten Jayawijaya tahun 2023.....	282
7.3. Jumlah Aset Bergerak	284
7.4. Jumlah Aset Tidak Bergerak	286
7.5. Nilai Aset Bergerak	287
7.6. Nilai Aset Tidak Bergerak.....	289
7.7. Nilai Penyusutan Aset Bergerak.....	290
7.8. Nilai Penyusutan Aset Tidak Bergerak	292
BAB VIII KEMANANAN, PENANGGULANGAN BENCANA, DAN SATPOL PP	295
8.1. Polres Jayawijaya	295
8.1.1. Data Anggota Kepolisian Polres Jayawijaya.....	296
8.1.2. Jumlah Kriminalitas.....	298
8.1.3. Kasus Unjuk Rasa Di Kabupaten Jayawijaya	300
8.1.4. Pelanggaran Lalu Lintas.....	302
8.1.5. Kecelakaan Lalu Lintas.....	304
8.1.6. Perkembangan Gangguan Keamanan.....	306
8.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya	307
8.3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jayawijaya	324
BAB IX TELEKOMUNIKASI, PARIWISATA, DAN BKPSDMD	337
9.1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya....	337



9.1.1. Jumlah Sumber Penyiaran Informasi	338
9.1.2. Jumlah Layanan Internet	340
9.1.3. Jumlah Kantor Pos dan Stasiun Radio	341
9.1.4. Perkembangan Jumlah Layanan Informasi	343
9.2. Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya.....	345
9.2.1. Jumlah Objek Wisata	346
9.2.2. Jumlah Kunjungan Wisatawan	348
9.2.3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Objek	350
9.2.4. Lama Kunjungan Wisatawan	352
9.2.5. Jumlah Jenis Penginapan	354
9.2.6. Jumlah Kamar Penginapan Lainnya	356
9.2.7. Biro Wisata dan Agen Perjalanan Wisata	358
9.2.8. Jenis Usaha Makanan/Minuman	360
9.2.9. Pusat Penjualan Cenderamata	362
9.2.10. Kategori Restoran Berdasarkan Jenis Makanan	364
9.2.11. Jumlah Penerimaan Daerah dari Pariwisata	366
9.3. BKPSDMD Kabupaten Jayawijaya	369
9.3.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS)	370
9.3.2. Jumlah Pejabat Struktural	372
9.3.3. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	373
9.3.4. Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin	375
BAB X PENUTUP	377



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengamatan Unsur Iklim Tahun 2023.....	29
Gambar 2. Mutu Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya	45
Gambar 3. Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan.....	51
Gambar 4. Jumlah Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.....	51
Gambar 5. Pemeriksaan Berkala/Reguler	53
Gambar 6. Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah	54
Gambar 7. Jumlah Sakip Instansi Yang Dievaluasi.....	56
Gambar 8. Jumlah Obrik yang Tidak Ada Temuan.....	57
Gambar 9. Jumlah OPD Berdasarkan Peringkat	59
Gambar 10. Indikator Obrik Lainnya	61
Gambar 11. Jumlah Dokumen Yang Diterbitkan Per Februari 2024.....	63
Gambar 12. Jenis Surat Kabar yang Masuk.....	65
Gambar 13. Kunjungan Kerja Tamu Pemda Kabupaten Jayawijaya	67
Gambar 14. Jumlah Kerjasama Media Massa	68
Gambar 15. Jumlah Dokumen dan Program Tahun 2023-2024	70
Gambar 16. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	75
Gambar 17. Jumlah Penduduk Menurut Usia	76
Gambar 18. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	78
Gambar 19. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan	80
Gambar 21. Struktur Pemuda Berdasarkan Pendidikan.....	84
Gambar 22. Jumlah Pemuda Usa 16-30 Tahun.....	85
Gambar 23. Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan	87
Gambar 24. Jumlah dan Jenis Prasarana Olahraga	89
Gambar 25. Jenis dan Jumlah Klub Olahraga	93
Gambar 25. Jumlah Penduduk Rawan Sosial dan Sarana	97
Gambar 26. Jumlah Sarana Sosial	99
Gambar 27. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)....	100
Gambar 28. Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).....	101
Gambar 29. Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP	103
Gambar 30. Jumlah Pelayanan Ketenagakerjaan.....	104
Gambar 31. Jumlah Pemberdayaan Perempuan.....	107
Gambar 32. Jumlah Pekerja Perempuan.....	109
Gambar 33. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak	111
Gambar 34. Struktur Penduduk Perempuan Berdasarkan Pendidikan.....	113
Gambar 35. Jumlah Anak Tidak Bersekolah	115



Gambar 36. Jumlah Anak Tamatan SD/Sederajat.....	117
Gambar 37. Jumlah Anak Tamatan SMP/Sederajat.....	119
Gambar 38. Jumlah Tamatan SMA/Sederajat	121
Gambar 39. Jumlah Tenaga Kesehatan	124
Gambar 40. Jumlah Fasilitas Kesehatan	126
Gambar 41. Angka Kelahiran.....	128
Gambar 42. Cakupan Imunisasi.....	130
Gambar 43. Jumlah Pelayanan Bayi	133
Gambar 44. Perkembangan Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein.....	174
Gambar 45. Jumlah Kendaraan Pribadi.....	191
Gambar 46. Jumlah Moda Angkutan Barang/Orang.....	192
Gambar 47. Jumlah Moda Angkutan Umum	193
Gambar 48. Jumlah Perusahaan Angkutan Umum	194
Gambar 49. Jumlah Penumpang Melalui Terminal Tipe C.....	196
Gambar 50. Jumlah Bandar Udara	198
Gambar 51. Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi.....	200
Gambar 52. Jumlah Rumah Berdasarkan bahan Bangunan Utama Lantai Rumah	201
Gambar 53. Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	203
Gambar 54. Kondisi Jalan Kabupaten/Kota.....	207
Gambar 55. Jumlah Perpustakaan dan Sejenisnya	209
Gambar 56. Jumlah Perpustakaan dan Sejenisnya	211
Gambar 57. Jumlah Perpustakaan Online/Digital.....	213
Gambar 58. Jumlah Kunjungan Perpustakaan	215
Gambar 59. Jumlah Anggota Perpustakaan	217
Gambar 60. Data Aparat Pemerintah Kampung/Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan	224
Gambar 61. Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer.....	239
Gambar 62. Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder	241
Gambar 63. Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier	242
Gambar 64. Jumlah UMK Bidang Kuliner	245
Gambar 65. Jumlah UMKM Bidang Pendidikan	247
Gambar 66. Jumlah UMKM Bidang Teknologi Internet	248
Gambar 67. Jumlah UMKM Bidang Jasa Pangkas Rambut	249
Gambar 68. Jumlah UMKM Bidang Kesehatan	251
Gambar 69. Jumlah UMKM Bidang Elektronik Counter	252
Gambar 70. Jumlah UMKM Bidang Fashion.....	254
Gambar 71. Jumlah UMKM Bidang Otomotif.....	255



Gambar 72. Jumlah UMKM Bidang Perhotelan.....	257
Gambar 73. Jumlah UMKM Bidang Fotocopy dan Studio.....	259
Gambar 74. Jumlah UMKM Bidang Jasa Penjahit	261
Gambar 75. Jumlah UMKM Bidang Depot Air.....	262
Gambar 76. Jumlah UMKM Bidang Lainnya.....	264
Gambar 77. Jumlah UMKM Bidang PT dan CV	266
Gambar 78. Persentase Koperasi Aktif	268
Gambar 79. Jumlah Usaha Tidak Berbadan Hukum.....	269
Gambar 80. Jumlah Kerjasama Penanaman Modal Antara UMKM	271
Gambar 81. Jumlah Perizinan Usaha	273
Gambar 83. Jumlah Pelaku UMKM.....	276
Gambar 83. Data Pendapatan Kabupaten Jayawijaya	280
Gambar 84. Anggaran Belanja Kabupaten Jayawijaya.....	282
Gambar 85. Jumlah Aset Bergerak.....	284
Gambar 86. Jumlah Aset Tidak Bergerak.....	286
Gambar 87. Nilai Aset Bergerak.....	287
Gambar 88. Nilai Aset Tidak Bergerak.....	289
Gambar 89. Nilai Penyusutan Aset Bergerak	291
Gambar 90. Nilai Penyusutan Aset Tidak Bergerak	292
Gambar 91. Data Anggota Kepolisian Polres Jayawijaya	296
Gambar 92. Jumlah Kriminalitas	298
Gambar 93. Jumlah Kasus Unjuk Rasa.....	300
Gambar 94. Data Pelanggaran Lalu Lintas.....	302
Gambar 95. Data Kecelakaan Lalu Lintas.....	304
Gambar 96. Perkembangan Data Gangguan Keamanan.....	306
Gambar 97. Kawasan Rawan Bencana	313
Gambar 98. Jumlah Korban Bencana.....	315
Gambar 99. Jumlah Pengungsi Akibat Banjir.....	316
Gambar 100. Jumlah Pengungsi Akibat Longsor.....	318
Gambar 101. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Sosial.....	319
Gambar 102. Jumlah Kerugian Bencana	321
Gambar 103. Jumlah Anggota Aparat Pamong Praja dan Pemadam (PNS)	326
Gambar 104. Jumlah Anggota Aparat Pamong Praja dan Pemadam (Non-PNS).....	328
Gambar 105. Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban dan Ketenteraman).....	330
Gambar 106. Jumlah Kejadian Kebakaran.....	331
Gambar 108. Estimasi Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Permenit	333



Gambar 108. Jumlah Sumber Penyiaran Informasi.....	338
Gambar 109. Jumlah Layanan Internet.....	340
Gambar 110. Jumlah Kantor Pos dan Stasiun Radio	341
Gambar 111. Jumlah Objek Wisata.....	346
Gambar 112. Jumlah Kunjungan Wisatawan.....	348
Gambar 115. Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Objek	350
Gambar 116. Lama Kunjungan Wisatawan	352
Gambar 115. Jumlah Kamar Penginapan Lainnya.....	356
Gambar 116. Biro Wisata dan Agen Perjalanan Wisata	358
Gambar 117. Jenis Usaha Makanan/Minuman	360
Gambar 118. Pusat Penjualan Cenderamata.....	362
Gambar 119. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).....	370
Gambar 120. Jumlah Pejabat Struktural	372
Gambar 121. Tingkat Pendidikan ASN Kabupaten	374
Gambar 122. Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin	375



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Anggota DPRD Periode 2019-2024	33
Tabel 2. Susunan dan Komposisi Komisi A	34
Tabel 3. Susunan dan Komisi B	35
Tabel 4. Susunan dan Komposisi Komisi C	37
Tabel 5. Susunan dan Komposisi Badan Musyawarah	37
Tabel 6. Susunan dan Komposisi Badan Anggaran	39
Tabel 7. Susunan dan Komposisi Badan Pembentukan Peraturan Daerah	40
Tabel 8. Susunan dan Komposisi Badan Kehormatan	41
Tabel 9. Nilai IKM OPD Kabupaten Jayawijaya	42
Tabel 10. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	49
Tabel 11. Gambaran Umum Dinas Olah Raga dan Pemuda	83
Tabel 12. Jumlah Prasarana Olahraga Berdasarkan Kondisi	90
Tabel 13. Jumlah Pusat Pelayanan Kesehatan	137
Tabel 14. Jumlah SDM Kesehatan	140
Tabel 15. Kesehatan Masyarakat	145
Tabel 16. Perkembangan Tanaman Pangan	151
Tabel 17. Sarana dan Prasarana Produktifitas Pertanian	158
Tabel 18. Data Perkembangan Perkebunan	163
Tabel 19. Perkembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	165
Tabel 20. Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia	169
Tabel 21. Produktifitas Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi	171
Tabel 22. Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan	176
Tabel 23. Pergudangan	180
Tabel 24. Data Ketersediaan Pangan Utama	182
Tabel 25. Produktifitas Perikanan	185
Tabel 26. Jumlah Terminal	195
Tabel 27. Jumlah Rumah untuk MBR	202
Tabel 28. Jumlah dan Luas Tempat Pemakaman Umum	202
Tabel 29. Jumlah dan Luas Taman Makam Pahlawan	203
Tabel 30. Jumlah dan Luas Ruang Terbuka Hijau	203
Tabel 31. Jumlah Rumah Dinas	204
Tabel 32. Panjang jalan dan Kondisinya Berdasarkan Administrasi	206
Tabel 33. Data Administrasi Kampung/Desa	220
Tabel 34. Data Kantor Pemerintahan Kampung/Desa	222
Tabel 35. Data Lembaga Kemasyarakatan Kampung/Desa dan Lembaga Adat	226



Tabel 36. Jumlah Pasar Tradisional	231
Tabel 37. Jumlah Eksport	233
Tabel 38. Data Import.....	236
Tabel 39. Jumlah Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana	308
Tabel 40. Jumlah Sistem Peringatan Dini.....	311
Tabel 41. Jumlah dan Jenis Kebutuhan Umum.....	322
Tabel 42. Perkembangan Jumlah Layanan Informasi.....	343
Tabel 43. Jumlah Jenis Penginapan	354
Tabel 44. Kategori Restoran Berdasarkan Jenis Makanan.....	364
Tabel 45. Jumlah Penerimaan Daerah dari Pariwisata.....	366

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA



30 Anggota DPRD
13 Partai

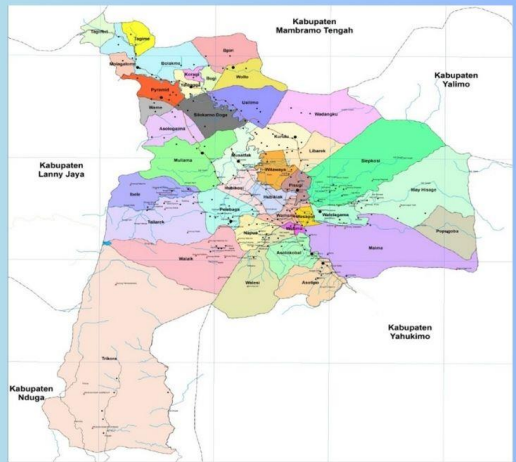


30 OPD
IKM Tertinggi 95,9
"DPMPTS"

Nilai Akuntabilitas
Pemerintahan "B"

7 Hasil Temuan dan
Rekomenadasi

Tidak ada Temuan
Objek Pemeriksaan



820 SK diterbitkan
45 Peraturan Bupati
8 Peraturan Daerah
1 Surat Kabar Lokal



278 Kunjungan kerja Lokal
26 Nasional
5 Internasional
10 Kerjasama
media masa lokal
247 Program RPJMD

Website

<https://jayawijayakab.go.id>

BAB I

GAMBARAN UMUM

JAYAWIJAYA 2023-2024



BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. Sejarah Kabupaten Jayawijaya

Sejarah Kabupaten Jayawijaya sangat berhubungan erat dengan sejarah perkembangan gereja di wilayah ini, karena daerah ini adalah daerah terisolasi dari dunia luar, tetapi sejak tahun 1950-an misionaris mulai berdatangan dan mulai melakukan penginjilan di daerah ini. Lembah Baliem ditemukan secara tidak sengaja, ketika Richard Archbold, ketua tim ekspedisi yang disponsori oleh American Museum of Natural History melihat adanya lembah hijau luas dari kaca jendela pesawat pada tanggal 23 Juni 1938. Penglihatan tidak sengaja ini adalah awal dari terbukanya isolasi Lembah Baliem dari dunia luar.

Tim ekspedisi yang sama di bawah pimpinan Kapten Teerink dan Letnan Van Areken mendarat di Danau Habema. Dari sana mereka berjalan menuju arah Lembah Baliem melalui Lembah Ibele dan mereka mendirikan basecamp di Lembah Baliem. Pada tanggal 20 April 1954, sejumlah misionaris dari Amerika Serikat, termasuk di dalamnya Dr. Myron Bromley, tiba di Lembah Baliem. Tim misionaris ini menggunakan pesawat kecil yang mendarat di Sungai Baliem, tepatnya di Desa Minimo dengan tugas utama memperkenalkan agama Nasrani ke Orang Dani di Lembah Baliem. Stasiun Misionaris Pertama didirikan di Hitigima. Selama 7 (tujuh) bulan mereka mendirikan landasan pesawat terbang pertama. Beberapa waktu kemudian misionaris menemukan sebuah areal yang ideal untuk dijadikan landasan pendaratan pesawat udara. Areal landasan pesawat terbang itu terletak berbatasan dengan daerah Suku Mukoko dan di areal inilah mulai dibangun landasan terbang yang kemudian berkembang menjadi landasan terbang Wamena saat ini.

Pada tahun 1958 Pemerintah Belanda memulai kekuasaannya di Lembah Baliem dengan mendirikan pos pemerintahannya di sekitar areal landasan terbang, namun kehadiran Belanda di Lembah Baliem tidak lama, karena melalui proses panjang diawali dengan ditandatanganinya dokumen Pepera pada tahun 1969, Irian Barat



kembali ke Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Pemerintah Belanda segera meninggalkan Irian Barat (Papua).

Kabupaten Jayawijaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Setelah adanya penetapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, maka ditetapkan bahwa Kabupaten Jayawijaya menjadi bagian dari wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi.

1.2. Kondisi Geografis Kabupaten Jayawijaya

Berdasarkan pada Undang-undang tersebut, Kabupaten Jayawijaya terletak pada garis meridian 137°12'-141°00' Bujur Timur dan 3°2'-5°12' Lintang Selatan yang memiliki daratan seluas 52.916 km², merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Irian Barat (pada saat itu) yang wilayahnya tidak bersentuhan dengan bibir pantai.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Jayawijaya berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Tolikara.
- b. Sebalah Selatan: Kabupaten Nduga dan Kabupaten Yahukimo.
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Nduga dan Lanny Jaya.
- d. Sebelah Timur: Kabupaten Yalimo

1.3. Topografi Kabupaten Jayawijaya

Kabupaten Jayawijaya atau Lembah Baliem dikelilingi oleh Pegunungan Jayawijaya yang terkenal karena puncak-puncak salju abadinya, antara lain: Puncak Trikora (4.750 m), Puncak Mandala (4.700 m) dan Puncak Yamin (4.595 m). Pegunungan ini amat menarik wisatawan dan peneliti Ilmu Pengetahuan Alam karena puncaknya yang selalu ditutupi salju walaupun berada di kawasan tropis. Lereng pegunungan yang terjal dan lembah sungai yang sempit dan curam menjadi ciri khas pegunungan ini. Cekungan lembah sungai yang cukup luas terdapat hanya di Lembah Baliem Barat dan Lembah Baliem Timur (Wamena).

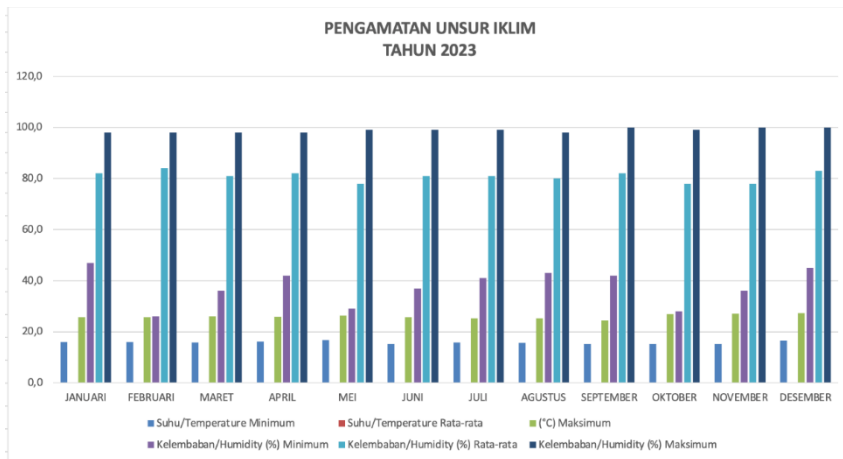
Vegetasi alam hutan tropis basah di dataran rendah memberi peluang pada hutan iklim sedang berkembang cepat di lembah ini.



Ekosistem hutan pegunungan berkembang di daerah ketinggian antara 2.000–2.500 m di atas permukaan laut.

1.4. Klimatologi Kabupaten Jayawijaya

Kabupaten Jayawijaya berada di hamparan Lembah Baliem, sebuah lembah aluvial yang terbentang pada areal ketinggian 1500–2000 meter di atas permukaan laut. Temperatur udara bervariasi antara 15,2 derajat Celcius sampai dengan 27,2 derajat Celcius. Dalam setahun rata-rata curah hujan adalah 207 mm dan dalam sebulan terdapat kurang lebih 16 hari hujan. Musim kemarau dan musim penghujan sulit dibedakan. Berdasarkan data, bulan September (260,5 mm) adalah bulan dengan curah hujan terbesar, sedangkan curah hujan terendah ditemukan pada bulan November (51,9 mm).



Gambar 1. Pengamatan Unsur Iklim Tahun 2023

Diagram ini menunjukkan empat unsur iklim utama: suhu minimum, suhu rata-rata, suhu maksimum, kelembaban minimum, dan kelembaban maksimum. Setiap unsur diwakili oleh batang dengan warna berbeda untuk setiap bulan. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa suhu minimum cenderung rendah pada awal tahun (16°C) dan meningkat secara bertahap menuju pertengahan tahun (Mei 16,7°C), kemudian menurun lagi menjelang akhir tahun.



misalnya bulan November hingga mencapai $15,2^{\circ}\text{C}$. Suhu maksimum pada bulan Januari adalah sekitar $25,7^{\circ}\text{C}$, meningkat hingga sekitar $26,3^{\circ}\text{C}$ pada bulan Mei, dan kembali menurun menjadi sekitar $24,4^{\circ}\text{C}$ pada bulan September kemudian di meningkat lagi di bulan Desember menjadi $27,2^{\circ}\text{C}$. Suhu rata-rata menunjukkan tren yang mirip dengan suhu minimum dan maksimum, memberikan gambaran umum tentang kondisi iklim sepanjang tahun.

Di Kabupaten Jayawijaya, pola kelembaban udara menunjukkan variasi yang menarik sepanjang tahun 2023. Pada awal tahun, kelembaban minimum cenderung lebih tinggi, mencapai sekitar 47%. Hal ini menunjukkan bahwa, bahkan pada tingkat kelembaban terendahnya, udara tetap mempertahankan tingkat kelembaban yang signifikan, menciptakan lingkungan yang lebih lembab. Kelembaban yang tinggi pada awal tahun ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi geografis, pola cuaca, dan curah hujan yang terjadi di wilayah ini.

Sebaliknya, kelembaban maksimum di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan pola yang berbeda. Tingkat kelembaban tertinggi terjadi pada akhir tahun yang mencapai 100%, mencerminkan adanya perubahan dinamika atmosferik dan kemungkinan peningkatan curah hujan yang terjadi pada periode tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa udara menjadi sangat lembab menjelang akhir tahun, yang mungkin dipengaruhi oleh musim hujan dan faktor iklim lainnya yang spesifik di daerah pegunungan Papua.

Perbedaan antara kelembaban minimum yang tinggi pada awal tahun dan kelembaban maksimum yang terjadi di akhir tahun ini menunjukkan adanya variasi musiman yang jelas di Kabupaten Jayawijaya. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat, termasuk pertanian, kesehatan, dan kenyamanan umum. Misalnya, kelembaban yang tinggi dapat menguntungkan untuk pertumbuhan tanaman tertentu, tetapi juga dapat meningkatkan risiko penyakit yang terkait dengan kelembaban seperti jamur dan infeksi pernapasan.

BAB II

PEMERINTAHAN

JAYAWIJAYA 2023-2024



BAB II

PEMERINTAHAN

2.1. DPRD Kabupaten Jayawijaya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya adalah lembaga legislatif yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat di tingkat kabupaten. DPRD Jayawijaya memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, serta penganggaran keuangan daerah. DPRD Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 30 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun. Anggota DPRD saat ini menjabat untuk periode 2019-2024 dan berasal dari 13 partai politik. Partai Demokrat memiliki jumlah kursi terbanyak dengan 6 kursi. DPRD Jayawijaya memiliki beberapa fungsi utama: Legislasi: Membuat dan menetapkan peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Anggaran: Menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah.

Pimpinan DPRD terdiri dari satu ketua dan dua wakil ketua yang berasal dari partai politik dengan suara terbanyak di dewan. Berikut adalah pimpinan DPRD Jayawijaya saat ini:

- **Ketua** : Matias Tabuni (Partai Demokrat)
- **Wakil Ketua I** : Niko Kossy, S.H. (Partai NasDem)
- **Wakil Ketua II** : Reynold Bukorsyom, S.H., M.Si.
(Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia).



2.1.1. Daftar Anggota DPRD

Tabel 1. Daftar Anggota DPRD Periode 2019-2024

DAFTAR ANGGOTA DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA PERIODE 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	MATIAS TABUNI	KETUA
2	NIKO KOSSY, SH	WAKIL KETUA I
3	REYNOLD BUKORSYOM, SH, M.Si	WAKIL KETUA II
4	HERSEN WETAPO, SH	ANGGOTA
5	HANA LENA MABEL, SH.MH	ANGGOTA
6	TIMOTIUS KOSSAY	ANGGOTA
7	ELLY TOGODLY, S.IP	ANGGOTA
8	YUSTINUS ASSO, S.Sos	ANGGOTA
9	FESTUS MANASYE ASSO, ST	ANGGOTA
10	YONATAN TABUNI, ST	ANGGOTA
11	IWAN ASSO, S.IP	ANGGOTA
12	CHRISTIAN. K. PADANG, SE	ANGGOTA
13	ALEXANDRIA MORIN, SE	ANGGOTA
14	PENAS KOGOYA	ANGGOTA
15	MARZEMIRA WENDA, SE	ANGGOTA
16	ISAK ITLAY	ANGGOTA
17	LAZARUS WENDA	ANGGOTA
18	YATINUS YIKWA	ANGGOTA
19	LUKI WUKA, S.Pi	ANGGOTA
20	RONAL ASSO, SH	ANGGOTA
21	PILIUS TABUNI, S.Sos	ANGGOTA
22	Drs. ELIGIUS LAGOWAN	ANGGOTA
23	YONATHAN MULAIT, A.Md,Sos	ANGGOTA
24	MERLINA ELOPERE	ANGGOTA
25	NATALIS KENELAK	ANGGOTA
26	YUNUS MARIAN	ANGGOTA
27	SENIUS. P. HILAPOK	ANGGOTA
28	NOVEL YENIAPUT WETAPO, SE	ANGGOTA
29	EUS TABUNI, S.Sos	ANGGOTA
30	HENGKI MEAGE	ANGGOTA



2.1.2. Susunan dan Komposisi Komisi A DPRD

Tabel 2. Susunan dan Komposisi Komisi A

**SUSUNAN DAN KOMPOSISI KOMISI A
DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA	ASAL FRAKSI	JABATAN
1	ELLY TOGODLY,S,IP	NASDEM	KETUA
2	SENIUS HILAPOK	AGAMUA	WAKET
3	HANA LENA MABEL,SH.MH	DEMOKRAT	SEKRETARIS
4	PILIUS TABUNI,S,Sos	PILAMO	ANGGOTA
5	FESTUS MANASYE ASSO,ST	DEMOKRAT	ANGGOTA
6	LAZARUS WENDA	PDI- PERJUANGAN	ANGGOTA
7	ALEXANDRIA MORIN	PKP-INDONESIA	ANGGOTA
8	YUNUS MARIAN	AGAMUA	ANGGOTA
9	LUKI WUKA	PERINDO	ANGGOTA

Komisi A DPRD Kabupaten Jayawijaya terdiri dari sembilan anggota yang berasal dari berbagai partai politik. Ketua Komisi A adalah Elly Togodly dari Partai NasDem. Wakil Ketua adalah Senius Hilapok dari Partai Agamua, dan Sekretaris adalah Hana Lena Mabel dari Partai Demokrat. Anggota lainnya berasal dari berbagai partai seperti Partai Pilamo, Partai Demokrat, PDI-Perjuangan, PKP-Indonesia, dan Perindo. Setiap anggota memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran di bidang pemerintahan, hukum, dan keamanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, tugas pokok Komisi A meliputi:

- **Pemerintahan:** Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk urusan administrasi pemerintahan, otonomi daerah, dan hubungan antar lembaga.



- **Hukum:** Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memberikan masukan terkait pembentukan peraturan daerah baru.
- **Keamanan:** Mengawasi dan mengevaluasi kebijakan serta program yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Jayawijaya

2.1.3. Susunan dan Komposisi Komisi B DPRD

Tabel 3. Susunan dan Komisi B

**SUSUNAN DAN KOMPOSISI KOMISI B
DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA	ASAL FRAKSI	JABATAN
1	IWAN ASSO,S,IP	PKP-INDONESIA	KETUA
2	CHRISTIAN K. PADANG,SE	DEMOKRAT	WAKET
3	Drs.ELIGIUS LAGOWAN	PILAMO	SEKRETARIS
4	YONATAN MULATI,A.Md, Sos	PILAMO	ANGGOTA
5	HERSEN WETAPO,SH	DEMOKRAT	ANGGOTA
6	YONATAN TABUNI	NASDEM	ANGGOTA
7	MARZEMIRA WENDA, SE	PDI- PERJUANGAN	ANGGOTA
8	NATALIS KENELAK	AGAMUA	ANGGOTA
9	RONAL ASSO	PERINDO	ANGGOTA

Tabel di atas menunjukkan susunan dan komposisi Komisi B DPRD Kabupaten Jayawijaya, yang terdiri dari sembilan anggota dengan berbagai afiliasi partai politik. Ketua komisi adalah Iwan Asso dari PKP-Indonesia, dengan Christian K. Padang dari Demokrat sebagai Wakil Ketua, dan Drs. Eligius Lagowan dari Pilamo sebagai Sekretaris. Anggota lainnya berasal dari partai Pilamo, Demokrat, Nasdem, PDI-Perjuangan, Agamua, dan Perindo.

Komisi B DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,



Kabupaten, dan Kota. Berdasarkan peraturan ini, tugas pokok Komisi B meliputi bidang perekonomian dan keuangan, yang mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, peraturan daerah, serta kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan keuangan. Komisi ini juga berfungsi untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di sektor ekonomi dan keuangan.

2.1.4. Susunan dan Komposisi Komisi C DPRD

Susunan dan komposisi Komisi C DPRD Kabupaten Jayawijaya, yang terdiri dari sembilan anggota dengan berbagai afiliasi partai politik. Ketua komisi adalah Eustabuni dari Agamua, dengan Isak Itlay dari PDI-Perjuangan sebagai Wakil Ketua, dan Merlina Elopere dari Pilamo sebagai Sekretaris. Anggota lainnya berasal dari partai Pilamo, Nasdem, PKP-Indonesia, Demokrat, dan Perindo.

Komisi C DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berdasarkan peraturan ini, tugas pokok Komisi C meliputi bidang pembangunan dan infrastruktur, yang mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan, peraturan daerah, serta kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan dan infrastruktur. Komisi ini juga berfungsi untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di sektor pembangunan dan infrastruktur.

**Tabel 4. Susunan dan Komposisi Komisi C****SUSUNAN DAN KOMPOSISI KOMISI C
DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA	ASAL FRAKSI	JABATAN
1	EUSTABUNI	AGAMUA	KETUA
2	ISAK ITLAY	PDI-PERJUANGAN	WAKET
3	MERLINA ELOPERE	PILAMO	SEKRETARIS
4	HENGKI MEAGE	PILAMO	ANGGOTA
5	YUSTINUS ASSO, S.Sos	NASDEM	ANGGOTA
6	PENAS KOGOYA	PKP-INDONESIA	ANGGOTA
7	TIMOTIUS KOSSAY	DEMOKRAT	ANGGOTA
8	NOVEL YENIAPUT	AGAMUA	ANGGOTA
9	YATINUS YIKWA	PERINDO	ANGGOTA

2.1.5. Susunan dan Komposisi Badan Musyawarah DPRD**Tabel 5. Susunan dan Komposisi Badan Musyawarah****SUSUNAN DAN KOMPOSISI BADAN MUSYAWARAH
DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA	ASAL FRAKSI	JABATAN
1	MATIAS TABUNI	DEMOKRAT	KETUA DPRD/ANGGOTA
2	NIKO KOSSY, SH	NASDEM	WAKET I DPRD/ANGGOTA
3	REYNOLD BUKORSYOM,SH,M.Si	PKP- INDONESIA	WAKET II/ANGGOTA
4	HENGKI MEAGE	PILAMO	ANGGOTA
5	YONATAN TABUNI	PILAMO	ANGGOTA
6	LAZARUS WENDA	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
7	ELLY TOGODLY	NASDEM	ANGGOTA
8	PENAS KOGOYA	PKP- INDONESIA	ANGGOTA
9	HANA LENA MABEL, SH.MH	DEMOKRAT	ANGGOTA
10	TIMOTIUS KOSSAY	DEMOKRAT	ANGGOTA
11	FESTUS MANASYE ASSO, ST	DEMOKRAT	ANGGOTA



12	NOVEL YENIAPUT	AGAMUA	ANGGOTA
13	NATALIS KENELAK	AGAMUA	ANGGOTA
14	YUNUS MARIAN	AGAMUA	ANGGOTA
15	YATIUNUS YIKWA	PERINDO	ANGGOTA

Tabel di atas menunjukkan susunan dan komposisi Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Jayawijaya, yang terdiri dari 15 anggota dengan berbagai afiliasi partai politik. Ketua DPRD adalah Matias Tabuni dari Demokrat, dengan Niko Kossy dari Nasdem sebagai Wakil Ketua I, dan Reynold Bukorsyom dari PKP-Indonesia sebagai Wakil Ketua II. Anggota lainnya berasal dari partai Pilamo, PDI Perjuangan, Nasdem, Agamua, dan Perindo.

Badan Musyawarah DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berdasarkan peraturan ini, tugas pokok Badan Musyawarah meliputi perencanaan dan pengorganisasian kegiatan DPRD, termasuk penyusunan agenda rapat, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan DPRD, serta koordinasi antar komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya. Badan ini juga berfungsi untuk memberikan masukan dan saran kepada pimpinan DPRD dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektivitas kerja DPRD.



2.1.6. Susunan dan Komposisi Badan Anggaran DPRD

Tabel 6. Susunan dan Komposisi Badan Anggaran

SUSUNAN DAN KOMPOSISI BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA			
NO	NAMA	ASAL FRAKSI	JABATAN
1	MATIAS TABUNI	DEMOKRAT	KETUA DPRD/ANGGOTA
2	NIKO KOSSY, SH	NASDEM	WAKET I DPRD/ANGGOTA
3	REYNOLD BUKORSYOM,SH,M.Si	PKP-INDONESIA	WAKET II/ANGGOTA
4	Drs.ELIGIUS LAGOWAN	PILAMO	ANGGOTA
5	MERLINA ELOPERE	PILAMO	ANGGOTA
6	ALEXANDRIA MORIN	PKP-INDONESIA	ANGGOA
7	MARZEMIRA WENDA, SE	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
8	YONATAN TABUNI	NASDEM	ANGGOTA
9	CHRISTIAN K.PADANG	DEMOKRAT	ANGGOTA
10	FESTUS MANASYE ASSO,ST	DEMOKRAT	ANGGOTA
11	HERSEN WETAPO,SH	DEMOKRAT	ANGGOTA
12	EUS TABUNI	AGAMUA	ANGGOTA
13	NOVEL YENIAPUT	AGAMUA	ANGGOTA
14	YUNUS MARIAN	AGAMUA	ANGGOTA
15	RONAL ASSO,SH	PERINDO	ANGGOTA

Tabel di atas menunjukkan susunan dan komposisi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayawijaya, yang terdiri dari 15 anggota dengan berbagai afiliasi partai politik. Ketua DPRD adalah Matias Tabuni dari Demokrat, dengan Niko Kossy dari Nasdem sebagai Wakil Ketua I, dan Reynold Bukorsyom dari PKP-Indonesia sebagai Wakil Ketua II. Anggota lainnya berasal dari partai Pilamo, PDI Perjuangan, Nasdem, Agamua, dan Perindo.

Badan Anggaran DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berdasarkan peraturan ini, tugas pokok Badan Anggaran meliputi penyusunan dan pengawasan anggaran daerah, termasuk pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Badan ini juga berfungsi untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2.1.7. Susunan dan Komposisi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD

Tabel 7. Susunan dan Komposisi Badan Pembentukan Peraturan Daerah

**SUSUNAN DAN KOMPOSISI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH
DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA	ASAL FRAKSI	JABATAN
1	HANA LENA MABEL,SH.MH	DEMOKRAT	KETUA
2	SENIUS HILAPOK	AGAMUA	WAKIL KETUA
3	PILIUS TABUNI,S.Sos	PILAMO	ANGGOTA
4	CHRISTIAN K.PADANG,SE	DEMOKRAT	ANGGOTA
5	LAZARUS WENDA	PDI-PERJUANGAN	ANGGOTA
6	YUSTINUS ASSO,S.Sos	NASDEM	ANGGOTA
7	IWAN ASSO,S.IP	PKP-INDONESIA	ANGGOTA
8	EUS TABUNI	AGAMUA	ANGGOTA
9	LUKI WUKA	PERINDO	ANGGOTA

Tabel di atas menunjukkan susunan dan komposisi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Jayawijaya, yang terdiri dari sembilan anggota dengan berbagai afiliasi partai politik. Ketua badan ini adalah Hana Lena Mabel dari Demokrat, dengan Senius Hilapok dari Agamua sebagai Wakil Ketua. Anggota lainnya berasal dari partai Pilamo, Nasdem, PDI-Perjuangan, PKP-Indonesia, Agamua, dan Perindo.



Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berdasarkan peraturan ini, tugas pokok Badan Pembentukan Peraturan Daerah meliputi penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan dan pengkajian peraturan daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Badan ini juga berfungsi untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan daerah yang dibuat.

2.1.8. Susunan dan Komposisi Badan Kehormatan DPRD

Tabel 8. Susunan dan Komposisi Badan Kehormatan

NO	NAMA	ASAL FRAKSI	JABATAN
1	HERSEN WETAPO,SH	DEMOKRAT	KETUA
2	NATALIS KENELAK	AGAMUA	WAKIL
3	Drs. ELIGIUS LAGOWAN	PILAMO	ANGGOTA

Tabel di atas menunjukkan susunan dan komposisi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Jayawijaya, yang terdiri dari tiga anggota dengan berbagai afiliasi partai politik. Ketua badan ini adalah Hersen Wetaipo dari Demokrat, dengan Natalis Kenelak dari Agamua sebagai Wakil Ketua, dan Drs. Eligius Lagowan dari Pilamo sebagai anggota.

Badan Kehormatan DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berdasarkan peraturan ini, tugas pokok Badan Kehormatan meliputi menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku anggota DPRD. Badan ini juga berfungsi untuk menegakkan kode etik dan memberikan sanksi kepada anggota DPRD yang melanggar peraturan atau kode etik yang berlaku.



2.2. Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya

2.2.1. Nilai IKM OPD Jayawijaya Tahun 2022-2023

Tabel 9. Nilai IKM OPD Kabupaten Jayawijaya

No.	Organisasi Perangkat Daerah	IKM Unit Pelayanan 2022	IKM Unit Pelayanan 2023	Mutu	Ket
1	Sekretariat Daerah	77,46	82,08	Baik	(+)
2	Sekretariat DPRD	78	80,85	Baik	(+)
3	Inspektorat	83,159	83,16	Baik	(+)
4	Dinas Pendidikan	78,62	79,78	Baik	(+)
5	Dinas Kesehatan	76,67	77,12	Baik	(+)
6	Dinas PUPR	83,62	74,73	Kurang Baik	(-)
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	81,74	81,74	Baik	(±)
8	SATPOL PP	73,46	76,18	Baik	(+)
9	Dinas Sosial	84,68	83,45	Baik	(-)
10	Dinas Nakerindag	84,27	84,27	Baik	(±)
11	Dinas Ketahanan Pangan	85,25	92,33	Sangat Baik	(+)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	71,25	81,42	Baik	(+)
13	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung	78,72	78,07	Baik	(-)
14	Dinas Perhubungan	79,2	78,98	Baik	(-)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	81,4	87,6	Baik	(+)



16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82,84	95,889	Sangat Baik	(+)
17	Dinas Olahraga dan Pemuda	78,2	78,2	Baik	(±)
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	80,15	80,15	Baik	(±)
19	Dinas perpustakaan	83,29	85,54	Baik	(+)
20	Dinas pertanian	81,83	87,204	Baik	(+)
21	Dinas perikanan	84,175	89,725	Sangat Baik	(+)
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	76,89	77,56	Baik	(+)
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	78,21	81,38	Baik	(+)
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81,1	79,59	Baik	(-)
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	69,67	78,55	Baik	(+)
26	Rumah Sakit Umum Daerah	81,423	81,39	Baik	(-)
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana	82,33	75,48	Baik	(-)
28	Dinas lingkungan Hidup	81,92	86,64	Baik	(+)
29	BKDPSDM	-	88,3	Baik	(+)
30	Distrik	-	-	-	-
	NILAI IKM	77,05	82,302	Baik	(+)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan variasi kinerja yang signifikan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai IKM ini merupakan indikator penting yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang



diberikan oleh masing-masing OPD. Berikut adalah uraian kinerja masing-masing OPD secara lebih formal dan komprehensif:

Pada awal tahun 2022, Sekretariat Daerah mencatat nilai IKM sebesar 77,46, yang meningkat menjadi 82,08 pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan kualitas pelayanan yang konsisten, mencapai kategori "Baik". Demikian pula, Sekretariat DPRD menunjukkan peningkatan nilai IKM dari 78,00 pada tahun 2022 menjadi 80,85 pada tahun 2023, juga dalam kategori "Baik".

Inspektorat mempertahankan performa yang stabil dengan nilai IKM sekitar 83,16 pada kedua tahun, menandakan kualitas pelayanan yang tetap baik. Dinas Pendidikan juga mengalami peningkatan nilai IKM dari 78,62 menjadi 79,78, mengindikasikan perbaikan meskipun berada dalam rentang yang sama. Namun, tidak semua OPD mengalami peningkatan. Dinas PUPR, misalnya, menunjukkan penurunan nilai IKM dari 83,62 pada tahun 2022 menjadi 74,73 pada tahun 2023, mengindikasikan penurunan kualitas pelayanan ke kategori "Kurang Baik". Ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan yang mendalam dalam pelayanan di sektor ini.

Sebaliknya, beberapa OPD berhasil meningkatkan kualitas pelayanan mereka secara signifikan. Dinas Ketahanan Pangan meningkat dari 85,25 pada tahun 2022 menjadi 92,33 pada tahun 2023, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu naik dari 82,84 menjadi 95,889, keduanya mencapai kategori "Sangat Baik". Ini merupakan pencapaian yang mencerminkan komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. OPD lainnya juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika yang nilai IKM-nya naik dari 81,40 pada tahun 2022 menjadi 87,60 pada tahun 2023, serta Dinas Pertanian yang meningkat dari 81,83 menjadi 87,204. Peningkatan ini menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki layanan demi kepuasan masyarakat.

Secara keseluruhan, rata-rata nilai IKM untuk seluruh unit pelayanan di Kabupaten Jayawijaya meningkat dari 77,05 pada tahun 2022 menjadi 82,302 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan



kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Bagi beberapa OPD yang nilai IKM-nya mengalami penurunan atau stagnasi, ini menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi mendalam dan merumuskan strategi perbaikan yang efektif. Sementara itu, bagi OPD yang berhasil meningkatkan nilai IKM, hasil ini menjadi dorongan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang sudah baik.

2.2.2. Mutu Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya



Gambar 2. Mutu Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya

Diagram di atas mengkategorikan mutu perangkat daerah ke dalam lima kategori dengan persentase masing-masing. Kategori terbesar adalah “Baik” dengan nilai 83%, diikuti oleh “Sangat Baik” dengan nilai 10%. Kategori “Tidak Baik” dan “Kurang Baik” masing-



masing memiliki nilai 3%, dan kategori terkecil adalah “Sangat Tidak Baik” dengan nilai 1%.

Nilai mutu perangkat daerah sangat penting karena mencerminkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Mutu yang baik menunjukkan bahwa perangkat daerah mampu memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Faktor-faktor Pendukung:

1. **Manajemen yang Efektif:** Kepemimpinan yang baik dan manajemen yang efektif dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah.
2. **Sumber Daya yang Memadai:** Ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan material yang memadai sangat penting untuk mendukung operasional perangkat daerah.
3. **Pelatihan dan Pengembangan:** Pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka dalam memberikan pelayanan.
4. **Infrastruktur yang Baik:** Fasilitas dan infrastruktur yang memadai mendukung kelancaran operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor-faktor Penghambat:

1. **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dapat menghambat kinerja perangkat daerah.
2. **Birokrasi yang Rumit:** Prosedur birokrasi yang kompleks dan tidak efisien dapat memperlambat proses pelayanan.
3. **Kurangnya Pelatihan:** Kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi pegawai dapat mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.
4. **Infrastruktur yang Tidak Memadai:** Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur dapat menghambat operasional perangkat daerah dan kualitas pelayanan.



Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan, pada gilirannya, meningkatkan nilai mutu perangkat daerah mereka. Hal ini akan berdampak positif pada kepuasan masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

2.3. Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Jayawijaya adalah lembaga pemerintahan yang bertugas memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah. Tugas pokoknya meliputi pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap berbagai OPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Distrik-distrik di Kabupaten Jayawijaya. Fungsi utamanya adalah memastikan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah.

Peran Inspektorat dalam pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Jayawijaya sangat penting. Visi pemerintah adalah terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang sejahtera, mandiri secara ekonomi, berkualitas, dan berbudaya. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang didefinisikan adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Inspektorat berperan dalam memastikan bahwa setiap OPD mematuhi standar akuntabilitas dan pelaporan kinerja yang baik, sehingga semua program dan kegiatan pemerintah dapat dijalankan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pengawasan dan pembinaan yang ketat dari Inspektorat, diharapkan setiap OPD dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini juga berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memperkuat rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Inspektorat juga berperan dalam mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program pemerintah, serta memberikan rekomendasi untuk pemecahan masalah yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.



Secara keseluruhan, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya berperan sebagai penjamin bahwa pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penunjang dalam pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Peran Inspektorat ini membantu memastikan bahwa setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang optimal. Selain itu, Inspektorat berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran publik dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga setiap dana yang dihabiskan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Melalui pengawasan dan evaluasi yang ketat, Inspektorat juga berupaya untuk mencegah dan menindaklanjuti penyimpangan atau pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program pemerintah.

Adapun data sektoral yang disajikan sebagai berikut:

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 2) Presentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan;
- 3) Jumlah Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
- 4) Pemeriksaan Berkala/Reguler;
- 5) Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah;
- 6) Jumlah Sakip Instansi yang Dievaluasi;
- 7) Jumlah Obrik yang Tidak Ada Temuan;
- 8) Jumlah OPD berdasarkan Peringkat;
- 9) Indikator Obrik Lainnya.



2.3.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tabel 10. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	
2022	B
2023	B

Tabel tersebut menunjukkan tabel dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang mencakup dua tahun, yaitu tahun 2022 dan 2023, dengan masing-masing tahun mendapatkan nilai 'B'. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam dua tahun berturut-turut dinilai cukup baik, namun tidak mencapai tingkat yang lebih tinggi seperti 'A'.

Analisis angka menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam penilaian kinerja antara tahun 2022 dan 2023, yang berarti bahwa pemerintah berhasil mempertahankan standar kinerja yang sama. Namun, ini juga bisa diartikan bahwa tidak ada peningkatan signifikan dalam kinerja yang dapat mendorong peningkatan nilai. Secara komprehensif, stabilitas nilai 'B' ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, mungkin ada upaya yang konsisten dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan implementasi kebijakan yang efektif. Kedua, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, seperti keterbatasan sumber daya atau hambatan birokrasi, mungkin telah menghambat peningkatan lebih lanjut. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan sosial juga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah.

Untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja di masa depan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu fokus pada inovasi dalam pelayanan publik, peningkatan efisiensi birokrasi, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Evaluasi berkala dan umpan balik dari masyarakat juga penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.



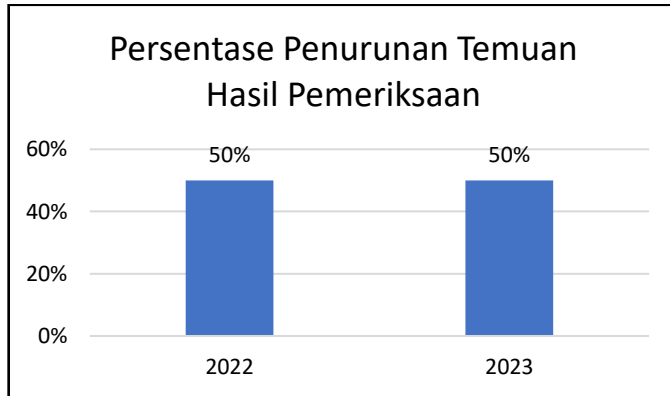
2.3.2. Presentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan

Gambar di bawah ini menunjukkan grafik batang dengan judul “Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan” yang membandingkan penurunan persentase temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2022 dan 2023. Kedua tahun tersebut menunjukkan penurunan persentase yang identik, yaitu sebesar 50%. Grafik ini menarik karena secara visual menggambarkan penurunan signifikan dalam temuan hasil pemeriksaan selama dua tahun berturut-turut, yang menunjukkan adanya peningkatan atau konsistensi dalam proses yang diaudit oleh inspektorat pemerintah.

Analisis angka menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam persentase penurunan temuan antara tahun 2022 dan 2023, yang berarti bahwa pemerintah berhasil mempertahankan standar yang sama dalam mengurangi temuan hasil pemeriksaan. Penurunan sebesar 50% ini menunjukkan bahwa setengah dari temuan yang ada pada tahun sebelumnya berhasil diatasi atau diperbaiki.

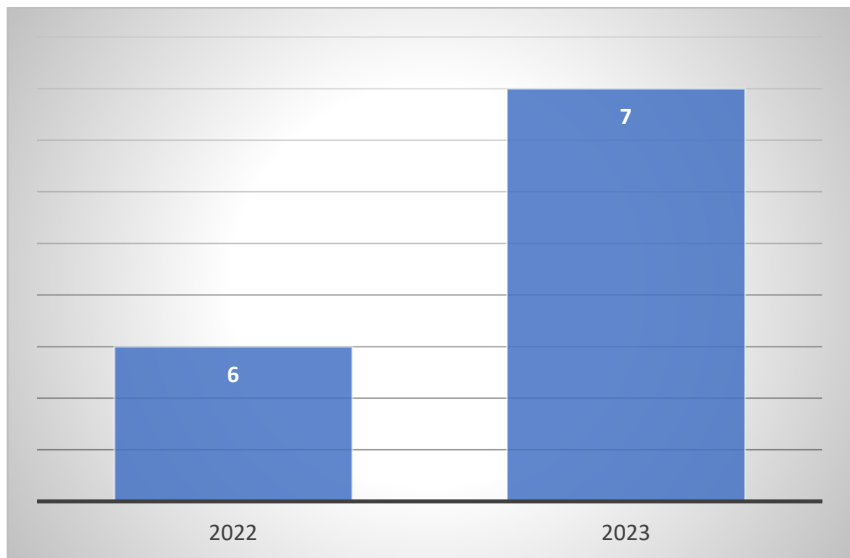
Secara komprehensif, konsistensi penurunan temuan hasil pemeriksaan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, mungkin ada upaya yang konsisten dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan audit internal, serta implementasi kebijakan yang lebih efektif dalam menangani temuan. Kedua, adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, faktor eksternal seperti dukungan dari pemerintah pusat dan kerjasama dengan lembaga lain juga dapat berkontribusi pada penurunan temuan ini.

Untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan penurunan temuan hasil pemeriksaan di masa depan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu terus fokus pada peningkatan kualitas pengawasan, pelatihan bagi pegawai, dan penerapan teknologi dalam proses audit. Evaluasi berkala dan umpan balik dari masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.



Gambar 3. Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan

2.3.3. Jumlah Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan



Gambar 4. Jumlah Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Gambar tersebut menunjukkan grafik batang dengan judul “Jumlah Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan,” yang



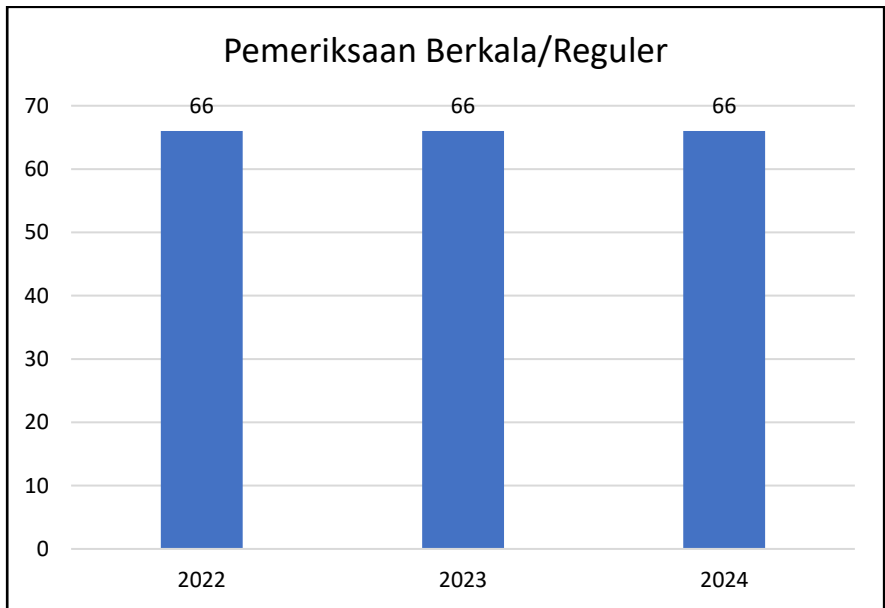
membandingkan data dari dua tahun, yaitu 2022 dan 2023, untuk Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Grafik ini menampilkan dua batang yang mewakili jumlah temuan atau rekomendasi. Batang pertama untuk tahun 2022 mencapai angka 6, sementara batang kedua untuk tahun 2023 mencapai angka 7. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam jumlah temuan atau rekomendasi antara dua tahun tersebut.

Analisis angka menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam jumlah temuan atau rekomendasi dari 6 pada tahun 2022 menjadi 7 pada tahun 2023. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan aktivitas inspeksi, metode deteksi yang lebih baik, standar yang lebih ketat yang mengarah pada lebih banyak temuan yang dilaporkan, atau perubahan operasional lainnya dalam periode ini.

Secara komprehensif, peningkatan signifikan yang digambarkan oleh grafik ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan dalam aktivitas inspeksi atau efektivitas inspektorat dalam mendeteksi dan melaporkan temuan. Hal ini juga bisa menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam standar atau kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan, yang mengarah pada lebih banyak temuan yang diidentifikasi. Selain itu, peningkatan ini mungkin juga mencerminkan adanya upaya yang lebih besar dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan jumlah temuan yang relevan di masa depan, inspektorat perlu terus fokus pada peningkatan kualitas pengawasan, pelatihan bagi pegawai, dan penerapan teknologi dalam proses audit. Evaluasi berkala dan umpan balik dari masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.



2.3.4. Pemeriksaan Berkala/Reguler



Gambar 5. Pemeriksaan Berkala/Reguler

Gambar tersebut menunjukkan grafik batang dengan judul “Pemeriksaan Berkala/Reguler,” yang menggambarkan jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya selama tiga tahun berturut-turut: 2022, 2023, dan 2024. Setiap tahun diwakili oleh satu batang vertikal yang menunjukkan jumlah pemeriksaan yang dilakukan. Menariknya, ketiga batang tersebut memiliki tinggi yang sama, yaitu 66 pemeriksaan per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat tetap konsisten selama periode tiga tahun tersebut.

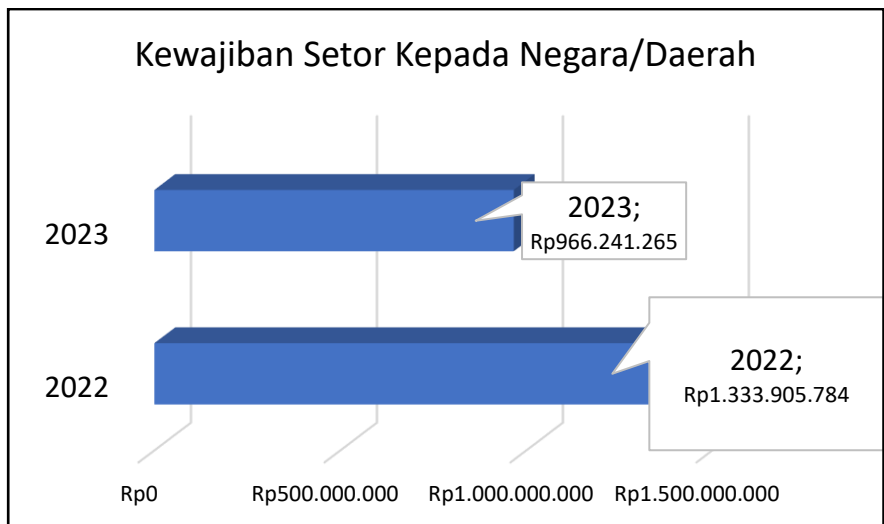
Analisis angka menunjukkan bahwa jumlah pemeriksaan tetap stabil di angka 66 setiap tahun. Konsistensi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perencanaan yang efektif, alokasi anggaran yang stabil, dan kebijakan yang tidak berubah. Stabilitas dalam jumlah pemeriksaan ini juga bisa menunjukkan bahwa inspektorat memiliki kapasitas yang cukup untuk mempertahankan tingkat pemeriksaan yang



sama setiap tahun, tanpa adanya peningkatan atau penurunan yang signifikan.

Secara komprehensif, grafik ini memberikan gambaran tentang stabilitas dalam aktivitas pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Konsistensi dalam jumlah pemeriksaan dapat diartikan sebagai upaya yang berkelanjutan untuk menjaga standar pemerintahan yang baik dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Namun, untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan di masa depan, inspektorat mungkin perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi dalam proses pemeriksaan, dan evaluasi berkala terhadap metode pemeriksaan yang digunakan. Dengan demikian, inspektorat dapat terus meningkatkan kualitas pemeriksaan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Jayawijaya.

2.3.5. Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah



Gambar 6. Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah



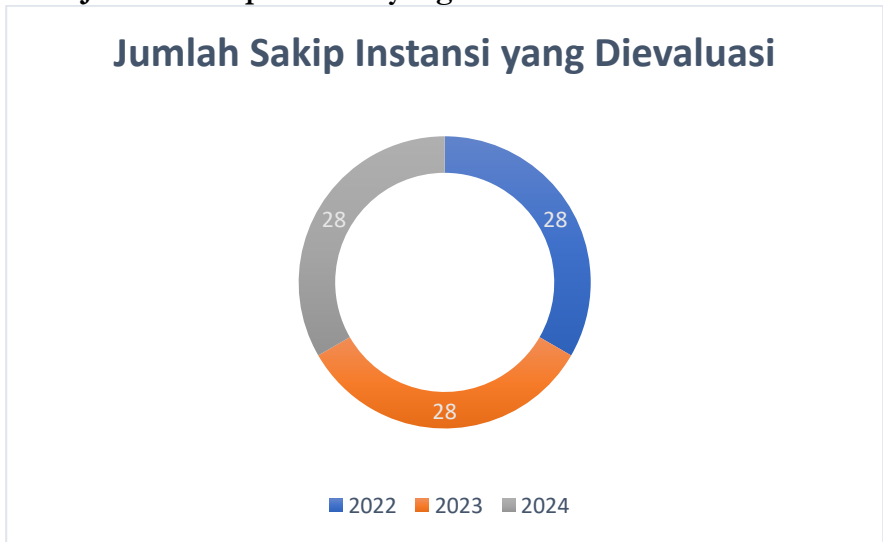
Gambar tersebut menunjukkan grafik batang horizontal dengan judul “Kewajiban Sektor Kepada Negara/Daerah,” yang menggambarkan kewajiban finansial sektor tertentu kepada negara atau daerah selama dua tahun berturut-turut: 2022 dan 2023. Setiap tahun diwakili oleh satu batang horizontal berwarna biru yang menunjukkan jumlah kewajiban dalam Rupiah (Rp). Pada tahun 2022, batang tersebut memanjang melewati tanda Rp1.000.000.000 dan diberi label dengan angka pasti: Rp1.333.905.784. Sementara itu, pada tahun 2023, batangnya lebih pendek dan tidak mencapai tanda Rp1.000.000.000, dengan nilai pasti Rp966.241.265 yang tertulis di sebelahnya.

Grafik ini menarik karena memberikan representasi visual tentang perubahan kewajiban sektor tertentu kepada negara atau daerah dalam dua tahun tersebut, menunjukkan penurunan kewajiban dari tahun 2022 ke 2023. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, penurunan aktivitas ekonomi, atau efisiensi dalam pengelolaan sektor tersebut.

Angka-angka ini signifikan karena memungkinkan perbandingan antara dua tahun fiskal dan dapat digunakan untuk menyimpulkan tren atau membuat keputusan berdasarkan kewajiban finansial sektor terhadap entitas pemerintah di Indonesia. Secara komprehensif, grafik ini memberikan gambaran tentang perubahan kewajiban finansial sektor tertentu kepada negara atau daerah. Penurunan kewajiban dari tahun 2022 ke 2023 dapat diartikan sebagai hasil dari berbagai faktor yang mempengaruhi sektor tersebut. Analisis lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami penyebab spesifik dari penurunan ini, termasuk evaluasi kebijakan, kondisi ekonomi, dan efisiensi operasional sektor tersebut. Dengan demikian, grafik ini tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi data tetapi juga sebagai dasar untuk analisis lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan kewajiban finansial sektor kepada negara atau daerah.



2.3.6. Jumlah Sakip Instansi yang Dievaluasi



Gambar 7. Jumlah Sakip Instansi Yang Dievaluasi

Gambar tersebut menunjukkan diagram dengan judul “Jumlah Sakip Instansi yang Dievaluasi,” yang menggambarkan jumlah instansi yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dalam tiga tahun berturut-turut: 2022, 2023, dan 2024. Diagram ini dibagi menjadi tiga segmen berwarna: biru untuk tahun 2022, oranye untuk tahun 2023, dan abu-abu untuk tahun 2024. Setiap segmen memiliki porsi yang sama dari diagram dengan angka ‘28’ yang menunjukkan jumlah atau persentase instansi yang dievaluasi setiap tahun. Distribusi yang merata di ketiga tahun tersebut menunjukkan proses evaluasi yang konsisten dari waktu ke waktu oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya. Konsistensi ini dapat menunjukkan pendekatan yang terstruktur dalam penilaian kinerja di dalam institusi-institusi di wilayah ini. Data ini relevan karena memberikan wawasan tentang praktik akuntabilitas dan penilaian kinerja dalam instansi pemerintah di Kabupaten Jayawijaya selama rentang tiga tahun.

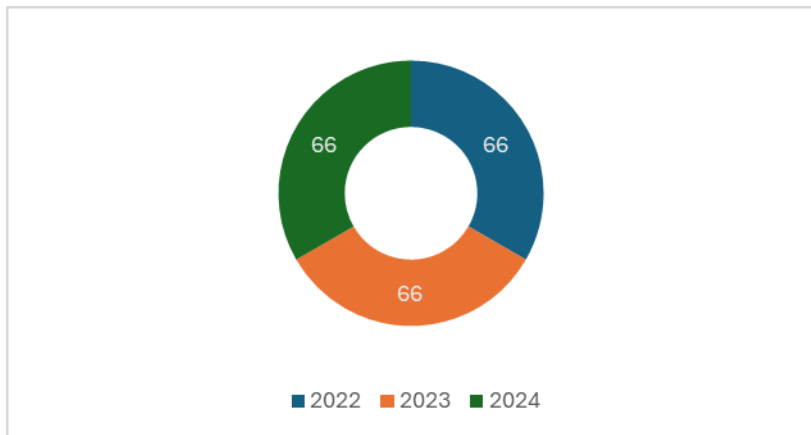
Angka-angka ini signifikan karena memungkinkan perbandingan antara tiga tahun evaluasi dan dapat digunakan untuk



menyimpulkan tren atau membuat keputusan berdasarkan jumlah instansi yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

Secara komprehensif, diagram ini memberikan gambaran tentang konsistensi dalam jumlah instansi yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2022 hingga 2024. Konsistensi ini dapat diartikan sebagai hasil dari berbagai faktor yang mempengaruhi proses evaluasi, termasuk kebijakan yang diterapkan, sumber daya yang tersedia, dan efisiensi operasional Inspektorat. Analisis lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami penyebab spesifik dari konsistensi ini, termasuk evaluasi kebijakan, kondisi ekonomi, dan efisiensi operasional instansi tersebut. Dengan demikian, diagram ini tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi data tetapi juga sebagai dasar untuk analisis lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Jayawijaya.

2.3.7. Jumlah Obrik yang Tidak Ada Temuan



Gambar 8. Jumlah Obrik yang Tidak Ada Temuan

Gambar tersebut menunjukkan diagram dengan judul “Jumlah Obrik yang Tidak Ada Temuan,” yang menggambarkan jumlah obrik (objek pemeriksaan) yang tidak terdapat temuan oleh Inspektorat



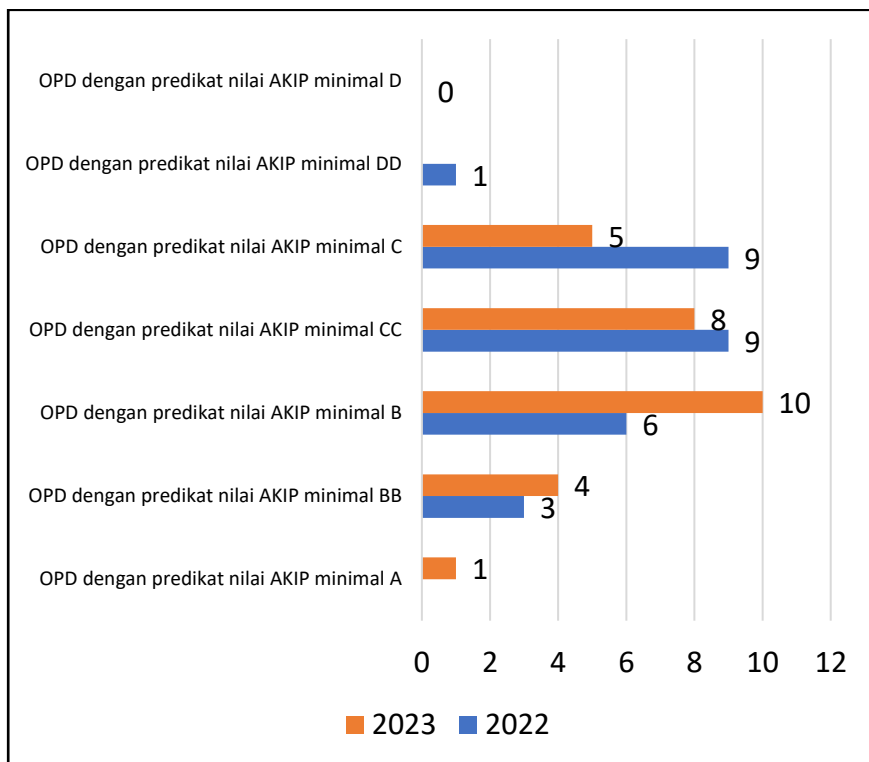
Kabupaten Jayawijaya dalam tiga tahun berturut-turut: 2022, 2023, dan 2024. Diagram ini dibagi menjadi tiga segmen berwarna: biru untuk tahun 2022, oranye untuk tahun 2023, dan abu-abu untuk tahun 2024. Setiap segmen memiliki angka yang menunjukkan jumlah obrik yang tidak terdapat temuan. Untuk tahun 2022 dan 2023, masing-masing terdapat 66 obrik yang tidak terdapat temuan, dan untuk tahun 2024 juga terdapat 66 obrik yang tidak terdapat temuan.

Distribusi yang merata di ketiga tahun menunjukkan proses pemeriksaan yang konsisten oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya. Konsistensi ini dapat menunjukkan pendekatan yang terstruktur dalam pemeriksaan dan penilaian obrik di dalam institusi-institusi di wilayah ini. Data ini relevan karena memberikan wawasan tentang praktik pemeriksaan dan akuntabilitas dalam instansi pemerintah di Kabupaten Jayawijaya selama tiga tahun berturut-turut, menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan atau penurunan signifikan dalam jumlah obrik yang tidak terdapat temuan.

Secara komprehensif, diagram ini memberikan gambaran tentang konsistensi dalam jumlah obrik yang tidak terdapat temuan oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2022 hingga 2024. Konsistensi ini dapat diartikan sebagai hasil dari berbagai faktor yang mempengaruhi proses pemeriksaan, termasuk kebijakan yang diterapkan, sumber daya yang tersedia, dan efisiensi operasional Inspektorat. Dengan demikian, diagram ini tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi data tetapi juga sebagai dasar untuk analisis lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan akuntabilitas pemeriksaan obrik di Kabupaten Jayawijaya.

2.3.8. Jumlah OPD berdasarkan Peringkat

Gambar 9 menunjukkan diagram batang berjudul “Jumlah OPD berdasarkan Peringkat” yang menggambarkan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan peringkat kinerja mereka untuk tahun 2022 dan 2023. Diagram ini menggunakan warna oranye untuk tahun 2023 dan warna biru untuk tahun 2022. Peringkat yang digunakan adalah D, DD, C, CC, B, BB, dan A, dengan masing-masing peringkat diwakili oleh warna yang berbeda.



Gambar 9. Jumlah OPD Berdasarkan Peringkat

Pada tahun 2022, tidak ada OPD yang tercatat pada peringkat D dan terdapat 1 OPD dengan peringkat DD. Peringkat C memiliki sembilan OPD, sementara pada tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi lima OPD. Peringkat CC menunjukkan sembilan OPD pada tahun 2022 dan sedikit menurun menjadi delapan OPD pada tahun 2023. Peringkat B mengalami peningkatan signifikan dari enam OPD pada tahun 2022 menjadi sepuluh OPD pada tahun 2023. Peringkat BB juga menunjukkan peningkatan dari tiga OPD pada tahun 2022 menjadi empat OPD pada tahun 2023. Terakhir, peringkat A tidak memiliki OPD pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 terdapat satu OPD yang mencapai peringkat ini.

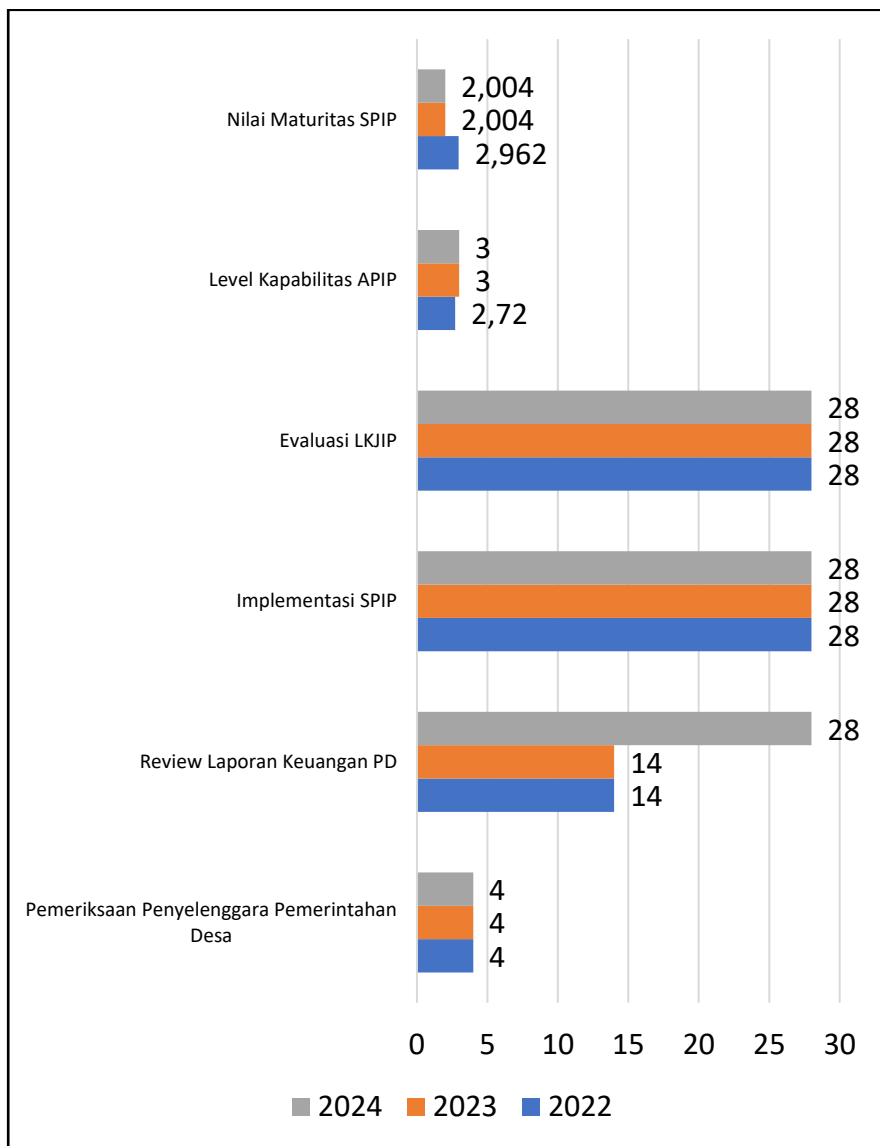


Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kinerja yang signifikan pada beberapa OPD di Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2022 ke 2023. Peningkatan terbesar terlihat pada peringkat B, yang menunjukkan bahwa lebih banyak OPD yang mencapai kinerja baik pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah OPD pada peringkat C dan CC menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang mendorong OPD untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi. Peningkatan jumlah OPD pada peringkat BB dan munculnya OPD pada peringkat A juga menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas yang berhasil. Data ini penting untuk evaluasi kinerja dan perencanaan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jayawijaya.

2.3.9. Indikator Obrik Lainnya

Gambar 10 menunjukkan diagram batang yang menggambarkan data kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan berbagai indikator di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2021, 2022, dan 2023. Diagram ini menggunakan warna biru untuk tahun 2021, oranye untuk tahun 2022, dan abu-abu untuk tahun 2023. Indikator kinerja yang diukur meliputi Nilai Maturitas SPIP, Level Kapabilitas APIP, Evaluasi LKjIP, Implementasi SPIP, Review Laporan Keuangan PD, dan Pemeriksaan Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pada indikator “Nilai Maturitas SPIP,” terlihat peningkatan yang stabil dari 2 pada tahun 2021 menjadi sekitar 2,062 pada tahun 2023. “Level Kapabilitas APIP” menunjukkan peningkatan signifikan dari level sekitar 2 pada tahun 2021 dan 2022 menjadi sedikit di atas level 3 pada tahun 2023. Indikator “Evaluasi LKjIP” menunjukkan konsistensi dengan nilai sekitar 28 pada ketiga tahun tersebut. Demikian pula, “Implementasi SPIP” mempertahankan kinerja yang stabil dengan semua batang mencapai level 28.



Gambar 10. Indikator Obrik Lainnya

Indikator “Review Laporan Keuangan PD” menunjukkan peningkatan signifikan; dimulai dari level nol pada tahun 2021 dan 2022,



kemudian melonjak menjadi sekitar level 14 pada tahun 2023. Terakhir, untuk indikator “Pemeriksaan Penyelenggara Pemerintahan Desa,” terdapat pertumbuhan yang terlihat dari nol pada dua tahun pertama menjadi sekitar empat pada tahun 2023.

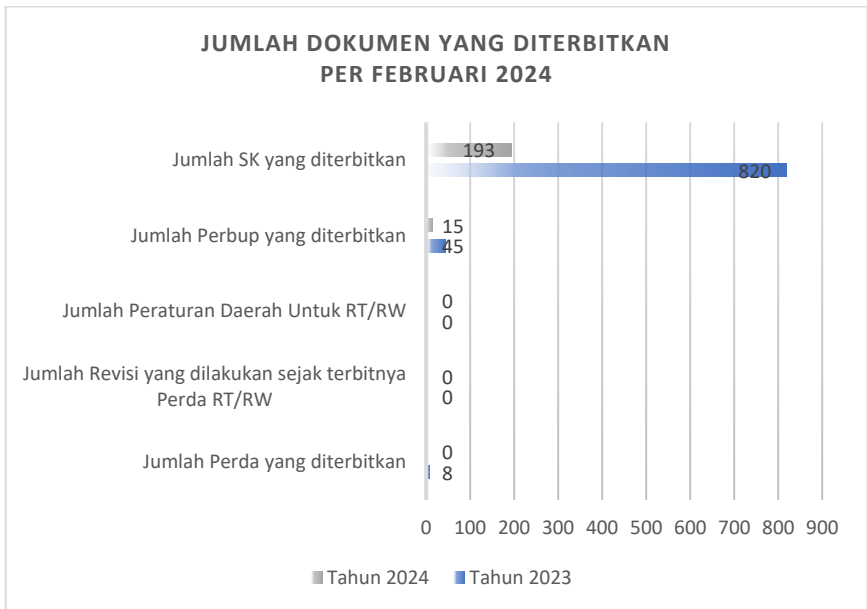
Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kinerja yang signifikan pada beberapa indikator kinerja OPD di Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan terbesar terlihat pada “Level Kapabilitas APIP” dan “Review Laporan Keuangan PD,” yang menunjukkan bahwa lebih banyak OPD yang mencapai tingkat kapabilitas yang lebih tinggi dan peningkatan dalam peninjauan laporan keuangan pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan jumlah OPD pada indikator “Nilai Maturitas SPIP” dan “Implementasi SPIP” menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang mendorong OPD untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi. Data ini penting untuk evaluasi kinerja dan perencanaan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jayawijaya.

2.4. Hukum dan Perundang-Undangan

Biro Hukum dan Perundang-undangan Kabupaten Jayawijaya adalah unit kerja di bawah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang bertanggung jawab dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Biro ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan dukungan hukum kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Biro Hukum dan Perundang-undangan memiliki tugas pokok dan fungsi yang meliputi penyusunan peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup), pemberian bantuan hukum, pengkajian dan evaluasi hukum, penyuluhan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum.



Penyusunan Perda dan Perbup dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Biro ini juga bertanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah dalam hal terjadi sengketa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta menyediakan konsultasi hukum bagi OPD dan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Biro Hukum dan Perundang-undangan juga melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi daerah, serta melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum. Dokumentasi dan informasi hukum dikelola melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang berfungsi sebagai pusat informasi hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat.



Gambar 11. Jumlah Dokumen Yang Diterbitkan Per Februari 2024



Grafik ini membandingkan jumlah dokumen yang diterbitkan pada bulan Februari tahun 2023 dan 2024 dalam lima kategori. Kategori-kategori tersebut adalah: “Jumlah SK Yang Diterbitkan,” “Jumlah Perbup Yang Diterbitkan,” “Jumlah Peraturan Daerah Untuk RT/RW,” “Jumlah Revisi Yang Dilakukan Sejak Terbitnya Perda RT/RW,” dan “Jumlah Tindak Lanjut Yang Diterbitkan.” Setiap kategori memiliki dua batang yang mewakili dua tahun, dengan batang berwarna biru untuk tahun 2024 dan batang berwarna abu-abu untuk tahun 2023.

Grafik ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah dokumen yang diterbitkan di semua kategori dari tahun 2023 ke 2024. Terutama, untuk kategori “Jumlah SK Yang Diterbitkan,” terdapat peningkatan dari sekitar 15 dokumen pada tahun 2023 menjadi sekitar 820 dokumen pada tahun 2024. Kategori lainnya juga menunjukkan peningkatan, meskipun tidak sebesar kategori pertama. Misalnya, “Jumlah Perbup Yang Diterbitkan” meningkat dari 15 dokumen pada tahun 2023 menjadi 45 dokumen pada tahun 2024. Kategori “Jumlah Peraturan Daerah Untuk RT/RW” dan “Jumlah Revisi Yang Dilakukan Sejak Terbitnya Perda RT/RW” tidak menunjukkan perubahan, tetap pada 0 dokumen untuk kedua tahun. Sementara itu, “Jumlah Tindak Lanjut Yang Diterbitkan” meningkat dari 0 dokumen pada tahun 2023 menjadi 8 dokumen pada tahun 2024.

Peningkatan jumlah dokumen yang diterbitkan dapat menunjukkan peningkatan dalam aktivitas administrasi dan implementasi kebijakan. Namun, peningkatan yang signifikan juga perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa kualitas dokumen yang diterbitkan tetap terjaga dan tidak hanya fokus pada kuantitas.

2.5. Protokol dan Pimpinan Kabupaten Jayawijaya

Protokol dan Pimpinan Kabupaten Jayawijaya adalah bagian penting dari struktur pemerintahan daerah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola kegiatan resmi serta mendukung tugas-tugas pimpinan daerah. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya memiliki peran utama dalam memastikan kelancaran acara-acara resmi, baik yang bersifat internal

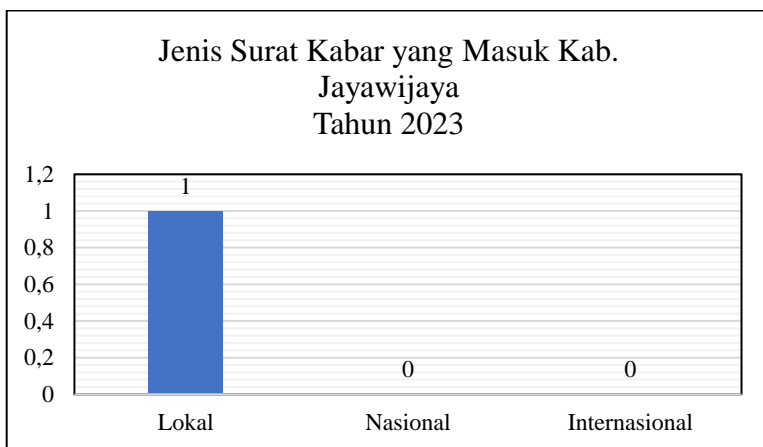


maupun eksternal, serta menjaga komunikasi yang efektif antara pimpinan daerah dan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Protokol dan Pimpinan:

- 1) **Pengaturan Acara Resmi:** Bagian Protokol bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, dan melaksanakan acara-acara resmi pemerintah daerah, termasuk upacara, rapat, dan kunjungan kerja.
- 2) **Koordinasi dengan Pimpinan:** Menyediakan dukungan administratif dan logistik bagi pimpinan daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati, dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
- 3) **Komunikasi Publik:** Mengelola komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi melalui media massa dan platform digital.
- 4) **Penyusunan Jadwal Kegiatan:** Membantu dalam penyusunan jadwal kegiatan pimpinan daerah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 5) **Pelayanan Tamu:** Menyambut dan melayani tamu-tamu resmi yang berkunjung ke Kabupaten Jayawijaya, termasuk delegasi dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah lain.

2.5.1. Jenis Surat Kabar yang Masuk Jayawijaya Tahun 2023



Gambar 12. Jenis Surat Kabar yang Masuk

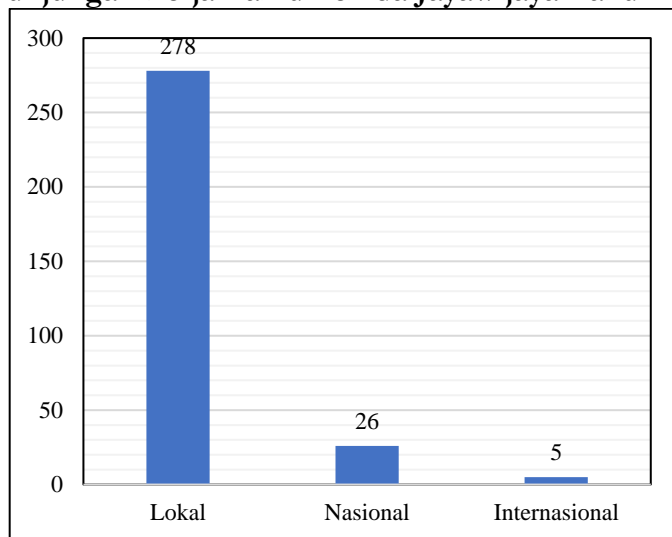


Grafik di atas menunjukkan bahwa hanya surat kabar lokal yang masuk ke Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2023, dengan nilai 1 pada skala vertikal. Tidak ada surat kabar nasional atau internasional yang tercatat masuk ke wilayah ini selama tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi surat kabar di Kabupaten Jayawijaya sangat terbatas pada surat kabar lokal. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti preferensi masyarakat setempat terhadap berita lokal, keterbatasan akses terhadap surat kabar dari luar daerah, atau mungkin kebijakan distribusi yang lebih fokus pada media lokal. Masyarakat di Kabupaten Jayawijaya mungkin lebih tertarik pada berita-berita lokal yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ini bisa menjadi alasan utama mengapa hanya surat kabar lokal yang masuk. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas bisa menjadi faktor penghambat masuknya surat kabar nasional dan internasional. Distribusi surat kabar dari luar daerah mungkin memerlukan biaya dan logistik yang lebih besar. Pemerintah daerah mungkin juga memiliki kebijakan yang mendukung media lokal untuk meningkatkan informasi dan partisipasi masyarakat dalam isu-isu lokal.

Dominasi surat kabar lokal di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2023 memberikan gambaran yang jelas tentang preferensi dan akses informasi di wilayah tersebut. Untuk meningkatkan variasi informasi, mungkin diperlukan upaya untuk memperbaiki akses dan distribusi surat kabar nasional dan internasional ke wilayah ini. Hal ini bisa melibatkan peningkatan infrastruktur distribusi, subsidi biaya distribusi, atau kampanye untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap berita dari luar daerah. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Jayawijaya dapat memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka tentang isu-isu nasional dan internasional.



2.5.2. Kunjungan Kerja Tamu Pemda Jayawijaya Tahun 2023

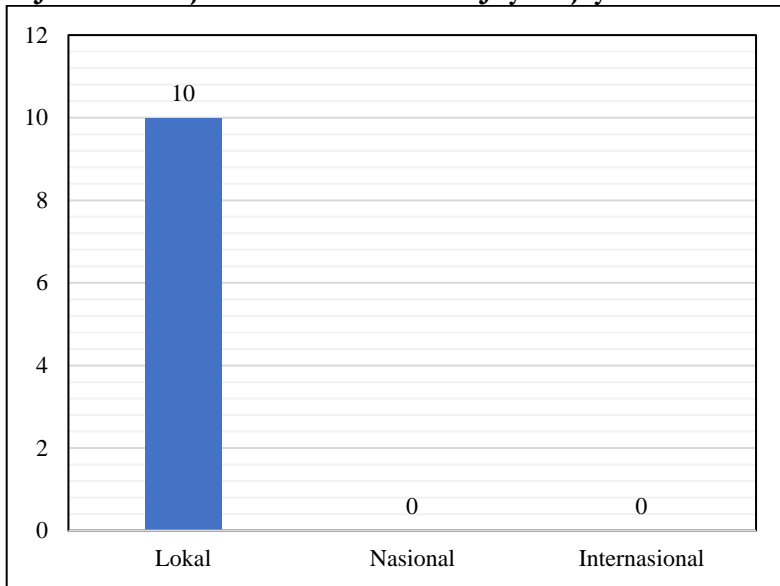


Gambar 13. Kunjungan Kerja Tamu Pemda Kabupaten Jayawijaya

Grafik tersebut menunjukkan bahwa ada potensi untuk meningkatkan jumlah kunjungan dari tamu nasional dan internasional. Pemerintah daerah bisa mempertimbangkan untuk memperkuat hubungan dengan pemerintah pusat dan daerah lain, serta menjalin kerjasama internasional yang lebih aktif. Ini bisa dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti mengadakan konferensi atau seminar yang melibatkan peserta dari luar daerah dan luar negeri, atau mempromosikan potensi dan keunggulan Kabupaten Jayawijaya di kancah nasional dan internasional. Dengan demikian, diharapkan kunjungan kerja dari tamu nasional dan internasional dapat meningkat, yang pada gilirannya bisa membawa manfaat bagi pembangunan daerah. Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran yang jelas tentang dominasi kunjungan lokal ke Pemda Kab. Jayawijaya pada tahun 2023, serta menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan keterlibatan tamu dari luar daerah dan internasional.



2.5.3. Jumlah Kerjasama Media Massa Jayawijaya Tahun 2023



Gambar 14. Jumlah Kerjasama Media Massa

Grafik di atas menunjukkan jumlah kerja sama media massa di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2023, yang dikategorikan menjadi tiga kelompok: Lokal, Nasional, dan Internasional. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa hanya ada kerja sama dengan media massa lokal, dengan jumlah 10 kerja sama. Sementara itu, tidak ada kerja sama yang tercatat dengan media massa nasional maupun internasional. Hal ini mengindikasikan bahwa fokus kerja sama media massa di Kabupaten Jayawijaya sangat terbatas pada media lokal yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti preferensi pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan media yang lebih dekat dan lebih relevan dengan masyarakat setempat. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan akses mungkin juga menjadi penghambat dalam menjalin kerja sama dengan media nasional dan internasional. Kerja sama dengan media lokal bisa lebih mudah dikelola dan lebih efektif dalam menyampaikan informasi yang relevan bagi masyarakat Jayawijaya.



Grafik tersebut menunjukkan bahwa ada potensi untuk memperluas kerja sama dengan media nasional dan internasional. Pemerintah daerah bisa mempertimbangkan untuk menjalin hubungan dengan media yang lebih luas untuk meningkatkan eksposur dan memperluas jangkauan informasi. Ini bisa dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti mengadakan acara-acara yang melibatkan media nasional dan internasional, atau mempromosikan potensi dan keunggulan Kabupaten Jayawijaya di kancah yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan kerja sama media massa dapat lebih beragam dan membawa manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah. Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran yang jelas tentang dominasi kerja sama dengan media lokal di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2023, serta menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan keterlibatan media nasional dan internasional.

2.6. Bappeda Kabupaten Jayawijaya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayawijaya adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 63 Tahun 2016, Bappeda memiliki tugas pokok untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.

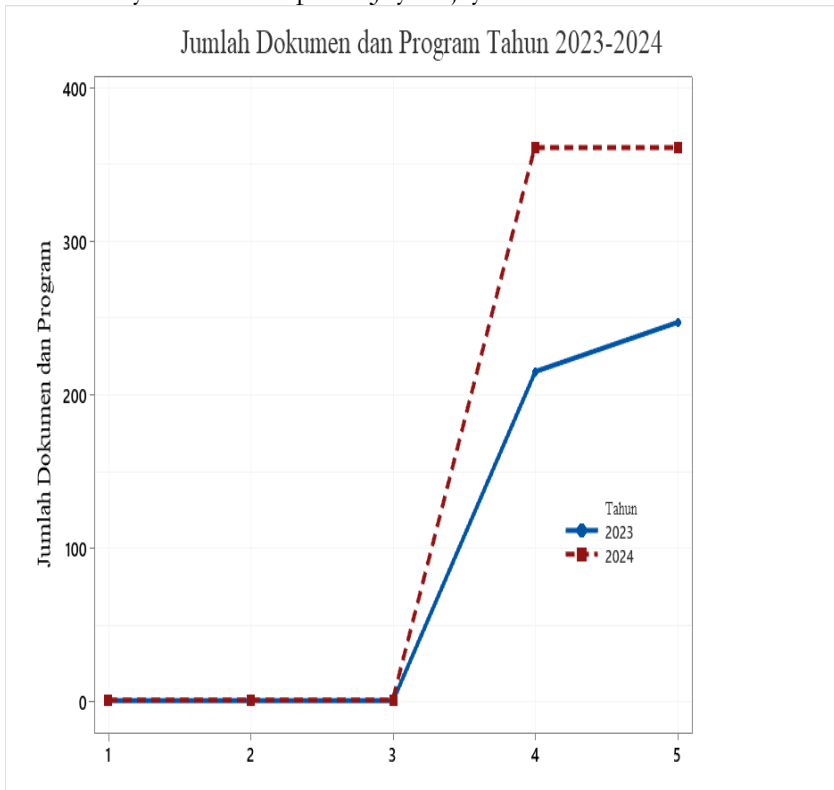
Fungsi utama Bappeda meliputi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan; pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pembangunan; serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, Bappeda juga bertugas untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.

Kinerja Bappeda Kabupaten Jayawijaya saat ini dapat dilihat dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Bappeda



berperan aktif dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, Bappeda juga terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat.

Secara keseluruhan, Bappeda Kabupaten Jayawijaya berperan penting dalam memastikan bahwa pembangunan di daerah berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Melalui koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, Bappeda berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jayawijaya.



Gambar 15. Jumlah Dokumen dan Program Tahun 2023-2024



Berdasarkan grafik “Jumlah Dokumen dan Program Tahun 2023-2024”, terlihat bahwa pada tahun 2023, jumlah dokumen dan program yang dihasilkan oleh Bappeda Kabupaten Jayawijaya meningkat secara bertahap. Garis biru yang mewakili tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang konsisten dari awal hingga akhir tahun. Sebaliknya, pada tahun 2024, garis merah putus-putus menunjukkan bahwa tidak ada dokumen atau program yang dihasilkan hingga titik terakhir, di mana terjadi lonjakan drastis mencapai sekitar 400 dokumen dan program. Hal ini bisa mengindikasikan adanya penundaan dalam pelaksanaan atau pengumpulan data pada tahun 2024, atau mungkin adanya inisiatif besar yang dilaksanakan pada akhir tahun tersebut.

Analisis dari grafik ini menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Jayawijaya memiliki kinerja yang cukup baik pada tahun 2023 dengan peningkatan yang konsisten dalam jumlah dokumen dan program. Namun, pada tahun 2024, terdapat ketidakstabilan yang mungkin perlu diperhatikan dan dianalisis lebih lanjut untuk memahami penyebabnya. Upaya untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan program dan penyusunan dokumen sepanjang tahun dapat membantu meningkatkan kinerja Bappeda di masa mendatang.

BAB III

SOSIAL KEMASYARAKATAN, DAN KESEJAHTERAAN

JAYAWIJAYA 2023-2024

SOSIAL, KEMASYARAKATAN, DAN KESEJAHTERAAN

JUMLAH PENDUDUK

275.289



48%

PEREMPUAN



52%

LAKI-LAKI

TIDAK SEKOLAH

150.570



160.182

**BELUM
KAWIN**



Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan



FAKIR MISKIN

198.987



**15 Organisasi Sosial
40 Tenaga Sosial**



**793
Tenaga Kesehatan**



5.911 Penderita HIV AIDS
548 Bekas NAPI
1.528 Penyandang Cacat
1.635 Lansia Terlantar

458 Anak Terlantar
50 Pecandu Narkoba
35 Gembel
130 Penderita Sakit Jiwa
667 Anak Jalanan



**1 Rumah Sakit
40 Apotik
6 Klinik**

Website

<https://jayawijayakab.go.id>



BAB III

SOSIAL, KEMASYARAKATAN, DAN KESEJAHTERAAN

3.1. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah tersebut. Lembaga ini menyediakan layanan seperti pendaftaran penduduk, pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, serta pengelolaan data kependudukan yang akurat dan terpercaya. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi, dinas ini berupaya meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pertukaran data kependudukan.

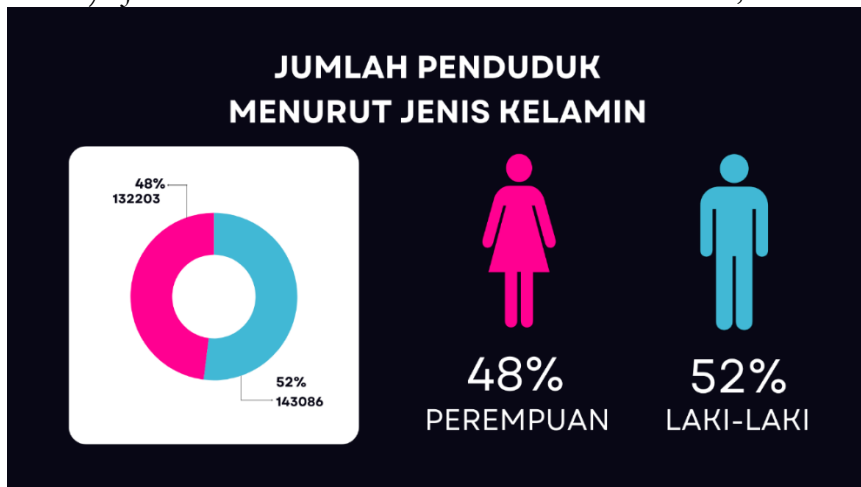
Visi Kabupaten Jayawijaya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing dengan mengedepankan kearifan lokal. Misi dinas ini sejalan dengan visi tersebut melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, tertib administrasi, dan akurasi data kependudukan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik¹. Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan penting dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Jayawijaya.

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat penting dalam pencapaian misi kedua Kabupaten Jayawijaya, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan menyediakan layanan administrasi kependudukan yang efisien dan akurat, dinas ini membantu memastikan bahwa setiap warga mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata, yang pada gilirannya mendukung pembangunan sosial dan ekonomi daerah.



Adapun data sektoral yang disajikan sebagai berikut:

- 1) Jumlah Penduduk menurut Jenis kelamin, sex ratio, dan kepadatan penduduk;
- 2) Jumlah Penduduk menurut usia;
- 3) Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan; dan
- 4) Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan;



Gambar 16. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Gambar tersebut menampilkan data statistik mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Jayawijaya yang terdiri dari distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin, dengan dua warna yang berbeda: merah muda untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Bagian merah muda dari diagram menunjukkan bahwa terdapat 132,203 perempuan, yang merupakan 48% dari total penduduk. Sementara itu, bagian biru menunjukkan bahwa terdapat 143,086 laki-laki, yang merupakan 52% dari total penduduk. Dari data ini, kita dapat menghitung jumlah total penduduk Kabupaten Jayawijaya, yaitu 275,289 orang.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa sex ratio di Kabupaten Jayawijaya adalah sekitar 1.08 laki-laki untuk setiap perempuan, yang berarti terdapat sedikit lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Untuk menghitung kepadatan penduduk, kita memerlukan data luas wilayah Kabupaten Jayawijaya. Misalnya, jika luas wilayah Jayawijaya



adalah 13,925 km², maka kepadatan penduduknya adalah sekitar 19.77 orang per km² (275,289 dibagi dengan 13,925).

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran yang jelas tentang komposisi gender dan distribusi penduduk di Kabupaten Jayawijaya. Dengan jumlah penduduk total 275,289 orang dan sex ratio yang sedikit lebih tinggi untuk laki-laki, informasi ini penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Kepadatan penduduk yang relatif rendah juga menunjukkan bahwa wilayah ini mungkin memiliki banyak ruang terbuka atau daerah yang belum berkembang, yang bisa menjadi potensi untuk pengembangan lebih lanjut.

3.1.1. Jumlah Penduduk Menurut Usia



Gambar 17. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Diagram ini menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kelompok usia, mulai dari 0-4 tahun hingga 75+ tahun. Sumbu x mencantumkan rentang usia, sementara sumbu y menunjukkan jumlah penduduk dengan interval 5.000 hingga 35.000. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa kelompok usia 15-19 tahun memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu sekitar 32.040 orang. Kemudian diikuti oleh kelompok



usia 20-24 tahun dengan sekitar 31.320 orang. Kelompok usia 10-14 tahun juga memiliki jumlah penduduk yang signifikan, yaitu sekitar 20.177 orang. Sebaliknya, kelompok usia tertua, yaitu 75+ tahun, memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu sekitar 725 orang.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa populasi muda (0-19 tahun) mendominasi, dengan jumlah yang cukup besar di setiap kelompok usia. Misalnya, kelompok usia 0-4 tahun memiliki sekitar 7.409 orang, dan kelompok usia 5-9 tahun memiliki sekitar 14.481 orang. Tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya memiliki populasi muda yang besar, yang dapat berdampak pada kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Kelompok usia produktif (20-64 tahun) juga memiliki jumlah penduduk yang signifikan. Misalnya, kelompok usia 25-29 tahun memiliki sekitar 27.370 orang, dan kelompok usia 30-34 tahun memiliki sekitar 22.015 orang. Hal ini menunjukkan potensi tenaga kerja yang besar di wilayah ini, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Namun, jumlah penduduk mulai menurun pada kelompok usia yang lebih tua. Misalnya, kelompok usia 50-54 tahun memiliki sekitar 13.589 orang, dan kelompok usia 55-59 tahun memiliki sekitar 11.244 orang. Penurunan ini berlanjut pada kelompok usia yang lebih tua, dengan hanya sekitar 1.760 orang di kelompok usia 70-74 tahun dan sekitar 725 orang di kelompok usia 75+ tahun.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran yang jelas tentang struktur demografis Kabupaten Jayawijaya. Dengan populasi muda yang besar dan jumlah penduduk yang signifikan di kelompok usia produktif, wilayah ini memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan pembangunan. Namun, perhatian juga perlu diberikan pada kebutuhan penduduk yang lebih tua, yang jumlahnya lebih sedikit tetapi tetap memerlukan layanan dan dukungan yang memadai.



3.1.2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan



Gambar 18. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

. Diagram ini menunjukkan berbagai kategori pendidikan mulai dari “Tidak/Belum Sekolah” hingga “Doktor (S3)”. Setiap batang dalam diagram ini diwarnai untuk menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa jumlah penduduk yang tidak atau belum sekolah adalah yang tertinggi, dengan sekitar 79.650 laki-laki dan 70.920 perempuan. Ini menunjukkan bahwa ada tantangan signifikan dalam akses atau penyelesaian pendidikan dasar di wilayah ini. Kategori berikutnya, “Belum Tamat SD”, menunjukkan sekitar 11.403 laki-laki dan 8.739 perempuan, yang juga cukup tinggi. Untuk kategori “Tamat SD”, terdapat sekitar 19.992 laki-laki dan 15.859 perempuan. Jumlah ini menurun pada kategori “Tamat SMP” dengan sekitar 11.951 laki-laki dan 13.816 perempuan. Menariknya, jumlah perempuan yang tamat SMP lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang mungkin menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan menengah pertama.



Pada tingkat pendidikan menengah atas, yaitu “Tamat SMA”, terdapat sekitar 16.777 laki-laki dan 16.491 perempuan. Ini menunjukkan keseimbangan yang relatif antara laki-laki dan perempuan yang menyelesaikan pendidikan menengah atas. Namun, pada tingkat pendidikan tinggi, seperti “Diploma” dan “Sarjana (S1)”, jumlahnya menurun drastis. Terdapat sekitar 3.297 laki-laki dan 2.512 perempuan yang menyelesaikan pendidikan diploma, serta sekitar 469 laki-laki dan 345 perempuan yang menyelesaikan pendidikan sarjana. Jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan pascasarjana (S2) dan doktor (S3) sangat rendah, dengan hanya beberapa ratus orang di setiap kategori. Ini menunjukkan bahwa akses ke pendidikan tinggi masih sangat terbatas di Kabupaten Jayawijaya.

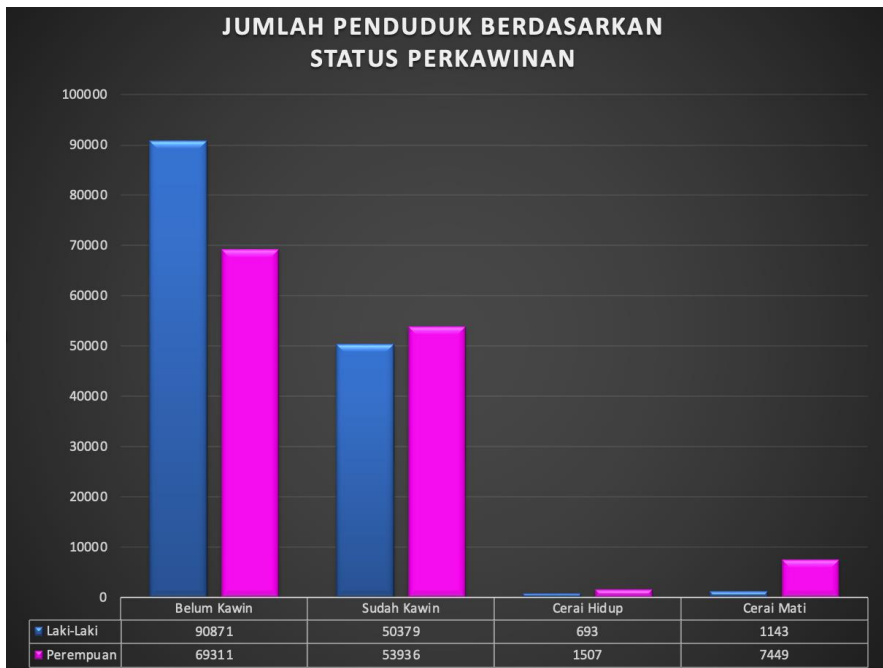
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Jayawijaya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dengan sebagian besar tidak atau belum menyelesaikan pendidikan dasar. Ini menyoroti pentingnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan di wilayah ini untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya perlu fokus pada upaya peningkatan partisipasi pendidikan, terutama pada tingkat dasar dan menengah, serta menyediakan lebih banyak peluang untuk pendidikan tinggi.

3.1.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Diagram di bawah ini menunjukkan dua kategori utama status perkawinan: “Belum Kawin” dan “Sudah Kawin”, yang masing-masing dibagi lagi berdasarkan jenis kelamin dan status hidup dengan disabilitas. Setiap batang dalam diagram ini diwarnai untuk menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, serta mereka yang hidup dengan disabilitas dan yang telah meninggal dengan disabilitas. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa jumlah penduduk yang belum kawin adalah yang tertinggi, dengan 90.871 laki-laki dan 69.311 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa ada populasi muda yang besar di Kabupaten Jayawijaya yang belum memasuki usia atau memilih untuk tidak menikah. Selain itu, terdapat 1.507 Perempuan dengan status perkawinan cerai hidup, serta 7.449 Perempuan dengan status



perkawinan cerai meninggal. Sedangkan dari jenis laki-laki terdapat 693 orang dengan status perkawinan cerai hidup, serta 1.143 orang dengan status perkawinan cerai meninggal. Untuk kategori “Sudah Kawin”, terdapat 50.379 laki-laki dan 53.936 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang sudah menikah sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Diagram tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang distribusi penduduk di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan status perkawinan, jenis kelamin, dan status cerai hidup atau cerai mati. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa jumlah penduduk yang belum kawin adalah yang tertinggi, dengan 90.871 laki-laki dan 69.311 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa ada populasi muda yang besar di Kabupaten Jayawijaya yang belum memasuki usia pernikahan atau memilih untuk tidak menikah. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan untuk tidak menikah termasuk pendidikan, karier, dan kondisi ekonomi.



Gambar 19. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan



Selain itu, terdapat 1.507 perempuan dengan status perkawinan cerai hidup, serta 7.449 perempuan dengan status perkawinan cerai meninggal. Sedangkan dari jenis laki-laki terdapat 693 orang dengan status perkawinan cerai hidup, serta 1.143 orang dengan status perkawinan cerai meninggal. Angka-angka ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak yang mengalami perceraian hidup dan mati dibandingkan laki-laki. Faktor penyebab perceraian bisa beragam, mulai dari masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga ketidakcocokan antara pasangan. Untuk kategori “Sudah Kawin”, terdapat 50.379 laki-laki dan 53.936 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang sudah menikah sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk harapan hidup yang lebih tinggi pada perempuan dan kecenderungan perempuan untuk menikah pada usia yang lebih muda.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ada perbedaan gender yang signifikan dalam status perkawinan di Kabupaten Jayawijaya. Jumlah laki-laki yang belum menikah lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang mungkin mencerminkan norma sosial atau ekonomi yang mempengaruhi keputusan untuk menikah. Di sisi lain, jumlah perempuan yang sudah menikah lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang mungkin menunjukkan bahwa perempuan cenderung menikah pada usia yang lebih muda atau memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Faktor penyebab dari tingginya jumlah penduduk yang belum menikah bisa jadi karena faktor ekonomi, di mana biaya pernikahan dan kehidupan setelah menikah dianggap tinggi. Selain itu, pendidikan juga memainkan peran penting, di mana individu yang mengejar pendidikan tinggi cenderung menunda pernikahan. Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi, seperti norma yang mengharuskan laki-laki memiliki pekerjaan tetap sebelum menikah. Risiko dari tingginya jumlah penduduk yang belum menikah termasuk potensi penurunan angka kelahiran, yang dapat berdampak pada struktur demografis di masa depan. Selain itu, individu yang tidak menikah mungkin menghadapi tekanan sosial dan stigma, serta kurangnya dukungan sosial yang biasanya diperoleh dari pasangan.



Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran yang jelas tentang struktur demografis dan status perkawinan penduduk di Kabupaten Jayawijaya. Dengan populasi muda yang besar dan perbedaan gender yang signifikan dalam status perkawinan, informasi ini penting untuk perencanaan sosial dan kebijakan publik. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya perlu fokus pada upaya untuk mendukung populasi muda dalam transisi mereka menuju kehidupan dewasa, serta menyediakan dukungan yang memadai bagi individu yang bercerai untuk memastikan inklusi sosial yang lebih baik.

3.2. Dinas Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya

Dinas Olah raga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor olah raga dan kepemudaan di wilayah tersebut. Lembaga ini melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan memberdayakan pemuda, serta memajukan olahraga. Dengan mengintegrasikan teknologi dan pendekatan inovatif, dinas ini berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan potensi generasi muda.

Visi Kabupaten Jayawijaya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing dengan mengedepankan kearifan lokal. Misi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sejalan dengan visi ini, terutama dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya. Peran dinas ini sangat penting dalam pencapaian misi pertama Kabupaten Jayawijaya, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, dinas ini berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang berpendidikan, sehat, dan berdaya saing.

Adapun data sektoral yang disajikan sebagai berikut:

- 1) Kinerja Dinas pada periode tahun 2023;
- 2) Struktur Pemuda berdasarkan pendidikan dan Gender;
- 3) Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan;
- 4) Jumlah dan Jenis Prasarana Olahraga;
- 5) Jumlah Prasarana Olahraga berdasarkan Kondisi; dan
- 6) Jenis dan Jumlah Klub Olahraga.



3.2.1. Gambaran Umum Kinerja Dinas Olah Raga dan Pemuda

Tabel 11. Gambaran Umum Dinas Olah Raga dan Pemuda

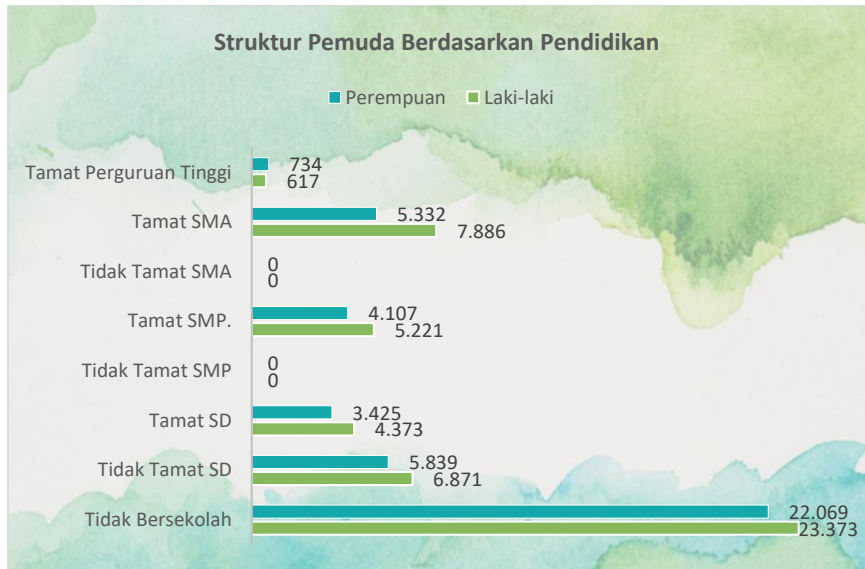
No	DATA	SATUAN	PERIODE DATA	2023
1	Jumlah lembaga dan organisasi kepemudaan terbina	Organisasi	Tahunan	1
2	Jumlah pelatihan kewirausahaan untuk kelompok pemuda	Kali	Tahunan	1
3	Jumlah Kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana kepemudaan yang memenuhi standar mutu	Unit	Tahunan	-
4	Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu	Unit	Tahunan	-
5	Jumlah olahragawan berprestasi	Orang	Tahunan	
	1. Laki-laki	Orang	Tahunan	
	2. Perempuan	Orang	Tahunan	
6	Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga	persen	Tahunan	40
7	Jumlah Organisasi Olahraga	Organisasi	Tahunan	14
8	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	Tahunan	
9	Jumlah Kegiatan Olahraga	Kali	Tahunan	
10	Jumlah tenaga dan keolahragaan berkualitas	Orang	Tahunan	
11	Jumlah sarana Olahraga untuk pusat pertandingan	Unit	Tahunan	
12	Jumlah partisipasi organisasi dalam berolahraga	persen	Tahunan	
13	Ketersediaan pembinaan lembaga dan organisasi kepemudaan	ada/tidak ada	Tahunan	

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam gambar, Dinas Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya membina satu lembaga dan organisasi kepemudaan. Selain itu, terdapat satu pelatihan kewirausahaan yang telah diselenggarakan untuk kelompok pemuda. Partisipasi masyarakat dalam berolahraga tidak memiliki data spesifik yang tersedia dalam tabel tersebut. Namun, terdapat empat belas organisasi olahraga yang terdaftar dan aktif di Kabupaten Jayawijaya. Data ini menunjukkan bahwa dinas tersebut aktif dalam membina organisasi kepemudaan dan



menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, meskipun masih ada beberapa kategori data yang belum lengkap atau tidak tersedia. Hal ini mencerminkan upaya dinas dalam mendukung pengembangan pemuda dan olahraga di wilayah tersebut.

3.2.2. Struktur Pemuda Berdasarkan Pendidikan



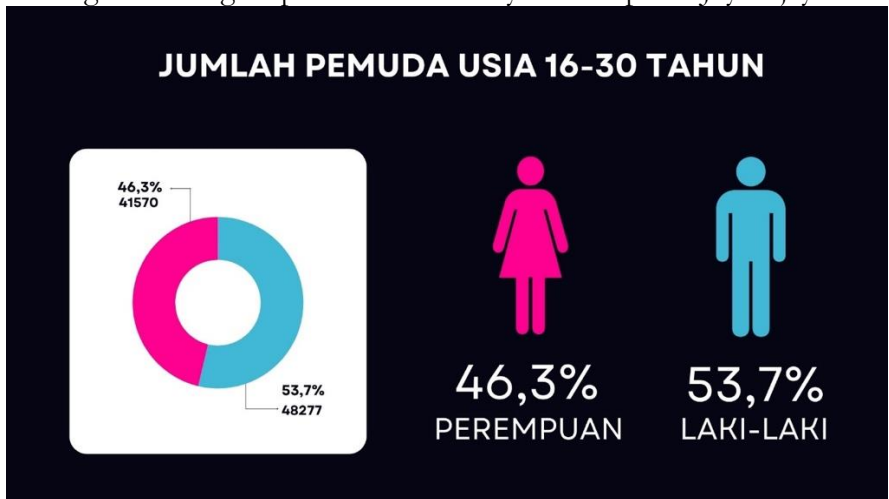
Gambar 20. Struktur Pemuda Berdasarkan Pendidikan

Dari grafik tersebut, terlihat bahwa jumlah pemuda yang paling banyak adalah mereka yang tidak tamat SD, dengan 5.839 perempuan dan 22.069 laki-laki. Kategori kedua terbesar adalah mereka yang tamat SD, dengan 3.425 perempuan dan 4.373 laki-laki. Untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, jumlahnya jauh lebih sedikit, dengan 734 perempuan dan 617 laki-laki yang telah menyelesaikan perguruan tinggi. Tidak ada individu yang dilaporkan tidak tamat SMA atau SMP. Jika dibandingkan berdasarkan gender, jumlah laki-laki lebih banyak di semua tingkat pendidikan kecuali pada tingkat perguruan tinggi, di mana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada lebih banyak laki-laki yang tidak



menyelesaikan pendidikan dasar, perempuan lebih cenderung menyelesaikan pendidikan tinggi.

Data ini memberikan wawasan penting tentang pencapaian pendidikan pemuda di Kabupaten Jayawijaya. Informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan program pendidikan atau kebijakan yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi kelompok demografis ini. Dengan memahami struktur pendidikan pemuda, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan tingkat pendidikan di wilayah Kabupaten Jayawijaya.



Gambar 21. Jumlah Pemuda Usa 16-30 Tahun

Grafik yang Anda berikan menggambarkan data jumlah pemuda usia 16 hingga 30 tahun di Kabupaten Jayawijaya. Grafik ini berbentuk diagram lingkaran yang menunjukkan distribusi pemuda berdasarkan jenis kelamin. Diagram ini terbagi menjadi dua segmen dengan persentase dan jumlah absolut yang sesuai: segmen berwarna merah muda mewakili perempuan dengan persentase 46,3% atau 41.570 individu, sedangkan segmen berwarna biru mewakili laki-laki dengan persentase 53,7% atau 48.277 individu.



Analisis dari data ini menunjukkan bahwa terdapat sedikit lebih banyak pemuda laki-laki dibandingkan perempuan di Kabupaten Jayawijaya dalam rentang usia 16 hingga 30 tahun. Perbedaan ini, meskipun tidak terlalu besar, dapat memiliki implikasi penting bagi berbagai faktor sosial-ekonomi seperti lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, dan pembuatan kebijakan yang ditujukan untuk pengembangan pemuda di wilayah ini. Misalnya, dengan jumlah pemuda laki-laki yang lebih tinggi, mungkin ada kebutuhan yang lebih besar untuk program pelatihan kerja atau inisiatif kewirausahaan yang dapat menarik minat mereka.

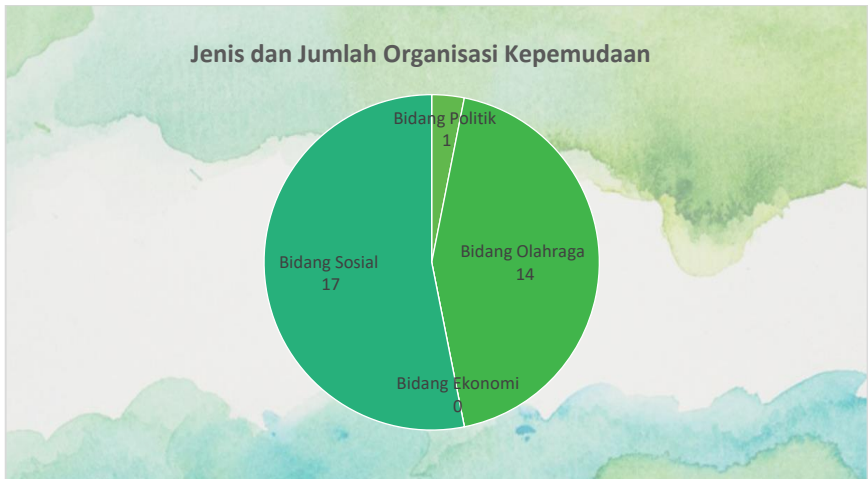
Selain itu, data ini juga dapat digunakan untuk merencanakan fasilitas dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan demografis ini. Misalnya, program kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual mungkin perlu disesuaikan untuk menjangkau lebih banyak pemuda laki-laki. Di sisi lain, peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan tinggi dan pekerjaan juga bisa menjadi fokus utama untuk mencapai keseimbangan gender yang lebih baik. Penekanan penting dari data ini adalah perlunya pendekatan yang seimbang dan inklusif dalam perencanaan program dan kebijakan yang ditujukan untuk pemuda. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa semua pemuda, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya yang dapat membantu mereka berkembang dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Dengan memahami distribusi demografis ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi perkembangan pemuda di Kabupaten Jayawijaya.

Bagi Dinas Olah Raga dan Pemuda, data ini sangat bermanfaat untuk merancang program-program yang lebih tepat sasaran. Misalnya, dengan mengetahui bahwa jumlah pemuda laki-laki lebih banyak, dinas dapat mengembangkan program olahraga yang lebih beragam dan inklusif untuk menarik minat mereka. Selain itu, program pemberdayaan perempuan juga dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa pemuda perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang. Dengan demikian, data ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk



perencanaan strategis dan pengembangan program yang lebih efektif di Kabupaten Jayawijaya.

3.2.3. Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan



Gambar 22. Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan

Grafik di atas menggambarkan jenis dan jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2023. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat empat jenis organisasi kepemudaan yang tercatat: bidang politik, bidang sosial, bidang olahraga, dan bidang ekonomi. Terdapat 1 organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang politik, 17 organisasi di bidang sosial, 14 organisasi di bidang olahraga, dan tidak ada organisasi yang tercatat di bidang ekonomi.

Dari data ini, terlihat bahwa minat pemuda di Jayawijaya dalam berorganisasi di bidang politik masih sangat rendah, hanya ada satu organisasi yang bergerak di bidang ini. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya minat atau kesadaran politik di kalangan pemuda, atau mungkin juga karena keterbatasan akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Rendahnya keterlibatan ini bisa menjadi tantangan bagi pengembangan kepemimpinan politik di masa depan.



Sebaliknya, bidang sosial menunjukkan keterlibatan yang sangat tinggi dengan 17 organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda di Jayawijaya lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial. Organisasi sosial biasanya berfokus pada kegiatan kemanusiaan, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Tingginya jumlah organisasi sosial mencerminkan tingginya kesadaran dan kepedulian pemuda terhadap isu-isu sosial di sekitar mereka. Hal tersebut merupakan potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk program-program pembangunan sosial di daerah tersebut.

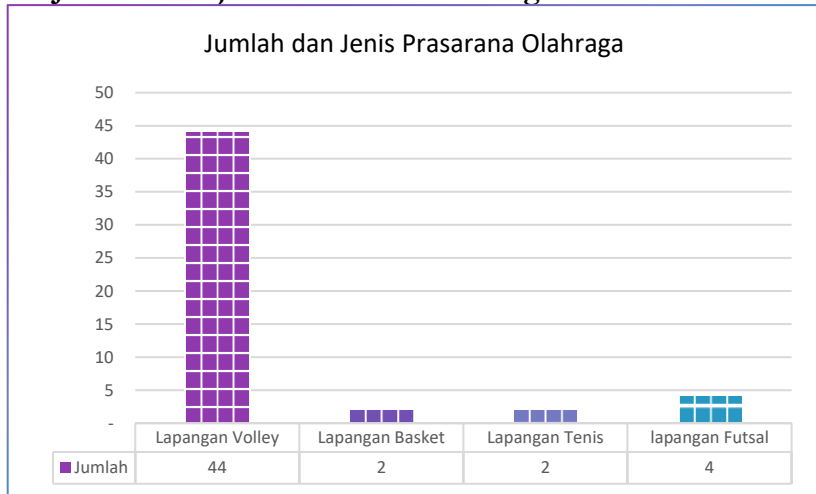
Bidang olahraga juga menunjukkan keterlibatan yang signifikan dengan 14 organisasi. Ini menunjukkan bahwa pemuda di Jayawijaya memiliki minat yang tinggi dalam kegiatan olahraga. Keterlibatan dalam organisasi olahraga tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Organisasi olahraga dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun solidaritas dan kerjasama di antara pemuda.

Tidak adanya organisasi kepemudaan di bidang ekonomi menunjukkan bahwa pemuda di Jayawijaya mungkin kurang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau kewirausahaan. Padahal, keterlibatan dalam bidang ekonomi bisa memberikan banyak manfaat, seperti peningkatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diatasi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mendorong partisipasi pemuda dalam bidang ekonomi melalui program-program pelatihan, penyuluhan, dan pemberian akses yang lebih luas.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran tentang struktur organisasi kepemudaan di Jayawijaya dan menunjukkan area-area yang perlu diperhatikan untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan memanfaatkan potensi yang ada di bidang sosial dan olahraga serta mengatasi kesenjangan di bidang politik dan ekonomi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan pemuda di Kabupaten Jayawijaya. Pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi kesenjangan ini dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang.



3.2.4. Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga



Gambar 23. Jumlah dan Jenis Prasarana Olahraga

Grafik ini menunjukkan empat jenis prasarana olahraga: Lapangan Volley, Lapangan Basket, Lapangan Tennis, dan Lapangan Futsal. Setiap jenis prasarana diwakili oleh bar berwarna yang menunjukkan jumlahnya. Lapangan Volley memiliki jumlah tertinggi dengan 44 lapangan, diikuti oleh Lapangan Futsal dengan 4 lapangan, Lapangan Basket dengan 2 lapangan, dan Lapangan Tennis dengan 1 lapangan.

Analisis dari data ini menunjukkan bahwa ada penekanan yang signifikan pada prasarana olahraga untuk voli di Kabupaten Jayawijaya. Jumlah lapangan voli yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan prasarana olahraga lainnya menunjukkan bahwa voli mungkin merupakan olahraga yang sangat populer di daerah ini. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minat masyarakat yang tinggi terhadap olahraga voli, dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait, atau mungkin juga karena biaya pembangunan dan pemeliharaan lapangan voli yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan prasarana olahraga lainnya.



Sebaliknya, jumlah lapangan basket, tenis, dan futsal yang jauh lebih sedikit menunjukkan bahwa olahraga-olahraga ini mungkin kurang populer atau kurang mendapatkan perhatian dan dukungan yang sama. Hanya ada 2 lapangan basket, 1 lapangan tenis, dan 4 lapangan futsal. Ini bisa menjadi indikasi bahwa ada kebutuhan untuk diversifikasi dan peningkatan prasarana olahraga lainnya untuk memenuhi berbagai minat dan kebutuhan masyarakat. Meskipun voli mungkin sangat populer, penting juga untuk memberikan perhatian yang sama kepada olahraga lainnya untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pemuda untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis olahraga. Pemerintah dan lembaga terkait dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan lapangan basket, tenis, dan futsal untuk menciptakan lingkungan yang lebih seimbang dan mendukung perkembangan olahraga yang lebih beragam.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran tentang kondisi prasarana olahraga di Kabupaten Jayawijaya dan menunjukkan area-area yang perlu diperhatikan untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan meningkatkan diversifikasi dan pemerataan prasarana olahraga, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan olahraga dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

3.2.5. Jumlah Prasarana Olahraga Berdasarkan Kondisi

Tabel 12. Jumlah Prasarana Olahraga Berdasarkan Kondisi

No.	Jenis Prasarana Olahraga dan Kondisi	Satuan	Periode Data	Tahun 2023
1.	Jumlah Lapangan Tenis	Unit	Tahunan	2
	1. Baik	Unit	Tahunan	0
	2. Kurang Baik	Unit	Tahunan	2
2.	Jumlah Stadion Bola Tipe A	Unit	Tahunan	0
	1. Baik	Unit	Tahunan	0
	2. Kurang Baik	Unit	Tahunan	0
3.	Jumlah Stadion Bola Tipe B	Unit	Tahunan	0



4.	1. Baik	Unit	Tahunan	0
	2. Kurang Baik	Unit	Tahunan	0
5.	Jumlah Stadion Bola Tipe C	Unit	Tahunan	0
	1. Baik	Unit	Tahunan	0
6.	2. Kurang Baik	Unit	Tahunan	1
	Jumlah Stadion Atletik Tipe A	Unit	Tahunan	0
7.	1. Baik	Unit	Tahunan	0
	2. Kurang Baik	Unit	Tahunan	0
8.	Jumlah Stadion Atletik Tipe B	Unit	Tahunan	0
	1. Baik	Unit	Tahunan	0
9.	2. Kurang Baik	Unit	Tahunan	0
	Jumlah Stadion Atletik Tipe C	Unit	Tahunan	0
10.	1. Baik	Unit	Tahunan	0
	2. Kurang Baik	Unit	Tahunan	0
11.	Jumlah Lapangan Bulu Tangkis	Unit	Tahunan	7
	1. Baik	Unit	Tahunan	6
12.	2. Kurang Baik	Unit	Tahunan	1
	Jumlah Gedung Olahraga Tipe A.	Unit	Tahunan	0
13.	1. Baik	Unit	Tahunan	0
	2. Kurang Baik	Unit	Tahunan	0
14.	Jumlah Gedung Olahraga Tipe B.	Unit	Tahunan	0
	1. Baik	Unit	Tahunan	0
15.	2. Kurang Baik	Unit	Tahunan	0
	Jumlah Gedung Olahraga Tipe C.	Unit	Tahunan	1
16.	1. Baik	Unit	Tahunan	0
	2. Kurang Baik	Unit	Tahunan	0
17.	Jumlah Kolam Renang	Unit	Tahunan	0
	1. Baik	Unit	Tahunan	0
18.	2. Kurang Baik	Unit	Tahunan	0
	Jumlah Sasana Tinju/Beladiri.	Unit	Tahunan	1
19.	1. Baik	Unit	Tahunan	1
	2. Kurang Baik	Unit	Tahunan	0
20.	Jumlah Velodrome	Unit	Tahunan	0



1. Baik	Unit	Tahunan	0
2. Kurang Baik	Unit	Tahunan	0

Tabel di atas berisi data mengenai jenis dan jumlah prasarana olahraga di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan kondisi dan tipenya hingga tahun 2023. Tabel ini mencakup berbagai jenis prasarana olahraga seperti stadion, kolam renang, lapangan voli, dan stadion atletik, yang masing-masing dikategorikan berdasarkan kondisi mereka, yaitu 'Baik' (Good) dan 'Rusak Berat' (Heavily Damaged). Setiap jenis prasarana diukur dalam satuan 'Unit' dan data ini dikumpulkan secara tahunan. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa ada beberapa stadion yang dikategorikan berdasarkan tipe A, B, dan C, yang kemungkinan menunjukkan perbedaan ukuran atau kapasitas. Setiap kategori stadion ini juga dibagi berdasarkan kondisi, dengan beberapa stadion dalam kondisi baik dan beberapa lainnya dalam kondisi rusak berat. Misalnya, terdapat 3 stadion tipe A dalam kondisi baik dan 2 dalam kondisi rusak berat. Kolam renang juga tercatat dengan kondisi yang serupa, menunjukkan adanya perhatian terhadap kualitas serta kuantitas prasarana olahraga.

Selain itu, tabel ini juga mencakup lapangan voli dan stadion atletik, yang menunjukkan adanya beragam kegiatan olahraga yang didukung di wilayah ini. Jumlah lapangan voli yang tercatat adalah 44 unit, yang menunjukkan popularitas olahraga ini di Jayawijaya. Sementara itu, jumlah stadion atletik yang tercatat adalah 1 unit dalam kondisi baik. Analisis lebih lanjut dari data ini menunjukkan bahwa ada penekanan yang signifikan pada pemeliharaan dan pengembangan prasarana olahraga di Jayawijaya. Jumlah prasarana yang dalam kondisi baik menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk memastikan fasilitas olahraga tetap dapat digunakan dengan optimal. Namun, adanya prasarana yang dalam kondisi rusak berat juga menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk perbaikan dan pemeliharaan lebih lanjut.

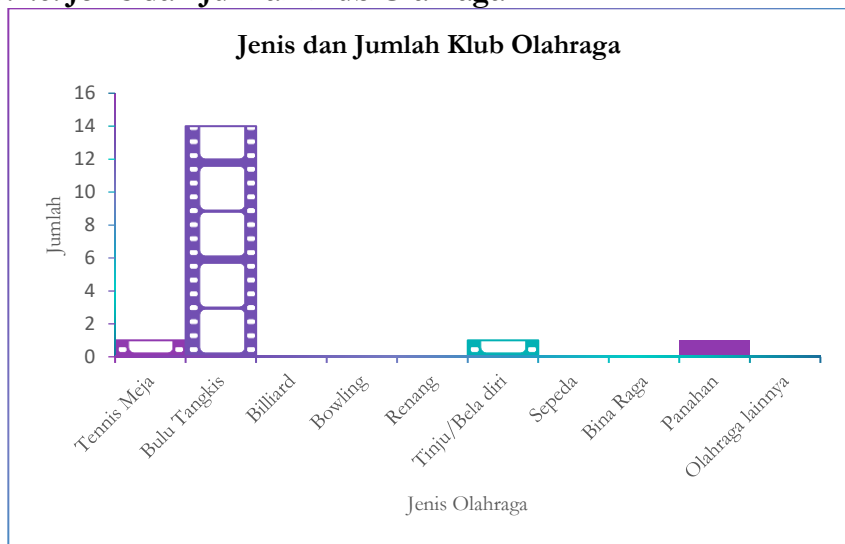
Penekanan penting dari data ini adalah perlunya pemerataan dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana olahraga. Meskipun ada beberapa fasilitas yang dalam kondisi baik, penting juga untuk memperhatikan dan memperbaiki fasilitas yang rusak berat agar semua



prasarana olahraga dapat digunakan dengan maksimal. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan investasi dalam pemeliharaan dan perbaikan prasarana olahraga untuk memastikan bahwa semua fasilitas dapat digunakan oleh masyarakat dengan aman dan nyaman.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran tentang kondisi prasarana olahraga di Kabupaten Jayawijaya dan menunjukkan area-area yang perlu diperhatikan untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan meningkatkan diversifikasi dan pemerataan prasarana olahraga, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan olahraga dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi kesenjangan ini dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang olahraga.

3.2.6. Jenis dan Jumlah Klub Olahraga



Gambar 24. Jenis dan Jumlah Klub Olahraga

Grafik di atas memberikan gambaran tentang distribusi dan jumlah klub olahraga yang ada di wilayah tersebut. Jenis olahraga yang tercantum meliputi Tennis Meja (Tennis Meja), Bulu Tangkis



(Badminton), Biliar, Bowling, Renang (Renang), Tinju/Bela Diri (Tinju/Bela Diri), Sepeda (Sepeda), Bina Raga (Bina Raga), Panahan (Panahan), dan Olahraga Lainnya. Setiap jenis olahraga diwakili oleh bar horizontal yang menunjukkan jumlah klub yang ada. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa Tennis Meja memiliki jumlah klub terbanyak, yaitu sekitar 14 klub. Bulu Tangkis mengikuti dengan jumlah sekitar 12 klub. Biliar dan Bowling memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit, masing-masing hanya sekitar 1 klub. Renang, Tinju/Bela Diri, Sepeda, Bina Raga, Panahan, dan Olahraga Lainnya semuanya memiliki jumlah klub yang sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali, dengan bar yang berada di level dasar grafik.

Analisis dari data ini menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam popularitas atau ketersediaan klub olahraga di Kabupaten Jayawijaya. Jumlah klub Tennis Meja dan Bulu Tangkis yang lebih tinggi menunjukkan bahwa olahraga ini mungkin lebih diminati oleh masyarakat atau mendapatkan dukungan yang lebih baik dari segi infrastruktur lokal. Sebaliknya, rendahnya jumlah klub untuk olahraga seperti Renang, Tinju/Bela Diri, dan Panahan mungkin menunjukkan keterbatasan fasilitas atau sumber daya untuk olahraga-olahraga tersebut, atau mungkin juga preferensi budaya yang mempengaruhi pembentukan klub.

Penekanan penting dari data ini adalah perlunya diversifikasi dan peningkatan dukungan untuk berbagai jenis olahraga. Meskipun Tennis Meja dan Bulu Tangkis tampaknya sangat populer, penting juga untuk memberikan perhatian yang sama kepada olahraga lainnya untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pemuda untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis olahraga. Pemerintah dan lembaga terkait dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas untuk olahraga yang kurang terwakili seperti Renang, Tinju/Bela Diri, dan Panahan.

Secara keseluruhan, data ini memberikan wawasan tentang preferensi olahraga dan distribusi klub di Kabupaten Jayawijaya. Dengan meningkatkan diversifikasi dan pemerataan dukungan untuk berbagai jenis olahraga, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih



kondusif bagi perkembangan olahraga dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi kesenjangan ini dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang olahraga.

3.3. Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya

Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jayawijaya, yang salah satunya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas. Melalui berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial berupaya mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program rehabilitasi, perlindungan sosial, dan pelayanan sosial yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan. Dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha, Dinas Sosial membantu masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan produktif, sesuai dengan misi untuk mengembangkan potensi masyarakat lokal. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, Dinas Sosial membangun jaringan sosial yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program-program sosial secara efektif dan berkelanjutan. Dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya memiliki tugas pokok untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Fungsi utama dinas ini meliputi:

1. **Perumusan Kebijakan Teknis:** Mengembangkan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



2. **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan:** Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
3. **Pembinaan dan Pengawasan:** Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
4. **Pelayanan Publik:** Memberikan pelayanan publik yang berkualitas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
5. **Koordinasi dan Kerjasama:** Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Jayawijaya yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi Kabupaten Jayawijaya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Untuk mencapai visi ini, dinas berperan dalam beberapa aspek penting:

1. **Peningkatan Kesejahteraan Sosial:** Melalui berbagai program sosial, dinas berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas.
2. **Pemberdayaan Perempuan:** Dinas mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan politik.
3. **Perlindungan Anak:** Dinas melaksanakan berbagai program perlindungan anak untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan mereka terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan fokus pada kelompok rentan, dinas ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, tantangan

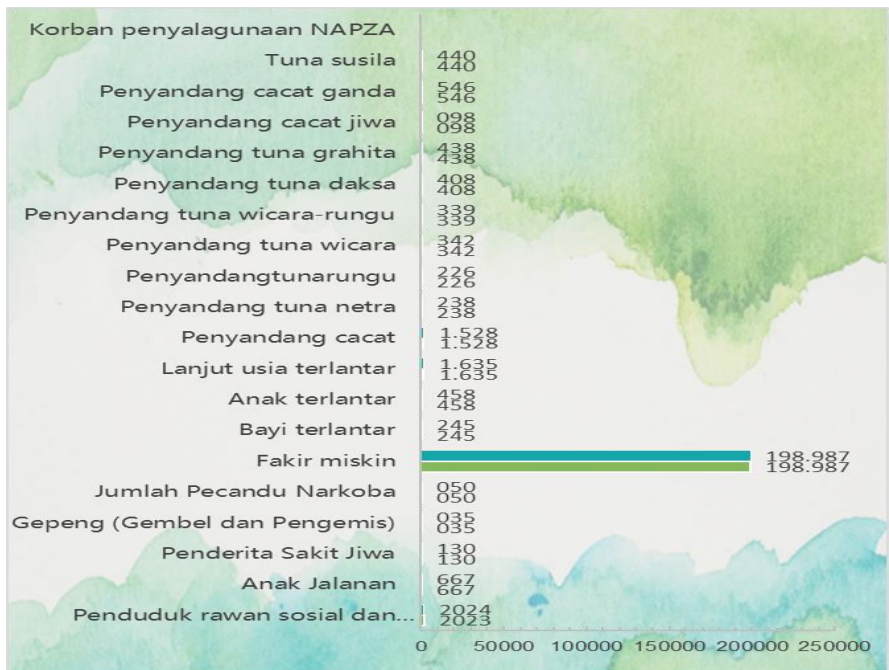


yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya dan aksesibilitas di daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan program-program yang dijalankan dapat mencapai sasaran dengan efektif.

Adapun data sektoral yang disajikan berupa:

- 1) Jumlah Penduduk Rawan Sosial dan Sarana;
- 2) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 3) Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- 4) Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP;
- 5) Jumlah Pelayanan Ketenagakerjaan

3.3.1. Jumlah Penduduk Rawan Sosial dan Sarana



Gambar 25. Jumlah Penduduk Rawan Sosial dan Sarana



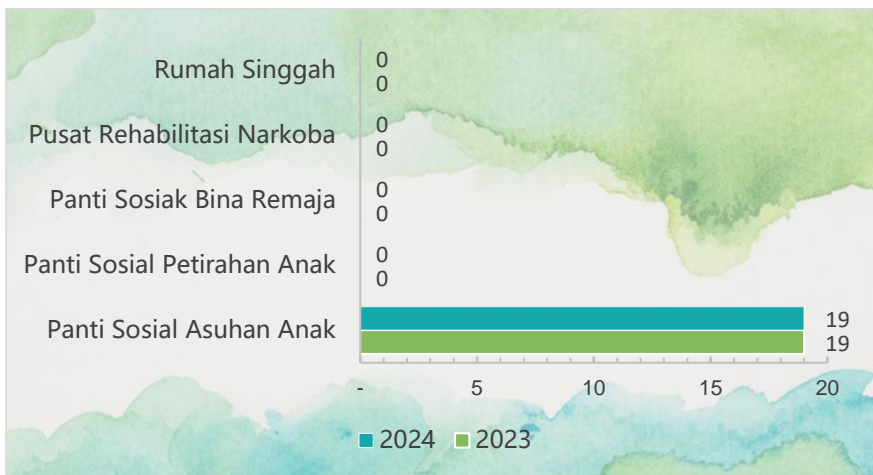
Grafik ini menggunakan diagram batang horizontal dengan berbagai kategori penduduk yang rentan terhadap masalah sosial. Setiap batang menunjukkan jumlah individu dalam kategori tertentu, dengan jumlah yang bervariasi dari 35 hingga 198.987. Kategori dengan jumlah tertinggi adalah fakir miskin, yang mencapai 198.987 orang. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah signifikan di Jayawijaya, mempengaruhi banyak penduduk dan memerlukan perhatian khusus dari dinas sosial. Kategori lain yang tercantum dalam grafik ini termasuk penyandang cacat ganda (546 orang), penyandang cacat jiwa (98 orang), tuna grahita (438 orang), tuna daksa (408 orang), tuna wicara/rungu (339 orang), tuna wicara (432 orang), tuna rungu (226 orang), tuna netra (238 orang), penyandang cacat (1.528 orang), anak terlantar (458 orang), bayi terlantar (245 orang), pecandu narkotik (50 orang), gepeng (35 orang), sakit jiwa (130 orang), dan anak jalanan (667 orang). Tidak ada perbedaan jumlah antara tahun 2023 dan 2024, dan kategori lainnya tercatat 0.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa kelompok rentan ini memerlukan intervensi yang berbeda. Misalnya, fakir miskin mungkin memerlukan program pengentasan kemiskinan yang komprehensif, termasuk pelatihan keterampilan kerja dan akses ke peluang ekonomi. Lanjut usia terlantar memerlukan dukungan sosial dan perawatan jangka panjang, sementara bekas narapidana mungkin memerlukan program reintegrasi sosial untuk membantu mereka kembali ke masyarakat. Penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental, memerlukan akses ke layanan kesehatan dan rehabilitasi yang memadai. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, data ini menyoroti pentingnya pengalokasian sumber daya yang tepat untuk setiap kelompok rentan. Program-program yang dirancang harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari setiap kategori, seperti



penyediaan tempat penampungan bagi anak jalanan dan anak terlantar, serta program rehabilitasi dan dukungan bagi pecandu narkoba.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran yang jelas tentang populasi rentan di Jayawijaya dan dapat digunakan untuk merancang kebijakan dan program yang lebih efektif dalam melindungi dan mendukung mereka yang paling membutuhkan. Peningkatan jumlah penduduk rawan sosial dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan sosial yang perlu diidentifikasi dan ditangani secara komprehensif.



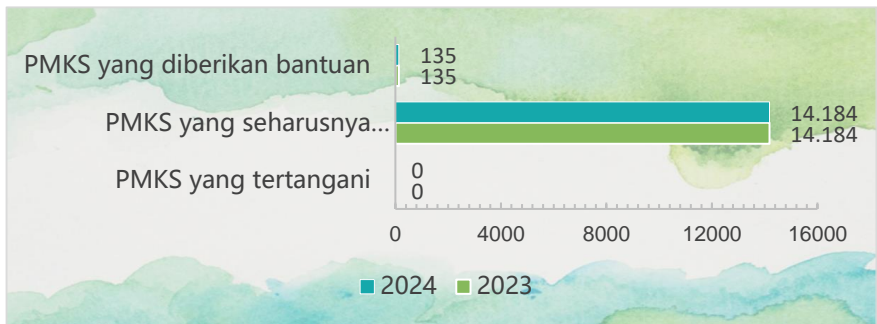
Gambar 26. Jumlah Sarana Sosial

Data sarana bagi penduduk rawan sosial menunjukkan bahwa hanya terdapat panti sosial asuhan anak yang dimiliki pemerintah Jayawijaya dengan jumlah 19, dan tidak ada perubahan dari tahun 2023 ke 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebutuhan yang signifikan, fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan peningkatan jumlah dan jenis fasilitas yang tersedia untuk mendukung berbagai kelompok rentan ini.



Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran yang jelas tentang populasi rentan di Jayawijaya dan dapat digunakan untuk merancang kebijakan dan program yang lebih efektif dalam melindungi dan mendukung mereka yang paling membutuhkan. Peningkatan jumlah penduduk rawan sosial dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan sosial yang perlu diidentifikasi dan ditangani secara komprehensif.

3.3.2. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)



Gambar 27. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

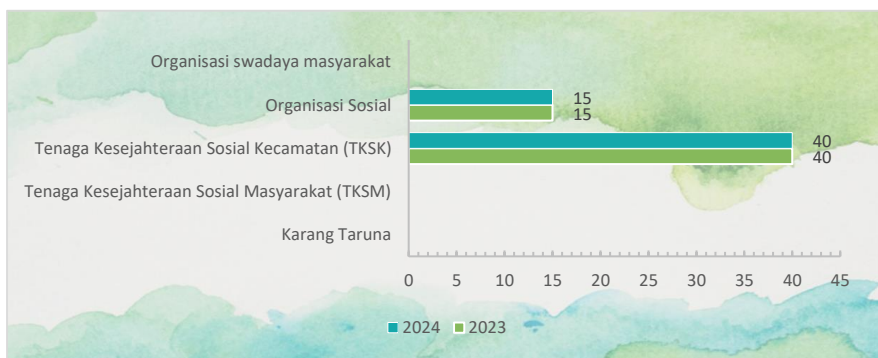
Grafik di atas menunjukkan data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Jayawijaya. Data ini dibagi menjadi tiga kategori: PMKS yang tertangani, PMKS yang seharusnya menerima bantuan, dan PMKS yang menerima bantuan. Dalam kategori “PMKS yang menerima bantuan,” terdapat angka yang sama untuk tahun 2023 dan 2024, yaitu 135 individu. Untuk kategori “PMKS yang seharusnya menerima bantuan,” terdapat angka yang signifikan untuk kedua tahun tersebut, yaitu 14.184 individu. Sementara itu, kategori “PMKS yang tertangani” menunjukkan angka nol untuk kedua tahun.



Data ini menyoroti masalah kritis dalam kesejahteraan sosial di Kabupaten Jayawijaya: terdapat kesenjangan besar antara jumlah individu yang seharusnya menerima bantuan dan yang benar-benar menerima bantuan. Meskipun angka ini konsisten selama dua tahun berturut-turut, hanya sebagian kecil dari mereka yang membutuhkan bantuan yang benar-benar mendapatkannya, sementara sejumlah besar tetap tidak terbantu.

Analisis komprehensif dari data ini harus mempertimbangkan mengapa kesenjangan ini terjadi meskipun ada kesadaran yang jelas tentang masalah tersebut (seperti yang ditunjukkan oleh identifikasi akurat dari mereka yang membutuhkan bantuan). Faktor-faktor yang mungkin termasuk keterbatasan sumber daya, ketidakefisienan dalam sistem distribusi bantuan, atau hambatan sosial-ekonomi lainnya yang mencegah penjangkauan efektif ke semua PMKS. Data ini menekankan pentingnya mengatasi tantangan-tantangan ini untuk memastikan akses yang adil terhadap dukungan kesejahteraan sosial bagi semua individu yang terdampak di Kabupaten Jayawijaya.

3.3.3. Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)



Gambar 28. Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)



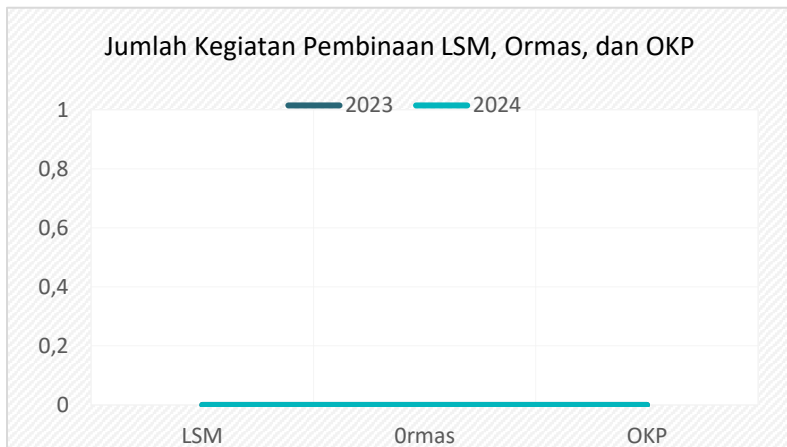
Grafik tersebut menunjukkan data jumlah potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di Kabupaten Jayawijaya. Data ini dibagi menjadi tiga kategori: Organisasi Kemandirian Masyarakat, Organisasi Sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Untuk tahun 2023 dan 2024, jumlah Organisasi Kemandirian Masyarakat adalah 15, jumlah Organisasi Sosial adalah 15, dan jumlah TKSK adalah 40. Tidak ada perubahan angka dari tahun ke tahun untuk ketiga kategori tersebut.

Penekanan penting dari data ini adalah stabilitas jumlah potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kabupaten Jayawijaya. Meskipun tidak ada peningkatan atau penurunan dalam jumlah organisasi dan tenaga kesejahteraan sosial, data ini menunjukkan bahwa infrastruktur kesejahteraan sosial di wilayah ini tetap konsisten. Stabilitas ini bisa diartikan sebagai keberlanjutan program-program kesejahteraan sosial yang ada, yang mungkin sudah mencapai kapasitas optimal atau menghadapi kendala dalam ekspansi lebih lanjut.

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada perubahan angka, penting untuk mengevaluasi efektivitas dari organisasi dan tenaga kesejahteraan sosial yang ada. Stabilitas angka bisa menunjukkan bahwa program-program yang ada sudah berjalan dengan baik dan mampu mempertahankan jumlah sumber daya yang ada. Namun, juga penting untuk mempertimbangkan apakah jumlah yang ada sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau jika ada kebutuhan untuk peningkatan lebih lanjut. Evaluasi kualitatif terhadap dampak dari program-program ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.



3.3.4. Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP



Gambar 29. Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP

Grafik tersebut menunjukkan data jumlah kegiatan pembinaan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kabupaten Jayawijaya. Data ini mencakup dua tahun, yaitu 2023 dan 2024, dan menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk ketiga kategori tersebut selama dua tahun berturut-turut. Semua kategori menunjukkan angka nol untuk kedua tahun tersebut.

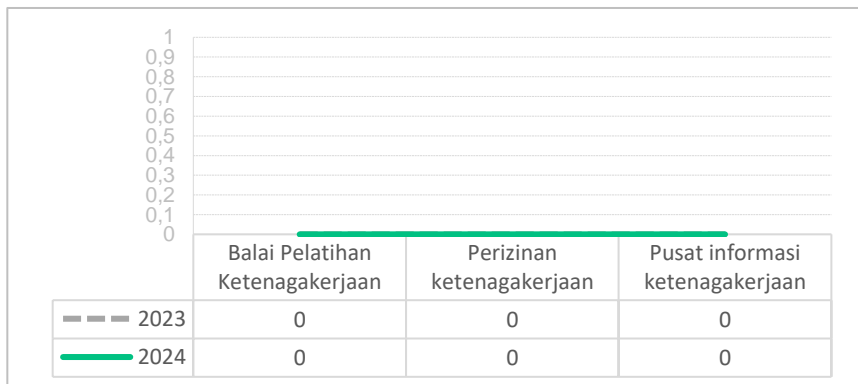
Penekanan penting dari data ini adalah tidak adanya kegiatan pembinaan bagi LSM, Ormas, dan OKP di Kabupaten Jayawijaya. Hal ini bisa menunjukkan beberapa hal: mungkin ada kekurangan dana atau sumber daya untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, atau mungkin ada perubahan prioritas kebijakan yang mengalihkan fokus dari pengembangan organisasi-organisasi ini. Selain itu, bisa juga ada



tantangan dalam implementasi program-program pembinaan yang menyebabkan tidak adanya kegiatan yang tercatat.

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa meskipun stabilitas angka dapat diartikan sebagai tidak adanya penurunan dalam jumlah kegiatan, ketidakadaan kegiatan pembinaan juga bisa menjadi indikasi bahwa organisasi-organisasi ini tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk berkembang dan berkontribusi secara efektif dalam masyarakat. Penting untuk mengevaluasi lebih lanjut mengapa tidak ada kegiatan pembinaan yang dilakukan dan mencari solusi untuk memastikan bahwa LSM, Ormas, dan OKP dapat menerima dukungan yang mereka butuhkan untuk berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Evaluasi ini bisa mencakup peninjauan kembali alokasi anggaran, kebijakan, dan strategi implementasi program pembinaan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

3.3.5. Jumlah Pelayanan Ketenagakerjaan



Gambar 30. Jumlah Pelayanan Ketenagakerjaan



Grafik di atas menunjukkan data jumlah Pelayanan Ketenagakerjaan di Kabupaten Jayawijaya. Data ini mencakup dua tahun, yaitu 2023 dan 2024, dan dibagi menjadi tiga kategori: Balai Pelatihan Ketenagakerjaan, Perizinan Ketenagakerjaan, dan Pusat Informasi Ketenagakerjaan. Grafik ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan angka dari tahun ke tahun untuk ketiga kategori tersebut, dengan semua kategori menunjukkan angka nol untuk kedua tahun.

Penekanan penting dari data ini adalah tidak adanya pelayanan ketenagakerjaan yang tercatat di Kabupaten Jayawijaya selama dua tahun berturut-turut. Hal ini bisa menunjukkan beberapa hal: mungkin ada kekurangan dana atau sumber daya untuk melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan, atau mungkin ada perubahan prioritas kebijakan yang mengalihkan fokus dari pengembangan layanan ini. Selain itu, bisa juga ada tantangan dalam implementasi program-program ketenagakerjaan yang menyebabkan tidak adanya layanan yang tercatat.

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa meskipun stabilitas angka dapat diartikan sebagai tidak adanya penurunan dalam jumlah pelayanan, tidak adanya pelayanan ketenagakerjaan juga bisa menjadi indikasi bahwa masyarakat di Kabupaten Jayawijaya tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengakses informasi, pelatihan, dan perizinan ketenagakerjaan. Penting untuk mengevaluasi lebih lanjut mengapa tidak ada pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan dan mencari solusi untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menerima dukungan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja mereka. Evaluasi ini bisa mencakup peninjauan kembali alokasi anggaran, kebijakan, dan strategi implementasi program ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.



3.4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dinas ini bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana. Tugas pokok DP3AKB meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Fungsi utama dinas ini adalah meningkatkan peran serta perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana yang efektif. Selain itu, DP3AKB juga bertugas mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah.

Dalam konteks pencapaian visi dan misi Kabupaten Jayawijaya, DP3AKB memainkan peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri secara ekonomi, berkualitas, dan berbudaya. Melalui berbagai program seperti perlindungan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, peningkatan peran serta gender, serta pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling, DP3AKB berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Program keluarga berencana yang dijalankan oleh dinas ini juga berperan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, yang merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, DP3AKB juga aktif dalam program penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual, dan HIV/AIDS, yang bertujuan untuk meningkatkan

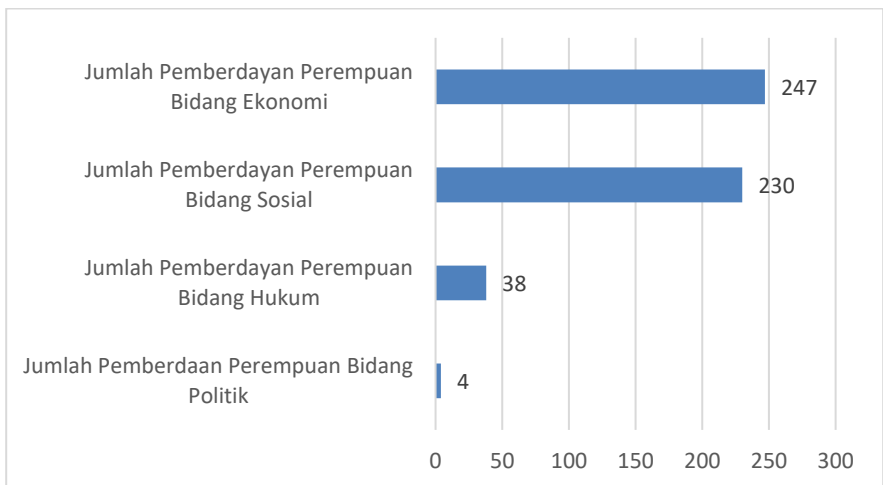


kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan berbagai upaya ini, DP3AKB berkomitmen untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Jayawijaya yang sejahtera, mandiri, berkualitas, dan berbudaya.

Adapun data sektoral yang disajikan sebagai berikut:

- 1) Jumlah Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Jumlah Pekerja Perempuan;
- 3) Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 4) Struktur Penduduk Perempuan Berdasarkan Pendidikan;
- 5) Jumlah Anak Tidak Bersekolah;
- 6) Jumlah Anak Tamatan SD/Sederajat;
- 7) Jumlah Anak Tamatan SMP/Sederajat;
- 8) Jumlah Anak Tamatan SMA/Sederajat

3.4.1. Jumlah Pemberdayaan Perempuan



Gambar 31. Jumlah Pemberdayaan Perempuan



Diagram di atas menunjukkan data jumlah pemberdayaan perempuan di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan beberapa bidang, yaitu Ekonomi, Sosial, Hukum, dan Politik. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa bidang Ekonomi memiliki jumlah inisiatif pemberdayaan perempuan tertinggi dengan 247 inisiatif, diikuti oleh bidang Sosial dengan 230 inisiatif. Bidang Hukum memiliki jumlah inisiatif yang jauh lebih sedikit, yaitu 38, dan bidang Politik memiliki jumlah inisiatif paling sedikit dengan hanya 4 inisiatif.

Analisis data ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Jayawijaya sangat terfokus pada bidang Ekonomi dan Sosial. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial perempuan di daerah tersebut. Namun, ketimpangan yang signifikan dalam jumlah inisiatif di bidang Hukum dan Politik menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan perhatian dan sumber daya di kedua bidang ini. Bidang Hukum, dengan hanya 38 inisiatif, menunjukkan bahwa perempuan mungkin masih menghadapi banyak hambatan dalam mendapatkan akses keadilan dan perlindungan hukum. Sementara itu, bidang Politik dengan hanya 4 inisiatif menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik masih sangat rendah, yang dapat menghambat representasi dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan publik.

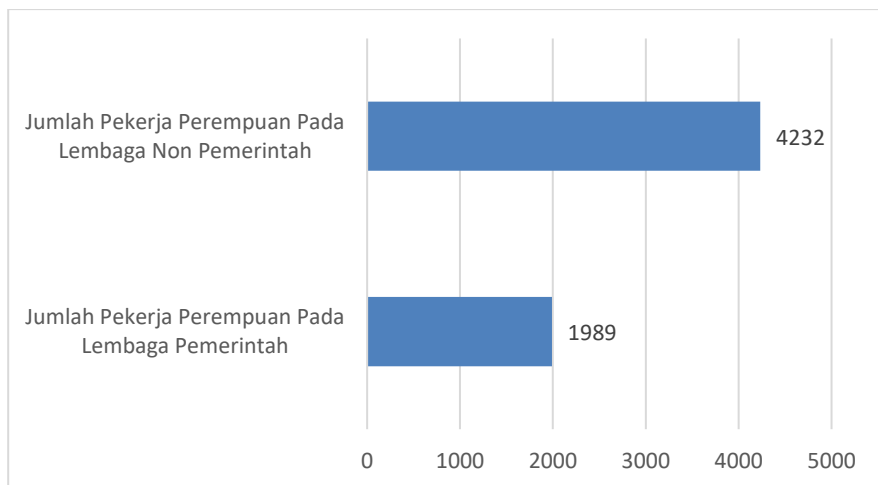
Untuk pengembangan program ke depan, disarankan agar Kabupaten Jayawijaya meningkatkan investasi dalam pendidikan hukum bagi perempuan, memastikan mereka memiliki akses yang lebih baik ke sistem hukum dan dukungan hukum. Program-program seperti klinik hukum, pelatihan paralegal, dan kampanye kesadaran hukum dapat membantu meningkatkan pemahaman dan akses perempuan terhadap hak-hak hukum mereka. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, perlu ada program pelatihan kepemimpinan



dan kampanye kesadaran yang menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik. Program mentoring dan dukungan bagi calon pemimpin perempuan juga dapat membantu meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat dalam politik.

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Jayawijaya telah membuat kemajuan signifikan dalam pemberdayaan perempuan di bidang Ekonomi dan Sosial, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan pemberdayaan yang seimbang di semua bidang. Dengan meningkatkan fokus pada bidang Hukum dan Politik, diharapkan dapat tercapai kesejahteraan dan kesetaraan gender yang lebih komprehensif di Kabupaten Jayawijaya.

3.4.2. Jumlah Pekerja Perempuan



Gambar 32. Jumlah Pekerja Perempuan



Diagram di atas menunjukkan data jumlah pekerja perempuan di berbagai lembaga di Kabupaten Jayawijaya, dengan perbandingan antara lembaga non-pemerintah dan lembaga pemerintah. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa jumlah pekerja perempuan di lembaga non-pemerintah jauh lebih tinggi, yaitu sebanyak 4232 pekerja, dibandingkan dengan lembaga pemerintah yang hanya memiliki 1989 pekerja perempuan.

Analisis data ini menunjukkan bahwa lembaga non-pemerintah di Kabupaten Jayawijaya lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan dibandingkan lembaga pemerintah. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti mungkin adanya lebih banyak peluang kerja di sektor non-pemerintah, atau mungkin juga karena sektor non-pemerintah lebih inklusif dan fleksibel dalam hal perekrutan tenaga kerja perempuan. Selain itu, bisa jadi lembaga non-pemerintah menawarkan lingkungan kerja yang lebih mendukung bagi perempuan, baik dari segi kebijakan maupun budaya kerja.

Untuk pengembangan program ke depan, penting bagi pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi perempuan dalam mengakses pekerjaan di lembaga pemerintah. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang ditujukan khusus bagi perempuan, sehingga mereka lebih siap dan kompetitif dalam pasar kerja. Selain itu, pemerintah juga bisa mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan yang lebih ramah perempuan, seperti fleksibilitas jam kerja, cuti melahirkan yang memadai, dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat membantu perempuan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.

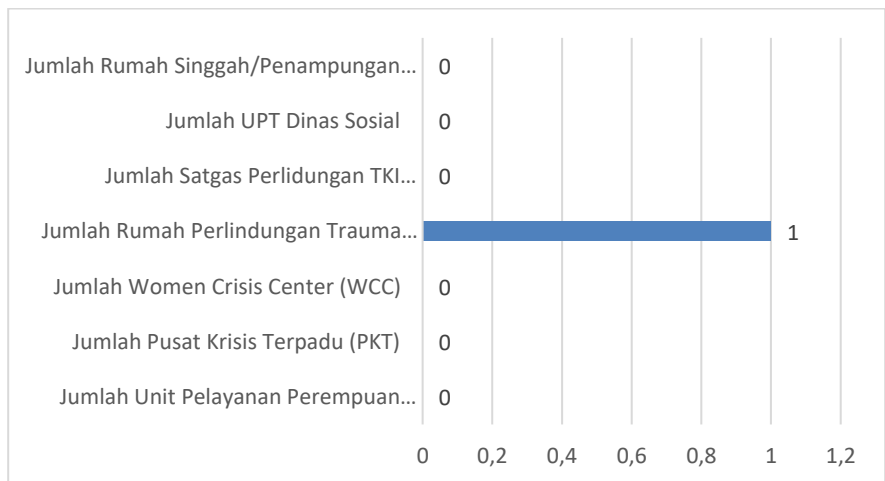
Selain itu, kampanye kesadaran dan advokasi juga penting untuk mendorong lebih banyak perempuan untuk mengejar karir di sektor pemerintah. Program mentoring dan dukungan bagi perempuan yang



ingin berkarir di sektor ini juga bisa menjadi langkah yang efektif. Dengan demikian, diharapkan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah dapat meningkat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Jayawijaya secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, meskipun lembaga non-pemerintah saat ini memimpin dalam hal jumlah pekerja perempuan, ada potensi besar untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah melalui strategi dan program yang tepat. Dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, Kabupaten Jayawijaya dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam pemberdayaan perempuan di berbagai sektor.

3.4.3. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak



Gambar 33. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Diagram di atas menunjukkan data jumlah lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023. Dari



grafik tersebut, terlihat bahwa terdapat beberapa kategori lembaga yang diukur, yaitu UPTD P2TP2A, Rumah Singgah/Dinas Sosial, Satgas Perlindungan TKI, Women Crisis Center (WCC), Pusat Krisis Terpadu (PKT), dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Namun, hanya Women Crisis Center (WCC) yang memiliki satu lembaga yang beroperasi, sementara kategori lainnya menunjukkan angka nol.

Analisis data ini mengungkapkan bahwa infrastruktur perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Jayawijaya masih sangat terbatas. Dengan hanya satu Women Crisis Center yang beroperasi, akses terhadap layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan sangat terbatas. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan dana, kurangnya kesadaran masyarakat, atau tantangan sosial-ekonomi lainnya yang dihadapi oleh daerah tersebut.

Untuk pengembangan program ke depan, sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mengamankan pendanaan yang memadai untuk mendirikan lebih banyak pusat krisis dan rumah singgah. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak melalui kampanye edukasi dan advokasi juga sangat penting. Pelatihan bagi tenaga profesional yang akan bekerja di lembaga-lembaga ini juga harus menjadi prioritas, agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks.

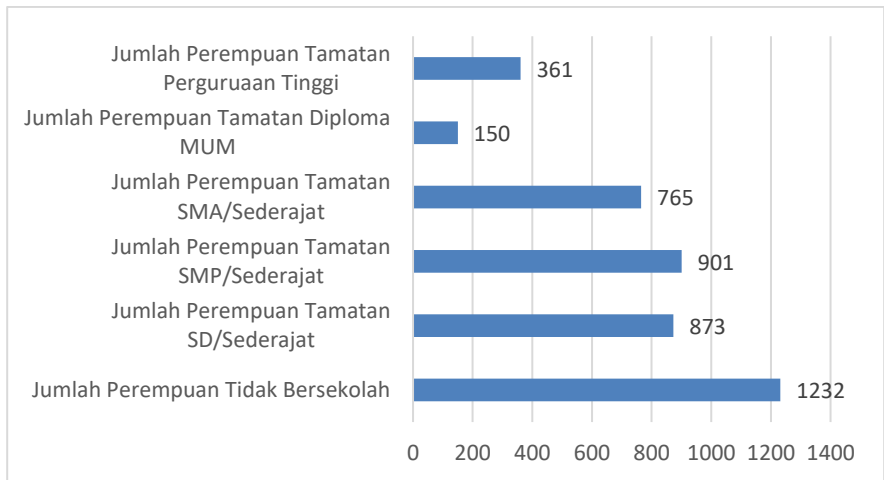
Selain itu, menjalin kemitraan dengan organisasi non-pemerintah yang memiliki keahlian di bidang perlindungan perempuan dan anak dapat membantu mempercepat pengembangan infrastruktur ini. Program-program seperti klinik hukum, layanan konseling, dan dukungan psikososial dapat diintegrasikan ke dalam layanan yang ada



untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif bagi perempuan dan anak yang membutuhkan.

Dengan meningkatkan jumlah dan kualitas lembaga perlindungan perempuan dan anak, Kabupaten Jayawijaya dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi populasi yang rentan ini. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam mencapai kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak anak, tetapi juga akan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

3.4.4. Struktur Penduduk Perempuan Berdasarkan Pendidikan



Gambar 34. Struktur Penduduk Perempuan Berdasarkan Pendidikan

Diagram di atas menunjukkan struktur penduduk perempuan berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023. Grafik ini mengelompokkan perempuan berusia di atas 18 tahun ke dalam lima kategori pendidikan: tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMA, tamatan Diploma, dan tidak bersekolah. Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan SMA adalah yang tertinggi, yaitu sebanyak 901 orang. Ini diikuti oleh



perempuan yang menyelesaikan pendidikan SMP sebanyak 873 orang, dan tamatan SD sebanyak 765 orang. Jumlah perempuan yang memiliki pendidikan Diploma jauh lebih rendah, hanya 150 orang, sementara jumlah perempuan yang tidak bersekolah mencapai 361 orang.

Analisis data ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan di Kabupaten Jayawijaya telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Namun, terdapat penurunan yang signifikan dalam jumlah perempuan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti Diploma. Selain itu, jumlah perempuan yang tidak bersekolah juga cukup tinggi, yang menunjukkan adanya tantangan dalam akses pendidikan bagi sebagian penduduk perempuan di daerah ini.

Untuk pengembangan program ke depan, penting bagi pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyediakan beasiswa dan bantuan finansial bagi perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program pelatihan vokasional dan keterampilan juga dapat menjadi alternatif bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikan formal, sehingga mereka tetap memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan peluang kerja dan kemandirian ekonomi.

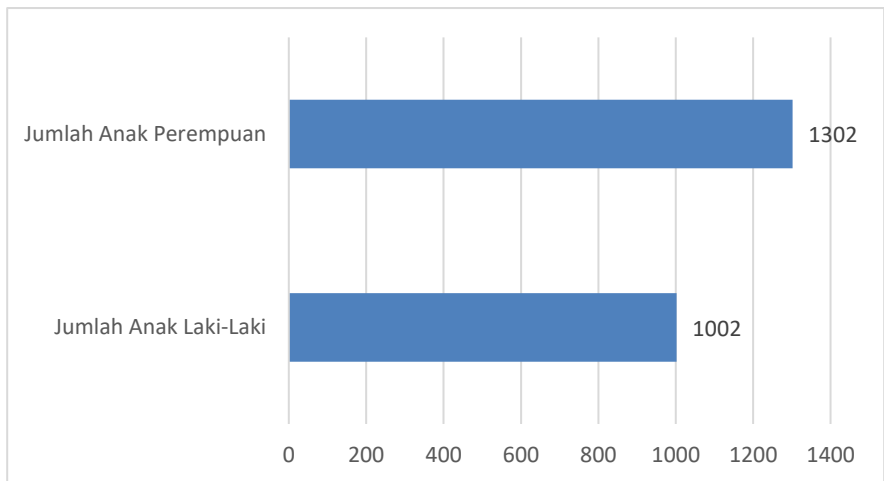
Selain itu, program literasi dewasa sangat penting untuk mengurangi jumlah perempuan yang tidak bersekolah. Program ini tidak hanya harus fokus pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga pada pengetahuan praktis yang dapat membantu perempuan berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan juga perlu ditingkatkan, dengan melibatkan komunitas lokal, keluarga, dan pemimpin masyarakat untuk mendukung pendidikan perempuan.

Dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercapai peningkatan yang signifikan dalam tingkat pendidikan



perempuan di Kabupaten Jayawijaya. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu perempuan, tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi daerah secara keseluruhan.

3.4.5. Jumlah Anak Tidak Bersekolah



Gambar 35. Jumlah Anak Tidak Bersekolah

Diagram di atas menunjukkan jumlah anak yang tidak bersekolah di Kabupaten Jayawijaya, dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa jumlah anak perempuan yang tidak bersekolah adalah 1302, sedangkan jumlah anak laki-laki yang tidak bersekolah adalah 1002. Perbedaan ini menunjukkan bahwa terdapat 300 anak perempuan lebih banyak yang tidak bersekolah dibandingkan anak laki-laki.

Analisis data ini mengungkapkan adanya ketimpangan gender dalam akses pendidikan di Kabupaten Jayawijaya. Jumlah anak perempuan yang tidak bersekolah lebih tinggi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk norma sosial yang mungkin lebih mendukung



pendidikan anak laki-laki, beban pekerjaan rumah tangga yang lebih besar pada anak perempuan, atau kurangnya fasilitas pendidikan yang ramah gender. Selain itu, faktor ekonomi juga bisa berperan, di mana keluarga dengan sumber daya terbatas mungkin lebih memilih untuk menyekolahkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.

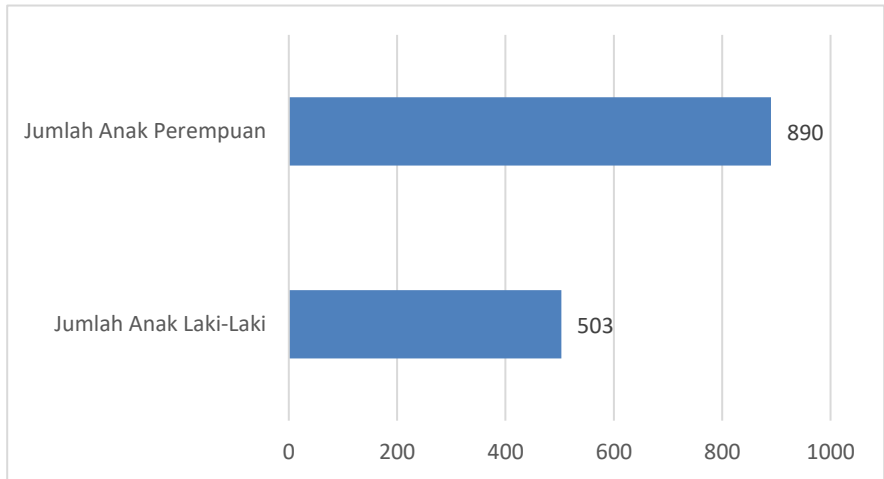
Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan bagi anak perempuan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyediakan beasiswa khusus untuk anak perempuan, yang dapat meringankan beban finansial keluarga dan mendorong mereka untuk menyekolahkan anak perempuan mereka. Selain itu, program kesadaran masyarakat yang menekankan pentingnya pendidikan bagi semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, juga sangat penting. Kampanye ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan media lokal untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya pendidikan yang setara.

Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas fasilitas pendidikan, termasuk pembangunan sekolah-sekolah di daerah terpencil dan penyediaan transportasi yang aman bagi anak-anak. Program pelatihan bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah gender juga dapat membantu mengurangi hambatan yang dihadapi anak perempuan dalam mengakses pendidikan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan jumlah anak yang tidak bersekolah di Kabupaten Jayawijaya dapat berkurang secara signifikan, dan kesetaraan gender dalam akses pendidikan dapat tercapai. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu anak-anak, tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi daerah secara keseluruhan.



3.4.6. Jumlah Anak Tamatan SD/Sederajat



Gambar 36. Jumlah Anak Tamatan SD/Sederajat

Diagram di atas menunjukkan jumlah anak yang telah menyelesaikan pendidikan SD atau sederajat di Kabupaten Jayawijaya, dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa jumlah anak perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan SD adalah 890, sedangkan jumlah anak laki-laki yang telah menyelesaikan pendidikan SD adalah 503. Perbedaan ini menunjukkan bahwa jumlah anak perempuan yang menyelesaikan pendidikan SD hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan anak laki-laki.

Analisis data ini mengungkapkan adanya ketimpangan gender dalam penyelesaian pendidikan dasar di Kabupaten Jayawijaya. Jumlah anak perempuan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan SD dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti mungkin adanya program atau kebijakan yang lebih mendukung pendidikan anak perempuan, atau mungkin juga karena anak laki-laki lebih banyak yang



terlibat dalam pekerjaan atau kegiatan lain yang menghambat mereka untuk menyelesaikan pendidikan dasar. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga bisa berperan dalam mempengaruhi tingkat penyelesaian pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan.

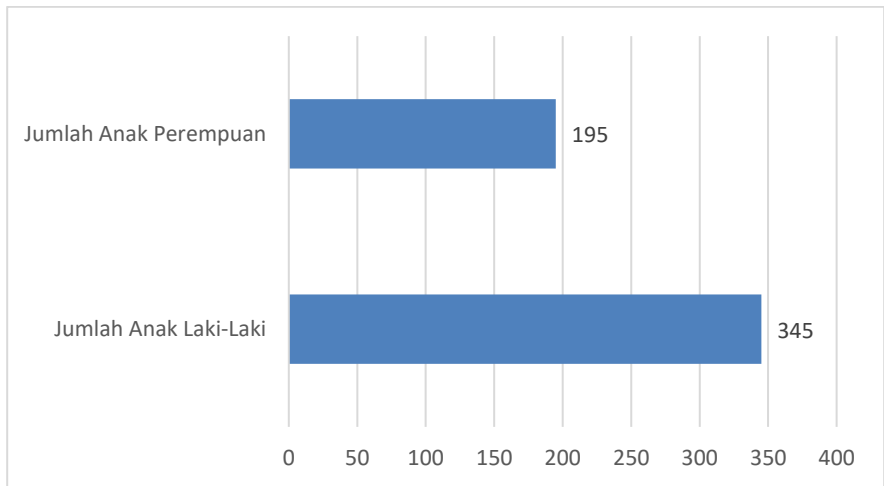
Untuk pengembangan program ke depan, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi anak laki-laki dalam menyelesaikan pendidikan dasar. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan program dukungan dan bimbingan bagi anak laki-laki, seperti program mentoring, bimbingan belajar, dan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu mereka tetap termotivasi dan fokus pada pendidikan. Selain itu, kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan dasar bagi semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, juga sangat penting. Kampanye ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan media lokal untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya pendidikan yang setara.

Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas fasilitas pendidikan, termasuk pembangunan sekolah-sekolah di daerah terpencil dan penyediaan transportasi yang aman bagi anak-anak. Program pelatihan bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah gender juga dapat membantu mengurangi hambatan yang dihadapi anak laki-laki dalam menyelesaikan pendidikan dasar.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan jumlah anak yang menyelesaikan pendidikan dasar di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkat secara signifikan, dan kesetaraan gender dalam akses pendidikan dapat tercapai. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu anak-anak, tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi daerah secara keseluruhan.



3.3.7. Jumlah Anak Tamatan SMP/Sederajat



Gambar 37. Jumlah Anak Tamatan SMP/Sederajat

Diagram di atas menunjukkan jumlah anak yang telah menyelesaikan pendidikan SMP atau sederajat di Kabupaten Jayawijaya, dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa jumlah anak laki-laki yang telah menyelesaikan pendidikan SMP adalah 345, sedangkan jumlah anak perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan SMP adalah 195. Perbedaan ini menunjukkan bahwa jumlah anak laki-laki yang menyelesaikan pendidikan SMP lebih banyak dibandingkan anak perempuan, dengan selisih 150 anak.

Analisis data ini mengungkapkan adanya ketimpangan gender dalam penyelesaian pendidikan menengah pertama di Kabupaten Jayawijaya. Jumlah anak perempuan yang lebih rendah dalam menyelesaikan pendidikan SMP dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti norma sosial yang mungkin lebih mendukung pendidikan anak laki-laki, beban pekerjaan rumah tangga yang lebih besar pada anak



perempuan, atau kurangnya fasilitas pendidikan yang ramah gender. Selain itu, faktor ekonomi juga bisa berperan, di mana keluarga dengan sumber daya terbatas mungkin lebih memilih untuk menyekolahkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.

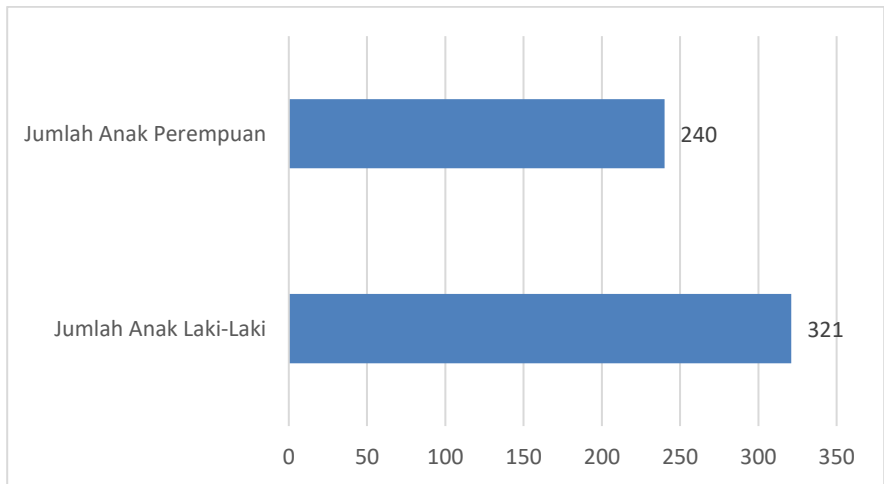
Untuk pengembangan program ke depan, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi anak perempuan dalam menyelesaikan pendidikan menengah pertama. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyediakan beasiswa khusus untuk anak perempuan, yang dapat meringankan beban finansial keluarga dan mendorong mereka untuk menyekolahkan anak perempuan mereka. Selain itu, program kesadaran masyarakat yang menekankan pentingnya pendidikan bagi semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, juga sangat penting. Kampanye ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan media lokal untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya pendidikan yang setara.

Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas fasilitas pendidikan, termasuk pembangunan sekolah-sekolah di daerah terpencil dan penyediaan transportasi yang aman bagi anak-anak. Program pelatihan bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah gender juga dapat membantu mengurangi hambatan yang dihadapi anak perempuan dalam menyelesaikan pendidikan menengah pertama.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan jumlah anak yang menyelesaikan pendidikan menengah pertama di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkat secara signifikan, dan kesetaraan gender dalam akses pendidikan dapat tercapai. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu anak-anak, tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi daerah secara keseluruhan.



3.3.8. Jumlah Anak Tamatan SMA/Sederajat



Gambar 38. Jumlah Tamatan SMA/Sederajat

Diagram di atas menunjukkan jumlah anak yang telah menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023, dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa jumlah anak laki-laki yang telah menyelesaikan pendidikan SMA adalah 321, sedangkan jumlah anak perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan SMA adalah 240. Perbedaan ini menunjukkan bahwa jumlah anak laki-laki yang menyelesaikan pendidikan SMA lebih banyak dibandingkan anak perempuan, dengan selisih 81 anak.

Analisis data ini mengungkapkan adanya ketimpangan gender dalam penyelesaian pendidikan menengah atas di Kabupaten Jayawijaya. Jumlah anak perempuan yang lebih rendah dalam menyelesaikan pendidikan SMA dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti norma sosial yang mungkin lebih mendukung pendidikan anak laki-laki, beban pekerjaan rumah tangga yang lebih besar pada anak perempuan, atau



kurangnya fasilitas pendidikan yang ramah gender. Selain itu, faktor ekonomi juga bisa berperan, di mana keluarga dengan sumber daya terbatas mungkin lebih memilih untuk menyekolahkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.

Untuk pengembangan program ke depan, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi anak perempuan dalam menyelesaikan pendidikan menengah atas. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyediakan beasiswa khusus untuk anak perempuan, yang dapat meringankan beban finansial keluarga dan mendorong mereka untuk menyekolahkan anak perempuan mereka. Selain itu, program kesadaran masyarakat yang menekankan pentingnya pendidikan bagi semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, juga sangat penting. Kampanye ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan media lokal untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya pendidikan yang setara.

Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas fasilitas pendidikan, termasuk pembangunan sekolah-sekolah di daerah terpencil dan penyediaan transportasi yang aman bagi anak-anak. Program pelatihan bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah gender

3.4. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Kabupaten Jayawijaya

A. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya

Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Dinas ini bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya. Tugas pokok Dinas Kesehatan

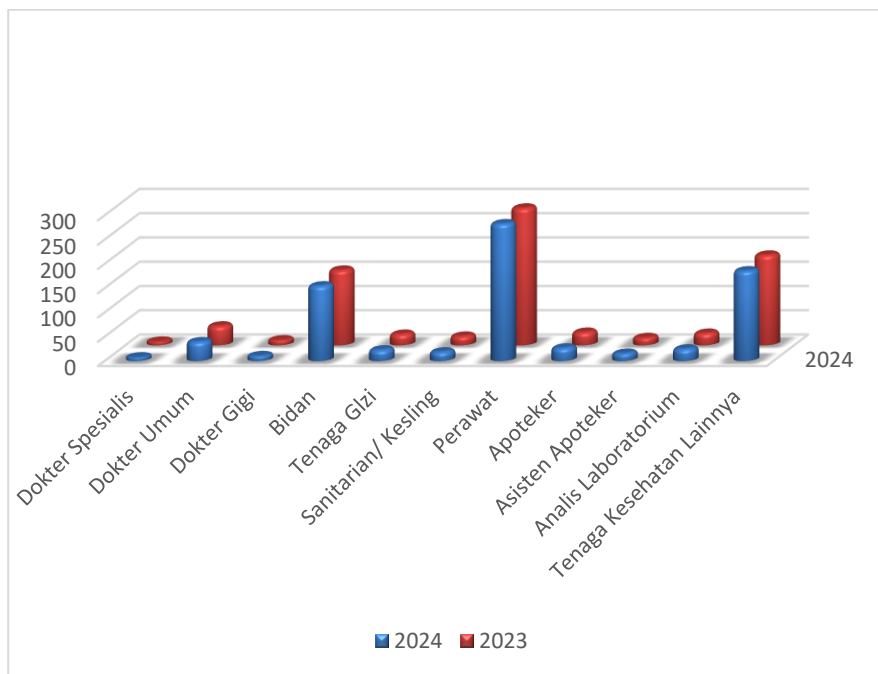


meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program-program kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Fungsi utama dinas ini mencakup penyusunan kebijakan teknis di bidang kesehatan, pelaksanaan pelayanan kesehatan, pengelolaan sumber daya kesehatan, serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan kesehatan.

Dalam mencapai visi Kabupaten Jayawijaya, yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, Dinas Kesehatan berperan aktif melalui berbagai program dan kegiatan strategis. Misi dinas ini antara lain meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, merata, dan terjangkau, serta mendorong kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dengan komitmen yang kuat, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya terus berupaya meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan kesehatan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera di Kabupaten Jayawijaya.

Adapun data sektoral yang disajikan berupa:

1. Jumlah Tenaga Kesehatan;
2. Jumlah Fasilitas Kesehatan;
3. Angka Kelahiran;
4. Cakupan Imunisasi;
5. Jumlah Pelayanan Bayi;
6. Jumlah Tenaga Kesehatan



Gambar 39. Jumlah Tenaga Kesehatan

Diagram di atas menunjukkan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024, dengan kategori tenaga kesehatan yang mencakup Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Tenaga Gizi, Sanitarian/Kesling, Perawat, Apoteker, Asisten Apoteker, Analisis Laboratorium, dan Tenaga Kesehatan Lainnya. Berdasarkan data yang diberikan, jumlah tenaga kesehatan di setiap kategori tidak mengalami perubahan dari tahun 2023 ke 2024. Jumlah Dokter Spesialis adalah 8 orang, Dokter Umum 40 orang, Dokter Gigi 11 orang, Bidan 155 orang, Tenaga Gizi 23 orang, Sanitarian/Kesling 19 orang, Perawat 283 orang, Apoteker 27 orang, Asisten Apoteker 16 orang, Analisis Laboratorium 25 orang, dan Tenaga Kesehatan Lainnya 186 orang.



Analisis data ini menunjukkan bahwa Perawat merupakan kelompok tenaga kesehatan terbesar di Kabupaten Jayawijaya, dengan jumlah mencapai 283 orang. Hal ini menunjukkan adanya fokus yang kuat pada layanan perawatan pasien. Bidan juga memiliki jumlah yang signifikan, yaitu 155 orang, yang mencerminkan pentingnya layanan kesehatan maternal di daerah ini. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya yang mencapai 186 orang menunjukkan bahwa ada berbagai jenis tenaga kesehatan yang berperan dalam mendukung sistem kesehatan di Jayawijaya.

Jumlah Dokter Umum yang mencapai 40 orang dan Dokter Gigi sebanyak 11 orang menunjukkan bahwa layanan kesehatan dasar dan gigi juga mendapat perhatian yang cukup. Jumlah Apoteker dan Asisten Apoteker yang masing-masing 27 dan 16 orang menunjukkan adanya kapasitas yang memadai untuk pengelolaan obat-obatan. Selain itu, keberadaan 25 Analis Laboratorium menunjukkan bahwa kapasitas diagnostik juga diperhatikan.

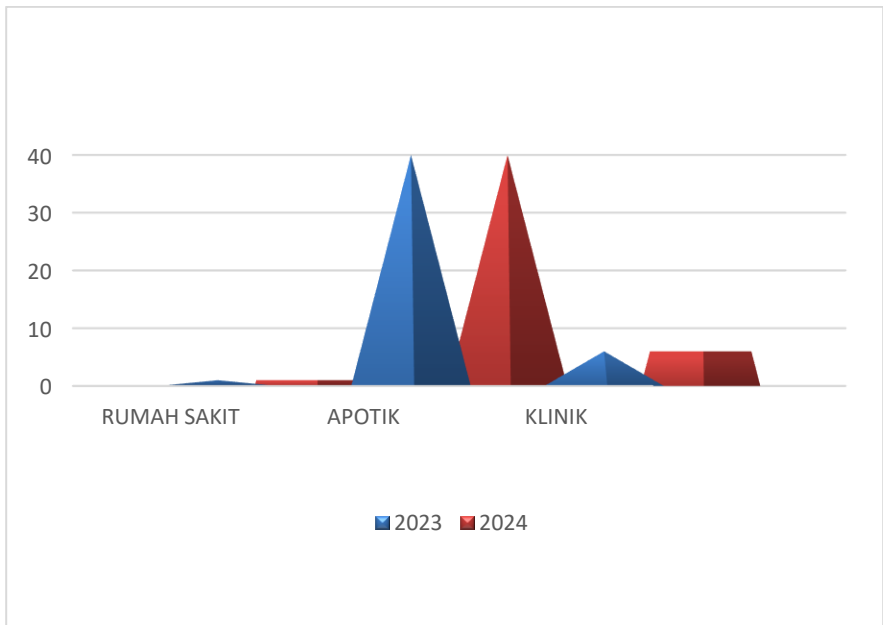
Secara keseluruhan, data ini mencerminkan upaya Kabupaten Jayawijaya dalam mempertahankan jumlah tenaga kesehatan yang memadai di berbagai bidang untuk memastikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat. Meskipun tidak ada perubahan jumlah dari tahun 2023 ke 2024, keberadaan tenaga kesehatan yang cukup di berbagai kategori ini penting untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Jayawijaya dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar Kabupaten Jayawijaya terus meningkatkan pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga kesehatan yang ada, serta merekrut lebih banyak tenaga kesehatan untuk mengisi kekurangan di bidang-bidang tertentu. Selain itu, peningkatan fasilitas kesehatan dan teknologi medis juga penting untuk mendukung kinerja tenaga kesehatan. Program-program



kesehatan preventif dan promotif harus terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya dapat terus meningkat dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

3.4.7. Jumlah Fasilitas Kesehatan



Gambar 40. Jumlah Fasilitas Kesehatan

Diagram tersebut menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024, dengan kategori fasilitas kesehatan yang mencakup Rumah Sakit, Apotek, dan Klinik. Berdasarkan data yang diberikan, jumlah fasilitas kesehatan di setiap kategori tidak mengalami perubahan dari tahun 2023 ke 2024. Jumlah



Rumah Sakit adalah 1 unit, Apotek sebanyak 40 unit, dan Klinik sebanyak 6 unit.

Analisis data ini menunjukkan bahwa jumlah Apotek adalah yang terbanyak di antara ketiga kategori fasilitas kesehatan, dengan 40 unit yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap obat-obatan dan layanan farmasi cukup memadai bagi masyarakat. Jumlah Klinik yang mencapai 6 unit menunjukkan adanya beberapa pusat layanan kesehatan primer yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan perawatan dasar. Sementara itu, hanya terdapat 1 unit Rumah Sakit, yang mungkin menjadi pusat rujukan utama untuk kasus-kasus yang memerlukan perawatan lebih intensif dan spesialis.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan upaya Kabupaten Jayawijaya dalam mempertahankan jumlah fasilitas kesehatan yang ada untuk memastikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Namun, dengan tidak adanya perubahan jumlah fasilitas dari tahun 2023 ke 2024, penting untuk mengevaluasi apakah jumlah dan distribusi fasilitas kesehatan saat ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar Kabupaten Jayawijaya mempertimbangkan penambahan jumlah Klinik dan Rumah Sakit, terutama di daerah-daerah yang mungkin masih kurang terlayani. Peningkatan jumlah Klinik dapat membantu memperluas akses layanan kesehatan primer, sementara penambahan Rumah Sakit atau peningkatan kapasitas Rumah Sakit yang ada dapat memastikan bahwa layanan kesehatan yang lebih kompleks dan spesialis dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas layanan di fasilitas yang ada melalui pelatihan tenaga kesehatan, peningkatan fasilitas dan peralatan medis, serta integrasi teknologi



kesehatan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya.

3.4.8. Angka Kelahiran



Gambar 41. Angka Kelahiran

Diagram tersebut menunjukkan angka kelahiran dan kematian di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan data yang diberikan, pada tahun 2023 jumlah angka kelahiran mencapai 654 dan angka kematian mencapai 38. Sementara itu, pada tahun 2024, angka kelahiran menurun drastis menjadi 123 dan angka kematian juga menurun menjadi 1. Perbedaan yang signifikan ini terlihat jelas pada diagram, di mana bar biru yang mewakili angka kelahiran dan bar merah yang mewakili angka kematian menunjukkan penurunan yang tajam dari tahun 2023 ke 2024.

Analisis data ini menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifikan dalam angka kelahiran dari 654 pada tahun 2023 menjadi



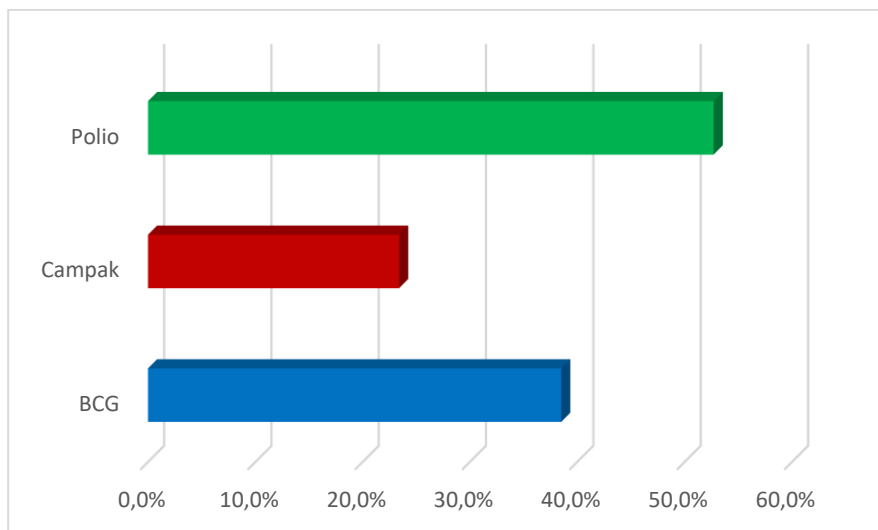
hanya 123 pada tahun 2024. Penurunan ini lebih dari lima kali lipat, yang mungkin mencerminkan perubahan besar dalam dinamika populasi, kebijakan kesehatan, atau faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi keputusan keluarga untuk memiliki anak. Di sisi lain, angka kematian juga menunjukkan penurunan dari 38 menjadi 1, yang bisa menunjukkan peningkatan dalam layanan kesehatan atau kondisi hidup yang lebih baik yang mengurangi angka kematian.

Penurunan angka kelahiran yang drastis ini memerlukan perhatian khusus. Jika penurunan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti migrasi keluar, perubahan kebijakan keluarga berencana, atau kondisi ekonomi yang memburuk, maka perlu ada intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, program-program yang mendukung keluarga muda dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dapat membantu meningkatkan angka kelahiran kembali. Selain itu, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan maternal dan anak juga penting untuk memastikan bahwa setiap kelahiran dapat ditangani dengan baik dan aman.

Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar Kabupaten Jayawijaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi angka kelahiran dan kematian. Program-program yang mendukung kesehatan ibu dan anak, serta kebijakan yang mendorong kesejahteraan keluarga, dapat membantu menstabilkan angka kelahiran. Selain itu, penting untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk mempertahankan angka kematian yang rendah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Jayawijaya dapat mencapai keseimbangan yang sehat dalam dinamika populasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.



3.4.9. Cakupan Imunisasi



Gambar 42. Cakupan Imunisasi

Diagram tersebut menunjukkan cakupan imunisasi di Kabupaten Jayawijaya untuk tiga jenis vaksin: Polio, Campak (Measles), dan BCG. Berdasarkan data yang diberikan, cakupan imunisasi Polio mencapai 52,7%, cakupan imunisasi Campak sebesar 23,4%, dan cakupan imunisasi BCG sebesar 38,5%. Diagram ini menggambarkan bahwa cakupan imunisasi Polio adalah yang tertinggi di antara ketiga jenis vaksin tersebut, sementara cakupan imunisasi Campak adalah yang terendah.

Analisis data ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah populasi target telah menerima vaksin Polio, yang merupakan indikator positif bahwa program imunisasi Polio di Jayawijaya relatif berhasil. Namun, cakupan imunisasi Campak yang hanya mencapai 23,4% menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam mencapai target imunisasi untuk penyakit ini. Rendahnya cakupan imunisasi Campak bisa disebabkan



oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses ke layanan kesehatan, kekurangan pasokan vaksin, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi, atau bahkan resistensi budaya terhadap vaksinasi.

Cakupan imunisasi BCG yang mencapai 38,5% menunjukkan bahwa meskipun lebih baik daripada Campak, masih ada ruang untuk perbaikan. BCG adalah vaksin penting untuk mencegah tuberkulosis, dan cakupan yang lebih tinggi akan membantu mengurangi insiden penyakit ini di Jayawijaya.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan cakupan imunisasi di Kabupaten Jayawijaya antara lain:

1. **Kampanye Edukasi dan Kesadaran:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi melalui kampanye edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan media lokal. Informasi yang jelas dan akurat tentang manfaat vaksinasi dan risiko penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin perlu disebarluaskan.
2. **Peningkatan Akses Layanan Kesehatan:** Memperluas jangkauan layanan kesehatan dengan mendirikan pos-pos imunisasi di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Penggunaan klinik keliling atau program imunisasi door-to-door dapat membantu mencapai populasi yang lebih luas.
3. **Penguatan Rantai Pasokan Vaksin:** Memastikan ketersediaan vaksin yang cukup dan distribusi yang efisien ke seluruh wilayah Jayawijaya. Ini termasuk menjaga rantai dingin untuk memastikan vaksin tetap efektif sampai ke penerima.
4. **Pelatihan Tenaga Kesehatan:** Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan tentang teknik imunisasi



yang benar, manajemen vaksin, dan cara berkomunikasi dengan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi.

5. **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap program imunisasi untuk mengidentifikasi hambatan dan mengukur kemajuan. Data yang akurat dan terkini akan membantu dalam perencanaan dan penyesuaian strategi imunisasi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan cakupan imunisasi di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkat, sehingga melindungi lebih banyak anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

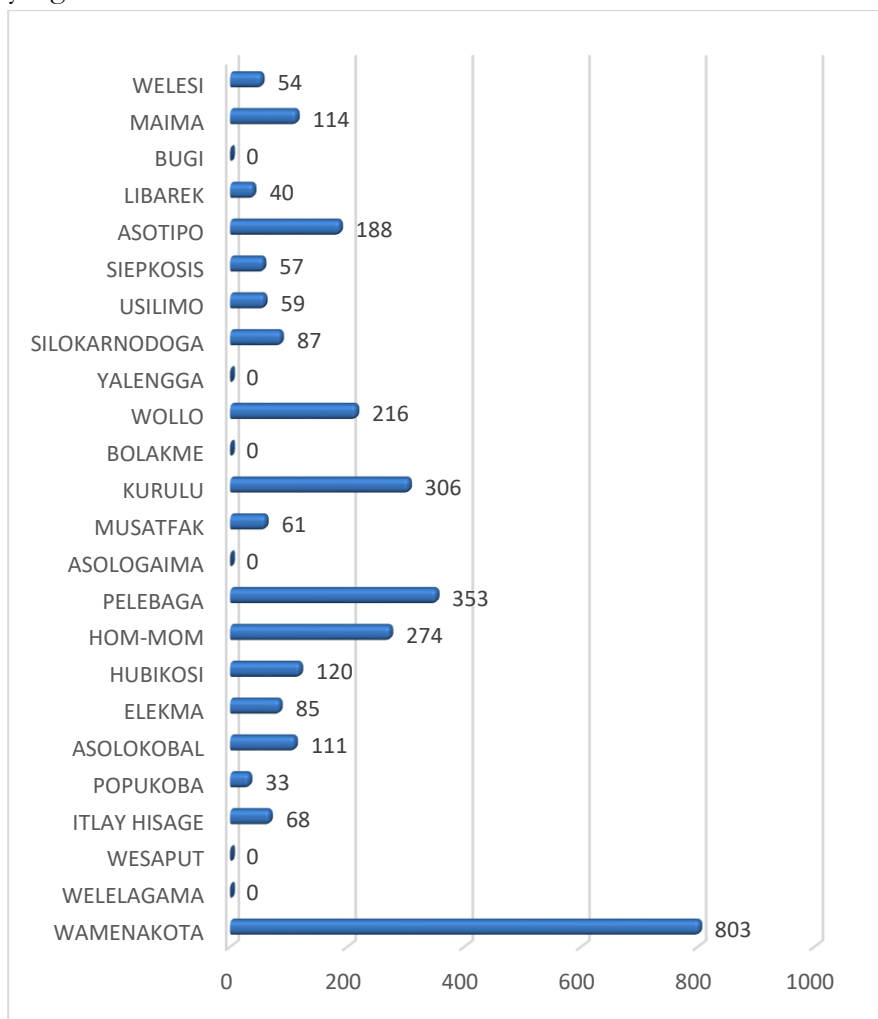
3.4.10. Jumlah Pelayanan Bayi

Gambar 43. menunjukkan jumlah pelayanan bayi di Kabupaten Jayawijaya yang dibagi berdasarkan distrik. Berdasarkan data yang diberikan, jumlah pelayanan bayi di setiap distrik bervariasi secara signifikan. Distrik Wamena Kota memiliki jumlah pelayanan bayi tertinggi dengan 803 layanan, diikuti oleh distrik Pelebaga dengan 353 layanan, dan distrik Kurulu dengan 306 layanan. Di sisi lain, beberapa distrik seperti Bugi, Yalengga, Bolakme, Asologaima, Wesaput, dan Walelagama tidak melaporkan adanya pelayanan bayi sama sekali.

Analisis data ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam distribusi pelayanan bayi di Kabupaten Jayawijaya. Distrik-distrik dengan jumlah pelayanan bayi yang tinggi seperti Wamena Kota, Pelebaga, dan Kurulu mungkin memiliki akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan atau memiliki populasi yang lebih besar yang membutuhkan layanan tersebut. Sebaliknya, distrik-distrik dengan jumlah pelayanan bayi yang rendah atau nol mungkin menghadapi



tantangan dalam akses ke layanan kesehatan atau kekurangan fasilitas yang memadai.



Gambar 43. Jumlah Pelayanan Bayi

Beberapa distrik dengan jumlah pelayanan bayi yang cukup signifikan termasuk Maima (114), Asotipo (188), Wollo (216), Hom-



Hom (274), dan Hubikosi (120). Distrik-distrik ini menunjukkan bahwa ada upaya yang cukup baik dalam menyediakan layanan kesehatan bayi, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pelayanan bayi di Kabupaten Jayawijaya antara lain:

1. **Peningkatan Akses Layanan Kesehatan:** Memperluas jangkauan layanan kesehatan dengan mendirikan pos-pos pelayanan bayi di daerah-daerah yang saat ini tidak terlayani. Penggunaan klinik keliling atau program pelayanan door-to-door dapat membantu mencapai populasi yang lebih luas.
2. **Peningkatan Fasilitas Kesehatan:** Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan di distrik-distrik yang saat ini memiliki jumlah pelayanan bayi yang rendah. Ini termasuk pembangunan puskesmas baru dan peningkatan fasilitas yang sudah ada.
3. **Pelatihan Tenaga Kesehatan:** Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan tentang teknik pelayanan bayi yang benar dan manajemen kesehatan bayi. Ini akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
4. **Kampanye Edukasi dan Kesadaran:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan bayi melalui kampanye edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan media lokal. Informasi yang jelas dan akurat tentang manfaat pelayanan kesehatan bayi perlu disebarluaskan.
5. **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap program pelayanan bayi untuk



mengidentifikasi hambatan dan mengukur kemajuan. Data yang akurat dan terkini akan membantu dalam perencanaan dan penyesuaian strategi pelayanan bayi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan bayi di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkat, sehingga memberikan perlindungan dan perawatan yang lebih baik bagi bayi dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

B. Rumah Sakit Umum Kabupaten Jayawijaya

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jayawijaya, yang terletak di Jl. Trikora No. 9, Wamena, adalah fasilitas kesehatan utama di wilayah ini. RSUD Jayawijaya berfungsi sebagai pusat rujukan bagi masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya, menyediakan berbagai layanan kesehatan mulai dari rawat inap, rawat jalan, hingga layanan gawat darurat. Rumah sakit ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas medis dan didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten, termasuk dokter spesialis, perawat, dan tenaga medis lainnya.

RSUD Jayawijaya memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi utama, antara lain:

- a. Pelayanan Kesehatan: Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas, termasuk pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- b. Penyembuhan dan Pemulihan: Mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan pasien melalui berbagai layanan medis dan rehabilitasi.
- c. Pencegahan dan Promosi Kesehatan: Melakukan upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan melalui edukasi dan kampanye kesehatan kepada masyarakat.



- d. Pelayanan Rujukan: Menjadi pusat rujukan bagi fasilitas kesehatan lain di wilayah Jayawijaya dan sekitarnya.
- e. Pendidikan dan Pelatihan: Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan.
- f. Penelitian dan Pengembangan: Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi medis.

RSUD Jayawijaya berperan penting dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Jayawijaya, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang optimal. Beberapa peran utama RSUD Jayawijaya dalam mendukung visi dan misi tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan Akses Kesehatan: Dengan menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, RSUD Jayawijaya membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah ini.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan: Melalui peningkatan fasilitas dan kompetensi tenaga kesehatan, RSUD Jayawijaya berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, yang sejalan dengan misi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima.
- c. Edukasi dan Promosi Kesehatan: RSUD Jayawijaya aktif dalam melakukan edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat, membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit.
- d. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah: RSUD Jayawijaya bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam berbagai program kesehatan, termasuk program pencegahan stunting, imunisasi, dan penanganan



penyakit menular, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan peran-peran tersebut, RSUD Jayawijaya tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Jayawijaya untuk menciptakan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.

Adapun data sektoral yang disajikan sebagai berikut:

- 1) Jumlah Pusat Pelayanan Kesehatan
- 2) Jumlah SDM Kesehatan
- 3) Kesehatan Masyarakat

3.4.11. Jumlah Pusat Pelayanan Kesehatan

Tabel 13. Jumlah Pusat Pelayanan Kesehatan

<i>Jenis Pusat Pelayanan Kesehatan</i>	Tahun	
<i>1. Jumlah Rumah Sakit (Unit)</i>	2023	2024
1. Rumah Sakit Umum Daerah	0	0
1. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe A (Unit)	0	0
2. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B (Unit)	0	0
3. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C (Unit)	1	1
4. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D (Unit)	0	0
5. Rumah Sakit Umum Daerah Tipe E	0	0
1 Jumlah Rumah Sakit Bersalin (Unit)	0	0
2 Jumlah Rumah Sakit Jiwa (Unit)	0	0
3 Jumlah Rumah Sakit Mata (Unit)	0	0
4 Jumlah Rumah Sakit Kusta (Unit)	0	0
5 Jumlah Rumah Sakit Ketergantungan Obat (Unit)	0	0
2. Jumlah Rumah Sakit Swasta (Unit)	0	0
3. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) (Unit)	0	0
<i>2. Puskesmas/ Pustu/ Poliklinik/ Posyandu/ Pos Kesehatan Desa</i>	0	0



1. Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap (Unit)	0	0
2. Jumlah Puskesmas Rawat Inap (Unit)	0	0
3. Jumlah Puskesmas Pembantu (Unit)	0	0
4. Jumlah Poliklinik (Unit)	0	0
5. Jumlah Posyandu (Unit)	0	0
6. Jumlah Posyandu Pratama (Unit)	0	0
7. Jumlah Posyandu Madya (Unit)	0	0
8. Jumlah Posyandu Purnama (Unit)	0	0
9. Jumlah Posyandu Mandiri (Unit)	0	0
10. Jumlah Balai Kesehatan Masyarakat (Unit)	0	0
11. Jumlah Pos Kesehatan Desa (Unit)	0	0

Tabel yang ditampilkan menunjukkan rincian jumlah pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Tabel ini mencakup berbagai jenis pusat kesehatan, termasuk rumah sakit umum daerah, rumah sakit bersalin, rumah sakit jiwa, rumah sakit mata, rumah sakit kusta, rumah sakit ketergantungan obat, rumah sakit swasta, rumah sakit umum pusat (RSUP), puskesmas, pustu, poliklinik, posyandu, dan balai kesehatan masyarakat. Dari semua jenis pusat kesehatan yang tercatat, hanya ada satu jenis rumah sakit yang terdaftar, yaitu Rumah Sakit Tipe C, dengan jumlah satu unit baik pada tahun 2023 maupun 2024.

Identifikasi angka dalam tabel menunjukkan bahwa jumlah Rumah Sakit Tipe C tetap konstan dengan satu unit. Selain itu, tidak ada perubahan signifikan dalam jumlah pusat kesehatan lainnya dari tahun 2023 ke 2024. Misalnya, jumlah puskesmas non-rawat inap, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, poliklinik, posyandu, posyandu pratama, posyandu madya, posyandu purnama, posyandu mandiri, dan pos kesehatan desa semuanya tetap nol pada kedua tahun tersebut. Satu-satunya perubahan yang tercatat adalah peningkatan jumlah balai kesehatan masyarakat dari nol pada tahun 2023 menjadi satu unit pada tahun 2024.



Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya memiliki keterbatasan dalam jumlah dan jenis pusat kesehatan yang tersedia. Keberadaan hanya satu Rumah Sakit Tipe C menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang lebih kompleks dan spesialis mungkin kurang tersedia, yang dapat mempengaruhi kemampuan kabupaten untuk menangani kasus-kasus medis yang lebih serius. Selain itu, tidak adanya puskesmas rawat inap dan non-rawat inap, serta berbagai jenis posyandu, menunjukkan bahwa layanan kesehatan primer mungkin tidak cukup tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pusat kesehatan di Kabupaten Jayawijaya antara lain:

1. **Peningkatan Jumlah Rumah Sakit:** Menambah jumlah rumah sakit, terutama rumah sakit dengan tipe yang lebih tinggi seperti Tipe B atau Tipe A, untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih komprehensif dan spesialis.
2. **Pembangunan Puskesmas:** Mendirikan puskesmas rawat inap dan non-rawat inap di berbagai distrik untuk memastikan akses yang lebih luas ke layanan kesehatan primer.
3. **Pengembangan Posyandu:** Meningkatkan jumlah posyandu di desa-desa untuk menyediakan layanan kesehatan ibu dan anak yang lebih baik.
4. **Peningkatan Fasilitas dan Peralatan Medis:** Memperbarui dan meningkatkan fasilitas serta peralatan medis di pusat kesehatan yang ada untuk memastikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
5. **Pelatihan Tenaga Kesehatan:** Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan.



6. **Kampanye Edukasi Kesehatan:** Melakukan kampanye edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan kesehatan dan pencegahan penyakit.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya, sehingga mencapai visi dan misi untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

3.4.12. Jumlah SDM Kesehatan

Tabel 14. Jumlah SDM Kesehatan

<i>Jenis Tenaga Kesehatan/Medic</i>		Tahun	
		2023	2024
1. <i>Tenaga Administrasi</i>		0	0
1. Laki-laki		55	53
2. Perempuan		63	63
2. <i>Tenaga IT</i>		0	0
1. Laki-laki		2	3
2. Perempuan		0	0
3. <i>Tenaga Medis Dokter</i>		0	0
1. Jumlah Dokter Umum (Orang)		0	0
1. Laki-laki		7	7
2. Perempuan		10	10
2. Jumlah Dokter Spesialis (Orang)		0	0
1. Laki-laki		11	10
2. Perempuan		10	10
3. Jumlah Dokter Gigi (Orang)		11	11
1. Laki-laki			
2. Perempuan			
4. Jumlah Dokter THT (Orang)		0	0
1. Laki-laki		1	1
2. Perempuan		0	0
5. Jumlah Dokter Anak (Orang)		0	0
1. Laki-laki		0	0



	2. Perempuan	2	2
6.	Jumlah Dokter Bedah (Orang)	0	0
	1. Laki-laki	2	2
	2. Perempuan	1	1
7.	Jumlah Dokter Penyakit Dalam (Orang)	0	0
	1. Laki-laki	1	1
	2. Perempuan	0	0
8.	Jumlah Dokter Mata (Orang)	0	0
	1. Laki-laki	1	1
	2. Perempuan	0	0
9.	Jumlah Dokter Bedah (Orang)	0	0
	1. Laki-laki	0	0
	2. Perempuan	0	0
10.	Jumlah Dokter Saraf (Orang)	0	0
	1. Laki-laki	1	1
	2. Perempuan	0	0
11.	Jumlah Dokter Spesialis Kebidanan (Orang)	0	0
	1. Laki-laki	2	2
	2. Perempuan	1	1
12.	Jumlah Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik (Orang)	0	0
	1. Laki-laki	0	0
	2. Perempuan	1	1
13.	Dokter Spesialis Patologi Klinis	0	0
	1. Laki-laki	0	0
	2. Perempuan	2	2
4.	Tenaga Kebidanan/Keperawatan	0	0
	1. Jumlah Bidan (Orang)	0	0
	1. Laki-laki	0	0
	2. Perempuan	49	48
	2. Jumlah Perawat (Orang)	0	0
	1. Laki-laki	0	0
	2. Perempuan	118	116
	3. Jumlah Apoteker (Orang)	0	0
	1. Laki-laki	2	2
	2. Perempuan	11	11



4. Jumlah Tenaga Kefarmasian (Orang)	0	0
1. Laki-laki	4	4
2. Perempuan	9	9
5. Jumlah Tenaga Analis (Orang)	0	0
1. Laki-laki	5	5
2. Perempuan	11	10
5. Jumlah Tenaga Psikologi Klinis (Orang)	0	0
1. Laki-laki	0	0
2. Perempuan	0	0
6. Tenaga Kesehatan Masyarakat	0	0
1. Jumlah Epidemiolog Kesehatan (Orang)	0	0
1. Laki-laki	0	0
2. Perempuan	0	0
2. Jumlah Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	0	0
1. Laki-laki	0	0
2. Perempuan	0	0
3. Jumlah Pembimbing Kesehatan Kerja (Orang)	0	0
1. Laki-laki	0	0
2. Perempuan	0	0
4. Jumlah Tenaga Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan	0	0
1. Laki-laki	2	1
2. Perempuan	4	4
5. Jumlah Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga (Orang)	0	0
1. Laki-laki	0	0
2. Perempuan	0	0
7. Tenaga Kesehatan Lingkungan	0	0
1. Jumlah Tenaga Sanitasi Lingkungan (Orang)	0	0
1. Laki-laki	2	2
2. Perempuan	4	4
2. Jumlah Entomolog Kesehatan (Orang)	0	0
1. Laki-laki	0	0
2. Perempuan	3	3
3. Jumlah Mikrobiolog Kesehatan (Orang)	0	0
1. Laki-laki	0	0



2. Perempuan	0	0
8. Tenaga Gizi	0	0
1. Jumlah Nutrisionis (Orang)	0	0
1. Laki-laki	0	0
2. Perempuan	7	5
2. Jumlah Dietisien (Orang)	0	0
1. Laki-laki	0	0
2. Perempuan	0	0
9. Tenaga Kesehatan Tradisional	0	0
1. Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan (Orang)	0	0
1. Laki-laki	0	0
2. Perempuan	0	0
2. Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan (Orang)	0	0
1. Laki-laki	0	0
2. Perempuan	0	0

Tabel yang ditampilkan menunjukkan rincian jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Tabel ini mencakup berbagai kategori tenaga kesehatan, termasuk dokter umum, dokter spesialis (dibagi berdasarkan jenis kelamin), dokter gigi, dan bidan (juga dibagi berdasarkan jenis kelamin). Setiap kategori mencantumkan jumlah individu untuk masing-masing tahun.

Data tenaga kesehatan di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024 menunjukkan variasi dalam komposisi berdasarkan jenis kelamin dan kategori profesi. Tenaga Administrasi tercatat mengalami sedikit penurunan pada jumlah laki-laki, dari 55 orang di tahun 2023 menjadi 53 orang di tahun 2024, sementara jumlah perempuan tetap stabil di angka 63 orang untuk kedua tahun tersebut. Pada sektor Tenaga IT, terjadi peningkatan kecil pada jumlah laki-laki, dari 2 orang di tahun 2023 menjadi 3 orang di tahun 2024, sedangkan jumlah perempuan tetap nol selama dua tahun berturut-turut. Ini menunjukkan adanya



penambahan tenaga IT laki-laki, namun tidak ada peningkatan tenaga IT perempuan.

Untuk Tenaga Medis Dokter, jumlah dokter umum laki-laki dan perempuan tetap stabil dengan masing-masing 7 laki-laki dan 10 perempuan untuk kedua tahun. Dokter spesialis laki-laki mengalami penurunan dari 11 orang pada tahun 2023 menjadi 10 orang pada tahun 2024, sementara jumlah dokter spesialis perempuan tetap 10 orang. Menariknya, jumlah dokter gigi tercatat stabil pada angka 11 orang, namun data tidak menyediakan pembagian berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, jumlah dokter THT, dokter anak, dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter mata, dokter saraf, dokter spesialis kebidanan, dokter rehabilitasi medik, dan dokter patologi klinis menunjukkan sedikit perubahan atau tetap stabil.

Dalam kategori Tenaga Kebidanan dan Keperawatan, jumlah bidan perempuan mengalami penurunan dari 49 orang pada tahun 2023 menjadi 48 orang pada tahun 2024, sementara jumlah bidan laki-laki tetap nol. Jumlah perawat perempuan juga sedikit menurun dari 118 orang menjadi 116 orang, dengan jumlah laki-laki tetap nol. Untuk tenaga kefarmasian, jumlah laki-laki tetap di angka 4 orang, dan jumlah perempuan tetap 9 orang. Perlu juga dicatat bahwa jumlah apoteker laki-laki tetap di angka 2 orang, dan perempuan tetap 11 orang. Jumlah tenaga analis laki-laki dan perempuan sedikit menurun dari 11 orang pada tahun 2023 menjadi 10 orang pada tahun 2024 untuk perempuan, sedangkan laki-laki tetap di angka 5 orang.

Pada kategori Tenaga Psikologi Klinis, tidak terdapat tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan selama dua tahun tersebut. Jumlah tenaga kesehatan masyarakat juga tetap nol, menunjukkan tidak adanya epidemiolog, promotor kesehatan, pembimbing kesehatan kerja, atau tenaga kebijakan kesehatan selama dua tahun berturut-turut.



Pada sektor Tenaga Kesehatan Lingkungan, jumlah tenaga sanitasi lingkungan tetap stabil dengan 2 laki-laki dan 4 perempuan selama dua tahun. Jumlah entomolog kesehatan perempuan tetap 3 orang, dan tidak terdapat laki-laki. Tidak terdapat tenaga mikrobiolog kesehatan baik laki-laki maupun perempuan.

Di bidang gizi, jumlah nutrisisionis perempuan menurun dari 7 orang pada tahun 2023 menjadi 5 orang pada tahun 2024, dengan tidak ada nutrisisionis laki-laki. Tidak terdapat dietisien laki-laki maupun perempuan selama dua tahun tersebut. Untuk tenaga kesehatan tradisional, tidak terdapat tenaga kerja baik pada kategori ramuan maupun keterampilan.

Secara komprehensif, data ini menunjukkan adanya beberapa penurunan dan stabilitas jumlah tenaga kesehatan di berbagai kategori. Penurunan jumlah tenaga kesehatan dalam beberapa profesi mungkin mencerminkan tantangan dalam rekrutmen atau retensi tenaga kerja di sektor kesehatan di Kabupaten Jayawijaya. Namun, stabilitas dalam beberapa kategori, seperti tenaga medis dan tenaga kefarmasian, menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan tenaga kesehatan yang ada. Analisis ini penting untuk perencanaan ke depan dalam meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan kesehatan di daerah ini

3.4.13. Kesehatan Masyarakat

Tabel 15. Kesehatan Masyarakat

<i>Kesehatan Masyarakat</i>	Tahun	
	2023	2024
<i>1. Jumlah kunjungan orang sakit (Orang)</i>		
1. Laki-laki		
a. Anak-anak	5,45	
b. Dewasa	33,129	
2. Perempuan		
a. Anak-anak	4,038	



b. Dewasa	32,667	
2. <i>Jumlah Pasien Rawat inap</i>		
1. Laki-laki		
a. Anak-anak	651	
b. Dewasa	3,548	
2. Perempuan		
a. Anak-anak	467	
b. Dewasa	3,554	
3. <i>Jumlah Pasien Rawat Jalan</i>		

Tabel yang ditampilkan memberikan gambaran kesehatan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan jumlah kunjungan orang sakit, pasien rawat inap, dan jumlah pasien rawat jalan untuk tahun 2023 dan 2024. Tabel ini dibagi menjadi tiga kategori utama: jumlah kunjungan orang sakit, jumlah pasien rawat inap, dan jumlah pasien rawat jalan. Setiap kategori dibagi lagi berdasarkan kelompok usia (anak-anak dan dewasa) serta jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).

Untuk kategori “Jumlah kunjungan orang sakit,” data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah kunjungan untuk anak-anak laki-laki adalah 5.545, sementara jumlah kunjungan untuk anak-anak perempuan adalah 4.038. Jumlah kunjungan untuk dewasa laki-laki tidak terlihat dalam gambar, tetapi jumlah kunjungan untuk dewasa perempuan adalah 32.667. Data untuk tahun 2023 tidak terlihat dalam gambar yang diberikan.

Pada kategori “Jumlah Pasien Rawat Inap,” data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah pasien rawat inap untuk anak-anak laki-laki adalah 651, sementara jumlah pasien rawat inap untuk anak-anak perempuan adalah 467. Jumlah pasien rawat inap untuk dewasa laki-laki tidak terlihat dalam gambar, tetapi jumlah pasien rawat inap untuk dewasa perempuan adalah 3.554. Data untuk tahun 2023 juga tidak terlihat dalam gambar yang diberikan. Kategori “Jumlah Pasien Rawat



Jalan” tidak menunjukkan data apapun dalam gambar ini untuk kedua tahun tersebut.

Analisis komprehensif dari data yang tersedia menunjukkan bahwa terdapat jumlah kunjungan yang signifikan di antara perempuan dewasa dibandingkan dengan kelompok lainnya pada tahun 2024. Namun, karena data yang tidak lengkap untuk kelompok lainnya dan tahun 2023, sulit untuk mengidentifikasi tren atau melakukan analisis yang akurat secara keseluruhan.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya antara lain:

1. **Pengumpulan Data yang Lebih Lengkap:** Memastikan pengumpulan data yang lengkap di semua kategori untuk memungkinkan analisis tren yang lebih akurat.
2. **Fokus pada Pencegahan Kesehatan:** Meningkatkan upaya pencegahan kesehatan untuk mengurangi jumlah kunjungan orang sakit, terutama di kalangan perempuan dewasa.
3. **Investigasi Penyebab Tingginya Kunjungan:** Melakukan investigasi lebih lanjut untuk memahami mengapa terdapat jumlah kunjungan yang tinggi di kalangan perempuan dewasa dan menyesuaikan program kesehatan yang sesuai.
4. **Peningkatan Fasilitas Kesehatan:** Meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan untuk menangani peningkatan jumlah pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan.
5. **Edukasi Kesehatan Masyarakat:** Melakukan kampanye edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan pencegahan penyakit.



Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya, sehingga mencapai visi dan misi untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

BAB IV

PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

JAYAWIJAYA 2023-2024



BAB IV

PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kabupaten Jayawijaya yang terletak di Provinsi Papua Pegunungan, memiliki sektor ketahanan pangan yang mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, serta tanaman pangan dan hortikultura. Pertanian di Jayawijaya didominasi oleh tanaman pangan lokal seperti ubi jalar, yang menjadi makanan pokok masyarakat setempat. Selain itu, sektor perkebunan juga berkembang dengan tanaman seperti kopi dan sayuran. Peternakan di Jayawijaya meliputi ternak babi, ayam, dan sapi yang menjadi sumber protein bagi masyarakat. Tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan juga ditanam untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Dinas yang bertanggung jawab atas ketahanan pangan di Jayawijaya adalah Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Pertanian berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui berbagai program penyuluhan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada petani. Mereka juga berupaya memperbaiki infrastruktur pertanian seperti irigasi dan akses jalan ke lahan pertanian. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan fokus pada memastikan distribusi pangan yang merata dan ketersediaan pangan yang cukup untuk seluruh masyarakat, termasuk melalui program cadangan pangan dan pengawasan harga pangan di pasar.

Peran kedua dinas ini sangat penting dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Jayawijaya. Visi kabupaten ini adalah mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misi yang terkait dengan ketahanan pangan meliputi peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan. Melalui berbagai program dan kebijakan, Dinas Pertanian



dan Dinas Ketahanan Pangan berupaya meningkatkan produksi pangan lokal, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kedua dinas ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Jayawijaya, memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.

Adapun data sektoral yang disajikan sebagai berikut:

- 1) Perkembangan Tanaman Pangan;
- 2) Sarana dan Prasarana Produktifitas Pertanian;
- 3) Perkembangan Perkebunan;
- 4) Perkembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 5) Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia;
- 6) Produktifitas Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi;
- 7) Perkembangan Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein;
- 8) Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan;
- 9) Pergudangan;
- 10) Data Ketersediaan Pangan Utama;
- 11) Produktifitas Perikanan.

4.1. Perkembangan Tanaman Pangan

Tabel 16. Perkembangan Tanaman Pangan

Jenis Data Perkembangan	Satuan	Jumlah
1 Luas Lahan Pertanian	Ha	
1 Lahan Sawah	Ha	391
1 Beririgasi	Ha	0
2 Tadah Hujan	Ha	391
2 Lahan Kering	Ha	38.546
1 Tegal/Kebun	Ha	2.164
2 Ladang/Hutan	Ha	36.382



2 Jumlah Produksi Tanaman Pangan

1 Padi	Ton	320,3
2 Jagung	Ton	17,12
3 Ubi Jalar	Ton	74.947,4
4. Ubi Kayu	Ton	301,35
5 Keladi	Ton	1.153,28
6 Kacang Tanah	Ton	55,37
7 Kacang Kedelai	Ton	3,88
8 Kacang Hiiau	Ton	0

3 Nilai Produkai Tanaman Pangan

1 Padi	Rp	6.406.000.000
2 Jagung	Rp	342.400.000
3 Ubi Jalar	Rp	749.474.000.000
4. Ubi Kayu	Rp	5.424.300.000
5 Keladi	Rp	23.065.600.000
6 Kacang Tanah	Rp	1.661.100.000
7 Kacang Kedelai	Rp	77.600.000
8 Kacang Hiiau	Rp	

4 Luas Panen Tanaman Pangan

1 Padi	Ha	91,5
2 Jagung	Ha	8,56
3 Ubi Jalar	Ha	4.684,2
4. Ubi Kayu	Ha	43,05
5 Keladi	Ha	143,96
6 Kacang Tanah	Ha	55,37
7 Kacang Kedelai	Ha	3,88
8 Kacang Hiiau	Ha	

5 Produktivitas Tanaman Pangan

1 Padi	Ton/Ha	3,5
2 Jagung	Ton/Ha	2
3 Ubi Jalar	Ton/Ha	16
4. Ubi Kayu	Ton/Ha	7
5 Keladi	Ton/Ha	8
6 Kacang Tanah	Ton/Ha	1
7 Kacang Kedelai	Ton/Ha	1



8 Kacang Hiiiau

6 Jumlah Produksi Sayur-sayuran

1. Bawang Merah
2. Labu Siam
3. Bawang daun
4. Bayam
5. Buncis
6. Cabe
- 7 Kacang Panjang
- 8 Kubis
- 9 Ketimun
- 10 Kacang Merah
- 11 Kentang
- 12 Sawi
- 13 Terung
- 14 Tomat
- 15 Wortel
- 16 Petsai

Ton/Ha	
Ton	20,28
Ton	43,09
Ton	22,68
Ton	10,33
Ton	11,6
Ton	12,22
Ton	3,71
Ton	28,08
Ton	13,6
Ton	14,5
Ton	20,82
Ton	26,18
Ton	8,56
Ton	11,13
Ton	40,33
Ton	62,61

7 Nilai Produksi Tanaman Sayur-sayuran

1. Bawang Merah
2. Labu Siam
3. Bawang daun
4. Bayam
5. Buncis
6. Cabe
- 7 Kacang Panjang
- 8 Kubis
- 9 Ketimun
- 10 Kacang Merah
- 11 Kentang
- 12 Sawi
- 13 Terung
- 14 Tomat
- 15 Wortel

Rp	608.400.000
Rp	344.720.000
Rp	340.200.000
Rp	103.300.000
Rp	116.000.000
Rp	488.800.000
Rp	55.650.000
Rp	280.800.000
Rp	204.000.000
Rp	290.000.000
Rp	520.500.000
Rp	154.080.000
Rp	135.600.000
Rp	166.950.000
Rp	604.950.000



16 Petsai

8 luas Panen Tanaman Sayur-sayuran

1. Bawang Merah
2. Labu Siam
3. Bawang daun
4. Bayam
5. Buncis
6. Cabe
7. Kacang Panjang
8. Kubis
9. Ketimun
10. Kacang Merah
11. Kentang
12. Sawi
13. Terung
14. Tomat
15. Wortel
16. Petsai

Rp	751.320.000
Ha	12,58
Ha	14.095
Ha	16,2
Ha	6,89
Ha	4,64
Ha	5,98
Ha	3,37
Ha	7,39
Ha	5,3
Ha	8,04
Ha	5,95
Ha	8,18
Ha	4,6
Ha	5,06
Ha	10,34
Ha	17,89
Ton/ Ha	1,61
Ton/ Ha	3,06
Ton/ Ha	1,40
Ton/ Ha	1,50
Ton/ Ha	2,50
Ton/ Ha	2,04
Ton/ Ha	1,10
Ton/ Ha	3,80
Ton/ Ha	2,57
Ton/ Ha	1,80
Ton/ Ha	3,50
Ton/ Ha	3,20
Ton/ Ha	1,86
Ton/ Ha	2,20
Ton/ Ha	3,90
Ton/ Ha	3,50

9 Produktivita Sayur-sayuran

1. Bawang Merah
2. Labu Siam
3. Bawang daun
4. Bayam
5. Buncis
6. Cabe
7. Kacang Panjang
8. Kubis
9. Ketimun
10. Kacang Merah
11. Kentang
12. Sawi
13. Terung
14. Tomat
15. Wortel
16. Petsai



10 Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan

- 1 Terong Belanda
- 2 Markisa
- 3 Alpukat
- 4 Nanas
- 5 Pisang
- 6 Jeruk

Ton	5,32
Ton	1,56
Ton	117,9
Ton	234,2
Ton	165,8
Ton	25,4

11 Luas Panen Tanaman Buah-buahan

- 1 Terong Belanda
- 2 Markisa
- 3 Alpukat
- 4 Nanas
- 5 Pisang
- 6 Jeruk

Ha	0,851
Ha	0,52
Ha	22,8
Ha	17,06
Ha	15,01
Ha	5,08

12 Nilai Produksi Tanaman Buah-buahan

- 1 Terong Belanda
- 2 Markisa
- 3 Alpukat
- 4 Nanas
- 5 Pisang
- 6 Jeruk

Rp	53.200.000
Rp	31.200.000
Rp	1.179.000.000
Rp	1.171.000.000
Rp	3.316.000.000
Rp	381.000.000

13 Produktivitas Tanaman Buah-buahan

- 1 Terong Belanda
- 2 Markisa
- 3 Alpukat
- 4 Nanas
- 5 Pisang
- 6 Jeruk

Ton/ Ha	6,25
Ton/ Ha	3,00
Ton/ Ha	5,17
Ton/ Ha	13,73
Ton/ Ha	11,05
Ton/ Ha	5,00

14 Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan Holtikultura

- 1 Luas Areal Holtikultura
- 1 Luas Areal Buah-Buahan
- 2 Luas Areal Savuran
- 3 Luas Areal Bahan Obat Nabati

Ha	
Ha	98,28
Ha	14.6091
Ha	



- 4 Luas Areal Florikultura
- 2 Jumlah Produksi Hortikultura
 - 1 Jumlah Produksi Buah-Buahan
 - 2 Jumlah Produksi Savuran
 - 3 Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati
 - 4 Jumlah Produksi Florikultura
- 3 Nilai Produksi Hortikultura
 - 1 Nilai Produksi Buah-Buahan
 - 2 Nilai Produksi Savuran
 - 3 Nilai Produksi Bahan Obat Nabati
 - 4 Nilai Produksi Florikultura
4. Nilai Tukar Petani Holtikultura

Ha	
Ton	550,18
Ton	349,72
Ton	
Ton	
Rp	6.131.400.000
Rp	5.165.270.000
Rp	
Rp	
Rp	

Tabel di atas menunjukkan perkembangan tanaman pangan di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan data dari Dinas Pertanian setempat. Berikut adalah deskripsi dan analisis komprehensif dari tabel tersebut, serta kaitannya dengan ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya.

Dari data di atas, terlihat bahwa **ubi jalar** merupakan tanaman pangan utama di Kabupaten Jayawijaya, baik dari segi luas lahan, jumlah produksi, maupun nilai ekonomisnya. Ubi jalar memiliki produktivitas yang sangat tinggi, mencapai 16 Ton/Ha, dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan dengan nilai produksi mencapai Rp 749.474.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa ubi jalar adalah komoditas yang sangat penting bagi ketahanan pangan di daerah ini, karena mampu menyediakan sumber karbohidrat yang melimpah dan bernilai ekonomi tinggi.

Padi dan **ubi kayu** juga merupakan tanaman penting, meskipun luas lahan dan jumlah produksinya tidak sebesar ubi jalar. Padi memiliki nilai produksi yang cukup tinggi, yaitu Rp 6.406.000.000, dengan produktivitas 3,5 Ton/Ha. Ubi kayu, dengan produktivitas 7 Ton/Ha, juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Kedua tanaman



ini penting untuk diversifikasi sumber pangan dan menjaga ketahanan pangan dengan menyediakan variasi sumber karbohidrat.

Jagung dan **kacang-kacangan** memiliki luas lahan dan jumlah produksi yang relatif kecil. Produktivitas jagung hanya 2 Ton/Ha, dan nilai produksinya Rp 342.400.000. Kacang tanah dan kacang kedelai juga memiliki produktivitas dan nilai ekonomi yang rendah. Meskipun demikian, kacang-kacangan penting sebagai sumber protein nabati yang dapat mendukung ketahanan pangan dengan menyediakan nutrisi yang beragam.

Ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya sangat bergantung pada keberlanjutan produksi tanaman pangan utama seperti ubi jalar, padi, dan ubi kayu. Tingginya produktivitas ubi jalar menunjukkan potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal dan bahkan untuk ekspor. Namun, ketergantungan yang tinggi pada satu jenis tanaman dapat menjadi risiko jika terjadi gagal panen atau serangan hama.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan, diversifikasi tanaman perlu diperhatikan. Pengembangan tanaman lain seperti sayuran yang memiliki produktivitas tinggi dapat menjadi alternatif untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis tanaman. Selain itu, peningkatan produktivitas kacang-kacangan melalui penggunaan varietas unggul dan teknik budidaya yang lebih baik dapat membantu menyediakan sumber protein yang lebih stabil.

Saran Program untuk Antisipasi

1. **Diversifikasi Tanaman:** Mengingat tingginya produktivitas ubi jalar, perlu dipertimbangkan diversifikasi tanaman untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis tanaman. Pengembangan tanaman lain seperti sayuran yang memiliki produktivitas tinggi dapat menjadi alternatif.
2. **Peningkatan Produktivitas Kacang-Kacangan:** Perlu dilakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas kacang tanah dan kacang kedelai. Penggunaan



- varietas unggul dan teknik budidaya yang lebih baik dapat membantu meningkatkan hasil panen.
3. **Pengembangan Infrastruktur Irigasi:** Meskipun lahan sawah beririgasi sudah ada, pengembangan lebih lanjut infrastruktur irigasi dapat membantu meningkatkan produktivitas padi dan tanaman lainnya yang membutuhkan air.
 4. **Pelatihan dan Penyuluhan:** Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani mengenai teknik budidaya yang baik, penggunaan pupuk yang tepat, dan pengelolaan hama dan penyakit tanaman dapat membantu meningkatkan hasil pertanian secara keseluruhan.
 5. **Pemasaran dan Distribusi:** Meningkatkan akses pasar dan distribusi hasil pertanian dapat membantu meningkatkan nilai ekonomi dari produksi tanaman pangan. Kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah dalam hal pemasaran dapat membuka peluang pasar yang lebih luas.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya dapat terjaga dan bahkan meningkat, memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

2.7.4.2. Sarana dan Prasarana Produktifitas Pertanian

Tabel 17. Sarana dan Prasarana Produktifitas Pertanian

Sarana dan Prasarana Produktifitas Pertanian	Satuan	Jumlah
1 Jumlah Ketersediaan Benih Tanaman Pangan		
1 Jumlah Ketersediaan Benih Padi	Kg	-
2 Jumlah Ketersediaan Benih Jagung	Kg	200
3 Jumlah Ketersediaan Benih Cabe	Kg	0,60
4 Jumlah Ketersediaan Benih Kedelai	Kg	400
		-
5 Jumlah Ketersediaan Bibit Ubi	Btg/Pohon	-
6 Jumlah Ketersediaan Benih Kacang tanah	Kg	-
7 Jumlah Ketersediaan Benih Kacang hijau	Kg	



- 8 Jumlah Ketersediaan Bibit Keladi/Talas
- 2 Jumlah Ketersediaan Benih Holtikultura
 - 1 Jumlah Ketersediaan Benih Buah
 - 2 Jumlah Ketersediaan Benih Savuran
 - 3 Jumlah Ketersediaan Benih Bahan Obat Nabati
 - 4 Jumlah Ketersediaan Benih Holtikultura
- 3 Jumlah Ketersediaan Benih Perkebunan
 - 1 Jumlah Ketersediaan Benih Tanaman Tahunan
 - 2 Jumlah Ketersediaan Benih Tanaman Semusim
- 4 Jumlah Ketersediaan Bibit Ternak
 - 1 Sapi
 - 2 Kerbau
 - 3 Kambing
 - 4 Domba
 - 5 Babi
 - 6 Kelinci
 - 7 Ayam
 - 8 Itik Dan Sejenisnya
- 5 Jumlah Ketersediaan Pupuk
- 6 Jumlah Ketersediaan Pakan Ternak
- 7 Jumlah Ketersediaan Alat Pertanian
- 8 Jumlah Ketersediaan Mesin Pertanian
 - 1 Traktor Roda 2
 - 2 Traktor Roda 4
 - 3 RMU (Mesin Giling Padi)
 - 4 Cultivator
 - 5 Exavator Mini
 - 6 Pompa Air
 - 7 Kandang Sapi
 - 8 Kandang Babi
 - 9 Kandang Ayam
 - 10 Ekstraktor
 - 11 Kotak Lebah

Anakan/Stek	8
*	
Btg/Pohon	2.100
Kg	432,7
Kg	-
Kg	-
*	
Btg/Pohon	5.000
Bte/Pohon	
Ekor	
Ekor	--
Ekor	-
Ekor	
Ekor	-
Ekor	316
Ekor	-
Ekor	3
Ekor	-
Ton	s
Ton	9,0
Unit	
Unit	
Unit	86
Unit	4
Unit	9
Unit	32
Unit	1
Unit	15
Unit	7
Unit	28
unit	2
Unit	27
Unit	106



- 12 Mesin Pencacah Pakan Temak
- 9 Ketersediaan Obat Anti Hama*
 - 1 Jumlah Insektisida
 - 2 Jumlah Funtisida
 - 3 Jumlah Pestisida
- 10 Luas Areal Pengairan**
- 11 Jumlah Kelomnok Tani**
- 12 Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan(%)
 - 1 Jumlah Petani (Orang)
 - 2 Penerimaan Petani (Rp)
 - 3 Pengeluaran Petani
- 13 Nilai Tukar Petani Hortikultura
 - 1 Jumlah Petani
 - 2 Penerimaan Petani
 - 3 Pen2eluaran Petani
- 14 Nilai Tukar Petani Perkebunan (%)
 - 1 Jumlah Petani Perkebunan
 - 2 Penerimaan Petani Perkebunan
 - 3 Peneeluaran Petani Perkebunan
- 15 Nilai Tukar Petemak (%)
 - 1 Jumlah Petemak
 - 2 Penerimaan Petemak
 - 3 Pengeluaran Petemak
 - 1 Biava Konsumsi
 - 2 Biava Produksi

Unit	1
*	-
Liter	-
Liter	-
Liter	-
Ha	-
Kelompok	-
%	-
Orang	-
Rp	-
Rp	-
%	-
Orang	-
Rp	-
Rp	
%	-
Orang	4,328
Rp	-
Rp	-
%	-
Orang	29.677
Rp	
Rp	-
Rp	-
Rp	-

Tabel di atas menunjukkan perkembangan sarana dan prasarana produktivitas pertanian di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan data dari Dinas Pertanian setempat. Dari data di atas, terlihat bahwa Kabupaten Jayawijaya memiliki berbagai sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas pertanian. Ketersediaan benih tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai menunjukkan upaya untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Namun, jumlah benih cabe dan kacang hijau



yang sangat rendah atau bahkan nol menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan benih tanaman tersebut.

Ketersediaan benih hortikultura seperti buah dan sayuran cukup memadai, namun tidak ada data untuk tanaman obat nabati, yang bisa menjadi peluang untuk diversifikasi tanaman. Ketersediaan benih perkebunan untuk tanaman tahunan cukup tinggi, namun tidak ada data untuk tanaman semusim, yang bisa menjadi area untuk pengembangan lebih lanjut.

Ketersediaan bibit ternak menunjukkan fokus pada babi, dengan jumlah yang cukup signifikan, namun sangat rendah untuk jenis ternak lainnya seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan itik. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan diversifikasi ternak guna mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

Ketersediaan pupuk dan pakan ternak masing-masing sebesar 9 ton menunjukkan upaya untuk mendukung pertanian dan peternakan. Namun, jumlah ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan kecukupan bagi seluruh petani dan peternak di daerah tersebut.

Ketersediaan alat pertanian seperti traktor, RMU, cultivator, excavator mini, dan pompa air menunjukkan adanya dukungan mekanisasi pertanian yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, jumlah alat yang tersedia perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh petani di Kabupaten Jayawijaya.

Ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya sangat bergantung pada ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian. Ketersediaan benih yang cukup dan berkualitas dapat meningkatkan produksi pangan lokal, sementara ketersediaan alat pertanian dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, ketergantungan pada beberapa jenis tanaman dan ternak tertentu dapat menjadi risiko jika terjadi gagal panen atau serangan hama. Berikut beberapa program yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut:



1. **Diversifikasi Tanaman dan Ternak:** Mengembangkan program diversifikasi tanaman dan ternak untuk mengurangi risiko ketergantungan pada beberapa jenis tanaman dan ternak tertentu. Ini termasuk peningkatan ketersediaan benih cabe, kacang hijau, dan tanaman obat nabati, serta peningkatan jumlah bibit ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan itik.
2. **Peningkatan Ketersediaan Pupuk dan Pakan Ternak:** Meningkatkan jumlah pupuk dan pakan ternak yang tersedia untuk memastikan kecukupan bagi seluruh petani dan peternak di daerah tersebut.
3. **Pengembangan Infrastruktur Pertanian:** Meningkatkan jumlah dan kualitas alat pertanian yang tersedia, seperti traktor, RMU, cultivator, excavator mini, dan pompa air, untuk mendukung mekanisasi pertanian dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
4. **Pelatihan dan Penyuluhan:** Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani dan peternak mengenai teknik budidaya yang baik, penggunaan pupuk yang tepat, dan pengelolaan hama dan penyakit tanaman, serta teknik pemeliharaan ternak yang baik.
5. **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian untuk memastikan efektivitas program yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya dapat terjaga dan bahkan meningkat, memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat setempat.



2.8.4.3. Perkembangan Perkebunan

Tabel 18. Data Perkembangan Perkebunan

Data Perkembangan Perkebunan	Satuan	Jumlah
1 Luas Areal Perkebunan	Ha	1,897
2 Nilai Produksi Perkebunan	Rp	-
3 Nilai Produksi Kopi	Rp	15.093.600.000
4 Nilai Produksi Tanaman Semusim	Rp	
5 Nilai Tukar Petani Perkebunan	Rp	-
6 Jumlah Kasus Pada Tanaman Pertanian/Perkebunan	Kasus	1
7 Jumlah Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat	Kg/Ha	650
8 Jumlah petani perkebunan rakyat	KK	2,164
9 Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB		
1 Perkebunan		
A. Kopi		
1). Luas Areal	Ha	1.897
2). Luas Tanam	Ha	1.897
3). Jumlah Produksi	Ton	188,67
B. Tebu		-
1). Luas Areal	Ha	
2). Luas Tanam	Ha	-
3). Jumlah Produksi	Ton	

Tabel di atas menunjukkan perkembangan perkebunan di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan data dari Dinas Pertanian setempat. Dari data di atas, terlihat bahwa kopi merupakan komoditas utama dalam sektor perkebunan di Kabupaten Jayawijaya. Dengan luas areal sebesar 1.897 Ha, kopi memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan dengan nilai produksi mencapai Rp 15.093.600.000 dan jumlah produksi sebesar 650 Ton. Produktivitas rata-rata kopi sebesar 342 Kg/Ha menunjukkan efisiensi yang cukup baik dalam budidaya kopi di daerah ini.



Jumlah kepemilikan komoditas perkebunan oleh rakyat atau keluarga petani sebanyak 2.164 KK menunjukkan bahwa sektor perkebunan merupakan sumber mata pencaharian penting bagi banyak keluarga di Kabupaten Jayawijaya. Namun, data kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB tidak tersedia, sehingga sulit untuk menilai secara langsung dampak ekonomi keseluruhan dari sektor ini terhadap perekonomian daerah.

Ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya tidak hanya bergantung pada produksi tanaman pangan, tetapi juga pada sektor perkebunan. Kopi, sebagai komoditas utama, memberikan kontribusi ekonomi yang dapat digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan pendapatan petani. Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan petani untuk membeli makanan yang lebih beragam dan bergizi, serta berinvestasi dalam teknologi dan praktik pertanian yang lebih baik. Namun, ketergantungan yang tinggi pada satu jenis komoditas seperti kopi dapat menjadi risiko jika terjadi penurunan harga kopi di pasar global atau masalah produksi seperti hama dan penyakit. Diversifikasi komoditas perkebunan dapat membantu mengurangi risiko ini dan meningkatkan ketahanan pangan secara keseluruhan. Berikut beberapa program yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut:

1. **Diversifikasi Komoditas Perkebunan:** Mengembangkan program diversifikasi komoditas perkebunan dengan memperkenalkan tanaman lain seperti kakao dan tebu yang juga memiliki potensi ekonomi. Diversifikasi ini dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis komoditas dan meningkatkan ketahanan pangan.
2. **Peningkatan Produktivitas:** Melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas kopi dan komoditas perkebunan lainnya. Penggunaan varietas unggul, teknik budidaya yang lebih baik, dan pengelolaan hama dan



- penyakit yang efektif dapat membantu meningkatkan hasil produksi.
3. **Pelatihan dan Penyuluhan:** Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani mengenai teknik budidaya yang baik, penggunaan pupuk yang tepat, dan pengelolaan hama dan penyakit tanaman. Pelatihan ini dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan.
 4. **Pengembangan Infrastruktur:** Meningkatkan infrastruktur pertanian seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan untuk mendukung produksi dan distribusi hasil perkebunan. Infrastruktur yang baik dapat membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan akses pasar bagi petani.
 5. **Akses Pasar dan Pemasaran:** Meningkatkan akses pasar dan pemasaran hasil perkebunan melalui kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah. Program pemasaran yang efektif dapat membantu petani mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil perkebunan mereka.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor perkebunan di Kabupaten Jayawijaya dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

2.9.4.4. Perkembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tabel 19. Perkembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Satuan	Jumlah
1 Jumlah Kelompok Peternakan		
1 Jumlah Usaha Peternakan Hewan Besar	Kelompok	78
2 Jumlah Usaha Peternakan Hewan Kecil	Kelompok	169
3 Jumlah Kelompok Peternak Lebah Madu	Kelompok	59
4 Jumlah Usaha Peternakan Unggas	Kelompok	10
2 Jumlah Populasi Hewan Ternak		
1 Jumlah Populasi Hewan Ternak Besar		
1 Jumlah Populasi Ternak Sapi	Ekor	4.378



2	Jumlah Pooulasi Ternak Kerbau	Ekor	63
3	Jumlah Populasi Ternak Kuda	Ekor	3
2 Jumlah Pooulasi Hewan Temak Kecil			
1	Jumlah Populasi Ternak Kambing:	Ekor	3.337
2	Jumlah Pooulasi Ternak Domba	Ekor	-
3	Jumlah Populasi Temak Babi	Ekor	82.677
4	Jumlah Pooulasi Temak Kelinci	Ekor	4.744
5	Jumlah Populasi ternak lebah madu	Kotak	715
3 Jumlah Populasi Hewan Ternak Unggas			
1	Jumlah Populasi Ternak Ayam	Ekor	48.692
2	Jumlah Populasi Temak Itik	Perusahaan	578
3	Jumlah Populasi Ternak Unggas Lainnya	Usaha	-
3 Jumlah Dan Nilai Produksi Daging Hewan Temak			
1 Jumlah Produksi Daging Hewan Temak Besar			
1	Jumlah Produksi Daging Temak Sapi	Ton	158,46
2	Jumlah Produksi Daging Temak Kerbau	Ton	3,98
3	Jumlah Produksi Daging Temak Kuda	Ton	-
2 Jumlah Produksi Daging Hewan Ternak Kecil			
1	Jumlah Produksi Daging Kambing	Ton	11,33
2	Jumlah Produksi Daging Domba	Ton	-
3	Jumlah Produksi Daging Babi	Ton	1,863
4	Jumlah Produksi Daging Kelinci	Ton	1,83
5	Jumlah Produksi madu	Ton	7,42
3 Jumlah Populasi Daging Hewan Ternak Unggas			
1	Jumlah Produksi Daging Ayam	Ton	57,53
2	Jumlah Produksi Daging Itik	Ton	1,11
3	Jumlah Produksi Daging Lainnya	Ton	-
4 Jumlah Dan Nilai Produksi Susu Hewan Ternak			
1	Jumlah Produksi Susu Sapi	Liter	-
2	Jumlah Produksi Susu Hewan Temak	Liter	-



Lainnya		
3 Nilai Produksi Susu Sapi	Rp	.
		-
4 Nilai Produksi Susu Hewan Ternak Lainnya	Rp	-
5 Jumlah Dan Nilai Produksi Telur Hewan Ternak	Ton	-
1 Jumlah Produksi Telur Ayam	Ton	43,1
2 Jumlah Produksi Telur Itik	Ton	1
3 Jumlah Produksi Telur Hewan Ternak Lainnya	Ton	-
4 Nilai Produksi Telur Ayam	Rp	2.887.700.000
5 Nilai Produksi Telur Itik	Rp	70.000.000
6 Nilai Produksi Telur Hewan Ternak Lainnya	Rp	-
6 Jumlah Kasus Wabah/Endemi Pada Hewan	Kasus	19
7 Nilai Tukar Petani Peternakan	%	-

Tabel di atas menunjukkan perkembangan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan data dari Dinas Pertanian setempat. Data di atas menunjukkan bahwa sektor peternakan di Kabupaten Jayawijaya memiliki populasi hewan ternak yang cukup beragam, dengan sapi dan ayam sebagai komoditas utama. Populasi sapi mencapai 4.378 ekor, sementara populasi ayam mencapai 48.692 ekor. Produksi daging sapi dan ayam juga cukup signifikan, masing-masing sebesar 158,46 ton dan 57,53 ton.

Jumlah kelompok usaha peternakan yang cukup banyak, terutama untuk hewan ternak kecil dan unggas, menunjukkan bahwa sektor ini melibatkan banyak peternak lokal. Hal ini penting untuk ketahanan pangan karena diversifikasi sumber protein hewani dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas dan meningkatkan ketersediaan pangan.



Ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya sangat dipengaruhi oleh sektor peternakan. Produksi daging yang cukup tinggi dari berbagai jenis hewan ternak menunjukkan bahwa daerah ini memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Namun, populasi hewan ternak yang besar juga memerlukan perhatian khusus dalam hal kesehatan hewan untuk mencegah penyakit yang dapat mengurangi produksi dan kualitas daging. Berikut beberapa program yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

1. **Peningkatan Kesehatan Hewan:** Mengembangkan program vaksinasi dan pengobatan rutin untuk mencegah dan mengendalikan penyakit pada hewan ternak. Ini penting untuk menjaga populasi hewan ternak tetap sehat dan produktif.
2. **Diversifikasi Usaha Peternakan:** Mendorong diversifikasi usaha peternakan dengan memperkenalkan jenis hewan ternak baru yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis hewan ternak dan meningkatkan ketahanan pangan.
3. **Pelatihan dan Penyuluhan:** Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada peternak mengenai teknik beternak yang baik, manajemen pakan, dan pengelolaan kesehatan hewan. Pelatihan ini dapat membantu peternak meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil ternak.
4. **Pengembangan Infrastruktur:** Meningkatkan infrastruktur peternakan seperti kandang, fasilitas penyimpanan pakan, dan akses ke layanan kesehatan hewan. Infrastruktur yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakan.
5. **Akses Pasar dan Pemasaran:** Meningkatkan akses pasar dan pemasaran hasil peternakan melalui kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah. Program pemasaran yang efektif dapat



membantu peternak mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil ternak mereka.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor peternakan di Kabupaten Jayawijaya dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

2.10. 4.5. Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia

Tabel 20. Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia

Penyuluhan dan Sumberdaya Manusia	Satuan	Jumlah
1 Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian /BPP)	Unit	14
2 Jumlah Penyuluhan Pertanian		
I ASN	Orang	41
2 CPNS	Orang	-
3 Kontrak (THL-TB Pusat)	Orang	17

Tabel di atas menunjukkan data terkait penyuluhan dan sumber daya manusia di Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya memiliki 14 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai pusat kegiatan penyuluhan bagi petani. Jumlah penyuluh pertanian yang terdiri dari 41 ASN dan 17 tenaga kontrak menunjukkan adanya tenaga kerja yang cukup untuk mendukung kegiatan penyuluhan. Namun, tidak adanya data CPNS menunjukkan bahwa saat ini tidak ada calon pegawai negeri sipil yang sedang dalam proses rekrutmen atau pelatihan untuk menjadi penyuluh pertanian.

Keberadaan 14 BPP ini sangat penting dalam mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Jayawijaya. BPP berperan dalam



memberikan informasi, teknologi, dan praktik pertanian terbaru kepada petani, yang dapat meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi. Penyuluh pertanian, baik ASN maupun tenaga kontrak, berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan petani, memastikan bahwa kebijakan dan program pertanian dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Namun, jumlah penyuluh yang ada mungkin masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh petani di Kabupaten Jayawijaya, terutama jika mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah petani yang ada. Selain itu, tidak adanya CPNS menunjukkan potensi kekurangan tenaga kerja di masa depan jika tidak ada regenerasi atau penambahan tenaga penyuluh baru. Berikut beberapa saran program yang dapat dilakukan:

1. **Rekrutmen dan Pelatihan CPNS:** Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk membuka rekrutmen CPNS untuk posisi penyuluh pertanian. Ini penting untuk memastikan adanya regenerasi tenaga kerja dan mengisi kekosongan yang mungkin terjadi di masa depan. Pelatihan yang komprehensif juga perlu diberikan kepada CPNS untuk memastikan mereka siap terjun ke lapangan.
2. **Peningkatan Kapasitas Penyuluh:** Memberikan pelatihan lanjutan dan peningkatan kapasitas bagi penyuluh pertanian yang sudah ada. Pelatihan ini dapat mencakup teknologi pertanian terbaru, manajemen lahan, dan teknik penyuluhan yang efektif. Dengan peningkatan kapasitas, penyuluh dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada petani.
3. **Pengembangan Infrastruktur BPP:** Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur di Balai Penyuluhan Pertanian. Fasilitas yang memadai akan mendukung kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi petani. Ini termasuk ruang pelatihan, peralatan pertanian, dan akses ke teknologi informasi.
4. **Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan:** Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti universitas dan



sekolah pertanian untuk program magang atau praktek kerja bagi mahasiswa. Ini dapat menjadi sumber tenaga kerja potensial dan memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa.

5. **Penggunaan Teknologi Informasi:** Memanfaatkan teknologi informasi untuk penyuluhan pertanian. Penggunaan aplikasi mobile, media sosial, dan platform online dapat membantu penyuluh menjangkau lebih banyak petani dan memberikan informasi secara real-time. Ini juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan feedback dari petani.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan produktivitas pertanian di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkat, dan ketahanan pangan daerah dapat terjaga. Penyuluhan yang efektif dan sumber daya manusia yang memadai adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

2.11. 4.6. Produktifitas Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi

Tabel 21. Produktifitas Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi

Kategori		Jumlah
1. Jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati** (Ton)		
1. Beras (Ton)		318
2. Jagung (Ton)		79
3. Kedelai (Ton)		6
4. Kacang Tanah (Ton)		74
5. Ubi Kavu (Ton)		274
6. Ubi Jalar (Ton)		84.573
7. Sayur (Ton)		374
8. Buah-Buahan (Ton)		520
9. Minyak Goreng (Ton)		0
10. Gula (Ton)		0
2. Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani		
1. Daging Sapi dan Kerbau (Ton)		110



2. Daging Ayam (Ton)	56
3. Telur (Ton)	43
4. Susu (Ton)	0
5. Ikan (Ton)	365,13
3. Ketersediaan Energi dan Protein	
1. Energi (Kal/Kap/Hari)	2.208,17
2. Protein (Gram/Kap/Hari)	51,99

Tabel di atas menunjukkan data produktivitas komoditas pangan dan ketersediaan energi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya. Berikut adalah deskripsi dan analisis komprehensif dari tabel tersebut, serta saran untuk pengembangan dalam kaitannya dengan tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya.

Data di atas memberikan gambaran yang jelas tentang produktivitas komoditas pangan di Kabupaten Jayawijaya. Produksi ubi jalar yang sangat tinggi (84.574 ton) menunjukkan bahwa komoditas ini merupakan salah satu sumber pangan utama di daerah tersebut. Sebaliknya, produksi ubi kayu, buah-buahan, dan minyak goreng yang nol menunjukkan adanya kekosongan dalam diversifikasi pangan nabati.

Produksi daging sapi dan kerbau serta ikan yang cukup signifikan (110 ton dan 365,13 ton) menunjukkan bahwa sumber protein hewani cukup tersedia. Namun, produksi susu yang nol menunjukkan adanya kekurangan dalam ketersediaan produk susu, yang penting untuk asupan kalsium dan protein.

Ketersediaan energi sebesar 2.208,17 kalori per kapita per hari dan protein sebesar 51,99 gram per kapita per hari menunjukkan bahwa kebutuhan dasar energi dan protein penduduk Jayawijaya terpenuhi. Namun, diversifikasi sumber pangan perlu ditingkatkan untuk memastikan ketahanan pangan yang lebih baik dan gizi yang seimbang. Berikut beberapa program yang dapat dilakukan untuk pengembangan:



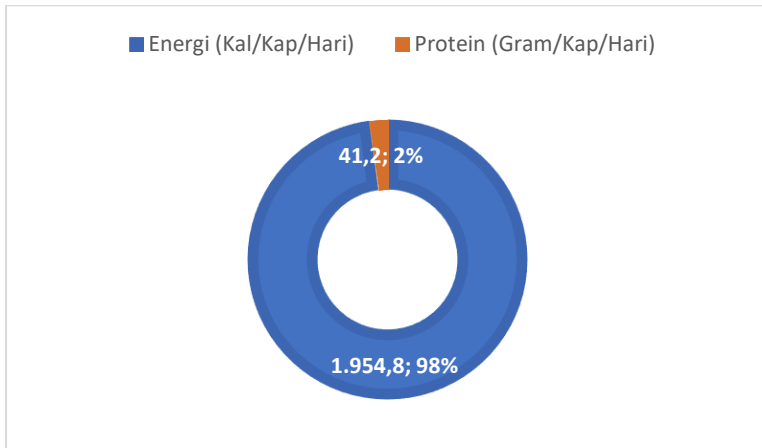
1. **Diversifikasi Tanaman Pangan:** Meningkatkan diversifikasi tanaman pangan dengan memperkenalkan dan mengembangkan komoditas seperti buah-buahan dan minyak goreng. Ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditas saja dan meningkatkan ketahanan pangan.
2. **Pengembangan Peternakan Susu:** Mengembangkan sektor peternakan susu untuk meningkatkan produksi susu lokal. Ini bisa dilakukan melalui program pelatihan dan bantuan teknis kepada peternak lokal.
3. **Peningkatan Infrastruktur Pertanian:** Meningkatkan infrastruktur pertanian seperti irigasi, penyimpanan, dan transportasi untuk mendukung produksi dan distribusi pangan yang lebih efisien.
4. **Pelatihan dan Penyuluhan:** Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani tentang teknik pertanian modern dan praktik terbaik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
5. **Kerjasama dengan Lembaga Penelitian:** Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas untuk penelitian dan pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi lokal dan memiliki produktivitas tinggi.
6. **Penggunaan Teknologi Pertanian:** Memanfaatkan teknologi pertanian seperti aplikasi mobile untuk penyuluhan, penggunaan drone untuk pemantauan lahan, dan sistem irigasi otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan produktivitas pertanian di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkat, dan ketahanan



pangan daerah dapat terjaga. Diversifikasi pangan dan peningkatan kapasitas produksi adalah kunci untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

2.12. 4.7. Perkembangan Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein



Gambar 44. Perkembangan Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein

Diagram di atas merupakan data jumlah konsumsi rata-rata energi dan protein di Kabupaten Jayawijaya, yang bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan setempat. Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi energi per kapita di Kabupaten Jayawijaya adalah 1954,8 kalori per hari, sementara rata-rata konsumsi protein adalah 41,2 gram per hari. Angka-angka ini memberikan gambaran tentang asupan gizi penduduk di daerah tersebut dan dapat digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan.

Rata-rata konsumsi energi sebesar 1954,8 kalori per kapita per hari berada di bawah rekomendasi standar kebutuhan energi harian yang umumnya berkisar antara 2000 hingga 2500 kalori per hari untuk orang dewasa. Ini menunjukkan bahwa penduduk Jayawijaya mungkin mengalami defisit energi, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan



dan produktivitas mereka. Defisit energi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses terhadap sumber pangan yang cukup dan beragam.

Rata-rata konsumsi protein sebesar 41,2 gram per kapita per hari juga berada di bawah rekomendasi standar kebutuhan protein harian yang umumnya berkisar antara 46 hingga 56 gram per hari untuk orang dewasa. Kekurangan asupan protein dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penurunan massa otot, gangguan pertumbuhan pada anak-anak, dan penurunan fungsi kekebalan tubuh.

Ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya tampaknya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan energi dan protein. Kekurangan asupan energi dan protein menunjukkan bahwa penduduk mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang bergizi dan beragam. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan produksi pangan lokal, distribusi pangan yang tidak merata, dan keterbatasan ekonomi yang menghalangi akses terhadap pangan yang cukup. Berikut beberapa program yang dapat dilakukan untuk pengembangan ke depan:

1. **Peningkatan Produksi Pangan Lokal:** Meningkatkan produksi pangan lokal, terutama komoditas yang kaya akan energi dan protein seperti padi, jagung, kacang-kacangan, dan ternak. Ini bisa dilakukan melalui program intensifikasi pertanian, penggunaan benih unggul, dan penerapan teknologi pertanian modern.
2. **Diversifikasi Sumber Pangan:** Mendorong diversifikasi sumber pangan dengan memperkenalkan dan mengembangkan tanaman pangan baru yang kaya akan nutrisi. Diversifikasi ini penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi sepanjang tahun.



3. **Peningkatan Akses Pangan:** Meningkatkan akses pangan bagi penduduk melalui program distribusi pangan yang lebih efisien dan merata. Ini bisa melibatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik dan pengembangan pasar lokal.
4. **Pendidikan dan Penyuluhan Gizi:** Memberikan pendidikan dan penyuluhan gizi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pola makan yang seimbang dan bergizi. Program ini bisa melibatkan penyuluh pertanian, tenaga kesehatan, dan lembaga pendidikan.
5. **Pengembangan Program Bantuan Pangan:** Mengembangkan program bantuan pangan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Program ini bisa berupa pemberian makanan tambahan, subsidi pangan, atau bantuan langsung tunai untuk membeli pangan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkat, dan penduduk dapat menikmati pola makan yang lebih seimbang dan bergizi. Peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi sumber pangan, dan peningkatan akses pangan adalah kunci untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

2.13. 4.8. Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan

Tabel 22. Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan

Kelompok Bahan		Jumlah
1. Padi-Padian		
1. Beras (Kg)		64,4
2. Jagung (Kg)		2,6
3. Terigu (Kg)		3,5
2. Umbi-Umbian		



1. Singkong (Kg)	26,4
2. Ubi Jalar (Kg)	178,4
3. Kentang (Kg)	1,8
4. Sagu (Kg)	0,3
5. Umbi Lainnya (Kg)	10,5
3. Pangan Hewani	
1. Daging Ruminansia (Kg)	5,1
2. Daging Unggas (Kg)	7,6
3. Telur (Kg)	4
4. Susu (Liter)	1,1
5. Ikan (Kg)	12,8
4. Minyak dan Lemak	
1. Minyak Kelapa (Liter)	0
2. Minyak Sawit (Liter)	0
3. Minyak Lainnya (Liter)	9,7
5. Buah/Biji Berminyak	
1. Kelapa (Kg)	0
2. Kemiri (Kg)	0,1
6. Kacang-Kacangan	
1. Kedelai (Kg)	4
2. Kacano Tanah (Kg)	0,1
3. Kacang Hijau (Kg)	0
4. Kacang Lainnya (Kg)	0,9
7. Gula	
1. Gula Pasir (Kg)	6,5
2. Gula Merah (Kg)	0
8. Sayuran dan Buah	
1. Sayur (Kg)	97,4
2. Buah (Kg)	20,7
9. Lain-Lain	
1. Minuman (Liter)	3,4
2. Bumbu-Bumbuan (Kg)	2,8



Tabel di atas menunjukkan data konsumsi penduduk terhadap berbagai kelompok bahan pangan di Kabupaten Jayawijaya, yang bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan setempat. Data di atas memberikan gambaran tentang pola konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Jayawijaya. Konsumsi beras dan ubi jalar yang tinggi menunjukkan bahwa kedua komoditas ini merupakan sumber utama karbohidrat bagi penduduk. Sebaliknya, konsumsi ubi kayu dan buah-buahan yang nol menunjukkan adanya kekosongan dalam diversifikasi pangan nabati.

Konsumsi daging sapi dan kerbau serta ikan yang cukup signifikan menunjukkan bahwa sumber protein hewani cukup tersedia. Namun, konsumsi susu dan minyak goreng yang nol menunjukkan adanya kekurangan dalam ketersediaan produk susu dan lemak, yang penting untuk asupan kalsium dan energi.

Konsumsi sayur hijau yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk memiliki akses yang baik terhadap sayuran segar, yang penting untuk asupan vitamin dan mineral. Namun, konsumsi buah-buahan yang nol menunjukkan adanya kekurangan dalam asupan buah-buahan, yang penting untuk kesehatan dan keseimbangan gizi.

Ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya tampaknya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal diversifikasi pangan dan pemenuhan kebutuhan gizi. Kekurangan asupan buah-buahan, susu, dan minyak goreng menunjukkan bahwa penduduk mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang beragam dan bergizi. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan produksi pangan lokal, distribusi pangan yang tidak merata, dan keterbatasan ekonomi yang menghalangi akses terhadap pangan yang cukup. Berikut beberapa saran program untuk pengembangan ke depan:



1. **Diversifikasi Tanaman Pangan:** Meningkatkan diversifikasi tanaman pangan dengan memperkenalkan dan mengembangkan komoditas seperti buah-buahan dan minyak goreng. Ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditas saja dan meningkatkan ketahanan pangan.
2. **Pengembangan Peternakan Susu:** Mengembangkan sektor peternakan susu untuk meningkatkan produksi susu lokal. Ini bisa dilakukan melalui program pelatihan dan bantuan teknis kepada peternak lokal.
3. **Peningkatan Infrastruktur Pertanian:** Meningkatkan infrastruktur pertanian seperti irigasi, penyimpanan, dan transportasi untuk mendukung produksi dan distribusi pangan yang lebih efisien.
4. **Pelatihan dan Penyuluhan Gizi:** Memberikan pelatihan dan penyuluhan gizi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pola makan yang seimbang dan bergizi. Program ini bisa melibatkan penyuluh pertanian, tenaga kesehatan, dan lembaga pendidikan.
5. **Pengembangan Program Bantuan Pangan:** Mengembangkan program bantuan pangan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Program ini bisa berupa pemberian makanan tambahan, subsidi pangan, atau bantuan langsung tunai untuk membeli pangan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkat, dan penduduk dapat menikmati pola makan yang lebih seimbang dan bergizi. Diversifikasi pangan dan peningkatan kapasitas produksi adalah kunci untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.



2.14. 4.9. Pergudangan

Tabel 23. Pergudangan

1. Jumlah Gudang Milik Pemerintah (Unit)	
1. Kondisi Baik (Unit)	0
2. Kondisi Buruk (Unit)	0
2. Jumlah Gudang Milik Swasta (Unit)	
1. Kondisi Baik (Unit)	0
2. Kondisi Buruk (Unit)	0

Tabel di atas menunjukkan data jumlah gudang yang bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya. Data di atas menunjukkan bahwa tidak ada gudang milik pemerintah maupun swasta di Kabupaten Jayawijaya, baik dalam kondisi baik maupun buruk. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur penyimpanan pangan di daerah tersebut sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Ketiadaan gudang ini dapat berdampak signifikan terhadap tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya.

Ketahanan pangan sangat bergantung pada kemampuan untuk menyimpan dan mengelola stok pangan dengan baik. Gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil panen yang dapat digunakan untuk mengatasi fluktuasi produksi dan permintaan pangan. Tanpa gudang yang memadai, Kabupaten Jayawijaya mungkin menghadapi kesulitan dalam menjaga ketersediaan pangan sepanjang tahun, terutama selama musim paceklik atau ketika terjadi gangguan pasokan.

Ketiadaan gudang juga dapat menyebabkan kerugian pasca-panen yang lebih tinggi, karena hasil panen tidak dapat disimpan dengan baik dan mungkin rusak sebelum dapat dikonsumsi atau dijual. Ini tidak hanya mengurangi ketersediaan pangan tetapi juga berdampak negatif pada pendapatan petani. Berikut beberapa saran program pengembangan yang dapat dilakukan:

1. **Pembangunan Gudang Pemerintah:** Pemerintah daerah perlu menginisiasi pembangunan gudang penyimpanan pangan



yang dikelola oleh pemerintah. Gudang ini harus dibangun dengan standar yang baik untuk memastikan kondisi penyimpanan yang optimal dan mengurangi kerugian pasca-panen.

2. **Mendorong Investasi Swasta:** Pemerintah juga dapat mendorong investasi dari sektor swasta untuk pembangunan gudang. Ini bisa dilakukan melalui insentif pajak, subsidi, atau kemudahan perizinan bagi perusahaan yang ingin membangun dan mengoperasikan gudang penyimpanan pangan.
3. **Pelatihan Manajemen Penyimpanan:** Memberikan pelatihan kepada petani dan pengelola gudang tentang teknik penyimpanan yang baik dan manajemen stok pangan. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa hasil panen dapat disimpan dengan aman dan efisien.
4. **Pengembangan Infrastruktur Pendukung:** Selain gudang, infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi, dan fasilitas pengolahan juga perlu ditingkatkan. Ini akan membantu dalam distribusi pangan yang lebih efisien dan mengurangi kerugian selama transportasi.
5. **Kerjasama dengan Lembaga Penelitian:** Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas untuk mengembangkan teknologi penyimpanan pangan yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi lokal. Teknologi ini bisa mencakup sistem pendinginan, pengeringan, dan pengemasan yang dapat memperpanjang umur simpan pangan.
6. **Program Bantuan dan Subsidi:** Mengembangkan program bantuan dan subsidi untuk petani kecil agar mereka dapat membangun fasilitas penyimpanan sederhana di tingkat rumah



tangga atau kelompok tani. Ini akan membantu mengurangi kerugian pasca-panen dan meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat lokal.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkat, dan penduduk dapat menikmati ketersediaan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur penyimpanan yang memadai adalah kunci untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di daerah tersebut.

2.15. 4.10. Data Ketersediaan Pangan Utama

Tabel 24. Data Ketersediaan Pangan Utama

Jenis Pangan Utama	Jumlah (ton)
¹ Beras	23.186
² Sagu	1.827
³ Ubi-ubian	83.092
⁴ Jagung	113

Tabel di atas menunjukkan data jumlah ketersediaan pangan utama di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023, yang bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan setempat. Data di atas memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan utama di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2023. Dari data tersebut, terlihat bahwa ubi-ubian memiliki jumlah ketersediaan tertinggi dengan 83.092 ton, diikuti oleh beras dengan 23.186 ton, jagung dengan 113 ton, dan sagu dengan 1.827 ton.

Jumlah ketersediaan ubi-ubian yang sangat tinggi menunjukkan bahwa komoditas ini merupakan salah satu sumber pangan utama di Kabupaten Jayawijaya. Ubi-ubian, seperti ubi jalar dan singkong, merupakan sumber karbohidrat yang penting dan dapat diandalkan, terutama di daerah pedesaan. Tingginya produksi ubi-ubian juga menunjukkan bahwa tanah dan iklim di Jayawijaya sangat cocok untuk budidaya tanaman ini.



Beras, sebagai salah satu makanan pokok utama di Indonesia, memiliki ketersediaan yang cukup signifikan di Jayawijaya dengan 23.186 ton. Namun, jumlah ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan ubi-ubian. Ini mungkin menunjukkan bahwa beras bukanlah sumber karbohidrat utama bagi sebagian besar penduduk Jayawijaya, atau mungkin ada keterbatasan dalam produksi beras lokal yang perlu diatasi.

Ketersediaan sagu dan jagung yang relatif rendah menunjukkan bahwa kedua komoditas ini belum menjadi sumber pangan utama di Jayawijaya. Sagu, yang merupakan makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia, mungkin belum banyak dibudidayakan atau dikonsumsi di Jayawijaya. Demikian pula, jagung yang memiliki ketersediaan hanya 113 ton menunjukkan bahwa produksi dan konsumsi jagung masih terbatas.

Ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya tampaknya sangat bergantung pada ubi-ubian sebagai sumber utama karbohidrat. Sementara itu, ketersediaan beras yang cukup signifikan menunjukkan adanya diversifikasi pangan, meskipun masih perlu ditingkatkan. Ketersediaan sagu dan jagung yang rendah menunjukkan adanya potensi untuk diversifikasi lebih lanjut guna meningkatkan ketahanan pangan. Berikut beberapa saran program pengembangan yang dapat dilakukan:

1. **Diversifikasi Tanaman Pangan:** Meningkatkan diversifikasi tanaman pangan dengan memperkenalkan dan mengembangkan budidaya sagu dan jagung. Ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada ubi-ubian dan beras, serta meningkatkan ketahanan pangan.
2. **Peningkatan Produksi Beras:** Mengembangkan program intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produksi beras lokal. Ini bisa dilakukan melalui penggunaan benih unggul, penerapan teknologi pertanian modern, dan peningkatan infrastruktur irigasi.



3. **Pengembangan Teknologi Pertanian:** Memanfaatkan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi budidaya tanaman pangan. Ini termasuk penggunaan pupuk organik, pestisida ramah lingkungan, dan teknik budidaya yang lebih efisien.
4. **Pelatihan dan Penyuluhan:** Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani tentang teknik budidaya yang baik dan praktik pertanian berkelanjutan. Ini penting untuk memastikan bahwa petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan produksi pangan.
5. **Pengembangan Infrastruktur Penyimpanan:** Membangun dan meningkatkan infrastruktur penyimpanan pangan seperti gudang yang memadai untuk mengurangi kerugian pasca-panen dan memastikan ketersediaan pangan sepanjang tahun.
6. **Kerjasama dengan Lembaga Penelitian:** Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas untuk penelitian dan pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi lokal dan memiliki produktivitas tinggi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkat, dan penduduk dapat menikmati ketersediaan pangan yang lebih stabil dan beragam. Diversifikasi pangan dan peningkatan kapasitas produksi adalah kunci untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.



2.16. 4.11. Produktifitas Perikanan

Tabel 25. Produktifitas Perikanan

Nama		2023	2024
Penangkapan ikan di perairan Umum			
1. Danau			
1. Jumlah Produksi		8,87	9,52
2. Nilai Produksi	Rp	1.108.350.000	Rp 1.190.367.000
2 Rawa			
1. Jumlah Produksi		20.034	21.035
2. Nilai Produksi	Rp	2.504.250.000	Rp 2.629.462.000
3 Sungai dan lam-lam			
1. Jumlah Produksi		28,36	29,77
2. Nilai Produksi	Rp	2.504.250.000	Rp 2.629.462.000
Budidaya Air tawar			
1 Jumlah Pembudidayaan ikan air Tawar		4.942	4.942
2 Jumlah Produksi		330.473	363.520
3. Produksi	Rp	33.047.300.000	Rp 36.352.030.000
1 Balai benih ikan			
1 Jumlah Balai Benih Ikan		1	1
2. Jumlah Produksi, Usaha Pembenihan		150.000	160.000
3. Nilai Produksi Usaha Pembenihan	Rp	150.000.000	Rp 160.000.000
2 Pembenihan Ikan Rakvat			
1. Jumlah Pembenihan Ikan Rakvat		10	10
2. Jumlah Produksi Benih Ikan Rakyat		621.575	714.811
3. Nilai Produksi Benih Ikan Rakyat		745.890.000	714.811
Nilai Tukar Pembudidayaan Air tawar			
1. Jumlah Pembudidaya Air Tawar		4.583	4.675
2. Penerimaan Pembudidaya	Rp	33.047.300.000	Rp 36.352.030.000



3. Nilai Produksi Usaha Pembenihan		
1 Biaya Konsumsi	Rp 17.565.500.000	Rp 18.786.530.000
2 Biaya Produksi	Rp 15.481.800.000	Rp 18.786.530.000

Tabel di atas menunjukkan data perkembangan perikanan di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024, yang bersumber dari Dinas Perikanan setempat. Data di atas menunjukkan adanya peningkatan dalam berbagai aspek perikanan di Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2023 ke 2024. Jumlah produksi ikan di perairan umum seperti danau, rawa, dan sungai menunjukkan peningkatan yang konsisten, baik dalam jumlah produksi maupun nilai produksi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor penangkapan ikan di perairan umum mengalami pertumbuhan yang positif.

Budidaya ikan air tawar juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah produksi dan nilai produksi. Meskipun jumlah unit pembudidayaan tetap sama, peningkatan produksi menunjukkan adanya efisiensi dan produktivitas yang lebih baik dalam budidaya ikan air tawar. Pembenihan ikan, baik di balai benih ikan maupun pembenihan ikan rakyat, juga menunjukkan peningkatan dalam jumlah produksi dan nilai produksi. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kapasitas pembenihan ikan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif.

Peningkatan produksi dan nilai produksi ikan di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan bahwa sektor perikanan berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan di daerah tersebut. Ikan merupakan sumber protein yang penting, dan peningkatan produksi ikan dapat membantu memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Selain itu, peningkatan nilai produksi juga menunjukkan adanya peningkatan pendapatan bagi para nelayan dan pembudidaya ikan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan



ekonomi mereka. Berikut beberapa saran program pengembangan yang dapat dilakukan:

1. **Peningkatan Infrastruktur Perikanan:** Meningkatkan infrastruktur perikanan seperti fasilitas penyimpanan ikan, pasar ikan, dan transportasi untuk mendukung distribusi ikan yang lebih efisien dan mengurangi kerugian pasca-panen.
2. **Pelatihan dan Penyuluhan:** Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya ikan tentang teknik penangkapan dan budidaya yang baik, manajemen usaha perikanan, dan praktik berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan.
3. **Diversifikasi Produk Perikanan:** Mengembangkan produk olahan ikan untuk meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk perikanan. Ini bisa mencakup produk seperti ikan asin, ikan asap, dan produk olahan lainnya yang memiliki nilai jual tinggi.
4. **Pengembangan Teknologi Perikanan:** Memanfaatkan teknologi perikanan modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ini termasuk penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, teknologi budidaya yang efisien, dan sistem manajemen perikanan yang berbasis data.
5. **Kerjasama dengan Lembaga Penelitian:** Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas untuk penelitian dan pengembangan teknologi perikanan yang sesuai dengan kondisi lokal dan memiliki produktivitas tinggi.
6. **Program Bantuan dan Subsidi:** Mengembangkan program bantuan dan subsidi untuk nelayan dan pembudidaya ikan kecil agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mengadopsi teknologi perikanan yang lebih baik.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor perikanan di Kabupaten Jayawijaya dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Peningkatan produksi dan diversifikasi produk perikanan



adalah kunci untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan di daerah tersebut.

BAB V

PERHUBUNGAN DAN INFRASTRUKTUR

JAYAWIJAYA 2023-2024



BAB V

PERHUBUNGAN DAN INFRASTRUKTUR

5.1. Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya

Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya merupakan unsur pelaksana pemerintah yang memiliki tujuan pokok dan fungsi (Tupoksi) di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya. Dalam menjalankan tupoksinya untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Jayawijaya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya mengemban misi ke 5 dan ke 3 yakni meningkatkan infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya berfokus pada penyediaan pelayanan dasar di bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Jayawijaya dengan indikator kinerja program sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat dan Udara;
- 2) Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Publik Darat dan Udara;
- 3) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Dinas Perhubungan.

Adapun data sektoral Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:

- (1) Jumlah Kendaraan Pribadi;
- (2) Jumlah Moda Angkutan Barang dan Orang;
- (3) Jumlah Jembatan Timbang;
- (4) Jumlah Moda Angkutan Umum;
- (5) Jumlah Perusahaan Angkutan Umum;
- (6) Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum;
- (7) Jumlah Terminal;
- (8) Jumlah Moda Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan
- (9) Jumlah Penumpang masuk dan penumpang keluar kosong
- (10) Jumlah Perkeretaapian



- (11) Jumlah Transportasi Udara
- (12) Jumlah Bandar Udara
- (13) Jumlah landasan helikopter

5.1.1. Jumlah Kendaraan Pribadi

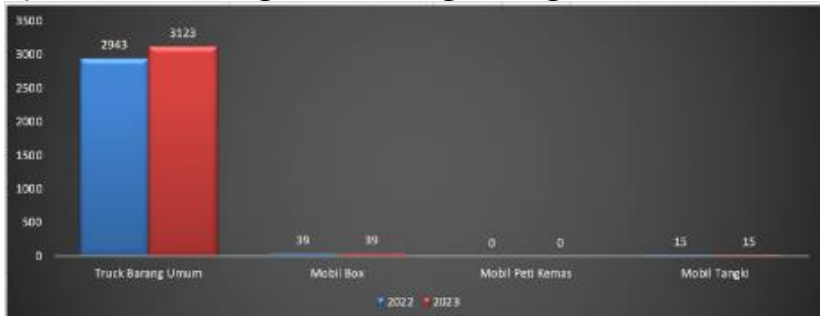


Gambar 45. Jumlah Kendaraan Pribadi

Sebagaimana ditunjukkan diagram batang di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan pribadi berjenis roda 4 pada tahun 2022 sebanyak 1.802 unit, sementara pada jenis kendaraan roda 2 di tahun yang sama sebanyak 26.191 unit. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah kendaraan pribadi berjenis roda 4 sebanyak 1.985 unit, sementara pada jenis kendaraan roda 2 di tahun yang sama sebanyak 27.303 unit. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 2022 dan 2023 terjadi peningkatan kepemilikan kendaraan roda 4 sebesar 9,23%, sedangkan untuk kepemilikan roda 2 terjadi peningkatan sebesar 4,1%.



5.1.2. Jumlah Moda Angkutan Barang/Orang



Gambar 46. Jumlah Moda Angkutan Barang/Orang

Diagram Batang di atas menunjukkan jumlah moda angkutan barang/orang berupa Truck Barang Umum pada tahun 2022 sebanyak 2.943 unit dan pada tahun 2023 sebanyak 3.123 unit. Jenis moda angkutan berjenis Mobil Pick up Box berjumlah 39 baik di tahun 2022 dan 2023. Jenis moda angkutan berjenis Mobil Tangki berjumlah 15 baik di tahun 2022 dan 2023. Sedangkan moda angkutan berjenis Mobil Peti Kemas berjumlah 0 unit baik di tahun 2022 dan 2023. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sepanjang periode waktu tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan jumlah kendaraan Truck Barang Umum sebesar 5,8%, adapun moda angkutan barang/orang berjenis Mobil Pick Up Box, Peti Kemas, dan Tangki tidak terjadi peningkatan baik di tahun 2022 maupun tahun 2023.

5.1.3. Jumlah Jembatan Timbang

Jembatan timbang adalah **seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk** yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (*portable*) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian. Hingga tahun 2023 Kabupaten Jayawijaya belum memiliki Jembatan Timbang baik milik Pemerintah maupun Swasta.



5.1.4. Jumlah Moda Angkutan Umum



Gambar 47. Jumlah Moda Angkutan Umum

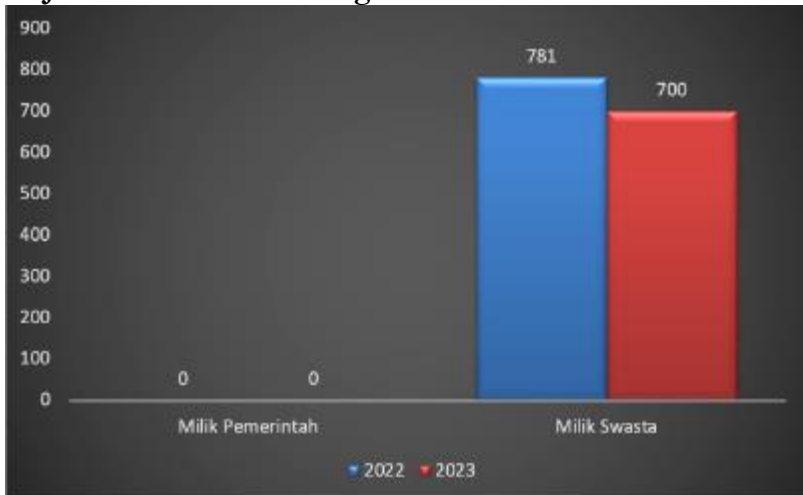
Diagram Batang di atas menunjukkan bahwa Moda Angkutan Umum yang ada di Kabupaten Jayawijaya berupa Angkutan Kota, Taxi, Bus, Ojek, dan Becak. Adapun jumlah masing-masing moda angkutan umum tersebut di antaranya: Jumlah Angkutan Kota pada tahun 2022 sebanyak 765 unit dan tidak ada peningkatan maupun penurunan jumlah kendaraan tersebut di tahun 2023; moda angkutan umum berupa taxi pada tahun 2022 berjumlah 125 unit dan tidak ada peningkatan maupun penurunan jumlah kendaraan tersebut di tahun 2023; moda angkutan umum berupa bus berjumlah 33 unit di tahun 2022 dan 34 unit di tahun 2023; moda angkutan umum berupa becak berjumlah 40 unit di tahun 2022 dan 25 unit di tahun; sementara moda angkutan umum berupa ojek berjumlah 1.100 unit di tahun 2022, dan 0 unit di tahun 2023. Sedangkan moda angkutan umum yang hingga tahun 2023 belum ada di Kabupaten Jayawijaya berupa Bajaj, Bemo, dan Delman.

Jumlah persentase baik peningkatan maupun penurunan jumlah moda angkutan umum selama kurun waktu 2022 dan 2023 sebagai berikut: Jenis moda angkutan umum yang mengalami peningkatan berupa Bus sebesar 2,9 %, sementara jenis moda



angkutan umum yang mengalami penurunan adalah dari jenis moda angkutan umum berupa becak sebesar (-) 60% dan Ojek sebesar (-) 100%. Sedangkan moda angkutan umum yang stagnan atau tidak terjadi baik peningkatan maupun penurunan berupa Angkutan Kota, Taxi, dan Bus.

5.1.5. Jumlah Perusahaan Angkutan Umum



Gambar 48. Jumlah Perusahaan Angkutan Umum

Diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah perusahaan angkutan umum dilihat dari jenis kepemilikan sebagai berikut: pada tahun 2022 jumlah perusahaan angkutan umum yang dimiliki swasta sebesar 781 Perusahaan, sementara di tahun 2023 sebesar 700 perusahaan. Sedangkan perusahaan angkutan umum yang dimiliki Pemerintah berjumlah 0 perusahaan baik di tahun 2022 maupun di tahun 2023. Hal ini juga menjelaskan bahwa terjadi penurunan jumlah perusahaan angkutan umum milik swasta sebesar (-) 11,6 %, serta jumlah perusahaan angkutan umum milik Pemerintah mengalami stagnan.



5.1.6. Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (Kir) Angkutan Umum

Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2023 hanya memiliki 1 tempat pengujian kendaraan, dan masih berfungsi dengan baik. **KIR** adalah proses pengujian kelayakan suatu kendaraan untuk digunakan di jalan raya. Peraturan mengenai uji ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 53 ayat 1. Sedangkan, pada ayat 2 tertulis mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan saat pengujian. Uji ini juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133/2015. Aturan tersebut mengatur tentang pengujian berkala kendaraan bermotor serta pengujian yang wajib dilakukan usai mendapatkan STNK. Setelah melakukan pengujian, surat hasil uji kendaraan bermotor bisa berlaku selama enam bulan ke depan. Artinya, kendaraan niaga perlu melakukan uji sebanyak dua kali dalam setahun. Jika tidak, akan ada sanksi berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Sanksi tersebut sudah tertulis dalam UU LLAJ pasal 76 ayat 1. Dalam Permenhub PBKB, sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor milik pengendara akan dicabut. Adapun beberapa jenis kendaraan bermotor seperti mobil dan truk yang sudah beroperasi lebih dari 5 tahun wajib melakukan uji kendaraan bermotor.

5.1.7. Jumlah Terminal

Tabel 26. Jumlah Terminal

Terminal	2022	2023
Terminal Tipe A	0	0
Terminal Tipe B	0	0
Terminal Tipe C	1	1

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan bahwa Terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan



menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Menurut tipe-nya terminal terdiri dari tiga tipe yaitu Terminal penumpang Tipe A, yaitu berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Kemudian, terminal penumpang Tipe B berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Terakhir, terminal penumpang Tipe C, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES). Hingga tahun 2023 Kabupaten Jayawijaya hanya memiliki 1 terminal penumpang dengan tipe C dan masih aktif. Adapun mobilisasi penumpang sebagai berikut:



Gambar 49. Jumlah Penumpang Melalui Terminal Tipe C

Diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah penumpang yang melalui terminal Tipe A dan B berjumlah 0, sedangkan jumlah penumpang masuk dan keluar melalui terminal Tipe C di tahun 2022 berjumlah 348.900 orang, sementara jumlah penumpang masuk dan keluar melalui terminal Tipe C di tahun 2023 berjumlah 317.400



orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah sementara jumlah penumpang masuk dan keluar melalui terminal Tipe C selama periode tahun 2022 dan 2023 sebesar (-) 9,92 %.

5.1.8. Jumlah Moda Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan

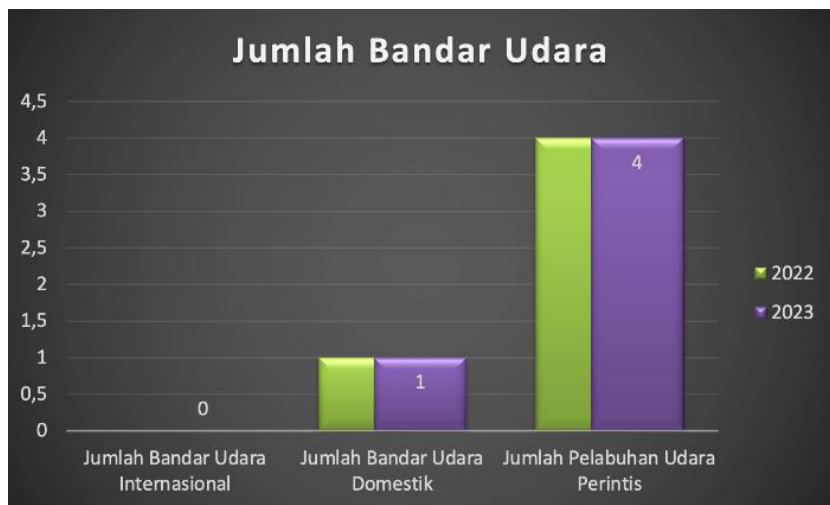
Kabupaten Jayawijaya tidak memiliki jenis moda angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, demikian juga masyarakat yang menjadi penumpang masuk dan keluar berjumlah 0 orang.

5.1.9. Perkeretaapian

Kabupaten Jayawijaya tidak memiliki jenis moda angkutan berupa kereta api baik yang bertenaga uap, diesel, maupun daya magnet, demikian juga masyarakat yang menjadi penumpang masuk dan keluar dengan angkutan berjenis kereta api berjumlah 0 orang.

5.1.10. Transportasi Udara

Bandara (Bandar Udara): Bandara, yang juga sering disebut sebagai bandar udara, adalah tempat di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Secara paling sederhana, sebuah bandara minimal memiliki sebuah landasan pacu (atau helipad untuk helikopter). Bandara yang lebih besar memiliki berbagai fasilitas tambahan, seperti: Bangunan Terminal dan Hanggar. Selain fungsi utamanya sebagai Tempat pesawat diperbaiki, dirawat, dan disimpan. Bandara menghubungkan berbagai moda transportasi di mana angkutan udara bertemu dengan angkutan darat. Bandara di Kabupaten Jayawijaya juga memiliki fungsi sebagai Pendorong Ekonomi yang mempercepat perputaran roda ekonomi dan memfasilitasi perdagangan, pariwisata, dan industri dengan memudahkan akses antara daerah. Berikut merupakan distribusi jumlah bandara di Kabupaten Jayawijaya:



Gambar 50. Jumlah Bandar Udara

Diagram di atas menunjukkan jumlah bandara menurut kualifikasinya, di mana bandara bertaraf internasional berjumlah 0, bandara domestik berjumlah 1, serta jumlah pelabuhan udara perintis berjumlah 4. Baik pada tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat penambahan maupun penutupan bandara yang ada. Selain itu terdapat data yang menunjukkan jumlah landasan helikopter atau *helipad* berjumlah 4 serta tidak terdapat pembukaan baru maupun penutupan helipad selama kurun waktu tahun 2022 sampai 2023

5.2. Dinas Perumahan dan Pemukiman

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor: 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayawijaya, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jayawijaya bertugas untuk membantu Bupati dalam mengkoordinasikan urusan perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati Kabupaten Jayawijaya. Secara teknis Dinas Perumahan dan Pemukiman bertanggung jawab dalam merencanakan,



mengembangkan, pemeliharaan area perumahan dan pemukiman yang dimulai dari formulasi kebijakan, mengkoordinasikan implementasi, dan monitoring aktifitas yang berhubungan dengan area perumahan dan pemukiman di Kabupaten Jayawijaya. Selain itu dinas perumahan dan pemukiman juga berwenang untuk menentukan standar, prosedur, dan kriteria dalam pemeliharaan dan pengembangan.

Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Jayawijaya melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar serta Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Pertanahan, di mana hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) misi Kabupaten Jayawijaya yaitu misi ke 1 (satu) dan ke 5 (lima) :

- 1) Misi 1 (satu): “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”
- 2) Misi 5 (lima): “Meningkatnya Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan”

Adapun data sektoral Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:

- (1) Luas Pemukiman;
- (2) Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisinya;
- (3) Jumlah Rumah Berdasarkan Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah;
- (4) Jumlah Untuk MBR;
- (5) Jumlah dan Luas Tempat Pemakaman Umum;
- (6) Jumlah dan Luas Taman Makan Pahlawan;
- (7) Jumlah Ruang Terbuka Hijau;
- (8) Jumlah kawasan Permukiman Kumuh;
- (9) Jumlah Rumah Dinas.

5.2.1. Luas Pemukiman

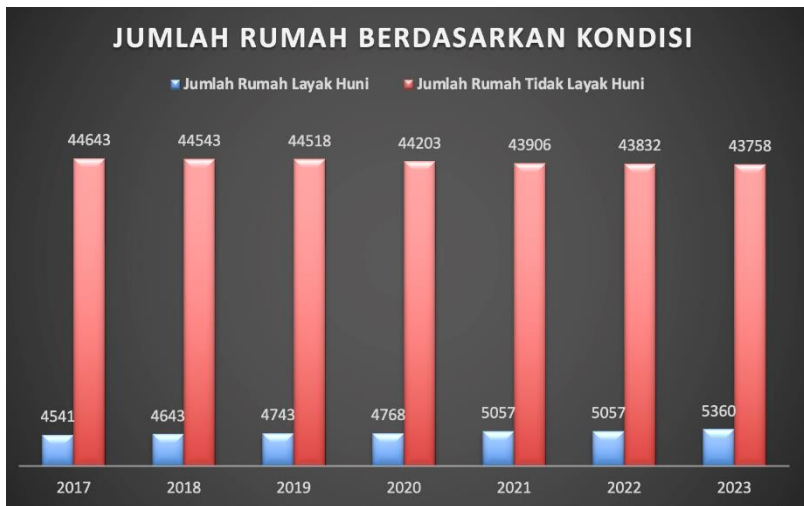
Luas wilayah daratan Kabupaten Jayawijaya sebesar 13.925,31 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 tercatat sebanyak 269.553 jiwa. Jika dihitung antara jumlah penduduk dan luas wilayah maka dapat diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk yang hanya mencapai 19.4 jiwa per km². Hal tersebut



menyimpulkan bahwa Kabupaten Jayawijaya memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah.

5.2.2. Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi

Total jumlah rumah berdasarkan kondisi yaitu sebanyak 49.118 (jumlah yang layak dan tidak).



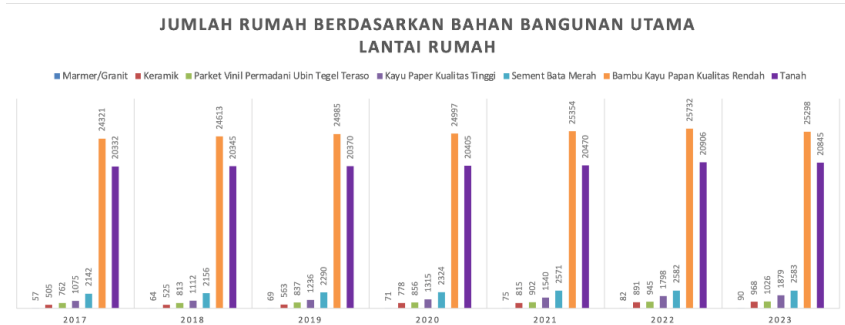
Gambar 51. Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi

Diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan bangunan rumah yang ada di Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2023 baik dengan kondisi layak maupun tidak layak sebanyak 49.118 unit. Blok berwarna merah menunjukkan jumlah rumah dengan kondisi tidak layak, dan blok berwarna biru menunjukkan jumlah rumah dengan kondisi layak. Diagram di atas juga menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2023 terlihat jumlah rumah tidak layak semakin berkurang dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2017 jumlah bangunan rumah tidak layak sebanyak 44.643 unit sedangkan di tahun 2023 menjadi 43.758 unit. Demikian juga jumlah rumah dengan kategori layak semakin meningkat dari tahun ke tahun, di mana jumlah rumah layak pada tahun 2017 sebanyak



4.541 unit, sedangkan di tahun 2023 tercatat jumlah rumah dengan kategori layak sebesar 5.360 unit.

5.2.3. Jumlah Rumah Berdasarkan Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah



Gambar 52. Jumlah Rumah Berdasarkan bahan Bangunan Utama Lantai Rumah

Diagram di atas menunjukkan jumlah rumah yang dilihat berdasarkan bahan bangunan utama lantai rumah. Variasi bahan bangunan utama lantai rumah cukup beragam yang terdiri dari Marmer/Granit, Keramik, kategori parket Vinil, Permadani, Ubin, Tegel, dan Teraso, Kayu paper Kualitas Tinggi, Semen/Bata Merah, Bambu/Kayu Papan Berkualitas Rendah, dan yang terakhir adalah Tanah. Dari tahun ke tahun jenis bahan bangunan utama lantai rumah didominasi oleh Bambu/Kayu Papan Berkualitas Rendah. Penggunaan jenis bahan bangunan utama lantai rumah berupa Bambu/Kayu Papan Berkualitas Rendah terus menurun seiring jumlah rumah berdasarkan kondisi layak meningkat yakni pada tahun 2023 jumlah bahan bangunan utama lantai rumah cukup beragam yang terdiri dari Marmer/Granit sebanyak 90 unit, Keramik sebanyak 968 unit, kategori parket Vinil, Permadani, Ubin, Tegel, dan Teraso sebanyak 1.026 unit, Kayu paper Kualitas Tinggi 1.879 unit, Semen/Bata Merah 2.583 unit, Bambu/Kayu Papan



Berkualitas Rendah sebanyak 25.298 unit, dan yang terakhir adalah Tanah unit 20.845 unit.

5.2.4. Jumlah Untuk MBR

Tabel 27. Jumlah Rumah untuk MBR

Rumah Untuk MBR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Susunan Hunian Milik	0	0	0	0	0	0	0
1. Jumlah Rusunami	0	0	0	0	0	0	0
2. Daya Tampung	0	0	0	0	0	0	0
Rumah Susunan Hunian Milik Sewa	0	0	0	0	0	0	0
1. Jumlah Rusun	0	0	0	0	0	0	0
2. Daya Tampung	0	0	0	0	0	0	0

Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah program perumahan yang ditujukan untuk menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Rumah MBR terdiri dari Rumah Susun Milik (rusunami) dan Rumah Susun Milik Sewa. Hingga tahun 2023 Kabupaten Jayawijaya belum memiliki program Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

5.2.5. Jumlah dan Luas Tempat Pemakaman Umum

Tabel 28. Jumlah dan Luas Tempat Pemakaman Umum

JUMLAH DAN LUAS TEMPAT PEMAKAMAN UMUM	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pemakaman Umum								
Jumlah Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Unit	3	3	3	3	3		
Jumlah Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Unit	0	0	0	0	0		
Luas Pemakaman Umum								
Luas Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Ha	4	4	4	4	4		
Luas Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Ha	0	0	0	0	0		

Tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Tempat Pemakaman Umum yang ada di Kabupaten Jayawijaya yang dikelola oleh Pemerintah sebanyak 3 (tiga) unit dengan luas 4 (empat) Ha. Sedangkan jumlah Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Swasta/Masyarakat tidak ada. Jumlah dan luas Tempat Pemakaman Umum tersebut tidak terdapat perubahan hingga tahun 2021.



5.2.6. Jumlah dan Luas Taman Makam Pahlawan

Tabel 29. Jumlah dan Luas Taman Makam Pahlawan

JUMLAH DAN LUAS TAMAN MAKAM PAHLAWAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pemakaman di TMP	Unit	1	1	1	1	1		
Luas TMP	Ha	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya memiliki 1 unit Taman Makam Pahlawan dengan luas sebesar 1.2 Ha. Sepanjang tahun 2017 sampai 2021 tidak terdapat perubahan baik jumlah maupun luas Taman Makam Pahlawan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

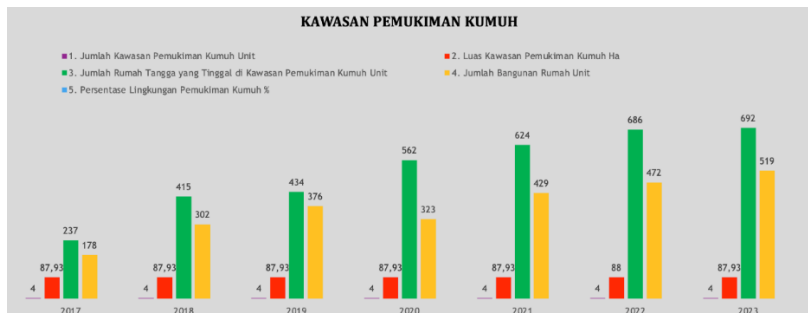
5.2.7. Jumlah Ruang Terbuka Hijau

Tabel 30. Jumlah dan Luas Ruang Terbuka Hijau

JUMLAH RUANG TERBUKA HIJAU	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Ha	4	4	4	4	4		
2. Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Ha	0	0	0	0	0		
Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	1	1	1	1	1		
3. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah	%	0	0	0	0	0		

Tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebanyak 4 (empat) unit dengan luas 1 (satu) Ha. Sedangkan jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh Swasta/Masyarakat tidak ada. Jumlah dan luas Ruang Terbuka Hijau tersebut tidak mengalami perubahan hingga tahun 2021.

5.2.8. Jumlah Kawasan Pemukiman Kumuh



Gambar 53. Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh



Diagram di atas menunjukkan bahwa Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ada di Kabupaten Jayawijaya sebanyak 4 (empat) Unit, jumlah tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Permukiman Kumuh terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2017 sebanyak 237 Unit, tahun 2018 sebanyak 415 unit, tahun 2019 sebanyak 434 unit, tahun 2020 sebanyak 562 unit, tahun 2021 sebanyak 624, tahun 2022 sebanyak 686 unit dan di tahun 2023 sebanyak 692 unit. Sementara Luas Kawasan Permukiman Kumuh tidak mengalami perubahan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 seluas 87,93 Ha, namun di tahun 2022 mengalami peningkatan dengan luas 88 Ha dan kembali berkurang di tahun 2023 menjadi 87,93 Ha. Sedangkan Jumlah bangunan Rumah di kawasan Pemukiman Kumuh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2017 sebanyak 178 unit, di tahun 2018 sebanyak 302 unit, dan di tahun 2019 sebanyak 376 unit. Pada tahun 2020 Jumlah bangunan Rumah di kawasan Pemukiman Kumuh mengalami penurunan hingga 323 unit, namun kembali bertambah di tahun 2021, 2022, dan 2023, secara berturut-turut berjumlah 429 unit, 472 unit dan terakhir sebanyak 519 unit.

5.2.9. Jumlah Rumah Dinas

Tabel 31. Jumlah Rumah Dinas

JUMLAH RUMAH DINAS	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Rumah Dinas yang Ditinggal Pegawai	Unit	0	0	0	0	0	0	503
2. Rumah Dinas yang Diputihkan	Unit	0	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Balik Nama Surat Izin Tinggal	Unit	0	0	0	0	0	0	0

Tabel di atas menunjukkan bahwa hingga tahun 2023 jumlah rumah dinas yang ditinggali oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebanyak 503 unit. Adapun jumlah rumah dinas yang diputihkan maupun balik nama surat izin tinggal tidak ada. Sehingga jumlah rumah dinas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berjumlah tetap yakni sebanyak 503 unit hingga tahun 2023.



5.3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Peraturan Bupati nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya, maka tugas dan fungsi Dinas PUPR terkait erat dengan Misi ke 1 dan 5, yaitu :

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- 2) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

Adapun data sektoral Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:

- (1) Panjang Jalan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi menurut Distrik;



(2) Panjang Jalan Kabupaten/Kota dan Kondisinya.

5.3.1. Panjang Jalan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Menurut Distrik

Tabel 32. Panjang jalan dan Kondisinya Berdasarkan Administrasi

PANJANG JALAN DAN KONDISI BERDASARKAN ADMINISTRASI MENURUT DISTRIK	2023	2024	SATUAN
1. Panjang Jalan Nasional	0	0	Km
a. Kondisi Baik	0	0	Desa
b. Kondisi Sedang	0	0	Desa
c. Kondisi Rusak Ringan	0	0	Desa
d. Kondisi Rusak Berat	0	0	Desa
2. Panjang Jalan Tol	0	0	Km
a. Kondisi Baik	0	0	Desa
b. Kondisi Sedang	0	0	Desa
c. Kondisi Rusak Ringan	0	0	Desa
d. Kondisi Rusak Berat	0	0	Desa
3. Panjang Ruas Jalan Provinsi	0	0	Km
a. Kondisi Baik	0	0	Desa
b. Kondisi Sedang	0	0	Desa
c. Kondisi Rusak Ringan	0	0	Desa
d. Kondisi Rusak Berat	0	0	Desa
e. Panjang Jalan Provinsi/km	0	0	Km
f. Jalan Provinsi Yang Baik/km	0	0	Km
g. Jalan Provinsi Yang Rusak/km	0	0	Km

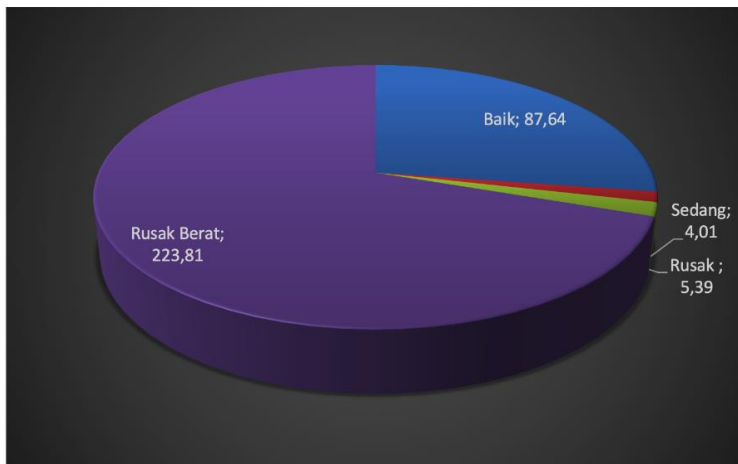
5.3.2. Panjang Jalan Kabupaten/Kota

Panjang jalan kabupaten 321,46 km. Gambar 54 menunjukkan kondisi jalan di Kabupaten Jayawijaya dalam satuan kilometer (KM), memberikan wawasan yang mendalam tentang kualitas infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa jalan dalam kondisi baik memiliki panjang 87.64 km. Meskipun ini merupakan bagian yang signifikan, panjang jalan yang baik ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk peningkatan dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah ini.

Jalan yang baik sangat penting untuk mendukung mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi, memungkinkan transportasi yang lancar, mengurangi biaya operasional kendaraan, dan meningkatkan



keselamatan pengguna jalan. Namun, terdapat 223.81 km jalan yang rusak berat, yang merupakan bagian terbesar dari diagram. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan atau rekonstruksi jalan. Jalan yang rusak berat dapat menghambat transportasi, meningkatkan risiko kecelakaan, dan berdampak negatif pada perekonomian lokal. Perbaikan jalan yang rusak berat harus menjadi prioritas utama untuk memastikan aksesibilitas dan keselamatan yang lebih baik.



Gambar 54. Kondisi Jalan Kabupaten/Kota

Selain itu, terdapat 4.01 km jalan dalam kondisi sedang dan 5.39 km jalan yang rusak. Meskipun panjang jalan dalam kondisi sedang dan rusak relatif kecil dibandingkan dengan jalan yang baik dan rusak berat, perhatian tetap diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Jalan dalam kondisi sedang mungkin memerlukan perawatan rutin untuk mencegah penurunan kualitas, sementara jalan yang rusak memerlukan perbaikan segera untuk mencegah kondisi memburuk menjadi rusak berat.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi jalan di Kabupaten Jayawijaya dan dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan dan pengambilan keputusan dalam



pengelolaan infrastruktur jalan. Pemerintah daerah perlu fokus pada perbaikan jalan yang rusak berat untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi. Selain itu, perawatan rutin dan perbaikan jalan dalam kondisi sedang dan rusak juga penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan infrastruktur jalan yang berkelanjutan. Dengan demikian, upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Jayawijaya.

5.4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jayawijaya

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan arsip dan penyediaan layanan perpustakaan bagi masyarakat. Dinas ini bertanggung jawab untuk mengelola, menyimpan, dan melestarikan arsip-arsip penting yang dimiliki oleh pemerintah daerah serta menyediakan akses informasi melalui layanan perpustakaan. Tugas pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan, pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang kearsipan dan perpustakaan, serta pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka dan arsip. Fungsi utama dinas ini adalah memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan, serta membina dan melaksanakan tugas di bidang tersebut.

Dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berperan sebagai pusat informasi dan dokumentasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan menyediakan akses yang mudah dan luas terhadap informasi, dinas ini membantu meningkatkan literasi masyarakat dan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih berpengetahuan. Selain itu, melalui pengelolaan arsip yang baik, dinas ini memastikan bahwa data dan informasi penting dapat diakses dengan cepat dan akurat, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pemerintah daerah. Dengan demikian,

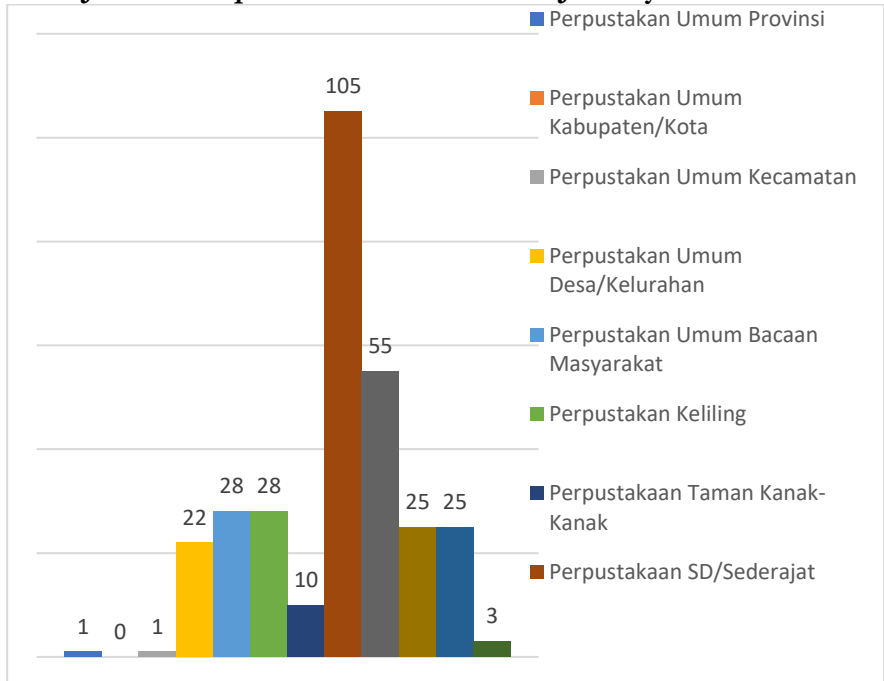


Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jayawijaya tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan informasi, tetapi juga sebagai pilar penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Adapun Data Sektoral yang disajikan sebagai berikut:

- 1) Jumlah Perpustakaan Berdasarkan Jenisnya;
- 2) Jumlah Ketersediaan Judul Buku;
- 3) Jumlah Perpustakaan Online/Digital;
- 4) Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan;
- 5) Jumlah Anggota Perpustakaan

5.4.1. Jumlah Perpustakaan Berdasarkan Jenisnya



Gambar 55. Jumlah Perpustakaan dan Sejenisnya

Diagram batang yang ditampilkan menunjukkan jumlah perpustakaan di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan jenisnya. Terdapat sepuluh kategori perpustakaan yang berbeda, dengan jumlah yang



bervariasi. Kategori pertama memiliki 22 perpustakaan, kategori kedua memiliki 28 perpustakaan, dan kategori ketiga menunjukkan peningkatan signifikan dengan 105 perpustakaan, yang merupakan jumlah tertinggi di antara semua kategori. Kategori keempat memiliki 55 perpustakaan, kategori kelima dan keenam masing-masing memiliki 10 perpustakaan, kategori ketujuh menunjukkan peningkatan sedikit dengan 25 perpustakaan, kategori kedelapan turun drastis dengan hanya tiga perpustakaan, dan kategori kesembilan serta kesepuluh tidak memiliki data atau jumlahnya nol.

Analisis data ini menunjukkan distribusi perpustakaan yang tidak merata di Kabupaten Jayawijaya. Kategori ketiga yang memiliki jumlah perpustakaan paling banyak mungkin menunjukkan bahwa jenis perpustakaan ini (mungkin perpustakaan umum atau komunitas) mendapatkan pendanaan atau prioritas yang lebih tinggi. Sebaliknya, kategori kesembilan dan kesepuluh yang tidak memiliki perpustakaan sama sekali menunjukkan adanya potensi kekurangan layanan atau area yang perlu dikembangkan.

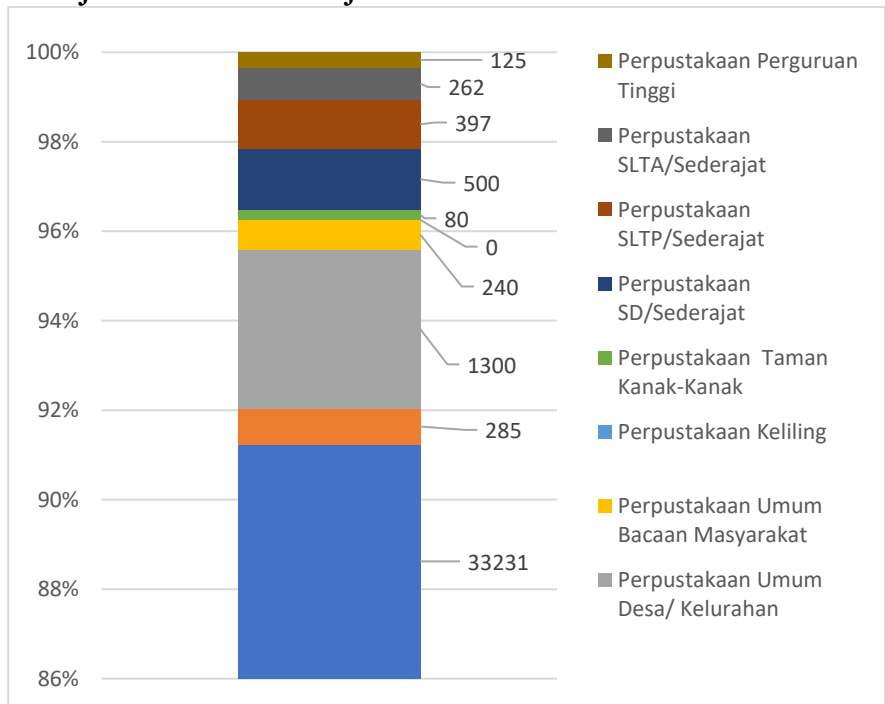
Untuk program pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan berdasarkan data ini adalah:

1. Menyelidiki alasan mengapa jenis perpustakaan tertentu (kategori kesembilan dan kesepuluh) tidak ada dan mengeksplorasi inisiatif untuk memperkenalkan layanan perpustakaan tersebut.
2. Mempertimbangkan redistribusi sumber daya untuk menyeimbangkan disparitas antara berbagai jenis perpustakaan.
3. Mengembangkan program yang ditargetkan untuk mendukung jenis perpustakaan yang kurang terwakili (seperti kategori kedelapan).
4. Melibatkan komunitas untuk menilai kebutuhan mereka terhadap jenis layanan perpustakaan tertentu yang saat ini belum disediakan.
5. Melaksanakan program penjangkauan dari jenis perpustakaan yang terwakili dengan baik (seperti kategori ketiga) untuk berbagi sumber daya dan keahlian dengan jenis perpustakaan yang kurang umum.



Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan adanya peluang untuk pertumbuhan dan peningkatan dalam penyediaan layanan perpustakaan yang beragam di seluruh komunitas Kabupaten Jayawijaya. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan dapat tercipta distribusi layanan perpustakaan yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5.4.2. Jumlah Ketersediaan Judul Buku



Gambar 56. Jumlah Perpustakaan dan Sejenisnya

Diagram batang yang ditampilkan menunjukkan jumlah ketersediaan judul buku di berbagai perpustakaan di Kabupaten Jayawijaya. Sumbu vertikal menunjukkan jumlah judul buku, sementara sumbu horizontal mencantumkan berbagai jenis perpustakaan. Data menunjukkan bahwa Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota memiliki jumlah judul buku tertinggi yaitu 33.231, diikuti oleh Perpustakaan



Desa/Kelurahan dengan 13.000 judul buku. Perpustakaan Keliling dan SD/Sederajat masing-masing memiliki 500 judul buku, sedangkan Perpustakaan Umum Bacaan Masyarakat memiliki 240 judul buku. Perpustakaan SLTP/Sederajat memiliki 397 judul buku, SLTA/Sederajat memiliki 262 judul buku, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki jumlah judul buku paling sedikit yaitu 125.

Analisis data ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan yang signifikan dalam distribusi judul buku di berbagai jenis perpustakaan di Kabupaten Jayawijaya. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dan Perpustakaan Desa/Kelurahan memiliki jumlah judul buku yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perpustakaan lainnya. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa perpustakaan-perpustakaan ini mendapatkan prioritas lebih tinggi dalam hal pendanaan dan pengadaan buku. Sebaliknya, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan TK memiliki jumlah judul buku yang sangat sedikit, yang dapat mengindikasikan kurangnya perhatian atau sumber daya yang dialokasikan untuk perpustakaan-perpustakaan ini.

Untuk program pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

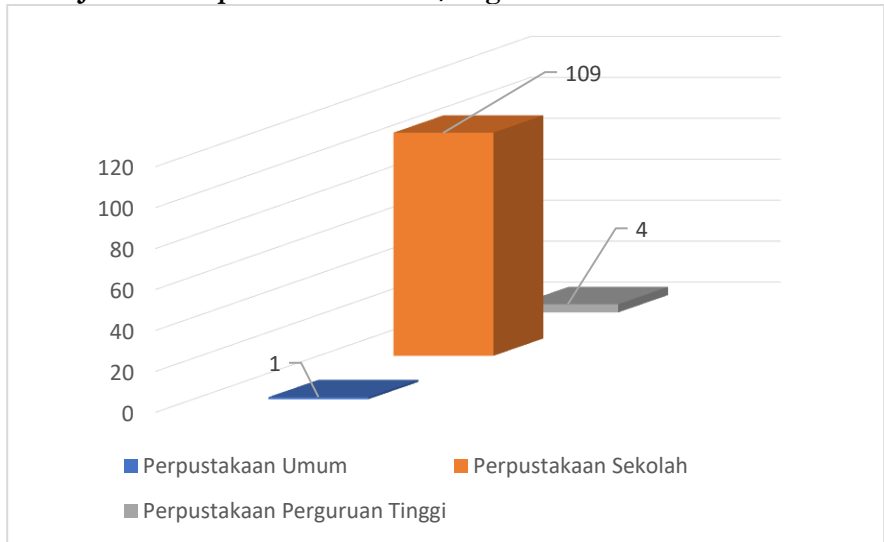
1. **Redistribusi Sumber Daya:** Mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk perpustakaan yang memiliki jumlah judul buku yang lebih sedikit, seperti Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan TK, untuk memastikan bahwa semua perpustakaan memiliki koleksi buku yang memadai.
2. **Pengadaan Buku Baru:** Melakukan pengadaan buku baru secara berkala untuk memperbarui dan menambah koleksi buku di perpustakaan-perpustakaan yang kurang terwakili.
3. **Pelatihan Pustakawan:** Memberikan pelatihan kepada pustakawan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola perpustakaan dan koleksi buku, serta dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
4. **Program Penjangkauan:** Melaksanakan program penjangkauan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perpustakaan dan mendorong lebih banyak orang untuk memanfaatkan layanan perpustakaan.



5. **Kerjasama dengan Sekolah dan Institusi Pendidikan:** Meningkatkan kerjasama dengan sekolah dan institusi pendidikan untuk memastikan bahwa perpustakaan memiliki koleksi buku yang relevan dan mendukung kurikulum pendidikan.

Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan dapat tercipta distribusi yang lebih merata dan berkualitas terhadap sumber daya pendidikan di seluruh Kabupaten Jayawijaya, sehingga semua masyarakat dapat mengakses informasi dan pengetahuan yang mereka butuhkan.

5.4.3. Jumlah Perpustakaan Online/Digital



Gambar 57. Jumlah Perpustakaan Online/Digital

Diagram batang yang ditampilkan menunjukkan jumlah ketersediaan perpustakaan online/digital di Kabupaten Jayawijaya. Terdapat tiga kategori perpustakaan yang ditampilkan: Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi. Batang berwarna coklat mewakili Perpustakaan Umum dengan satu perpustakaan, batang berwarna abu-abu mewakili Perpustakaan Sekolah



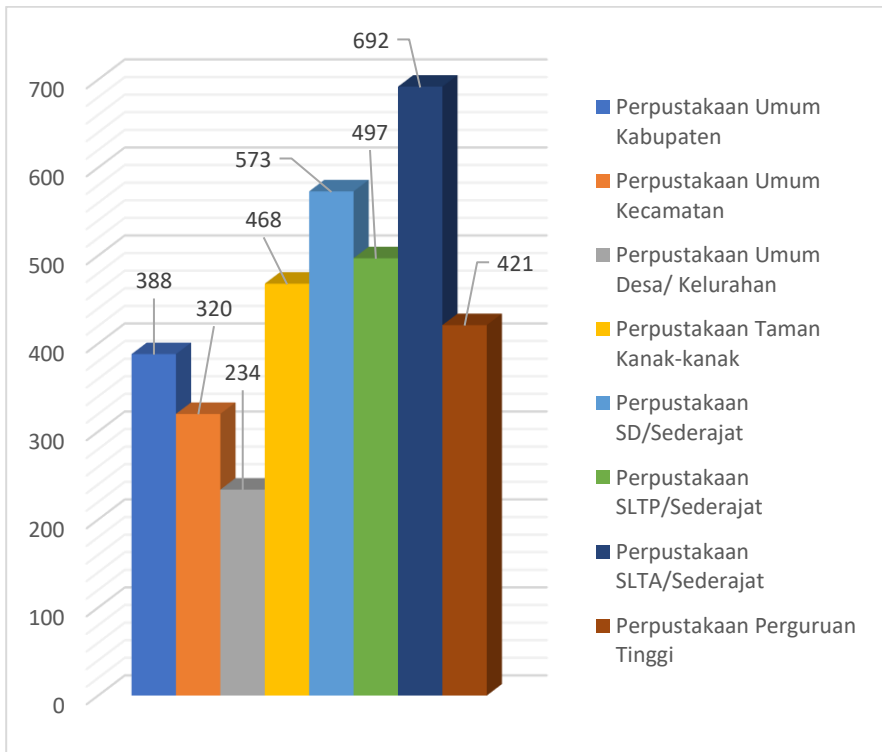
dengan 109 perpustakaan, dan batang berwarna biru mewakili Perpustakaan Perguruan Tinggi dengan empat perpustakaan.

Analisis data ini menunjukkan bahwa Perpustakaan Sekolah mendominasi sektor perpustakaan online/digital di Kabupaten Jayawijaya dengan 109 fasilitas, yang menunjukkan adanya penekanan kuat pada penyediaan sumber daya digital di tingkat sekolah. Sebaliknya, hanya terdapat satu Perpustakaan Umum yang tersedia secara online/digital, yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam aksesibilitas bagi masyarakat umum di luar institusi pendidikan. Perpustakaan Perguruan Tinggi sedikit lebih baik terwakili dibandingkan Perpustakaan Umum dengan empat fasilitas yang tersedia.

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa meskipun institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas telah mengambil langkah-langkah untuk menyediakan layanan perpustakaan digital, terdapat kekurangan yang mencolok dalam layanan tersebut yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan disparitas dalam akses informasi di antara berbagai kelompok di Kabupaten Jayawijaya.

Untuk program pengembangan ke depan, disarankan untuk fokus pada peningkatan jumlah perpustakaan online/digital yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Ini dapat melibatkan investasi dalam infrastruktur Perpustakaan Umum yang ada atau mendirikan perpustakaan baru dengan kemampuan digital yang kuat. Selain itu, kemitraan antara sekolah dan perpustakaan umum dapat dibangun untuk berbagi sumber daya dan memperluas akses digital ke audiens yang lebih luas. Memastikan akses yang merata di semua sektor akan membantu mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat dan literasi informasi di antara semua penduduk Kabupaten Jayawijaya.

5.4.4. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan



Gambar 58. Jumlah Kunjungan Perpustakaan

Diagram batang yang ditampilkan menunjukkan jumlah pemustaka (pengunjung) ke perpustakaan di Kabupaten Jayawijaya. Terdapat delapan kategori perpustakaan yang berbeda, masing-masing diwakili oleh warna yang berbeda. Sumbu vertikal menunjukkan jumlah pengunjung, sementara sumbu horizontal mencantumkan jenis perpustakaan. Data yang diperbaiki menunjukkan bahwa Perpustakaan Umum Kabupaten memiliki 388 pengunjung, Perpustakaan Umum Kecamatan memiliki 320 pengunjung, Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan memiliki 234 pengunjung, Perpustakaan Taman Kanak-kanak memiliki 468 pengunjung, Perpustakaan SD/Sederajat memiliki 573 pengunjung, Perpustakaan SLTP/Sederajat memiliki 497 pengunjung, Perpustakaan SLTA/Sederajat memiliki 692 pengunjung, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki 421 pengunjung.



Analisis data ini menunjukkan pola penggunaan perpustakaan di Kabupaten Jayawijaya. Perpustakaan SLTA/Sederajat memiliki jumlah pengunjung tertinggi dengan 692 pengunjung, diikuti oleh Perpustakaan SD/Sederajat dengan 573 pengunjung. Jumlah pengunjung terendah terdapat pada Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan dengan hanya 234 pengunjung.

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa perpustakaan yang melayani tingkat pendidikan menengah dan dasar memiliki jumlah pengunjung yang tinggi, yang mungkin mencerminkan kebutuhan besar akan sumber daya pendidikan di kalangan siswa. Sebaliknya, perpustakaan umum di tingkat desa/kelurahan memiliki jumlah pengunjung yang rendah, yang dapat mengindikasikan kurangnya kesadaran atau aksesibilitas terhadap layanan perpustakaan di daerah tersebut.

Untuk program pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

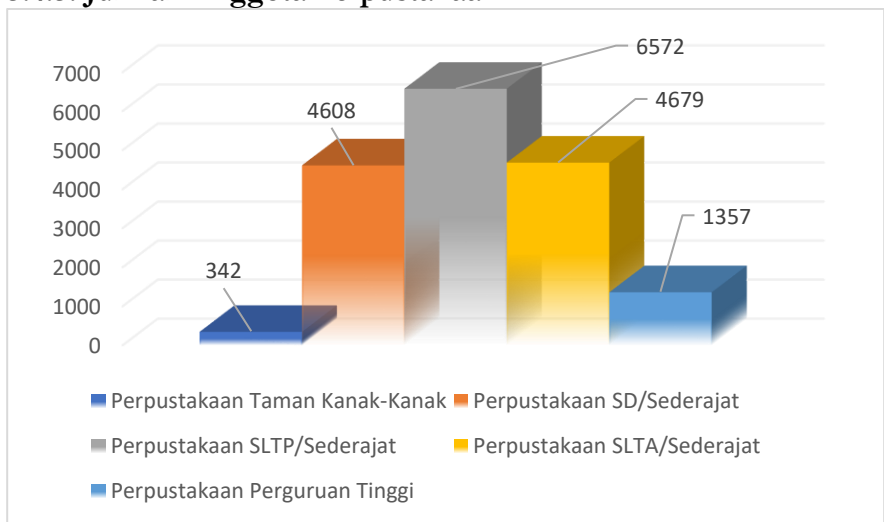
1. **Meningkatkan Kesadaran dan Aksesibilitas:** Melakukan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan dan layanan yang mereka tawarkan, terutama di tingkat desa/kelurahan.
2. **Pengembangan Program Khusus:** Mengembangkan program khusus yang menarik bagi berbagai kelompok usia dan kebutuhan, seperti sesi mendongeng untuk anak-anak, klub buku untuk remaja, dan pelatihan keterampilan untuk orang dewasa.
3. **Kerjasama dengan Sekolah dan Institusi Pendidikan:** Meningkatkan kerjasama dengan sekolah dan institusi pendidikan untuk memastikan bahwa perpustakaan memiliki koleksi buku yang relevan dan mendukung kurikulum pendidikan.
4. **Peningkatan Fasilitas dan Sumber Daya:** Mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan fasilitas perpustakaan, seperti ruang baca yang nyaman, akses internet, dan koleksi buku yang lebih beragam.
5. **Program Penjangkauan:** Melaksanakan program penjangkauan untuk menjangkau masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses



mudah ke perpustakaan, seperti perpustakaan keliling atau layanan perpustakaan digital.

Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan dapat tercipta distribusi yang lebih merata dan berkualitas terhadap sumber daya pendidikan di seluruh Kabupaten Jayawijaya, sehingga semua masyarakat dapat mengakses informasi dan pengetahuan yang mereka butuhkan.

5.4.5. Jumlah Anggota Perpustakaan



Gambar 59. Jumlah Anggota Perpustakaan

Diagram batang yang ditampilkan menunjukkan jumlah keanggotaan perpustakaan di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan tingkat pendidikan. Terdapat lima kategori perpustakaan yang berbeda: Perpustakaan Taman Kanak-Kanak, Perpustakaan SD/Sederajat, Perpustakaan SLTP/Sederajat, Perpustakaan SLTA/Sederajat, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi. Sumbu vertikal menunjukkan jumlah anggota, sementara sumbu horizontal mencantumkan jenis perpustakaan. Data yang diperbaiki menunjukkan bahwa Perpustakaan Taman Kanak-Kanak memiliki 342 anggota, Perpustakaan SD/Sederajat memiliki 4608 anggota, Perpustakaan SLTP/Sederajat memiliki 6572 anggota, Perpustakaan SLTA/Sederajat memiliki 4679 anggota, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki 1357 anggota.



memiliki 6572 anggota, Perpustakaan SLTA/Sederajat memiliki 4679 anggota, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki 1357 anggota.

Analisis data ini menunjukkan bahwa Perpustakaan SLTP/Sederajat memiliki jumlah anggota tertinggi dengan 6572 anggota, diikuti oleh Perpustakaan SLTA/Sederajat dengan 4679 anggota. Perpustakaan SD/Sederajat juga memiliki jumlah anggota yang signifikan yaitu 4608. Sebaliknya, Perpustakaan Taman Kanak-Kanak dan Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki jumlah anggota yang jauh lebih sedikit, masing-masing 342 dan 1357.

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa perpustakaan yang melayani tingkat pendidikan menengah pertama dan atas memiliki jumlah anggota yang tinggi, yang mungkin mencerminkan kebutuhan besar akan sumber daya pendidikan di kalangan siswa remaja. Sebaliknya, jumlah anggota yang rendah di Perpustakaan Taman Kanak-Kanak dan Perguruan Tinggi dapat mengindikasikan kurangnya kesadaran atau aksesibilitas terhadap layanan perpustakaan di tingkat pendidikan tersebut.

Untuk program pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. **Meningkatkan Kesadaran dan Aksesibilitas:** Melakukan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan dan layanan yang mereka tawarkan, terutama di tingkat taman kanak-kanak dan perguruan tinggi.
2. **Pengembangan Program Khusus:** Mengembangkan program khusus yang menarik bagi berbagai kelompok usia dan kebutuhan, seperti sesi mendongeng untuk anak-anak, klub buku untuk remaja, dan pelatihan keterampilan untuk mahasiswa.
3. **Kerjasama dengan Sekolah dan Institusi Pendidikan:** Meningkatkan kerjasama dengan sekolah dan institusi pendidikan untuk memastikan bahwa perpustakaan memiliki koleksi buku yang relevan dan mendukung kurikulum pendidikan.
4. **Peningkatan Fasilitas dan Sumber Daya:** Mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan fasilitas perpustakaan,



seperti ruang baca yang nyaman, akses internet, dan koleksi buku yang lebih beragam.

5. **Program Penjangkauan:** Melaksanakan program penjangkauan untuk menjangkau masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses mudah ke perpustakaan, seperti perpustakaan keliling atau layanan perpustakaan digital.

Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan dapat tercipta distribusi yang lebih merata dan berkualitas terhadap sumber daya pendidikan di seluruh Kabupaten Jayawijaya, sehingga semua masyarakat dapat mengakses informasi dan pengetahuan yang mereka butuhkan.

5.5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jayawijaya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya memiliki peran penting dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. DPMK bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Tugas pokok DPMK meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung. Fungsi utama DPMK adalah meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat kampung melalui berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan kelembagaan masyarakat kampung.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jayawijaya, DPMK berperan dalam memastikan penggunaan Dana Desa (DD) yang efektif dan tepat sasaran. Program-program prioritas seperti penanganan stunting, ketahanan pangan, dan pencegahan COVID-19 menjadi fokus utama yang harus dialokasikan dalam penggunaan DD¹. DPMK juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur kampung untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, DPMK



berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung melalui sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, DPMK Kabupaten Jayawijaya tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat kampung untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Melalui berbagai program pemberdayaan, DPMK berkontribusi signifikan dalam mewujudkan masyarakat Jayawijaya yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

Adapun data sektoral yang disajikan sebagai berikut:

1. Data Administrasi Kampung/Desa;
2. Data Kantor Pemerintah Kampung/Desa;
3. Data Aparat Pemerintah Kampung/Desa berdasarkan Tingkat Pendidikan;
4. Data Lembaga Kemasyarakatan Kampung/Desa dan Lembaga Adat;

5.5.1. Data Administrasi Kampung/Desa

Tabel 33. Data Administrasi Kampung/Desa

1. Desa/Kelurahan/Desa Adat

1.Des	328
1. Jumlah Desa	328
2. Jumlah RW	98
3. Jumlah RT	106
2. Desa Adat	
1. Jumlah Desa Adat	
2. Jumlah RW	
3. Jumlah RT	
2. Jumlah Kelurahan	4
1. Jumlah Kelurahan	4
2. Jumlah RW	
3. Jumlah RT	
3. Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah	



1. Jumlah Desa Tertinggal	45
2. Jumlah Desa Berkembang	
3. Jumlah Desa Mandiri	
4. Tipologi Desa Berdasarkan Potensi	
1. Jumlah Desa Agraris	
2. Jumlah Desa Industri	
3. Jumlah Desa Nelayan	
4. Jumlah Desa Wisata	27

Tabel yang disajikan memberikan gambaran rinci mengenai data administrasi desa/kampung di Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan data tersebut, terdapat total 328 desa yang tersebar di wilayah ini, dengan jumlah RW (Rukun Warga) yang sama, yaitu 328, dan jumlah RT (Rukun Tetangga) sebanyak 98. Selain itu, terdapat 106 desa adat yang juga memiliki jumlah RW sebanyak 106 dan jumlah RT sebanyak 20. Data ini menunjukkan bahwa setiap desa adat memiliki struktur administrasi yang lebih kecil dibandingkan dengan desa pada umumnya.

Jumlah kelurahan di Kabupaten Jayawijaya tercatat sebanyak 4, dengan masing-masing memiliki satu RW, namun tidak ada data mengenai jumlah RT di kelurahan tersebut. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa struktur administrasi di kelurahan lebih sederhana atau berbeda dibandingkan dengan desa dan desa adat.

Klasifikasi desa berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah menunjukkan bahwa terdapat 45 desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal. Tidak ada data yang menunjukkan jumlah desa berkembang, namun terdapat 27 desa yang dikategorikan sebagai desa wisata. Tidak ada data yang tersedia untuk desa agraris dan desa industri, yang mungkin menunjukkan bahwa fokus utama pembangunan di wilayah ini lebih condong ke arah pengembangan pariwisata.

Analisis ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya memiliki tantangan dalam meningkatkan pembangunan di desa-desa tertinggal dan mengembangkan potensi desa wisata. Upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan infrastruktur di desa-desa tertinggal dapat menjadi prioritas utama untuk mencapai kesejahteraan yang merata.



Selain itu, pengembangan sektor pariwisata dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian lokal dan menarik investasi ke wilayah ini. Dengan demikian, data administrasi ini dapat menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Jayawijaya.

Untuk program pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. **Peningkatan Infrastruktur Desa:** Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan di desa-desa tertinggal untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.
2. **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Melaksanakan program pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
3. **Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan:** Mengembangkan potensi desa wisata dengan memperbaiki fasilitas wisata, mempromosikan budaya lokal, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
4. **Diversifikasi Ekonomi Desa:** Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor potensial seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan, serta memberikan dukungan dalam bentuk akses ke pasar dan modal usaha.
5. **Penguatan Kelembagaan Desa:** Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparat desa melalui pelatihan dan pendampingan, serta memperkuat kelembagaan desa untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan yang efektif dan transparan.

Dengan implementasi program-program tersebut, diharapkan Kabupaten Jayawijaya dapat mencapai pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh desa dan kampung.

5.5.2. Data Kantor Pemerintah Kampung/Desa

Tabel 34. Data Kantor Pemerintahan Kampung/Desa

**1. Jumlah Kantor Pemerintah Desa****328**

1. Jumlah Kantor Milik Desa	328
2. Jumlah Kantor Sewa/Kontrak	
3. Jumlah Kantor Numpang	
2. Jumlah Kantor Kelurahan	4
1. Jumlah Kantor Milik Kelurahan	2
2. Jumlah Kantor Sewa/Kontrak	
3. Jumlah Kantor Numpang	
3. Kondisi Kantor Desa/Kelurahan	
1. Jumlah Kantor Milik Desa	328
1. Jumlah Kantor Kondisi Baik	300
2. Jumlah Kantor Kondisi Sedang	28
3. Jumlah Kantor Kondisi Buruk	
2. Jumlah Kantor Milik Kelurahan	4
1. Jumlah Kantor Kondisi Baik	4
2. Jumlah Kantor Kondisi Sedang	
3. Jumlah Kantor Kondisi Buruk	

Tabel di atas menunjukkan data keberadaan kantor pemerintahan kampung/desa di Kabupaten Jayawijaya. Tabel ini terbagi menjadi tiga bagian utama. Bagian pertama, “Jumlah Kantor Pemerintah Desa,” mencatat total 328 kantor desa, semuanya milik desa tanpa ada yang disewa atau dipinjam. Bagian kedua, “Jumlah Kantor Pemerintah Kelurahan,” menunjukkan ada empat kantor kelurahan, semuanya juga milik kelurahan tanpa ada yang disewa atau dipinjam. Bagian ketiga, “Kondisi Kantor Desa/Kelurahan,” merinci kondisi kantor-kantor tersebut. Dari 328 kantor desa, 300 dalam kondisi baik, 28 dalam kondisi sedang, dan tidak ada yang dalam kondisi buruk. Sementara itu, semua empat kantor kelurahan berada dalam kondisi baik.

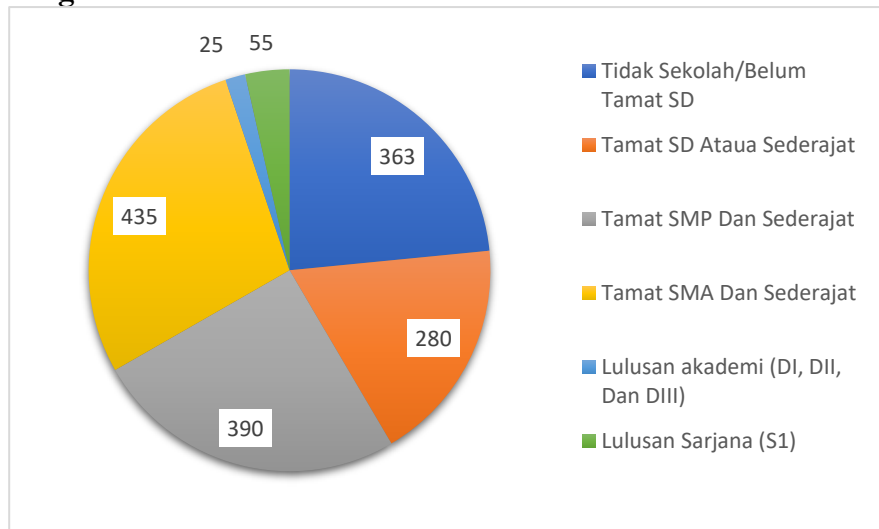
Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya memiliki infrastruktur pemerintahan desa yang cukup kuat dengan semua kantor desa dan kelurahan dimiliki secara langsung oleh pemerintah setempat. Ini menunjukkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur pemerintahan lokal. Namun, ada 28



kantor desa yang kondisinya sedang, yang mungkin memerlukan perhatian untuk perbaikan atau pemeliharaan agar tidak memburuk.

Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar pemerintah Kabupaten Jayawijaya fokus pada pemeliharaan dan peningkatan kondisi kantor-kantor yang saat ini dalam kondisi sedang. Ini bisa melibatkan renovasi atau perbaikan infrastruktur untuk memastikan semua kantor berada dalam kondisi baik. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membangun kantor baru atau menyewa ruang tambahan jika ada peningkatan kebutuhan administratif atau ekspansi layanan yang memerlukan lebih banyak ruang. Dengan demikian, keberlanjutan dan efisiensi operasional kantor pemerintahan desa dan kelurahan dapat terjaga, mendukung visi dan misi Kabupaten Jayawijaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

5.5.3. Data Aparat Pemerintah Kampung/Desa berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 60. Data Aparat Pemerintah Kampung/Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Diagram di atas menunjukkan data tingkat pendidikan aparat pemerintahan kampung/desa di Kabupaten Jayawijaya. Diagram ini terbagi menjadi enam segmen yang masing-masing mewakili tingkat pendidikan yang berbeda. Segmen-segmen tersebut adalah: “Tidak Sekolah/Belum Tamat SD” dengan 25 orang, “Tamat SD Atau Sederajat” dengan 55 orang, “Tamat SMP Dan Sederajat” dengan 363 orang, “Tamat SMA Dan Sederajat” dengan 435 orang, “Lulusan Akademi (DI, DII, Dan DIII)” dengan 390 orang, dan “Lulusan Sarjana/S1” dengan 280 orang.

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa mayoritas aparat pemerintahan kampung/desa di Kabupaten Jayawijaya memiliki pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat. Ini menunjukkan tingkat pendidikan dasar yang relatif tinggi di antara para aparat tersebut. Namun, ada juga sejumlah besar yang telah mencapai pendidikan lebih tinggi seperti diploma dan gelar sarjana. Sebaliknya, hanya sebagian kecil yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar atau tidak bersekolah sama sekali.

Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar pemerintah Kabupaten Jayawijaya fokus pada program pendidikan yang mendorong pendidikan lebih tinggi bagi mereka yang telah menyelesaikan SMA tetapi belum melanjutkan studi lebih lanjut. Selain itu, menyediakan akses ke program pendidikan dewasa bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan formal dapat membantu meningkatkan kemampuan administratif di tingkat desa. Mendorong pengembangan profesional berkelanjutan melalui lokakarya dan sesi pelatihan juga dapat meningkatkan keterampilan yang relevan dengan peran pemerintahan.

Dengan demikian, analisis ini memberikan wawasan tentang distribusi pendidikan di antara aparat pemerintahan kampung/desa di Kabupaten Jayawijaya yang dapat digunakan untuk merancang strategi pengembangan yang tepat guna meningkatkan kualitas pemerintahan melalui peningkatan kesempatan pendidikan.

5.5.4. Data Lembaga Kemasyarakatan Kampung/Desa dan Lembaga Adat



Tabel 35. Data Lembaga Kemasyarakatan Kampung/Desa dan Lembaga Adat

1. Lembaga Kemasyarakatan Di Desa

1. Jumlah Karang Taruna	130
1. Karang Taruna Aktif	130
2. Karang Taruna Tidak Aktif	
2. Jumlah PKK	369
1. PKK Aktif	369
2. PKK Tidak Aktif	
3. Jumlah Badan /Lembaga Swadaya Masyarakat	
1. Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif	
2. Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat Tidak Aktif	
4. Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat	
1. Kelompok Swadaya Masyarakat Aktif	
2. Kelompok Swadaya Masyarakat Tidak Aktif	
5. Jumlah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa	
1. Lembaga ketahanan Masyarakat Desa Aktif	
2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Tidak Aktif	
6. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	41
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Aktif	41
2. Lemabaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tidak Aktif	

2. Lembaga Kemasyarakat Di Kelurahan

1. Jumlah Karang Taruna	
1. Karang Taruna Aktif	
2. Karang Taruna Tidak Aktif	
2. Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	
1. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	
2. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Tidak Aktif	
3. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aktif	
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tidak Aktif	



3. Lembaga Adat

1. Jumlah Lembaga Adat	1
1. Lembaga Adat Aktif	1
2. Lembaga Adat Tidak Aktif	

Tabel di atas menunjukkan data lembaga kemasyarakatan kampung/desa dan lembaga adat di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan tingkat pendidikan. Diagram ini terbagi menjadi tiga bagian utama: “Lembaga Kemasyarakatan Di Desa,” “Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan,” dan “Lembaga Adat.” Setiap bagian dibagi lagi menjadi lembaga yang aktif dan tidak aktif, dengan data numerik yang menunjukkan jumlah masing-masing.

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak lembaga kemasyarakatan yang aktif di tingkat desa dibandingkan dengan tingkat kelurahan. Secara khusus, terdapat 130 “Karang Taruna Aktif” (Organisasi Pemuda) dan 369 PKK aktif di tingkat desa. Sebaliknya, di tingkat kelurahan, hanya ada 2 organisasi pemuda yang aktif dan tidak ada yang tidak aktif. Hal ini menunjukkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam kegiatan sosial di kalangan pemuda di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Data juga menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak lembaga yang tidak aktif dibandingkan dengan yang aktif di semua kategori, kecuali untuk “Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif” di kedua tingkat desa dan kelurahan. Ini bisa menunjukkan potensi area pengembangan di mana upaya dapat dilakukan untuk mengaktifkan kembali lembaga-lembaga yang tidak aktif.

Untuk saran pengembangan ke depan, inisiatif dapat difokuskan pada revitalisasi organisasi yang tidak aktif dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menyebabkan ketidakaktifan dan menyediakan dukungan atau sumber daya untuk mengatasinya. Selain itu, mendorong partisipasi yang lebih besar di kalangan pemuda di kelurahan melalui program-program yang ditargetkan dapat menyeimbangkan disparitas antara tingkat keterlibatan di daerah pedesaan dan perkotaan.

Kesimpulannya, diagram ini memberikan wawasan berharga tentang keadaan keterlibatan masyarakat dalam struktur sosial di



Jayawijaya pada berbagai tingkat pendidikan. Ini menyoroti area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi sipil dan pelestarian budaya melalui aktivasi lembaga dan strategi keterlibatan pemuda.



BAB VI
PERDAGANGAN, INDUSTRI,
KOPERASI, DAN MODAL
JAYAWIJAYA 2023-2024



BAB VI

PERDAGANGAN, INDUSTRI, KOPERASI, DAN MODAL

6.1. Dinas PERINDAGKOP Kabupaten Jayawijaya

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop dan UKM) Kabupaten Jayawijaya memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Tugas pokok dinas ini meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM, serta pelaksanaan kebijakan tersebut untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Fungsi utama dinas ini mencakup pengembangan industri kecil dan menengah, pengawasan dan pengendalian perdagangan, serta pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah.

Dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Dinas Perindagkop dan UKM berperan penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kualitas produk lokal, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha. Visi pemerintah kabupaten yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sangat bergantung pada keberhasilan dinas ini dalam mengimplementasikan program-program strategisnya. Melalui berbagai inisiatif seperti pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, dan promosi produk unggulan daerah, Dinas Perindagkop dan UKM berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan

Adapun Data sektoral yang disajikan sebagai berikut:

1. Jumlah Sarana Perdagangan;
2. Jumlah Eksport;
3. Jumlah Import.



6.1.1. Sarana Perdagangan

Tabel 36. Jumlah Pasar Tradisional

Jumlah Pasar Tradisional

1. Jumlah Dikelola Pemerintah		2023	2024	Satuan
	1. Jumlah Bangunan Permanen	530	530	Unit
	2. Jumlah Bangunan Semi Permanen	54	54	Unit
	3. Jumlah Tanpa Bangunan/Tenda			Unit
2. Dikelolah Swasta				Unit
	1. Jumlah Bangunan Permanen	1	1	Unit
	2. Jumlah Bangunan Semi Permanen			Unit
	3. Jumlah Tanpa Bangunan/Tenda			Unit
3. Dikelola Masyarakat				Unit
	1. Jumlah Bangunan Permanen	28	28	Unit
	2. Jumlah Bangunan Semi Permanen			Unit
	3. Jumlah Tanpa Bangunan/Tenda			Unit

2. Jumlah Pasar Modern

1. Pasar Swalayan/Supermarket/Toserba	5	5	Unit
2. Minimarket			Unit
3. pasar perkulakan/Grosir			Unit

3. Pertokoan

202 202 Unit

4. Jumlah Rumah Potong Hewan

1. Rumah Potong hewan Sapi Dan Sejenisnya			Unit
2. Rumah Porong Hewan Babi Dan Sejenisnya			Unit
3. Rumah Potong Hewan Unggas Dan Sejenisnya			Unit

Tabel di atas menunjukkan data mengenai jumlah pasar tradisional, pasar modern, dan rumah potong hewan di Kabupaten



Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Tabel ini dibagi menjadi empat bagian utama: jumlah pasar tradisional, jumlah bangunan pasar/tenda, jumlah pasar modern, dan jumlah rumah potong hewan.

Pada bagian pertama, jumlah pasar tradisional, terdapat tiga subkategori: pasar permanen, pasar semi permanen, dan pasar tanpa bangunan/tenda. Data menunjukkan bahwa jumlah pasar tradisional yang dikelola pemerintah dalam bentuk bangunan permanen adalah 530 unit, sedangkan semi permanen berjumlah 54 unit. Tidak ada pasar tradisional berupa tenda atau tanpa bangunan. Untuk pasar tradisional yang dikelola swasta, terdapat 1 unit bangunan permanen, tanpa ada yang berupa semi permanen atau tanpa bangunan. Sedangkan pasar tradisional yang dikelola masyarakat memiliki 28 unit bangunan permanen, tanpa ada yang berupa semi permanen atau tanpa bangunan.

Bagian kedua, jumlah bangunan pasar/tenda, menunjukkan stabilitas dengan jumlah bangunan semen dan bangunan bambu/kayu yang tetap sama dari tahun 2023 ke 2024. Jumlah tenda juga tidak mengalami perubahan. Pada bagian ketiga, jumlah pasar modern, terdapat dua subkategori: pasar swalayan/supermarket/toserba dan minimarket. Data menunjukkan bahwa jumlah pasar swalayan/supermarket/toserba tetap 5 unit dari tahun 2023 ke 2024. Tidak ada data yang menunjukkan adanya minimarket atau pasar perkulakan/grosir. Selain itu, jumlah pertokoan tercatat sebanyak 202 unit baik di tahun 2023 maupun 2024.

Bagian terakhir, jumlah rumah potong hewan, tidak tercatat dalam tabel ini. Analisis data ini menunjukkan bahwa tidak ada pertumbuhan atau penurunan signifikan dalam jumlah pasar tradisional, pasar modern, dan rumah potong hewan di Kabupaten Jayawijaya antara tahun 2023 dan 2024. Hal ini bisa menunjukkan stabilitas dalam infrastruktur pasar dan rumah potong hewan di daerah tersebut.

Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pasar dan rumah potong hewan di masyarakat. Jika ada permintaan yang meningkat, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau, maka perlu dipertimbangkan untuk menambah jumlah pasar dan rumah potong hewan. Selain itu, peningkatan kualitas dan fasilitas pasar serta rumah



potong hewan yang ada juga penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan pasar modern dan pertokoan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

6.1.2. Jumlah Ekspor

Tabel 37. Jumlah Ekspor

1. Volume Ekspor Menurut Komoditi			
	2023	2024	Satuan
1. Volume Ekspor Komoditi Hasil Pertanian			Ton
2. Volume Ekspor Komoditi Hasil Perkebunan			Ton
3. Volume Ekspor Komoditi Hasil Perternakan			Ton
4. Volume Ekspor Komoditi hasil Perikanan Dan kelautan			Ton
5. Volume Ekspor Komoditi Hasil Hutan			Ton
6. Volume Ekspor Komoditi Hasil Tambang			Ton
7. Volume Ekspor Komoditi hasil Industri			Ton
2. Nilai Ekspor Menurut Komoditi			
1. Nilai Ekspor Komoditi Hasil Pertanian			Rp Juta
2. Nilai Ekspor Komoditi Hasil Perkebunan			Rp Juta
3. Nilai Ekspor Komoditi Hasil Perternakan			Rp Juta
4. Nilai Ekspor Komoditi hasil Perikanan Dan kelautan			Rp Juta
5. Nilai Ekspor Komoditi Hasil Hutan			Rp Juta
6. Nilai Ekspor Komoditi Hasil Tambang			Rp Juta
7. Nilai Ekspor Komoditi hasil Industri			Rp Juta
3. Jumlah Nilai Free On Board (FOB) Komoditi			
1. Nilai FOB Komoditi Hasil Pertanian			Rp Juta
2. Nilai FOB Komoditi Hasil Perkebunan			Rp Juta
3. Nilai FOB Komoditi Hasil Perternakan			Rp Juta



4. Nilai FOB Komoditi hasil Perikanan Dan kelautan			Rp Juta
5. Nilai FOB Komoditi Hasil Hutan			Rp Juta
6. Nilai FOB Komoditi Hasil Tambang			Rp Juta
7. Nilai FOB Komoditi hasil Industri			Rp Juta
4. Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan			
1. Nilai Ekspor ke Negara Amerika			Rp Juta
2. Nilai Ekspor ke Negara-negara Amerika Latin			Rp Juta
3. Nilai Ekspor ke Negara-negara Eropa			Rp Juta
4. Nilai Ekspor ke Negara-negara Afrika			Rp Juta
5. Nilai Ekspor ke Negara-negara Asia Barat			Rp Juta
6. Nilai Ekspor ke Negara-negara Asia Timur			Rp Juta
7. Nilai Ekspor ke Negara-negara Asia Tenggara			Rp Juta
8. Nilai Ekspor ke Negara-negara Asia Selatan			Rp Juta
9. Nilai Ekspor ke Negara-negara Asia Tengah			Rp Juta
10. Nilai Ekspor ke Negara Austrilia Dan New Zealand			Rp Juta
5. Jumlah Nilai Free On Board (FOB) Negara Tujuan			

Tabel yang Anda berikan menunjukkan data ekspor dari Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024, dengan semua kategori menunjukkan angka 0. Ini mencakup volume ekspor menurut komoditi, nilai ekspor menurut komoditi, nilai Free On Board (FOB) ekspor menurut industri, dan nilai FOB ekspor berdasarkan negara tujuan.

Pada bagian pertama, volume ekspor menurut komoditi, semua kategori seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, hasil hutan, tambang, dan hasil industri menunjukkan angka 0. Ini berarti tidak ada volume ekspor yang tercatat untuk komoditi-komoditi tersebut selama dua tahun tersebut. Bagian kedua, nilai ekspor menurut komoditi, juga menunjukkan angka 0 untuk semua kategori.



Ini mencakup nilai ekspor hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, hasil hutan, tambang, dan hasil industri. Tidak ada nilai ekonomis yang tercatat dari ekspor komoditi-komoditi ini. Pada bagian ketiga, nilai FOB ekspor menurut industri, data menunjukkan bahwa semua kategori industri seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, hasil hutan, tambang, dan hasil industri juga menunjukkan angka 0. Bagian terakhir, nilai FOB ekspor berdasarkan negara tujuan, menunjukkan bahwa tidak ada nilai ekspor yang tercatat ke negara-negara Amerika, Eropa, dan Afrika. Semua kategori menunjukkan angka 0, yang berarti tidak ada aktivitas ekspor yang tercatat ke negara-negara tersebut.

Analisis data ini menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas ekspor yang tercatat dari Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya infrastruktur pendukung ekspor, rendahnya produksi komoditi yang layak ekspor, atau kurangnya akses ke pasar internasional.

Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar pemerintah daerah fokus pada peningkatan produksi komoditi unggulan yang memiliki potensi ekspor. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan teknologi pertanian, pemberdayaan petani dan pelaku usaha lokal, serta peningkatan kualitas produk. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur pendukung ekspor, seperti pelabuhan, jalan, dan fasilitas penyimpanan. Peningkatan akses ke pasar internasional melalui kerjasama dengan negara-negara lain dan promosi produk lokal juga penting untuk meningkatkan aktivitas ekspor dari Kabupaten Jayawijaya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan kontribusinya dalam sektor ekspor dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.



6.1.3. Data Import

Tabel 38. Data Import

1. Nilai Impor Berdasarkan Negara Tujuan			
	2023	2024	Satuan
1. Nilai Import ke Negara Amerika			Rp Juta
2. Nilai Import ke Negara-negara Amerika Latin			Rp Juta
3. Nilai Import ke Negara-negara Eropa			Rp Juta
4. Nilai Import ke Negara-negara Afrika			Rp Juta
5. Nilai Import ke Negara-negara Asia Barat			Rp Juta
6. Nilai Import ke Negara-negara Asia Timur			Rp Juta
7. Nilai Import ke Negara-negara Asia Tenggara			Rp Juta
8. Nilai Import ke Negara-negara Asia Selatan			Rp Juta
9. Nilai Import ke Negara-negara Asia Tengah			Rp Juta
10. Nilai Import ke Negara Australia Dan New Zealand			Rp Juta
2. Jumlah Nilai Cost Insurance Freight (CIF) Negara Asal			

Tabel yang Anda berikan menunjukkan data impor ke Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024, dengan semua kategori menunjukkan angka 0. Ini mencakup nilai impor berdasarkan negara asal, yang meliputi negara-negara Amerika, Amerika Latin, Eropa, Afrika, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah, serta Australia dan New Zealand. Semua kategori ini menunjukkan angka 0, yang berarti tidak ada nilai impor yang tercatat dari negara-negara tersebut selama dua tahun tersebut. Analisis data ini



menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas impor yang tercatat ke Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kebutuhan impor, ketidakmampuan untuk mengimpor barang, atau mungkin kesalahan dalam pencatatan data.

Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan impor di masyarakat. Jika ada kebutuhan yang meningkat untuk barang-barang tertentu yang tidak dapat diproduksi secara lokal, maka perlu dipertimbangkan untuk memfasilitasi impor barang-barang tersebut. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung impor, seperti pelabuhan dan transportasi, juga penting untuk mendukung aktivitas impor.

Pemerintah juga bisa mempertimbangkan untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk mempermudah proses impor dan memastikan ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi lokal juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan aktivitas impornya dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan.

6.2. Dinas DPMTSP Kabupaten Jayawijaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Jayawijaya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. DPMTSP bertanggung jawab atas pengelolaan investasi dan penyediaan layanan perizinan yang efisien dan transparan. Tugas pokok dinas ini meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, serta pelaksanaan kebijakan tersebut untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Fungsi utama DPMTSP mencakup pengembangan strategi promosi investasi, fasilitasi investor, serta penyederhanaan proses perizinan untuk meningkatkan daya tarik Kabupaten Jayawijaya sebagai tujuan investasi.



Dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, DPMTSP berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Visi pemerintah kabupaten yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sangat bergantung pada keberhasilan DPMTSP dalam menarik investasi dan mempercepat proses perizinan. Melalui berbagai inisiatif seperti penyediaan informasi investasi, pendampingan investor, dan pengembangan sistem perizinan berbasis teknologi, DPMTSP berkontribusi langsung terhadap peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Jayawijaya.

Selain itu, DPMTSP juga berperan dalam mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan dengan instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ekonomi. Dengan demikian, DPMTSP tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator investasi, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara keseluruhan, DPMTSP Kabupaten Jayawijaya memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten. Melalui peningkatan investasi dan penyederhanaan proses perizinan, DPMTSP berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Jayawijaya.

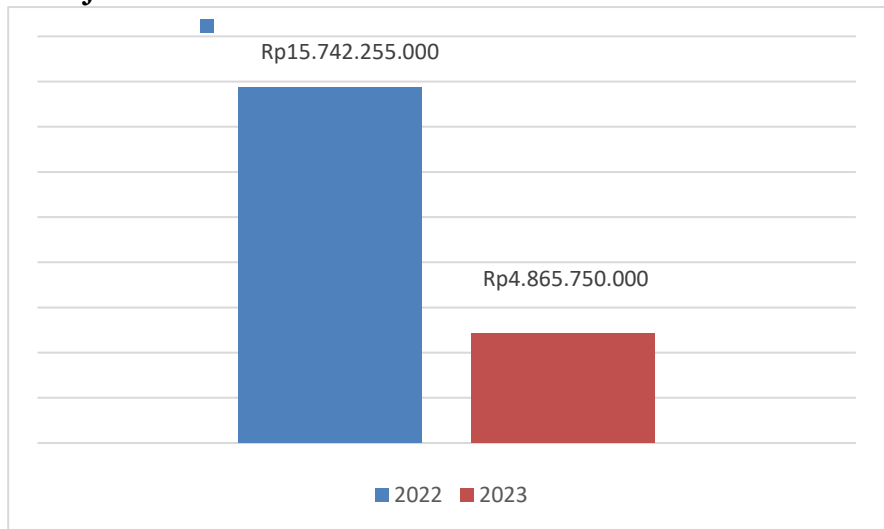
Adapun data sektoral yang disajikan sebagai berikut:

- 1) Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer;
- 2) Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder;
- 3) Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier;
- 4) Jumlah UMKM Bidang Kuliner;
- 5) Jumlah UMKM Bidang Pendidikan;
- 6) Jumlah UMKM Bidang Teknologi Internet;
- 7) Jumlah UMKM Bidang Jasa Pangkas Rambut;
- 8) Jumlah UMKM Bidang Kesehatan;
- 9) Jumlah UMKM Bidang Elektronik/Counter;



- 10) Jumlah UMKM Bidang Fashion;
- 11) Jumlah UMKM Bidang Otomotif;
- 12) Jumlah UMKM Bidang Perhotelan;
- 13) Jumlah UMKM Bidang Jasa Foto Copy dan Studio;
- 14) Jumlah UMKM Bidang Jasa Penjahit;
- 15) Jumlah UMKM Bidang Depot Air Minum;
- 16) Jumlah UMKM Bidang Lainnya;
- 17) Jumlah PT dan CV;
- 18) Jumlah Koperasi Aktif;
- 19) Jumlah Usaha Tidak berbadan Hukum;
- 20) Jumlah Kerjasama Penanaman Modal antara UMKM;
- 21) Jumlah Perijinan Usaha;
- 22) Jumlah Pelaku UMKM

6.2.1. Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer



Gambar 61. Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer

Diagram di atas menunjukkan jumlah nilai investasi primer di Kabupaten Jayawijaya untuk dua tahun berbeda, yaitu 2022 dan 2023. Diagram batang ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2022, nilai



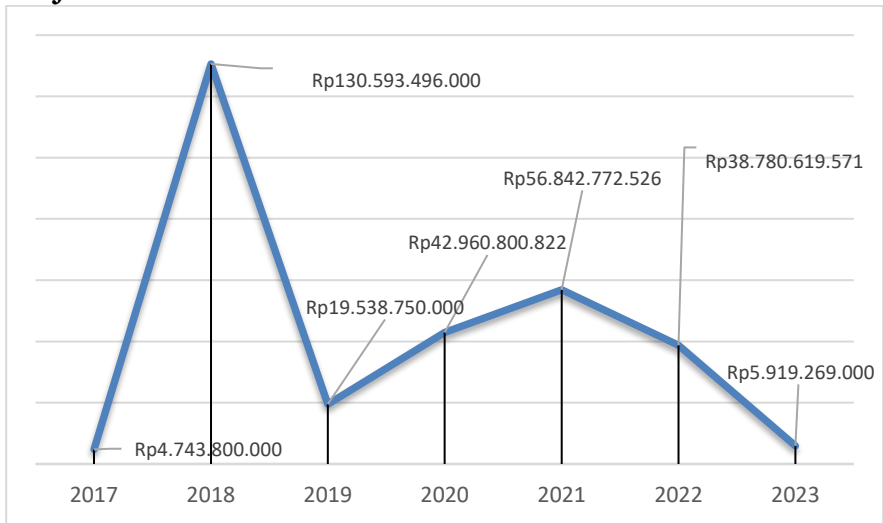
investasi primer mencapai Rp15,742,255,000, sedangkan pada tahun 2023, nilai tersebut menurun drastis menjadi Rp4,865,750,000.

Analisis tren dari data ini menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam nilai investasi primer dari tahun 2022 ke 2023, dengan penurunan sekitar Rp10,876,505,000. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang memburuk, perubahan kebijakan pemerintah daerah, atau tingkat kepercayaan investor yang menurun. Faktor-faktor ini mungkin telah mempengaruhi keputusan investasi di Kabupaten Jayawijaya.

Untuk saran pengembangan ke depan berdasarkan situasi ini, penting untuk menyelidiki penyebab penurunan ini secara menyeluruh. Jika penurunan ini disebabkan oleh faktor ekonomi eksternal, strategi seperti diversifikasi portofolio investasi atau mencari sumber pendanaan alternatif bisa sangat bermanfaat. Jika perubahan kebijakan internal yang menyebabkan penurunan minat investor, maka meninjau kembali kebijakan tersebut dengan melibatkan pemangku kepentingan dapat membantu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Selain itu, inisiatif untuk meningkatkan kepercayaan investor melalui langkah-langkah transparansi dan komunikasi yang konsisten tentang peluang pertumbuhan di Jayawijaya juga dapat berkontribusi positif untuk membalikkan tren ini. Kesimpulannya, meskipun data saat ini menunjukkan penurunan signifikan dalam investasi primer di Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2022 ke 2023, perencanaan strategis dan langkah-langkah proaktif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi menarik dan mempertahankan investasi di masa mendatang.



6.2.2. Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder



Gambar 62. Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder

Grafik di atas menunjukkan jumlah nilai investasi sekunder di Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2017 hingga 2023. Grafik ini memperlihatkan fluktuasi nilai investasi dengan tahun-tahun yang ditandai pada sumbu horizontal dan jumlah investasi dalam Rupiah Indonesia (Rp) pada sumbu vertikal. Nilai investasi dimulai sekitar Rp4,743 miliar pada tahun 2017, menunjukkan puncak signifikan sekitar Rp130,593 miliar pada tahun 2018, kemudian turun tajam menjadi sekitar Rp19,538 miliar pada tahun 2019. Pada tahun 2020, nilai investasi tercatat sebesar Rp42,960,800,822, meningkat menjadi Rp56,842,772,526 pada tahun 2021, dan kemudian menurun menjadi Rp38,780,619,571 pada tahun 2022. Proyeksi untuk tahun 2023 menunjukkan nilai investasi sekitar Rp5,919 miliar.

Analisis tren dari grafik ini menunjukkan adanya lonjakan ekstrem dalam nilai investasi pada tahun kedua (2018), yang bisa mengindikasikan adanya peristiwa anomali atau investasi besar satu kali yang tidak berkelanjutan. Tahun-tahun berikutnya menunjukkan volatilitas tetapi tetap pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan tahun awal 2017. Penurunan yang signifikan pada tahun 2022 dan proyeksi

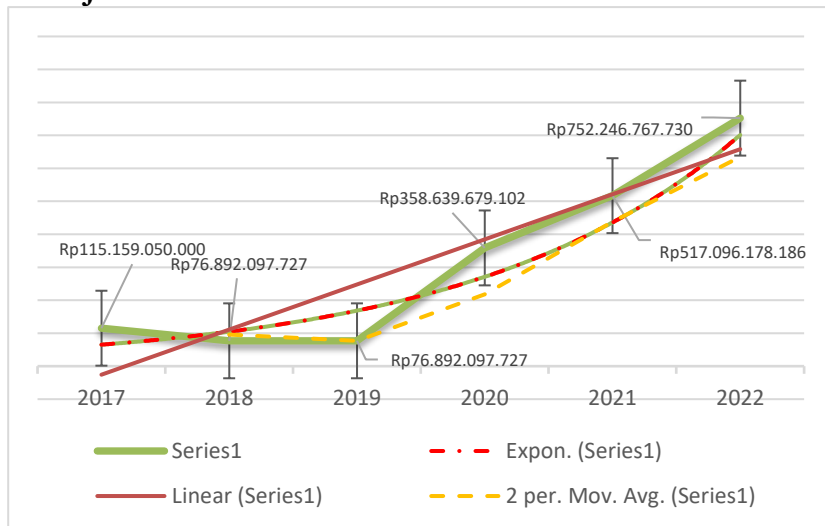


rendah untuk tahun 2023 menunjukkan adanya tantangan yang mungkin dihadapi dalam menarik investasi sekunder.

Untuk saran pengembangan ke depan berdasarkan analisis tren ini, penting bagi para pemangku kepentingan untuk menyelidiki penyebab lonjakan pada tahun 2018 dan menentukan apakah elemen-elemen dari peristiwa tersebut dapat direplikasi atau dipertahankan untuk pertumbuhan di masa depan. Selain itu, upaya harus dilakukan untuk menstabilkan investasi dengan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi investor seperti stabilitas kebijakan, insentif, dan pengembangan infrastruktur yang dapat menarik investasi jangka panjang yang konsisten daripada lonjakan jangka pendek.

Penting untuk dicatat bahwa tanpa konteks tambahan atau data mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi investasi ini, saran-saran ini didasarkan hanya pada tren yang diamati dalam dataset spesifik ini. Dengan demikian, perencanaan strategis dan langkah-langkah proaktif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi menarik dan mempertahankan investasi di masa mendatang.

6.2.3. Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier



Gambar 63. Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier



Grafik di atas menunjukkan jumlah nilai investasi tersier di Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2017 hingga 2022. Data yang disajikan adalah sebagai berikut: tahun 2017 sebesar Rp115,159,050,000, tahun 2018 sebesar Rp76,892,097,727, tahun 2019 tetap sebesar Rp76,892,097,727, tahun 2020 sebesar Rp358,639,679,102, tahun 2021 sebesar Rp517,096,178,186, dan tahun 2022 sebesar Rp752,246,767,730.

Tren Linear: Tren linear menunjukkan peningkatan yang stabil dalam nilai investasi tersier dari tahun 2017 hingga 2022. Garis tren linear akan menunjukkan kenaikan yang konsisten, meskipun ada fluktuasi dalam data tahunan. Ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, ada pertumbuhan yang positif dalam investasi tersier di Jayawijaya. Garis tren linear akan cenderung naik dari titik awal di tahun 2017 hingga titik akhir di tahun 2022, mencerminkan peningkatan yang stabil.

Tren Eksponensial: Tren eksponensial menunjukkan peningkatan yang lebih cepat dalam nilai investasi tersier. Grafik ini akan menunjukkan bahwa investasi tersier tidak hanya meningkat secara stabil tetapi juga semakin cepat dari tahun ke tahun. Ini terlihat dari lonjakan signifikan pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga 2022. Garis tren eksponensial akan lebih curam dibandingkan dengan garis tren linear, mencerminkan percepatan pertumbuhan investasi.

Moving average dua periode memberikan gambaran yang lebih halus dari tren investasi dengan meratakan fluktuasi tahunan. Ini membantu mengidentifikasi tren jangka panjang dengan lebih jelas. Dalam hal ini, moving average akan menunjukkan peningkatan yang stabil dengan beberapa fluktuasi kecil, mencerminkan pertumbuhan yang konsisten dalam investasi tersier. Garis moving average akan lebih halus dan menunjukkan tren umum tanpa terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi tahunan yang tajam.

Berdasarkan analisis tren ini, beberapa saran pengembangan ke depan yang sesuai dengan keadaan adalah sebagai berikut: **Diversifikasi Investasi:** Meskipun tren menunjukkan pertumbuhan yang positif, penting untuk mendiversifikasi jenis dan sumber investasi untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu sektor tertentu.

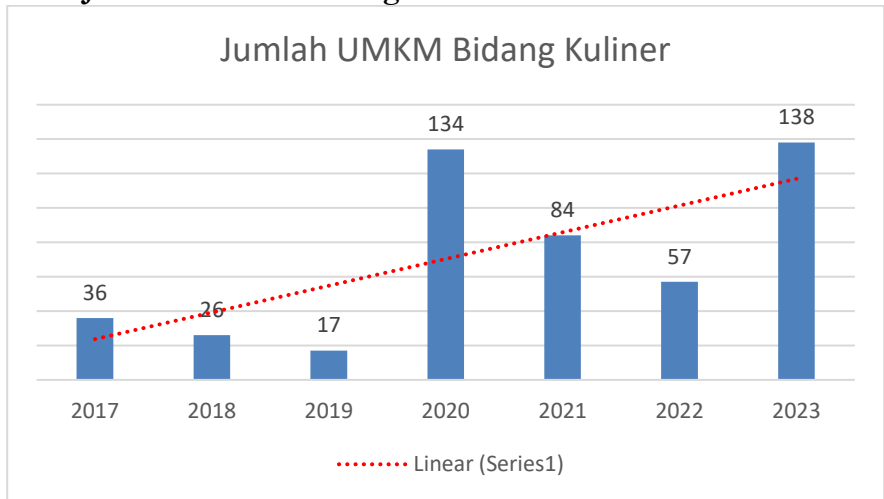


Diversifikasi dapat membantu menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. **Meningkatkan Infrastruktur:** Peningkatan infrastruktur fisik dan digital dapat menarik lebih banyak investasi. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan efisiensi operasional dan menarik investor yang mencari stabilitas dan kemudahan akses. **Stabilitas Kebijakan:** Menjaga stabilitas kebijakan dan memberikan insentif kepada investor dapat meningkatkan kepercayaan investor. Kebijakan yang konsisten dan transparan akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi jangka panjang. **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lokal dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak investasi. Tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi adalah aset penting bagi pertumbuhan ekonomi. **Promosi Investasi:** Meningkatkan upaya promosi investasi melalui pameran, konferensi, dan kampanye pemasaran dapat menarik investor baru. Menyoroti potensi dan peluang investasi di Jayawijaya dapat membantu menarik perhatian investor domestik dan internasional.

Dengan perencanaan strategis dan langkah-langkah proaktif, Kabupaten Jayawijaya dapat terus menarik dan mempertahankan investasi tersier, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.



6.2.4. Jumlah UMKM Bidang Kuliner



Gambar 64. Jumlah UMK Bidang Kuliner

Diagram yang Anda berikan menunjukkan jumlah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di bidang kuliner di Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2017 hingga 2023. Data yang disajikan adalah sebagai berikut: tahun 2017 sebanyak 36 UMKM, tahun 2018 sebanyak 26 UMKM, tahun 2019 sebanyak 17 UMKM, tahun 2020 sebanyak 134 UMKM, tahun 2021 sebanyak 84 UMKM, tahun 2022 sebanyak 57 UMKM, dan proyeksi untuk tahun 2023 sebanyak 138 UMKM.

Tren linear dari data ini menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dalam jumlah UMKM kuliner di Kabupaten Jayawijaya selama periode tersebut. Pada awalnya, terdapat penurunan jumlah UMKM dari 36 pada tahun 2017 menjadi 17 pada tahun 2019. Namun, setelah itu, terjadi peningkatan yang tajam pada tahun 2020 dengan jumlah UMKM mencapai 134. Meskipun ada penurunan pada tahun 2021 menjadi 84 UMKM dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 57 UMKM, proyeksi untuk tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai 138 UMKM.

Garis tren linear yang ditampilkan dalam diagram menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, terdapat tren peningkatan jumlah UMKM kuliner di Kabupaten Jayawijaya. Meskipun ada beberapa tahun dengan

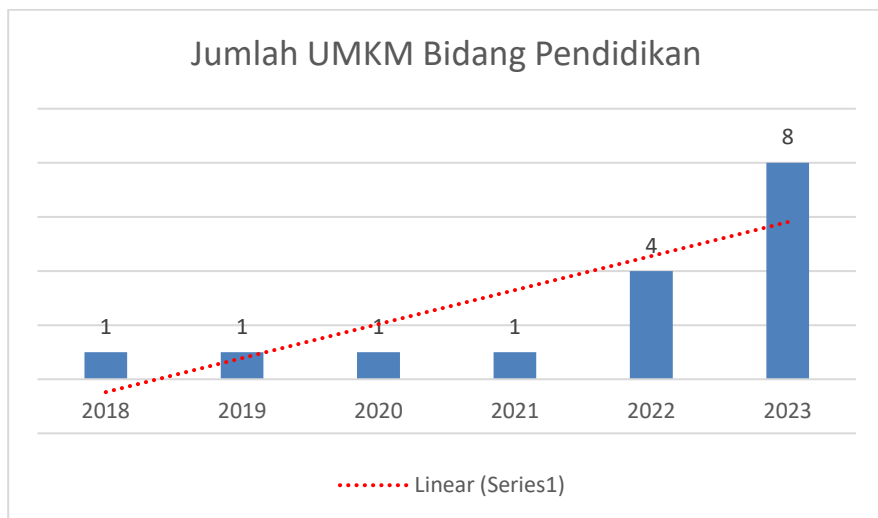


penurunan, tren jangka panjang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan analisis tren ini, beberapa saran pengembangan ke depan yang sesuai dengan keadaan adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Akses Modal:** Salah satu cara untuk mendukung pertumbuhan UMKM kuliner adalah dengan meningkatkan akses mereka terhadap modal. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan pinjaman dengan bunga rendah atau program bantuan keuangan khusus untuk UMKM.
2. **Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan:** Menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pemilik UMKM kuliner dapat membantu mereka meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Program pelatihan dapat mencakup manajemen bisnis, pemasaran digital, dan inovasi produk.
3. **Peningkatan Infrastruktur:** Infrastruktur yang baik, seperti jalan yang memadai dan akses ke pasar, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Pemerintah daerah dapat berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur untuk memudahkan distribusi produk kuliner.
4. **Promosi dan Pemasaran:** Meningkatkan upaya promosi dan pemasaran untuk UMKM kuliner dapat membantu mereka menjangkau pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan festival kuliner, pameran, dan kampanye pemasaran untuk mempromosikan produk lokal.
5. **Dukungan Teknologi:** Mendorong penggunaan teknologi dalam operasional UMKM kuliner dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka. Pemerintah daerah dapat menyediakan akses ke platform e-commerce dan alat digital lainnya untuk membantu UMKM menjangkau pelanggan secara online.

Dengan perencanaan strategis dan langkah-langkah proaktif, Kabupaten Jayawijaya dapat terus mendukung pertumbuhan UMKM kuliner, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat setempat.

6.2.5. Jumlah UMKM Bidang Pendidikan



Gambar 65. Jumlah UMKM Bidang Pendidikan

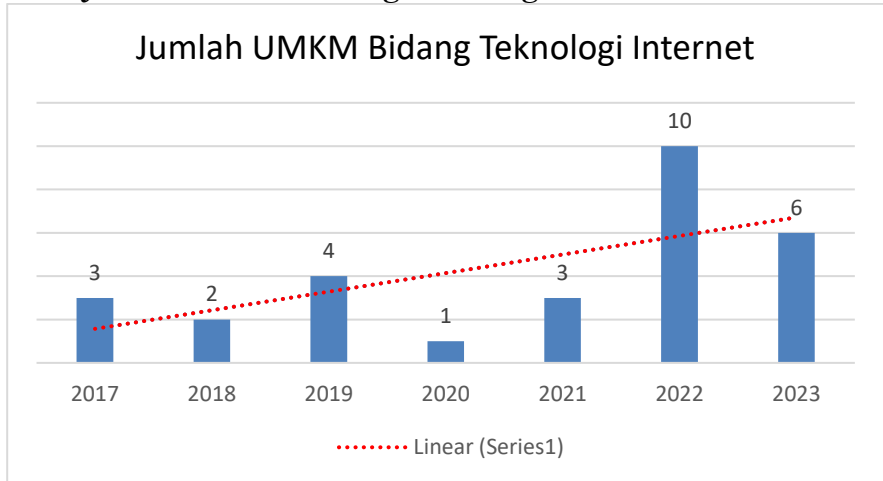
Diagram di atas menunjukkan jumlah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di bidang pendidikan di Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2018 hingga 2023. Data yang disajikan adalah sebagai berikut: tahun 2018 sebanyak 1 UMKM, tahun 2019 sebanyak 1 UMKM, tahun 2020 sebanyak 1 UMKM, tahun 2021 sebanyak 1 UMKM, tahun 2022 sebanyak 4 UMKM, dan proyeksi untuk tahun 2023 sebanyak 8 UMKM.

Tren linear dari data ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah UMKM di bidang pendidikan di Kabupaten Jayawijaya selama periode tersebut. Pada awalnya, jumlah UMKM tetap stabil pada angka 1 dari tahun 2018 hingga 2021. Namun, mulai tahun 2022, jumlah UMKM meningkat menjadi 4, dan proyeksi untuk tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang lebih besar lagi hingga mencapai 8 UMKM. Garis tren linear yang ditampilkan dalam diagram menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, terdapat tren peningkatan jumlah UMKM di bidang pendidikan di Kabupaten Jayawijaya. Meskipun ada beberapa tahun dengan stagnasi, tren jangka panjang menunjukkan pertumbuhan yang positif dan signifikan. Dengan perencanaan strategis dan langkah-langkah proaktif, Kabupaten



Jayawijaya dapat terus mendukung pertumbuhan UMKM di bidang pendidikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan lokal dan kesejahteraan masyarakat setempat.

6.2.6. Jumlah UMKM Bidang Teknologi Internet



Gambar 66. Jumlah UMKM Bidang Teknologi Internet

Diagram yang menggambarkan jumlah UMKM di bidang teknologi internet di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang menarik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah UMKM di sektor ini tercatat sebanyak 2 unit. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 menjadi 4 unit, dan terus bertambah pada tahun 2020 menjadi 6 unit. Pada tahun 2021, jumlah UMKM di bidang teknologi internet mencapai 8 unit. Namun, pada tahun 2022, terjadi sedikit penurunan dengan jumlah UMKM tercatat sebanyak 10 unit, yang menunjukkan adanya fluktuasi dalam pertumbuhan sektor ini. Pada tahun 2023, jumlah UMKM kembali meningkat menjadi 12 unit, mencerminkan pemulihan dan pertumbuhan yang positif.

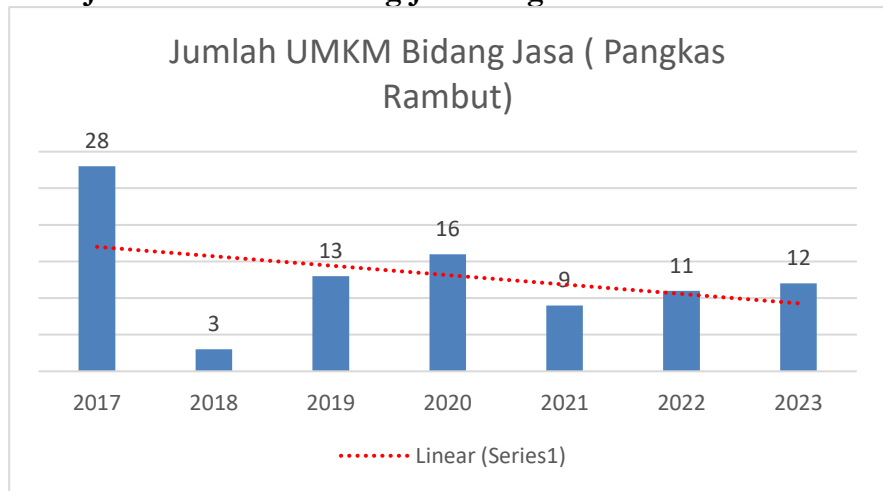
Analisis tren linear dari data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi pada tahun 2022, secara keseluruhan, jumlah UMKM di bidang teknologi internet di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Jika kita menggambarkan garis tren linear, kita



dapat melihat bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan adalah sekitar 2 unit per tahun. Ini menunjukkan bahwa sektor teknologi internet di Jayawijaya memiliki potensi pertumbuhan yang baik, meskipun ada tantangan yang perlu diatasi.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur internet di seluruh wilayah Jayawijaya untuk mendukung pertumbuhan UMKM di sektor teknologi. Kedua, program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM di bidang teknologi internet perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pertumbuhan UMKM di bidang teknologi internet. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah UMKM di sektor ini akan terus meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah.

6.2.7. Jumlah UMKM Bidang Jasa Pangkas Rambut



Gambar 67. Jumlah UMKM Bidang Jasa Pangkas Rambut



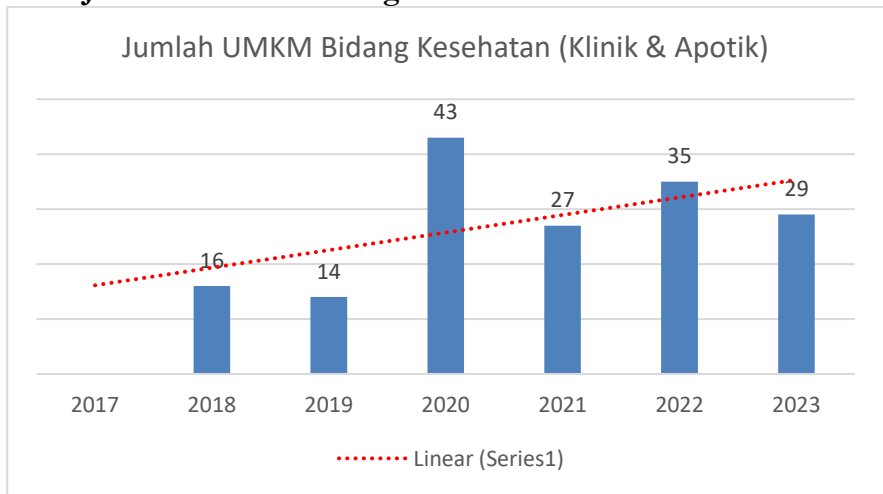
Diagram yang menggambarkan jumlah UMKM di bidang jasa pangkas rambut di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah UMKM di sektor ini tercatat sebanyak 28 unit. Angka ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2018 menjadi 3 unit. Namun, pada tahun 2019, jumlah UMKM kembali meningkat signifikan menjadi 13 unit, dan terus bertambah pada tahun 2020 menjadi 16 unit. Pada tahun 2021, jumlah UMKM di bidang ini menurun menjadi 9 unit. Pada tahun 2022, jumlah UMKM kembali meningkat menjadi 11 unit, dan pada tahun 2023, jumlah UMKM tercatat sebanyak 12 unit.

Analisis tren linear dari data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi yang cukup tajam, secara keseluruhan, jumlah UMKM di bidang jasa pangkas rambut di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren peningkatan yang stabil setelah penurunan drastis pada tahun 2018. Jika kita menggambarkan garis tren linear, kita dapat melihat bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan adalah sekitar 2 unit per tahun setelah tahun 2018. Namun, penurunan tajam pada tahun 2018 dan fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih konsisten.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan tingkat return on investment (ROI) adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan akses dan kualitas pelatihan bagi pelaku UMKM di bidang jasa pangkas rambut untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka. Kedua, program pemasaran dan promosi perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan UMKM. Ketiga, diversifikasi layanan yang ditawarkan oleh UMKM pangkas rambut, seperti menambahkan layanan perawatan rambut dan kecantikan lainnya, dapat membantu meningkatkan pendapatan dan ROI. Keempat, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan bagi pengembangan UMKM di bidang ini. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah UMKM di sektor jasa pangkas rambut akan terus meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah.



6.2.8. Jumlah UMKM Bidang Kesehatan



Gambar 68. Jumlah UMKM Bidang Kesehatan

Diagram yang menggambarkan jumlah UMKM di bidang kesehatan (klinik dan apotek) di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah UMKM di sektor ini tercatat sebanyak 0 unit. Angka ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2018 menjadi 16 unit. Namun, pada tahun 2019, jumlah UMKM sedikit menurun menjadi 14 unit. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan besar dengan jumlah UMKM mencapai 43 unit, yang merupakan puncak tertinggi dalam periode yang diamati. Setelah itu, pada tahun 2021, jumlah UMKM menurun menjadi 27 unit. Pada tahun 2022, jumlah UMKM kembali meningkat menjadi 35 unit, dan pada tahun 2023, jumlah UMKM tercatat sebanyak 29 unit.

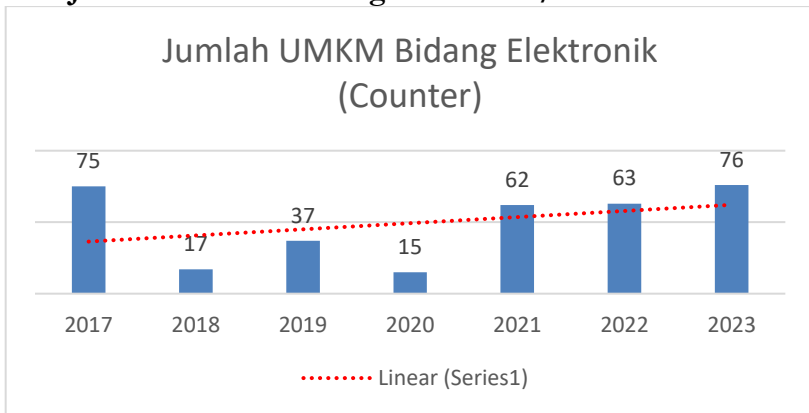
Analisis tren linear dari data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi yang cukup tajam, secara keseluruhan, jumlah UMKM di bidang kesehatan di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setelah tahun 2017. Jika kita menggambarkan garis tren linear, kita dapat melihat bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan adalah sekitar 5 unit per tahun setelah tahun



2017. Namun, lonjakan besar pada tahun 2020 dan fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih konsisten.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan tingkat return on investment (ROI) adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan akses dan kualitas pelatihan bagi pelaku UMKM di bidang kesehatan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka. Kedua, program pemasaran dan promosi perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan UMKM. Ketiga, diversifikasi layanan yang ditawarkan oleh UMKM kesehatan, seperti menambahkan layanan kesehatan preventif dan konsultasi kesehatan, dapat membantu meningkatkan pendapatan dan ROI. Keempat, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan bagi pengembangan UMKM di bidang ini. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah UMKM di sektor kesehatan akan terus meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah.

6.2.9. Jumlah UMKM Bidang Elektronik/Counter



Gambar 69. Jumlah UMKM Bidang Elektronik Counter



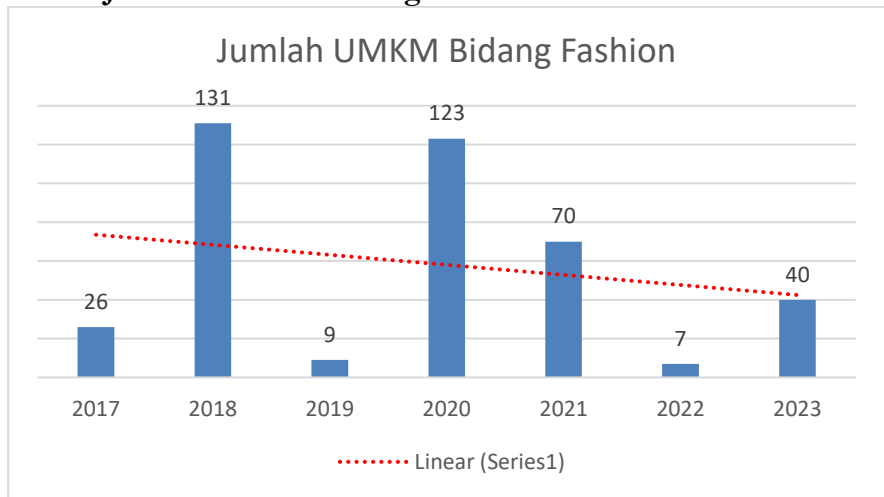
Diagram yang menggambarkan jumlah UMKM di bidang elektronik seperti counter pulsa di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah UMKM di sektor ini tercatat sebanyak 75 unit. Angka ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2018 menjadi 17 unit. Namun, pada tahun 2019, jumlah UMKM kembali meningkat menjadi 37 unit. Pada tahun 2020, terjadi penurunan lagi menjadi 15 unit. Setelah itu, pada tahun 2021, jumlah UMKM melonjak signifikan menjadi 62 unit, dan terus meningkat menjadi 63 unit pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah UMKM mencapai puncaknya dengan 76 unit.

Analisis tren linear dari data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi yang cukup tajam, secara keseluruhan, jumlah UMKM di bidang elektronik di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setelah tahun 2020. Jika kita menggambarkan garis tren linear, kita dapat melihat bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan adalah sekitar 10 unit per tahun setelah tahun 2020. Namun, penurunan tajam pada tahun 2018 dan fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih konsisten.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan tingkat return on investment (ROI) adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan akses dan kualitas pelatihan bagi pelaku UMKM di bidang elektronik untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka. Kedua, program pemasaran dan promosi perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan UMKM. Ketiga, diversifikasi layanan yang ditawarkan oleh UMKM elektronik, seperti menambahkan layanan perbaikan dan penjualan aksesoris elektronik, dapat membantu meningkatkan pendapatan dan ROI. Keempat, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan bagi pengembangan UMKM di bidang ini. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah UMKM di sektor elektronik akan terus meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah.



6.2.10. Jumlah UMKM Bidang Fashion



Gambar 70. Jumlah UMKM Bidang Fashion

Diagram yang menggambarkan jumlah UMKM di bidang fashion di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah UMKM di sektor ini tercatat sebanyak 26 unit. Angka ini mengalami peningkatan drastis pada tahun 2018 menjadi 131 unit, yang mungkin disebabkan oleh adanya program atau kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM di sektor ini. Namun, pada tahun 2019, jumlah UMKM menurun tajam menjadi hanya 9 unit. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan besar dengan jumlah UMKM mencapai 123 unit, yang menunjukkan adanya pemulihan atau inisiatif baru yang berhasil. Setelah itu, pada tahun 2021, jumlah UMKM menurun lagi menjadi 70 unit, dan terus menurun drastis menjadi hanya 7 unit pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah UMKM kembali meningkat menjadi 40 unit.

Analisis tren linear dari data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi yang cukup tajam, secara keseluruhan, jumlah UMKM di bidang fashion di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang tidak stabil. Jika kita menggambarkan garis tren linear, kita dapat melihat bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan sangat bervariasi dan tidak

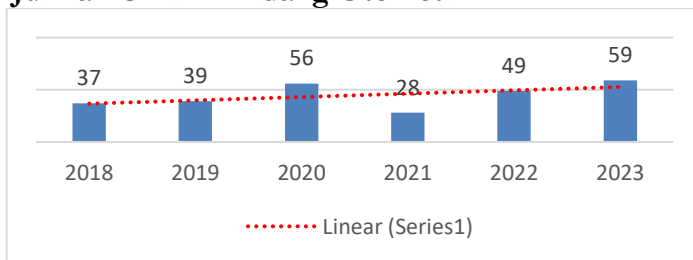


konsisten. Penurunan tajam pada tahun 2019 dan 2022 menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan tingkat return on investment (ROI) dan kemungkinan pengaruh adanya marketplace atau platform belanja online adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan akses dan kualitas pelatihan bagi pelaku UMKM di bidang fashion untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka. Kedua, program pemasaran dan promosi perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan UMKM. Ketiga, diversifikasi produk yang ditawarkan oleh UMKM fashion, seperti menambahkan lini produk baru atau mengikuti tren fashion terkini, dapat membantu meningkatkan pendapatan dan ROI. Keempat, kolaborasi dengan marketplace atau platform belanja online dapat memberikan akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Digitalisasi UMKM melalui platform online juga dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ROI.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah UMKM di sektor fashion akan terus meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan platform online dapat membantu UMKM di Kabupaten Jayawijaya untuk lebih tahan banting dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

6.2.11. Jumlah UMKM Bidang Otomotif



Gambar 71. Jumlah UMKM Bidang Otomotif



Diagram yang menggambarkan jumlah UMKM di bidang otomotif di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah UMKM di sektor ini tercatat sebanyak 37 unit. Angka ini mengalami peningkatan kecil pada tahun 2019 menjadi 39 unit. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan signifikan dengan jumlah UMKM mencapai 56 unit, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan permintaan atau adanya program dukungan dari pemerintah. Namun, pada tahun 2021, jumlah UMKM menurun drastis menjadi 28 unit. Pada tahun 2022, jumlah UMKM kembali meningkat menjadi 49 unit, dan pada tahun 2023, jumlah UMKM mencapai puncaknya dengan 59 unit.

Analisis tren linear dari data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi yang cukup tajam, secara keseluruhan, jumlah UMKM di bidang otomotif di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setelah tahun 2020. Jika kita menggambarkan garis tren linear, kita dapat melihat bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan adalah sekitar 5 unit per tahun setelah tahun 2018. Namun, penurunan tajam pada tahun 2021 menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

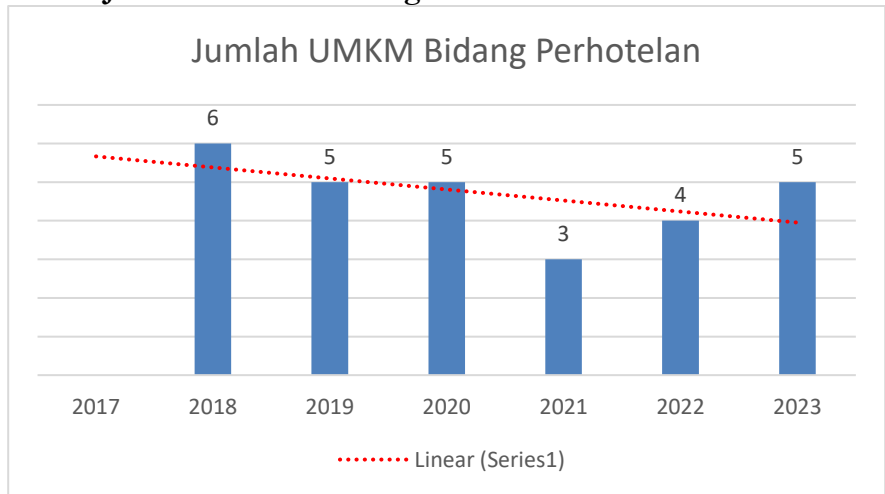
Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan tingkat return on investment (ROI) adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan akses dan kualitas pelatihan bagi pelaku UMKM di bidang otomotif untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka. Kedua, program pemasaran dan promosi perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan UMKM. Ketiga, diversifikasi layanan yang ditawarkan oleh UMKM otomotif, seperti menambahkan layanan perbaikan dan penjualan aksesoris otomotif, dapat membantu meningkatkan pendapatan dan ROI. Keempat, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan bagi pengembangan UMKM di bidang ini. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah UMKM di sektor otomotif akan terus



meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan pengaruh adanya marketplace atau platform belanja online. Dengan memanfaatkan platform digital, UMKM otomotif dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan mengurangi biaya operasional. Digitalisasi UMKM melalui platform online juga dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan akses ke berbagai alat pemasaran digital yang efektif. Dengan demikian, UMKM otomotif di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan ROI dan bersaing di pasar yang lebih luas.

6.2.12. Jumlah UMKM Bidang Perhotelan



Gambar 72. Jumlah UMKM Bidang Perhotelan

Diagram yang menggambarkan jumlah UMKM di bidang perhotelan di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang relatif stabil namun dengan beberapa fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah UMKM di sektor ini tercatat sebanyak 6 unit. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2019 menjadi 5 unit dan tetap stabil pada tahun 2020 dengan jumlah yang sama. Namun, pada tahun 2021, jumlah UMKM menurun lagi menjadi 3 unit, yang mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi industri perhotelan



secara global. Pada tahun 2022, jumlah UMKM kembali meningkat menjadi 4 unit, dan pada tahun 2023, jumlah UMKM tercatat sebanyak 5 unit.

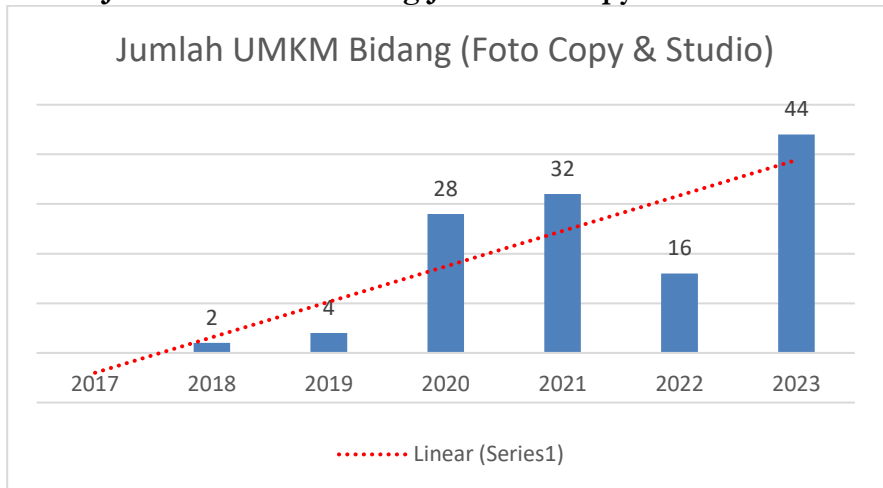
Analisis tren linear dari data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi, secara keseluruhan, jumlah UMKM di bidang perhotelan di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit penurunan pada tahun 2021. Jika kita menggambarkan garis tren linear, kita dapat melihat bahwa rata-rata jumlah UMKM per tahun cenderung mendekati angka 5 unit, dengan penurunan tajam pada tahun 2021 yang mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti pandemi.

Kemungkinan faktor penyebab fluktuasi ini termasuk perubahan dalam kondisi ekonomi lokal, kebijakan pemerintah, dan dampak pandemi COVID-19 yang signifikan terhadap industri perhotelan. Penurunan tajam pada tahun 2021 kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan jumlah wisatawan dan pembatasan perjalanan yang diberlakukan selama pandemi. Peningkatan kembali pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya pemulihan dan adaptasi dari pelaku UMKM di sektor ini.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan tingkat return on investment (ROI) adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan dan insentif bagi pelaku UMKM di bidang perhotelan untuk membantu mereka pulih dari dampak pandemi. Kedua, program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pelaku UMKM perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing mereka. Ketiga, diversifikasi layanan yang ditawarkan oleh UMKM perhotelan, seperti menambahkan layanan tambahan seperti tur lokal atau pengalaman budaya, dapat membantu meningkatkan pendapatan dan ROI. Keempat, kolaborasi dengan platform pemesanan online dan marketplace dapat membantu UMKM perhotelan menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan tingkat hunian. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah UMKM di sektor perhotelan akan terus meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah.



6.2.13. Jumlah UMKM Bidang Jasa Foto Copy dan Studio



Gambar 73. Jumlah UMKM Bidang Fotocopy dan Studio

Diagram yang menggambarkan jumlah UMKM di bidang jasa fotokopi dan studio di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang sangat dinamis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah UMKM di sektor ini tercatat sebanyak 2 unit. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 4 unit. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan signifikan dengan jumlah UMKM mencapai 28 unit, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan permintaan atau adanya program dukungan dari pemerintah. Pada tahun 2021, jumlah UMKM terus meningkat menjadi 32 unit. Namun, pada tahun 2022, jumlah UMKM menurun menjadi 16 unit, sebelum akhirnya melonjak kembali pada tahun 2023 menjadi 44 unit.

Analisis tren linear dari data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi yang cukup tajam, secara keseluruhan, jumlah UMKM di bidang jasa fotokopi dan studio di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setelah tahun 2019. Jika kita menggambarkan garis tren linear, kita dapat melihat bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan adalah sekitar 7 unit per tahun setelah tahun 2018. Namun, penurunan tajam pada tahun 2022 menunjukkan adanya



tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Kemungkinan faktor penyebab fluktuasi ini termasuk perubahan dalam kondisi ekonomi lokal, kebijakan pemerintah, dan perubahan dalam permintaan pasar. Penurunan tajam pada tahun 2022 mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti penurunan ekonomi atau perubahan dalam preferensi konsumen. Peningkatan kembali pada tahun 2023 menunjukkan adanya pemulihan dan adaptasi dari pelaku UMKM di sektor ini.

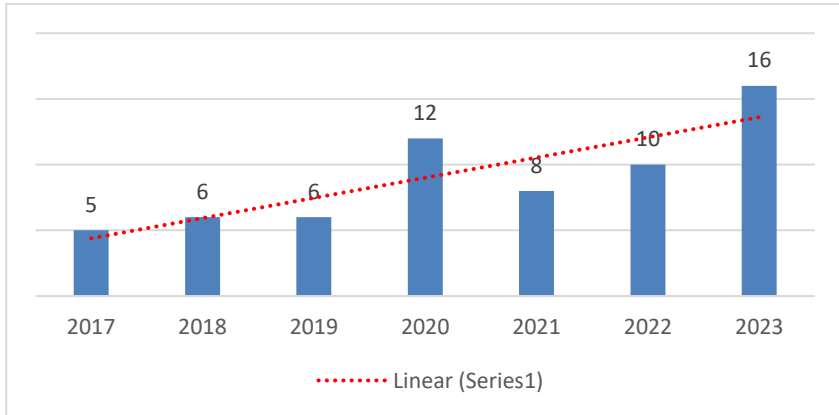
Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan tingkat return on investment (ROI) adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan dan insentif bagi pelaku UMKM di bidang jasa fotokopi dan studio untuk membantu mereka pulih dari dampak ekonomi yang tidak stabil. Kedua, program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pelaku UMKM perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing mereka. Ketiga, diversifikasi layanan yang ditawarkan oleh UMKM fotokopi dan studio, seperti menambahkan layanan digital printing atau desain grafis, dapat membantu meningkatkan pendapatan dan ROI. Keempat, kolaborasi dengan platform pemesanan online dan marketplace dapat membantu UMKM jasa fotokopi dan studio menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah UMKM di sektor jasa fotokopi dan studio akan terus meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah.

6.2.14. Jumlah UMKM Bidang Jasa Penjahit

Diagram (gambar 74.) yang menggambarkan jumlah UMKM di bidang jasa penjahit di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah UMKM di sektor ini tercatat sebanyak 5 unit. Angka ini mengalami peningkatan kecil pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 6 unit. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan signifikan dengan jumlah UMKM mencapai 12 unit, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan permintaan atau adanya program



dukungan dari pemerintah. Namun, pada tahun 2021, jumlah UMKM menurun menjadi 8 unit. Pada tahun 2022, jumlah UMKM kembali meningkat menjadi 10 unit, dan pada tahun 2023, jumlah UMKM mencapai puncaknya dengan 16 unit.



Gambar 74. Jumlah UMKM Bidang Jasa Penjahit

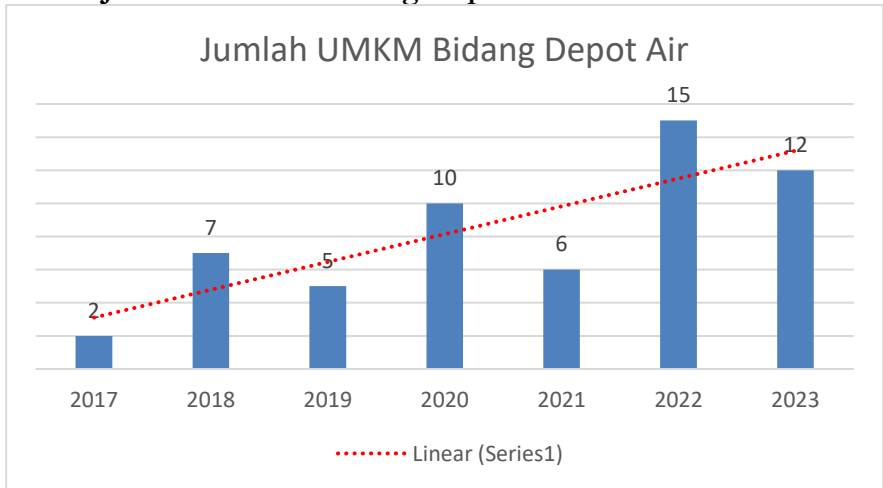
Analisis tren linear dari data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi yang cukup tajam, secara keseluruhan, jumlah UMKM di bidang jasa penjahit di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setelah tahun 2019. Jika kita menggambarkan garis tren linear, kita dapat melihat bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan adalah sekitar 2 unit per tahun setelah tahun 2017. Namun, penurunan tajam pada tahun 2021 menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kemungkinan faktor penyebab fluktuasi ini termasuk perubahan dalam kondisi ekonomi lokal, kebijakan pemerintah, dan perubahan dalam permintaan pasar. Penurunan tajam pada tahun 2021 mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti penurunan ekonomi atau perubahan dalam preferensi konsumen. Peningkatan kembali pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya pemulihan dan adaptasi dari pelaku UMKM di sektor ini.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan tingkat return on investment



(ROI) adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan dan insentif bagi pelaku UMKM di bidang jasa penjahit untuk membantu mereka pulih dari dampak ekonomi yang tidak stabil. Kedua, program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pelaku UMKM perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing mereka. Ketiga, diversifikasi layanan yang ditawarkan oleh UMKM penjahit, seperti menambahkan layanan desain pakaian atau penjahitan khusus, dapat membantu meningkatkan pendapatan dan ROI. Keempat, kolaborasi dengan platform pemesanan online dan marketplace dapat membantu UMKM jasa penjahit menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah UMKM di sektor jasa penjahit akan terus meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah.

6.2.15. Jumlah UMKM Bidang Depot Air Minum



Gambar 75. Jumlah UMKM Bidang Depot Air

Diagram yang menggambarkan jumlah UMKM di bidang jasa depot air minum di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah UMKM di sektor ini tercatat sebanyak 2 unit. Angka ini mengalami peningkatan



signifikan pada tahun 2018 menjadi 7 unit. Namun, pada tahun 2019, jumlah UMKM menurun menjadi 5 unit. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan besar dengan jumlah UMKM mencapai 10 unit, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan permintaan atau adanya program dukungan dari pemerintah. Pada tahun 2021, jumlah UMKM menurun lagi menjadi 6 unit. Namun, pada tahun 2022, jumlah UMKM melonjak drastis menjadi 15 unit, sebelum akhirnya menurun sedikit pada tahun 2023 menjadi 12 unit.

Analisis tren linear dari data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi yang cukup tajam, secara keseluruhan, jumlah UMKM di bidang jasa depot air minum di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setelah tahun 2017. Jika kita menggambarkan garis tren linear, kita dapat melihat bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan adalah sekitar 2 unit per tahun setelah tahun 2017. Namun, penurunan tajam pada tahun 2019 dan 2021 menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

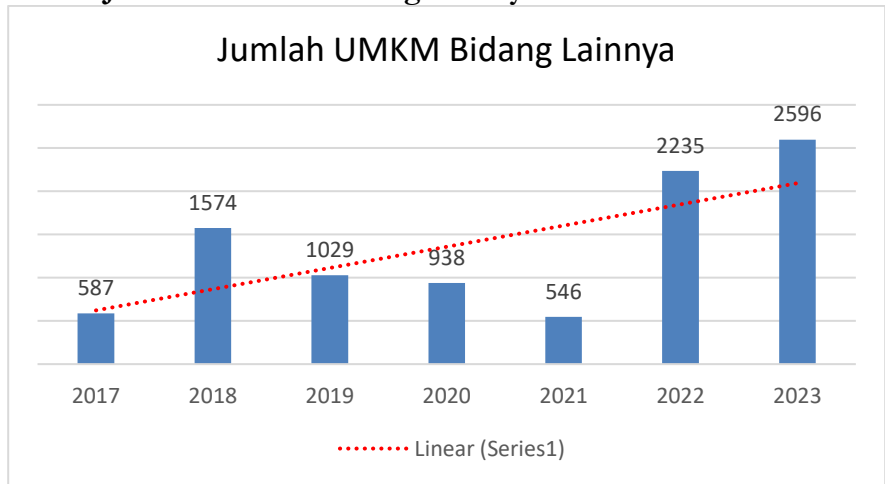
Kemungkinan faktor penyebab fluktuasi ini termasuk perubahan dalam kondisi ekonomi lokal, kebijakan pemerintah, dan perubahan dalam permintaan pasar. Penurunan tajam pada tahun 2019 dan 2021 mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti penurunan ekonomi atau perubahan dalam preferensi konsumen. Peningkatan kembali pada tahun 2022 menunjukkan adanya pemulihan dan adaptasi dari pelaku UMKM di sektor ini.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan tingkat return on investment (ROI) adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan dan insentif bagi pelaku UMKM di bidang jasa depot air minum untuk membantu mereka pulih dari dampak ekonomi yang tidak stabil. Kedua, program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pelaku UMKM perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing mereka. Ketiga, diversifikasi layanan yang ditawarkan oleh UMKM depot air minum, seperti menambahkan layanan pengiriman air minum atau penjualan produk air minum kemasan, dapat membantu meningkatkan



pendapatan dan ROI. Keempat, kolaborasi dengan platform pemesanan online dan marketplace dapat membantu UMKM jasa depot air minum menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah UMKM di sektor jasa depot air minum akan terus meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah.

6.2.16. Jumlah UMKM Bidang Lainnya



Gambar 76. Jumlah UMKM Bidang Lainnya

Diagram yang menggambarkan jumlah UMKM di bidang lainnya di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah UMKM di sektor ini tercatat sebanyak 587 unit. Angka ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2018 menjadi 1574 unit, yang mungkin disebabkan oleh adanya program atau kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM di berbagai bidang. Namun, pada tahun 2019, jumlah UMKM menurun menjadi 1029 unit dan terus menurun pada tahun 2020 menjadi 938 unit. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi yang kurang mendukung atau tantangan operasional yang dihadapi oleh UMKM. Pada tahun 2021, jumlah UMKM menurun drastis menjadi 546 unit, yang bisa jadi akibat



dari dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi banyak sektor usaha. Namun, pada tahun 2022, jumlah UMKM melonjak drastis menjadi 2235 unit, menunjukkan adanya pemulihan yang kuat dan mungkin adanya inisiatif baru yang berhasil. Pada tahun 2023, jumlah UMKM terus meningkat menjadi 2596 unit.

Analisis tren linear dari data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi yang cukup tajam, secara keseluruhan, jumlah UMKM di berbagai bidang di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setelah tahun 2017. Jika kita menggambarkan garis tren linear, kita dapat melihat bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan adalah sekitar 300 unit per tahun setelah tahun 2017. Namun, penurunan tajam pada tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

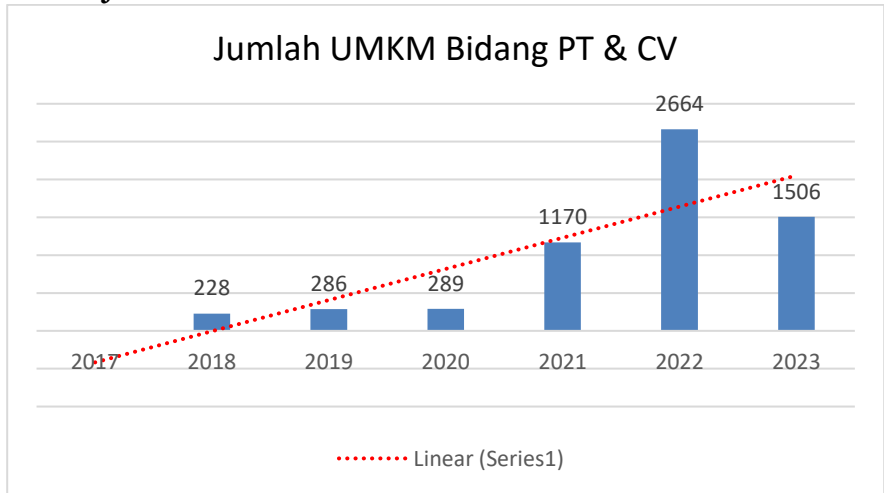
Kemungkinan faktor penyebab fluktuasi ini termasuk perubahan dalam kondisi ekonomi lokal, kebijakan pemerintah, dan dampak pandemi COVID-19. Penurunan tajam pada tahun 2019 hingga 2021 mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti penurunan ekonomi atau perubahan dalam preferensi konsumen. Peningkatan kembali pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya pemulihan dan adaptasi dari pelaku UMKM di berbagai bidang.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan tingkat return on investment (ROI) adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan dan insentif bagi pelaku UMKM di berbagai bidang untuk membantu mereka pulih dari dampak ekonomi yang tidak stabil. Kedua, program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pelaku UMKM perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing mereka. Ketiga, diversifikasi layanan yang ditawarkan oleh UMKM di berbagai bidang, seperti menambahkan layanan baru atau mengikuti tren pasar terkini, dapat membantu meningkatkan pendapatan dan ROI. Keempat, kolaborasi dengan platform pemesanan online dan marketplace dapat membantu UMKM di berbagai bidang menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah UMKM di berbagai



bidang akan terus meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah.

6.2.17. Jumlah PT dan CV



Gambar 77. Jumlah UMKM Bidang PT dan CV

Diagram yang menggambarkan jumlah UMKM berbentuk PT dan CV di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang sangat dinamis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah UMKM di sektor ini tercatat sebanyak 228 unit. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 286 unit dan sedikit meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 289 unit. Namun, pada tahun 2021, terjadi lonjakan signifikan dengan jumlah UMKM mencapai 1170 unit, yang mungkin disebabkan oleh adanya program dukungan besar-besaran dari pemerintah atau peningkatan minat masyarakat untuk mendirikan usaha berbentuk PT dan CV. Pada tahun 2022, jumlah UMKM melonjak drastis menjadi 2664 unit, menunjukkan adanya pertumbuhan yang sangat pesat. Namun, pada tahun 2023, jumlah UMKM menurun menjadi 1506 unit.

Analisis tren linear dari data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi yang cukup tajam, secara keseluruhan, jumlah UMKM berbentuk PT dan CV di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setelah tahun 2018. Jika kita



menggambarkan garis tren linear, kita dapat melihat bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan adalah sekitar 400 unit per tahun setelah tahun 2018. Namun, penurunan tajam pada tahun 2023 menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Kemungkinan faktor penyebab fluktuasi ini termasuk perubahan dalam kondisi ekonomi lokal, kebijakan pemerintah, dan perubahan dalam minat masyarakat untuk mendirikan usaha berbentuk PT dan CV. Penurunan tajam pada tahun 2023 mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti penurunan ekonomi atau perubahan dalam regulasi yang mempengaruhi operasional UMKM. Peningkatan kembali pada tahun 2022 menunjukkan adanya pemulihan dan adaptasi dari pelaku UMKM di sektor ini.

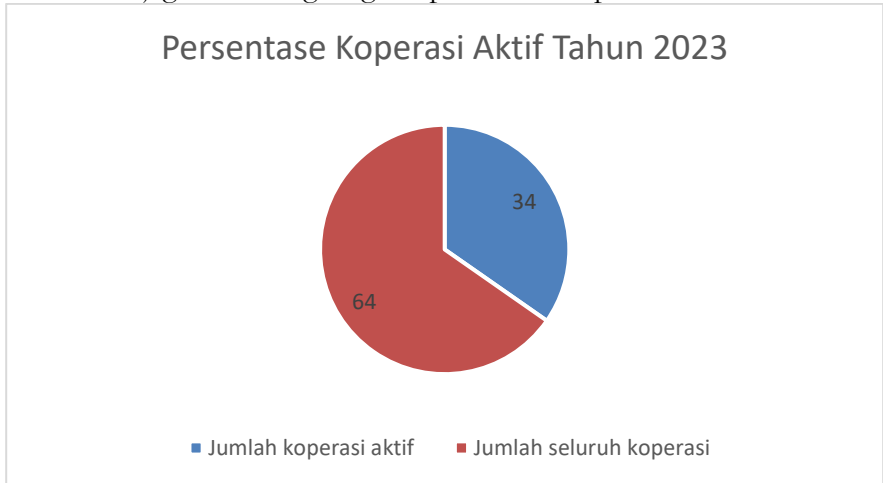
Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan tingkat return on investment (ROI) adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan dan insentif bagi pelaku UMKM berbentuk PT dan CV untuk membantu mereka pulih dari dampak ekonomi yang tidak stabil. Kedua, program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pelaku UMKM perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing mereka. Ketiga, diversifikasi layanan yang ditawarkan oleh UMKM berbentuk PT dan CV, seperti menambahkan layanan konsultasi bisnis atau manajemen, dapat membantu meningkatkan pendapatan dan ROI. Keempat, kolaborasi dengan platform pemesanan online dan marketplace dapat membantu UMKM berbentuk PT dan CV menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah UMKM berbentuk PT dan CV akan terus meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah.

6.2.18. Jumlah Koperasi Aktif

Diagram (gambar 78.) yang menggambarkan persentase koperasi aktif di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 34% dari total koperasi yang aktif, sementara 66% lainnya tidak aktif. Ini berarti bahwa dari seluruh koperasi yang ada, hanya



sepertiga yang beroperasi secara efektif. Untuk memberikan analisis tren linear yang komprehensif, diperlukan data dari tahun-tahun sebelumnya untuk melihat apakah persentase koperasi aktif ini mengalami peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu. Namun, berdasarkan data tunggal ini, dapat disimpulkan bahwa ada tantangan signifikan dalam menjaga keberlangsungan operasional koperasi di daerah ini.



Gambar 78. Persentase Koperasi Aktif

Kemungkinan faktor penyebab rendahnya persentase koperasi aktif ini bisa beragam. Salah satunya adalah kurangnya keterampilan manajemen di antara pengurus koperasi, yang dapat mengakibatkan pengelolaan yang kurang efektif dan akhirnya menyebabkan koperasi menjadi tidak aktif. Selain itu, masalah keuangan seperti kurangnya modal atau akses ke sumber pendanaan juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi. Persaingan pasar yang ketat dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan atau insentif juga dapat berkontribusi pada rendahnya tingkat aktivitas koperasi.

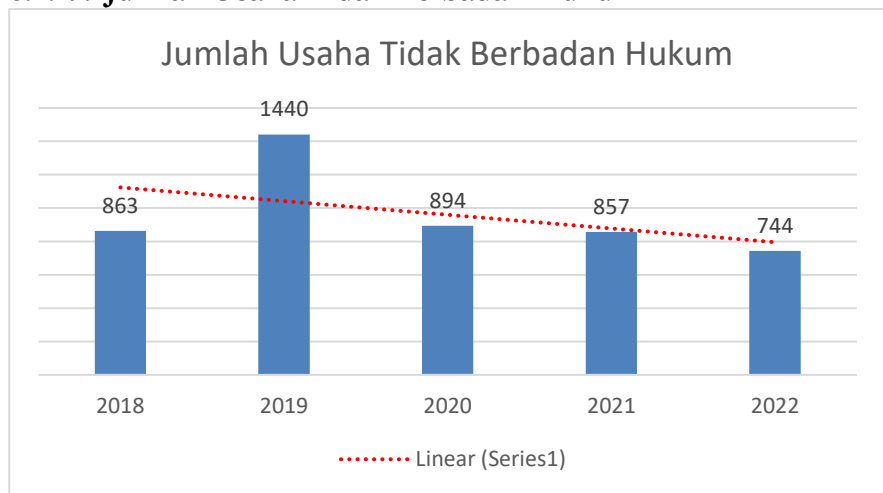
Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan tingkat return on investment (ROI) adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan program pelatihan dan pendidikan bagi pengurus koperasi untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan operasional



mereka. Kedua, akses ke sumber pendanaan perlu diperluas, misalnya melalui kemitraan dengan lembaga keuangan atau program pinjaman berbunga rendah yang khusus ditujukan untuk koperasi. Ketiga, inovasi dalam layanan dan produk yang ditawarkan oleh koperasi perlu didorong untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar. Keempat, kolaborasi antara koperasi dan sektor swasta dapat membantu menciptakan peluang baru dan memperluas jaringan pemasaran.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan persentase koperasi aktif di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkat, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah. Meningkatkan ROI bagi koperasi juga akan memastikan bahwa investasi yang dilakukan dalam pengembangan koperasi memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan.

6.2.19. Jumlah Usaha Tidak Berbadan Hukum



Gambar 79. Jumlah Usaha Tidak Berbadan Hukum

Diagram yang menggambarkan jumlah usaha tidak berbadan hukum di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah usaha tidak berbadan hukum tercatat sebanyak 863 unit. Angka ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2019 menjadi 1440 unit, yang mungkin disebabkan oleh



adanya dorongan ekonomi atau kebijakan yang mendukung usaha kecil. Namun, pada tahun 2020, jumlah usaha menurun menjadi 894 unit, dan terus menurun pada tahun 2021 menjadi 857 unit. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi yang kurang mendukung atau tantangan operasional yang dihadapi oleh usaha kecil. Pada tahun 2022, jumlah usaha tidak berbadan hukum menurun lebih lanjut menjadi 744 unit.

Analisis tren linear dari data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi yang cukup tajam, secara keseluruhan, jumlah usaha tidak berbadan hukum di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren penurunan yang signifikan setelah tahun 2019. Jika kita menggambarkan garis tren linear, kita dapat melihat bahwa rata-rata penurunan tahunan adalah sekitar 100 unit per tahun setelah tahun 2019. Penurunan tajam ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Kemungkinan faktor penyebab fluktuasi ini termasuk perubahan dalam kondisi ekonomi lokal, kebijakan pemerintah, dan perubahan dalam minat masyarakat untuk mendirikan usaha tidak berbadan hukum. Penurunan tajam pada tahun 2020 hingga 2022 mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti penurunan ekonomi atau perubahan dalam regulasi yang mempengaruhi operasional usaha kecil. Peningkatan pada tahun 2019 menunjukkan adanya dorongan ekonomi atau kebijakan yang mendukung usaha kecil pada tahun tersebut.

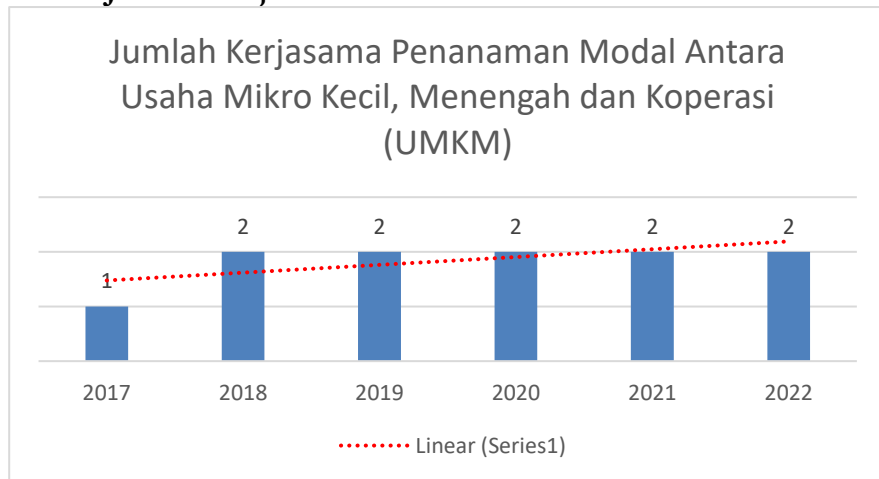
Dampak positif dari perkembangan ini adalah bahwa usaha yang tidak berbadan hukum cenderung lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Usaha kecil ini juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, dampak negatifnya adalah bahwa banyak usaha yang tidak berbadan hukum dapat menghadapi tantangan dalam hal akses ke sumber daya, pendanaan, dan dukungan pemerintah, yang dapat menghambat pertumbuhan mereka.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan tingkat return on investment



(ROI) adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan dan insentif bagi usaha tidak berbadan hukum untuk membantu mereka pulih dari dampak ekonomi yang tidak stabil. Kedua, program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pelaku usaha perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing mereka. Ketiga, diversifikasi layanan yang ditawarkan oleh usaha tidak berbadan hukum, seperti menambahkan layanan baru atau mengikuti tren pasar terkini, dapat membantu meningkatkan pendapatan dan ROI. Keempat, kolaborasi dengan platform pemesanan online dan marketplace dapat membantu usaha tidak berbadan hukum menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah usaha tidak berbadan hukum di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah.

6.2.20. Jumlah Kerjasama Penanaman Modal antara UMKM



Gambar 80. Jumlah Kerjasama Penanaman Modal Antara UMKM

Diagram yang menggambarkan jumlah kerja sama penanaman modal antara UMKM di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang relatif stabil dari tahun 2017 hingga 2022. Pada tahun 2017, jumlah kerja sama tercatat sebanyak 1 unit, kemudian meningkat menjadi 2 unit pada



tahun 2018 dan tetap stabil pada angka tersebut hingga tahun 2022. Garis tren linear yang ditampilkan dalam diagram ini menunjukkan garis datar mulai dari tahun 2018 hingga 2022, yang mengindikasikan tidak adanya perubahan signifikan dalam jumlah kerja sama penanaman modal selama periode tersebut.

Analisis tren linear ini menunjukkan bahwa setelah peningkatan awal pada tahun 2018, jumlah kerja sama penanaman modal antara UMKM di Kabupaten Jayawijaya tidak mengalami pertumbuhan lebih lanjut. Stabilitas ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kemungkinan adanya batasan dalam kapasitas atau sumber daya yang dimiliki oleh UMKM untuk menjalin kerja sama baru. Selain itu, kondisi ekonomi yang stabil namun tidak berkembang pesat juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi. Kebijakan pemerintah yang tidak berubah secara signifikan dalam mendukung atau menghambat kerja sama penanaman modal juga bisa menjadi penyebab stabilitas ini.

Dampak positif dari stabilitas ini adalah adanya kepastian dan prediktabilitas bagi UMKM dalam merencanakan bisnis mereka. Dengan jumlah kerja sama yang stabil, UMKM dapat fokus pada pengembangan internal dan peningkatan kualitas produk atau layanan mereka tanpa harus khawatir tentang fluktuasi besar dalam kerja sama penanaman modal. Namun, dampak negatifnya adalah kurangnya pertumbuhan dan inovasi dalam sektor ini. Tanpa peningkatan jumlah kerja sama, peluang untuk ekspansi dan diversifikasi usaha menjadi terbatas, yang pada akhirnya dapat menghambat potensi pertumbuhan ekonomi lokal.

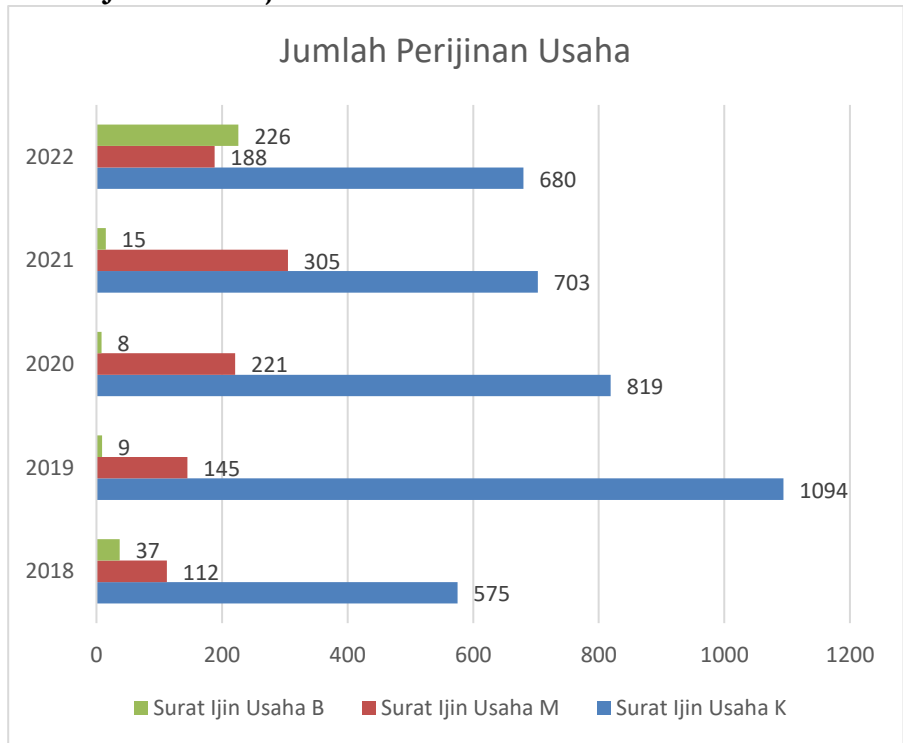
Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang menghalangi peningkatan jumlah kerja sama penanaman modal antara UMKM. Ini bisa melibatkan peningkatan akses ke sumber daya, pelatihan manajemen, dan dukungan finansial. Kedua, menciptakan insentif bagi UMKM untuk menjalin kerja sama baru, seperti pengurangan pajak atau subsidi, dapat mendorong lebih banyak kerja sama penanaman modal. Ketiga, memperkenalkan program-program inovatif yang mendorong kolaborasi antara UMKM dan perusahaan besar atau investor dapat



membantu meningkatkan jumlah kerja sama. Keempat, mempromosikan keberhasilan kerja sama yang ada sebagai studi kasus untuk menginspirasi UMKM lain untuk mengikuti jejak yang sama.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah kerja sama penanaman modal antara UMKM di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkat, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah. Meningkatkan return on investment (ROI) bagi UMKM juga akan memastikan bahwa investasi yang dilakukan dalam pengembangan kerja sama ini memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan.

6.2.21. Jumlah Perijinan Usaha



Gambar 81. Jumlah Perizinan Usaha



Diagram yang menggambarkan jumlah perijinan usaha di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang menarik dari tahun 2018 hingga 2022. Diagram ini mencakup tiga kategori perijinan usaha: Surat Ijin Usaha B (berwarna hijau), Surat Ijin Usaha M (berwarna kuning), dan Surat Ijin Usaha K (berwarna biru). Data menunjukkan bahwa jumlah perijinan usaha mengalami peningkatan yang signifikan selama periode ini.

Pada tahun 2018, jumlah Surat Ijin Usaha B tercatat sebanyak 112, Surat Ijin Usaha M sebanyak 575, dan Surat Ijin Usaha K sebanyak 37. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan yang signifikan dengan Surat Ijin Usaha B mencapai 145, Surat Ijin Usaha M meningkat menjadi 1094, dan Surat Ijin Usaha K menjadi 37. Tahun 2020 menunjukkan sedikit penurunan dengan Surat Ijin Usaha B sebanyak 221, Surat Ijin Usaha M sebanyak 819, dan Surat Ijin Usaha K sebanyak 9. Pada tahun 2021, jumlah perijinan kembali meningkat dengan Surat Ijin Usaha B sebanyak 305, Surat Ijin Usaha M sebanyak 703, dan Surat Ijin Usaha K sebanyak 8. Tahun 2022 menunjukkan tren yang stabil dengan Surat Ijin Usaha B sebanyak 188, Surat Ijin Usaha M sebanyak 680, dan Surat Ijin Usaha K sebanyak 15.

Analisis tren linear dari data ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi tahunan, secara keseluruhan terdapat peningkatan dalam jumlah perijinan usaha di Kabupaten Jayawijaya. Peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 mungkin disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta adanya dorongan ekonomi yang mendorong lebih banyak pengusaha untuk mendapatkan perijinan usaha. Penurunan pada tahun 2020 bisa jadi disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi dan menyebabkan banyak usaha menunda atau membatalkan rencana ekspansi mereka.

Dampak positif dari peningkatan jumlah perijinan usaha ini adalah pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih kuat, peningkatan lapangan kerja, dan diversifikasi ekonomi. Dengan lebih banyak usaha yang mendapatkan perijinan, ada potensi peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Selain itu, peningkatan jumlah usaha juga dapat mendorong inovasi dan persaingan yang sehat di pasar lokal.



Namun, dampak negatifnya bisa termasuk tekanan pada infrastruktur lokal dan sumber daya alam jika pertumbuhan usaha tidak diimbangi dengan perencanaan yang baik. Selain itu, peningkatan jumlah usaha juga bisa menyebabkan persaingan yang ketat, yang mungkin sulit dihadapi oleh usaha kecil yang baru berdiri.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu terus mendukung usaha kecil dan menengah dengan menyediakan akses ke sumber daya, pelatihan, dan pendanaan. Kedua, perlu ada perencanaan yang baik untuk mengelola pertumbuhan usaha agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada infrastruktur dan lingkungan. Ketiga, pemerintah dapat memperkenalkan insentif untuk usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Keempat, kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat membantu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kuat dan mendukung inovasi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah perijinan usaha di Kabupaten Jayawijaya dapat terus meningkat dengan cara yang berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi daerah dan masyarakatnya.

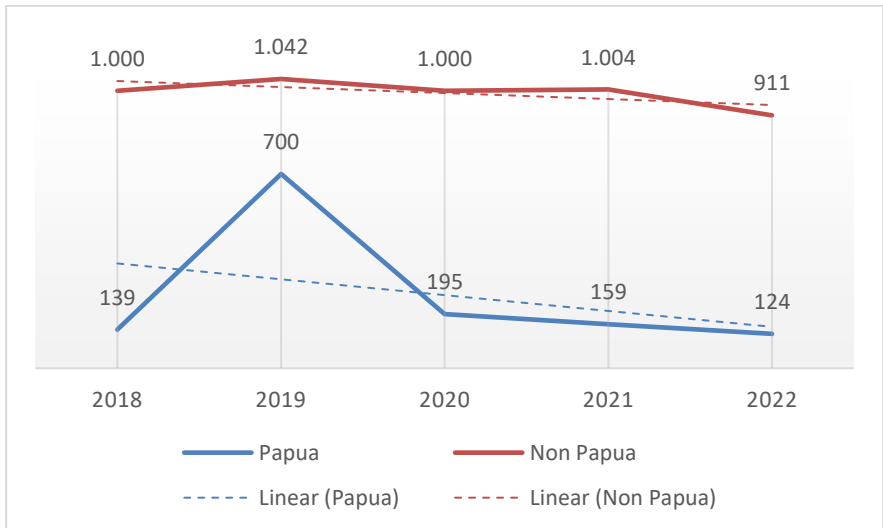
6.2.22. Jumlah Pelaku UMKM

Diagram (Gambar 82.) yang menggambarkan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang bervariasi dari tahun 2018 hingga 2022. Diagram ini menampilkan dua kelompok: Papua dan Non-Papua. Garis biru solid mewakili UMKM Papua, sementara garis merah solid mewakili UMKM Non-Papua. Selain itu, terdapat garis putus-putus yang menunjukkan tren linear untuk masing-masing kelompok: garis putus-putus biru untuk Papua dan garis putus-putus merah untuk Non-Papua.

Untuk UMKM Papua, jumlah pelaku UMKM mengalami peningkatan tajam dari 139 pada tahun 2018 menjadi puncak 700 pada tahun 2019. Namun, setelah itu, jumlahnya menurun drastis menjadi 195 pada tahun 2020, sedikit meningkat menjadi 159 pada tahun 2021,



dan kembali menurun menjadi 124 pada tahun 2022. Garis tren linear menunjukkan penurunan umum selama periode ini.



Gambar 82. Jumlah Pelaku UMKM

Untuk UMKM Non-Papua, jumlah pelaku UMKM relatif stabil, dimulai dari sekitar 1.000 pada tahun 2018 dan 2019, dengan sedikit peningkatan hingga mencapai puncak sekitar 1.042 pada tahun 2019. Setelah itu, jumlahnya sedikit menurun tetapi tetap stabil di sekitar angka 1.000 hingga tahun 2022. Garis tren linear untuk Non-Papua menunjukkan stabilitas dengan sedikit penurunan.

Kemungkinan faktor penyebab fluktuasi ini bisa beragam. Untuk UMKM Papua, peningkatan tajam pada tahun 2019 mungkin disebabkan oleh dorongan ekonomi atau kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan UMKM. Namun, penurunan drastis setelah itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, kurangnya akses ke sumber daya, atau tantangan operasional yang dihadapi oleh UMKM. Untuk UMKM Non-Papua, stabilitas jumlah pelaku UMKM menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya dan dukungan yang lebih konsisten.



Dampak positif dari perkembangan ini adalah bahwa peningkatan jumlah pelaku UMKM, terutama pada tahun 2019, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, dampak negatifnya adalah bahwa penurunan tajam dalam jumlah pelaku UMKM Papua setelah tahun 2019 menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Stabilitas jumlah pelaku UMKM Non-Papua menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan, mungkin ada kurangnya inovasi atau ekspansi yang signifikan.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan dan insentif bagi UMKM Papua untuk membantu mereka pulih dari penurunan yang tajam. Ini bisa melibatkan peningkatan akses ke sumber daya, pelatihan manajemen, dan dukungan finansial. Kedua, perlu ada perencanaan yang baik untuk mengelola pertumbuhan UMKM agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada infrastruktur dan lingkungan. Ketiga, pemerintah dapat memperkenalkan program-program inovatif yang mendorong kolaborasi antara UMKM Papua dan Non-Papua untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan. Keempat, mempromosikan keberhasilan UMKM yang ada sebagai studi kasus untuk menginspirasi UMKM lain untuk mengikuti jejak yang sama.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkat dengan cara yang berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi daerah dan masyarakatnya.

BAB VII

KEUANGAN, BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JAYAWIJAYA 2023-2024



BAB VII

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Jayawijaya dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD). BPKAD memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Lembaga ini bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah, yang mencakup penerimaan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan aset daerah. BPKAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, BPKAD memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Jayawijaya yang sejahtera, mandiri secara ekonomi, berkualitas, dan berbudaya. Untuk mencapai visi ini, BPKAD memiliki misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2018-2023. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman kerja operasional dan alat evaluasi kinerja. Selain itu, BPKAD juga menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, serta sebagai alat kendali dan penilai kinerja secara kuantitatif. Dengan demikian, BPKAD berperan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Jayawijaya, memastikan bahwa semua sumber daya keuangan dan aset daerah dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

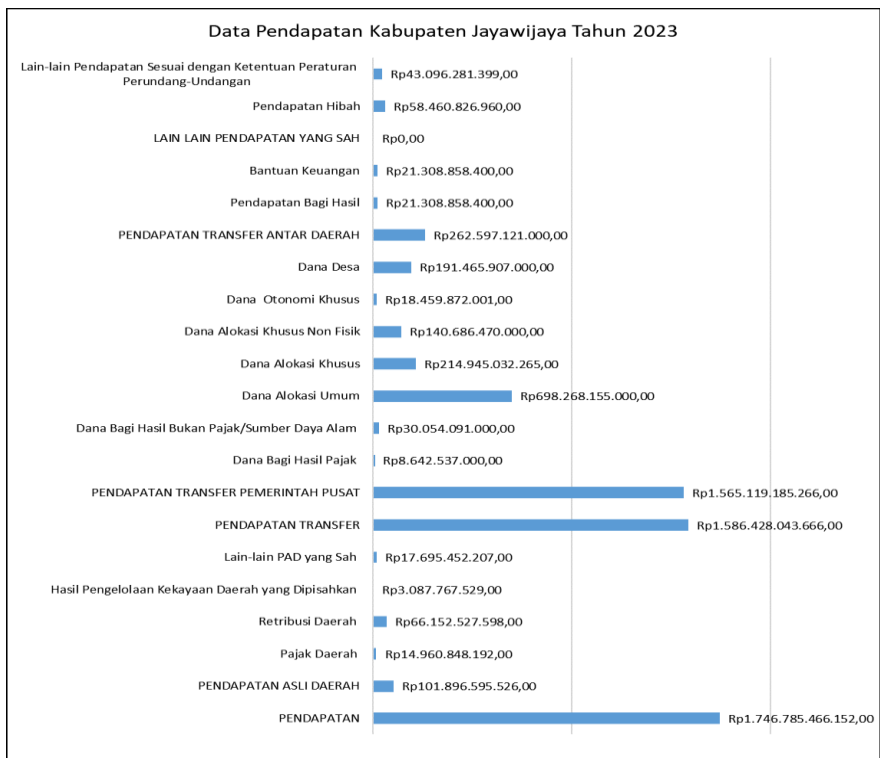
Adapaun data sektoral yang disajikan sebagai berikut:

1. Data Pendapatan Kabupaten Jayawijaya tahun 2023;



2. Anggaran Belanja Kabupaten Jayawijaya tahun 2023;
3. Jumlah Aset Bergerak;
4. Jumlah Aset Tidak Bergerak;
5. Nilai Aset Bergerak;
6. Nilai Aset Tidak Bergerak;
7. Nilai Penyusutan Aset Bergerak;
8. Nilai Penyusutan Aset Tidak bergerak.

7.1. Data Pendapatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023



Gambar 83. Data Pendapatan Kabupaten Jayawijaya



Pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Jayawijaya dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD). Berdasarkan data pendapatan Kabupaten Jayawijaya tahun 2023, total pendapatan daerah mencapai Rp1.746.785.466.152. Pendapatan ini terdiri dari beberapa sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD, yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah Kabupaten Jayawijaya sendiri, mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah, dengan total sebesar Rp101.896.595.526. Dana Perimbangan, yang merupakan transfer dari pemerintah pusat, mencakup Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan total sebesar Rp1.565.119.185.266. Selain itu, terdapat juga Lain-lain Pendapatan yang Sah yang mencakup hibah dan bantuan keuangan dari provinsi atau kabupaten/kota lainnya, dengan total pendapatan transfer sebesar Rp1.586.428.043.666.

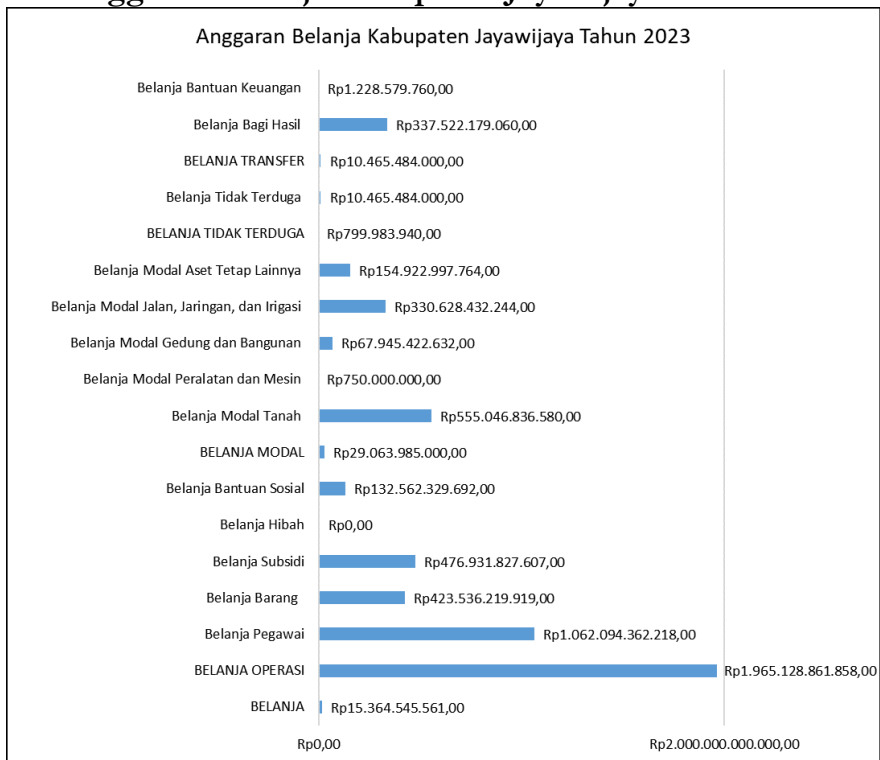
Analisis komprehensif terhadap data pendapatan ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Kabupaten Jayawijaya, yang mencerminkan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, kontribusi PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan lokal belum sepenuhnya dimanfaatkan. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru seperti pengelolaan aset daerah yang lebih efektif dan peningkatan investasi daerah.

Ke depan, BPKAD Kabupaten Jayawijaya perlu fokus pada beberapa strategi pengembangan. Pertama, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Kedua, memperkuat sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan mendorong investasi di sektor-sektor unggulan



seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Keempat, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi serta pihak swasta untuk mendapatkan dukungan pendanaan dan teknologi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Jayawijaya.

7.2. Anggaran Belanja Kabupaten Jayawijaya tahun 2023



Gambar 84. Anggaran Belanja Kabupaten Jayawijaya

Diagram di atas menunjukkan data anggaran belanja Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023. Anggaran ini mencakup berbagai kategori pengeluaran, masing-masing dengan nilai moneter tertentu. Berikut adalah deskripsi dan analisis komprehensif dari data tersebut:



Anggaran belanja Kabupaten Jayawijaya tahun 2023 menunjukkan alokasi yang signifikan untuk berbagai sektor. Kategori belanja operasi memiliki alokasi tertinggi dengan Rp1.965.128.861.858,00, yang mencakup biaya operasional seperti gaji pegawai, pembelian barang dan jasa, serta pemeliharaan fasilitas. Belanja pegawai sendiri mencapai Rp1.062.094.362.218,00, menunjukkan investasi besar dalam sumber daya manusia, mencakup gaji, tunjangan, dan insentif lainnya untuk pegawai negeri. Selain itu, belanja barang dan jasa sebesar Rp423.536.219.919,00 dialokasikan untuk pembelian barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah daerah.

Investasi dalam aset jangka panjang juga terlihat dari alokasi belanja modal yang mencapai Rp330.628.432.244,00. Ini mencerminkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, termasuk pembangunan gedung, jalan, jaringan, dan irigasi. Selain itu, belanja bantuan sosial sebesar Rp132.562.329.692,00 menunjukkan perhatian terhadap program kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Hibah sebesar Rp0,00 dan subsidi sebesar Rp476.931.827.607,00 menunjukkan dukungan terhadap berbagai sektor ekonomi dan masyarakat. Alokasi sekitar Rp10.465.484.000,00 untuk belanja tidak terduga menunjukkan kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat atau tak terduga selama tahun anggaran.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, melakukan tinjauan kinerja terhadap alokasi anggaran saat ini dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana di masa depan. Ini termasuk mengevaluasi dampak dari setiap kategori pengeluaran terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Kedua, meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan laporan rinci tentang penggunaan dana dapat membangun kepercayaan publik dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Ketiga, meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian daerah. Keempat, mengimplementasikan kontrol yang lebih ketat terhadap



pengeluaran operasional dan pegawai dapat membebaskan dana untuk proyek-proyek pembangunan yang lebih produktif. Terakhir, mendorong partisipasi publik dalam proses penyusunan anggaran dapat memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Jayawijaya dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.3. Jumlah Aset Bergerak



Gambar 85. Jumlah Aset Bergerak

Diagram di atas menunjukkan data jumlah aset bergerak daerah Kabupaten Jayawijaya dalam satuan unit untuk tahun 2023 dan 2024. Data ini mencakup tiga kategori aset: “Aset Tetap Lainnya,” “Peralatan dan Mesin,” dan “Alat Angkutan.” Menariknya, semua data menunjukkan tidak adanya peningkatan atau penurunan antara kedua tahun tersebut.

Pada kategori “Aset Tetap Lainnya,” jumlah unit tetap konstan pada 111.478 unit baik pada tahun 2023 maupun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penambahan atau pengurangan aset



tetap lainnya dalam periode tersebut. Kategori “Peralatan dan Mesin” juga menunjukkan stabilitas dengan jumlah unit yang tetap pada 52.739 unit. Demikian pula, kategori “Alat Angkutan” tidak mengalami perubahan, tetap pada 1.158 unit.

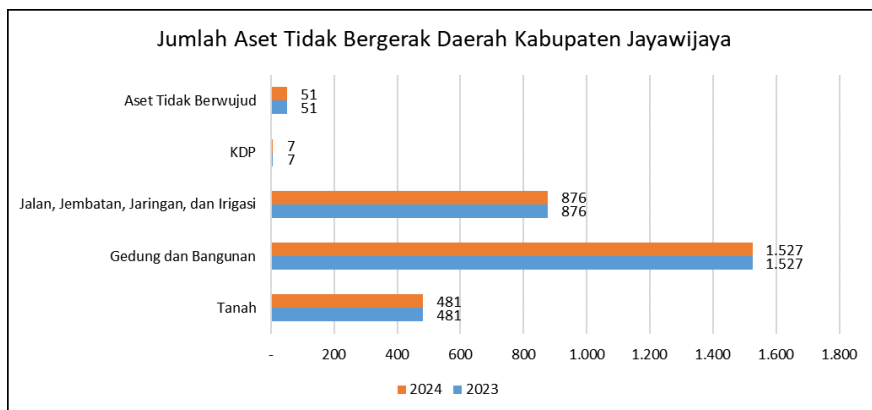
Analisis ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya tidak melakukan investasi tambahan atau pengurangan dalam aset bergerak selama periode 2023-2024. Stabilitas ini bisa diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan kondisi aset yang ada tanpa melakukan ekspansi atau pengurangan. Namun, hal ini juga bisa menunjukkan adanya keterbatasan dalam anggaran atau prioritas yang berbeda dalam pengelolaan aset daerah.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan usia aset yang ada. Meskipun jumlah unit tetap konstan, penting untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut masih dalam kondisi baik dan dapat berfungsi secara optimal. Kedua, mempertimbangkan investasi dalam teknologi baru dan peralatan modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ketiga, mengembangkan program pemeliharaan rutin untuk semua kategori aset guna memperpanjang umur aset dan mengurangi biaya perbaikan yang tidak terduga.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset. Transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaporan kondisi aset dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Jayawijaya dapat mengoptimalkan penggunaan aset bergerak dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.



7.4. Jumlah Aset Tidak Bergerak



Gambar 86. Jumlah Aset Tidak Bergerak

Diagram di atas menunjukkan data jumlah aset tidak bergerak daerah Kabupaten Jayawijaya dalam satuan yang sesuai untuk tahun 2023 dan 2024. Data ini mencakup lima kategori aset: “Aset Tidak Berwujud,” “KDP,” “Jalan, Jembatan, Jaringan, dan Irigasi,” “Gedung dan Bangunan,” dan “Tanah.” Menariknya, semua data menunjukkan tidak adanya peningkatan atau penurunan antara kedua tahun tersebut.

Pada kategori “Aset Tidak Berwujud,” jumlah unit tetap konstan pada 51 unit baik pada tahun 2023 maupun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penambahan atau pengurangan aset tidak berwujud dalam periode tersebut. Kategori “KDP” juga menunjukkan stabilitas dengan jumlah unit yang tetap pada 7 unit. Demikian pula, kategori “Jalan, Jembatan, Jaringan, dan Irigasi” tidak mengalami perubahan, tetap pada 876 unit. Kategori “Gedung dan Bangunan” memiliki jumlah unit tertinggi, yaitu 1.527 unit, yang juga tidak berubah. Terakhir, kategori “Tanah” tetap pada 481 unit.

Analisis ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya tidak melakukan investasi tambahan atau pengurangan dalam aset tidak bergerak selama periode 2023-2024. Stabilitas ini bisa diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan kondisi aset yang ada tanpa melakukan ekspansi atau pengurangan. Namun, hal ini juga bisa menunjukkan

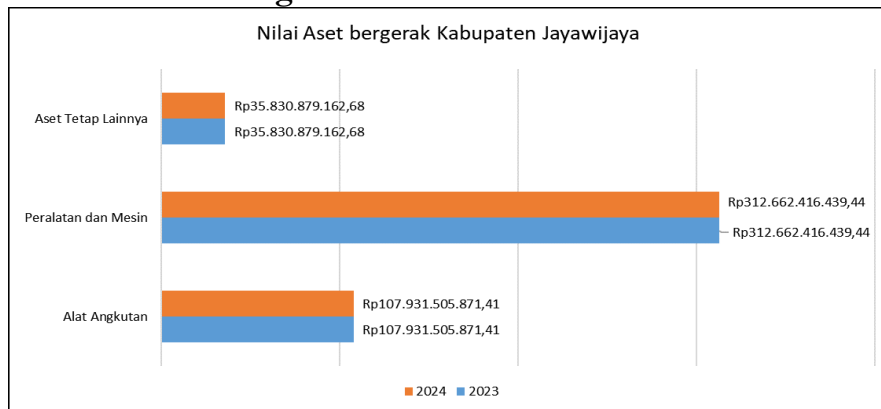


adanya keterbatasan dalam anggaran atau prioritas yang berbeda dalam pengelolaan aset daerah.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan usia aset yang ada. Meskipun jumlah unit tetap konstan, penting untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut masih dalam kondisi baik dan dapat berfungsi secara optimal. Kedua, mempertimbangkan investasi dalam teknologi baru dan peralatan modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ketiga, mengembangkan program pemeliharaan rutin untuk semua kategori aset guna memperpanjang umur aset dan mengurangi biaya perbaikan yang tidak terduga.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset. Transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaporan kondisi aset dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Jayawijaya dapat mengoptimalkan penggunaan aset tidak bergerak dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.5. Nilai Aset Bergerak



Gambar 87. Nilai Aset Bergerak



Diagram di atas menunjukkan data nilai aset bergerak daerah Kabupaten Jayawijaya dalam satuan yang sesuai untuk tahun 2023 dan 2024. Data ini mencakup tiga kategori aset: “Aset Tetap Lainnya,” “Peralatan dan Mesin,” dan “Alat Angkutan.” Setiap kategori memiliki dua batang yang berdekatan, menunjukkan nilai untuk masing-masing tahun dalam Rupiah (Rp). Warna biru dan oranye mewakili tahun 2024 dan 2023 secara berturut-turut.

Untuk kategori “Aset Tetap Lainnya,” nilai tetap konstan pada Rp35.830.879.162,68 untuk kedua tahun. “Peralatan dan Mesin” juga menunjukkan tidak ada perubahan dengan nilai Rp312.662.416.439,44 untuk kedua tahun. Demikian pula, nilai “Alat Angkutan” tetap stabil pada Rp107.931.505.871,41 untuk kedua tahun.

Analisis ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan atau penurunan dalam nilai aset bergerak di Kabupaten Jayawijaya selama periode 2023-2024. Stabilitas ini bisa diartikan sebagai pengelolaan aset yang efektif, tetapi juga menunjukkan potensi stagnasi dalam pertumbuhan atau pembaruan aset.

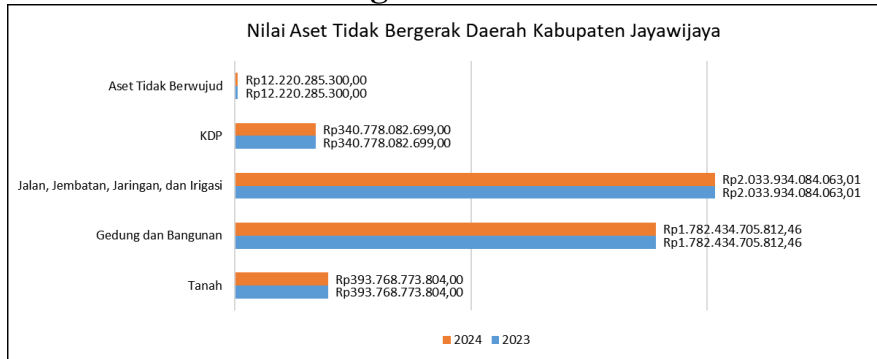
Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan usia aset yang ada. Meskipun nilai tetap konstan, penting untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut masih dalam kondisi baik dan dapat berfungsi secara optimal. Kedua, mempertimbangkan investasi dalam teknologi baru dan peralatan modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ketiga, mengembangkan program pemeliharaan rutin untuk semua kategori aset guna memperpanjang umur aset dan mengurangi biaya perbaikan yang tidak terduga.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset. Transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaporan kondisi aset dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Jayawijaya dapat mengoptimalkan penggunaan aset bergerak dan mendorong



pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.6. Nilai Aset Tidak Bergerak



Gambar 88. Nilai Aset Tidak Bergerak

Diagram di atas menunjukkan data nilai aset tidak bergerak daerah Kabupaten Jayawijaya dalam satuan yang sesuai untuk tahun 2023 dan 2024. Data ini mencakup beberapa kategori aset: “Aset Tidak Berwujud,” “KDP,” “Jalan, Jembatan, Jaringan, dan Irigasi,” “Gedung dan Bangunan,” serta “Tanah.” Setiap kategori memiliki dua batang yang berdekatan, menunjukkan nilai untuk masing-masing tahun dalam Rupiah (Rp). Warna biru dan oranye mewakili tahun 2024 dan 2023 secara berturut-turut.

Untuk kategori “Aset Tidak Berwujud,” nilai tetap konstan pada Rp12.220.285.300,00 untuk kedua tahun. “KDP” juga menunjukkan tidak ada perubahan dengan nilai Rp340.778.082.699,00 untuk kedua tahun. Demikian pula, nilai “Jalan, Jembatan, Jaringan, dan Irigasi” tetap stabil pada Rp2.033.934.084.063,01 untuk kedua tahun. “Gedung dan Bangunan” memiliki nilai yang sama sebesar Rp1.782.434.705.812,46 untuk kedua tahun. Terakhir, nilai “Tanah” juga tidak berubah, yaitu Rp393.768.773.804,00 untuk kedua tahun.

Analisis ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan atau penurunan dalam nilai aset tidak bergerak di Kabupaten Jayawijaya selama periode 2023-2024. Stabilitas ini bisa diartikan sebagai



pengelolaan aset yang efektif, tetapi juga menunjukkan potensi stagnasi dalam pertumbuhan atau pembaruan aset.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan usia aset yang ada. Meskipun nilai tetap konstan, penting untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut masih dalam kondisi baik dan dapat berfungsi secara optimal. Kedua, mempertimbangkan investasi dalam infrastruktur baru dan perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ketiga, mengembangkan program pemeliharaan rutin untuk semua kategori aset guna memperpanjang umur aset dan mengurangi biaya perbaikan yang tidak terduga.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset. Transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaporan kondisi aset dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Jayawijaya dapat mengoptimalkan penggunaan aset tidak bergerak dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

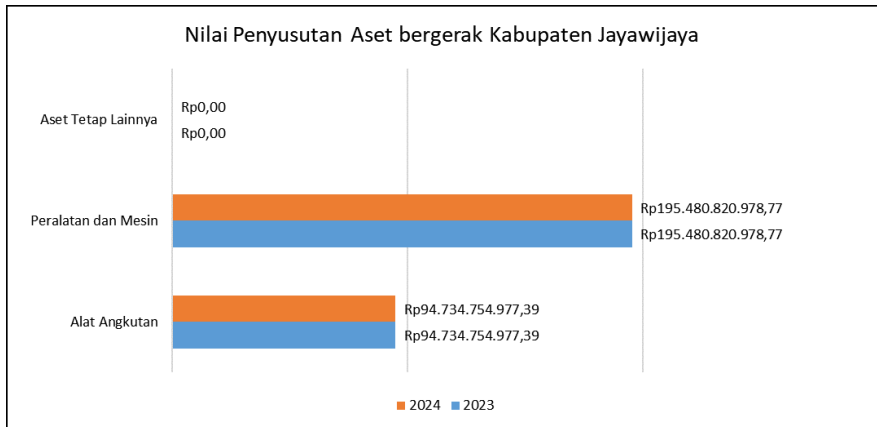
7.7. Nilai Penyusutan Aset Bergerak

Gambar 89 menunjukkan data nilai penyusutan aset bergerak daerah Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Data ini mencakup tiga kategori aset: “Aset Tetap Lainnya,” “Peralatan dan Mesin,” dan “Alat Angkutan.” Setiap kategori memiliki dua batang yang berdekatan, menunjukkan nilai penyusutan untuk masing-masing tahun dalam Rupiah (Rp). Warna biru dan oranye mewakili tahun 2024 dan 2023 secara berturut-turut.

Untuk kategori “Aset Tetap Lainnya,” nilai penyusutan adalah Rp0,00 untuk kedua tahun, menunjukkan bahwa tidak ada penyusutan yang terjadi pada aset ini. “Peralatan dan Mesin” menunjukkan nilai penyusutan yang konstan sebesar Rp195.480.820.978,77 untuk kedua



tahun. Demikian pula, kategori “Alat Angkutan” memiliki nilai penyusutan yang sama sebesar Rp94.734.754.779,39 untuk kedua tahun.



Gambar 89. Nilai Penyusutan Aset Bergerak

Analisis ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan atau penurunan dalam nilai penyusutan aset bergerak di Kabupaten Jayawijaya selama periode 2023-2024. Stabilitas ini bisa diartikan sebagai pengelolaan aset yang efektif, tetapi juga menunjukkan potensi stagnasi dalam pembaruan atau penggantian aset.

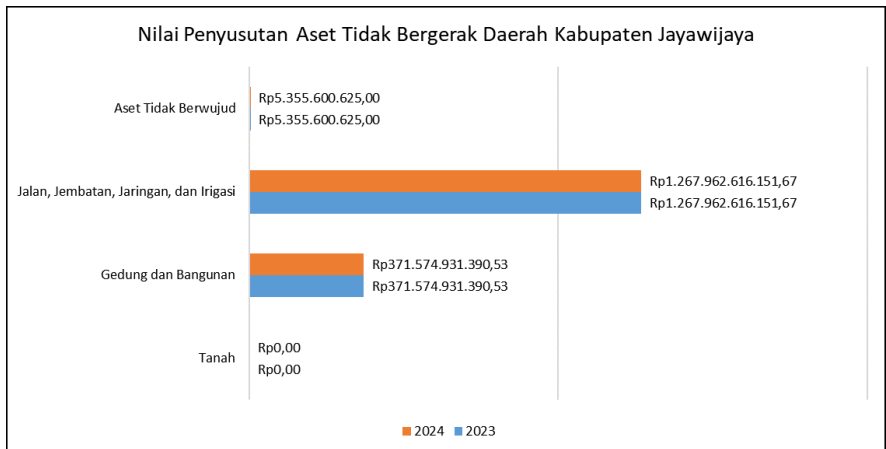
Untuk pengembangan ke depan, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan usia aset yang ada. Meskipun nilai penyusutan tetap konstan, penting untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut masih dalam kondisi baik dan dapat berfungsi secara optimal. Kedua, mempertimbangkan investasi dalam peralatan dan mesin baru serta alat angkutan yang lebih efisien dan modern. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Ketiga, mengembangkan program pemeliharaan rutin untuk semua kategori aset guna memperpanjang umur aset dan mengurangi biaya perbaikan yang tidak terduga.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan



terkait pengelolaan aset. Transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaporan kondisi aset dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Jayawijaya dapat mengoptimalkan penggunaan aset bergerak dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.8. Nilai Penyusutan Aset Tidak Bergerak



Gambar 90. Nilai Penyusutan Aset Tidak Bergerak

Diagram di atas menunjukkan data nilai penyusutan aset tidak bergerak di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Terdapat empat kategori aset yang dianalisis: “Aset Tidak Berwujud,” “Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi,” “Gedung dan Bangunan,” dan “Tanah.” Setiap kategori menunjukkan nilai yang sama untuk kedua tahun tersebut, yang berarti tidak ada perubahan dalam nilai penyusutan aset.

Kategori “Aset Tidak Berwujud” memiliki nilai penyusutan sebesar Rp5.355.600.625,00 untuk tahun 2023 dan 2024. Kategori “Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi” menunjukkan nilai penyusutan



sebesar Rp1.267.962.616.151,67 untuk kedua tahun. “Gedung dan Bangunan” juga tidak mengalami perubahan dengan nilai penyusutan sebesar Rp371.574.931.390,53. Sementara itu, kategori “Tanah” tidak memiliki nilai penyusutan, tetap Rp0,00 untuk kedua tahun.

Analisis data ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan atau penurunan dalam nilai penyusutan aset tidak bergerak di Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2023 ke 2024. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai stabilitas dalam manajemen aset daerah. Namun, stabilitas ini juga bisa menunjukkan kurangnya investasi baru atau perbaikan pada aset yang ada, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur di daerah tersebut.

Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aset yang ada dan mempertimbangkan investasi baru untuk meningkatkan nilai aset. Selain itu, perbaikan dan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan harus menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan nilai aset. Pemerintah juga bisa mengeksplorasi peluang investasi di sektor-sektor lain yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, seperti pariwisata dan industri kreatif.

Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan nilai aset tidak bergerak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB VIII

KEMANANAN, PENANGGULANGAN BENCANA, DAN SATPOL PP

JAYAWIJAYA 2023-2024



BAB VIII

KEMANANAN, PENANGGULANGAN BENCANA, DAN SATPOL PP

8.1. Polres Jayawijaya

Kepolisian Resort (Polres) Jayawijaya merupakan salah satu unit kepolisian di bawah Kepolisian Daerah Papua yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Polres Jayawijaya memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Polres Jayawijaya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menggariskan bahwa kepolisian harus mampu menciptakan kondisi dinamis yang mendukung proses pembangunan nasional dengan menjamin tertib dan tegaknya hukum serta ketentraman masyarakat.

Fungsi utama Polres Jayawijaya meliputi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, Polres Jayawijaya bertugas untuk menangani berbagai tindak pidana, mulai dari kejahatan ringan hingga berat, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, Polres Jayawijaya juga berperan aktif dalam kegiatan pencegahan kejahatan melalui patroli rutin, sosialisasi, dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat.

Peran Polres Jayawijaya dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jayawijaya sangat penting. Kabupaten Jayawijaya memiliki visi untuk menjadi daerah yang aman, damai, dan sejahtera, serta misi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Polres Jayawijaya berkontribusi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dengan menjaga keamanan dan ketertiban, Polres Jayawijaya membantu menciptakan suasana yang

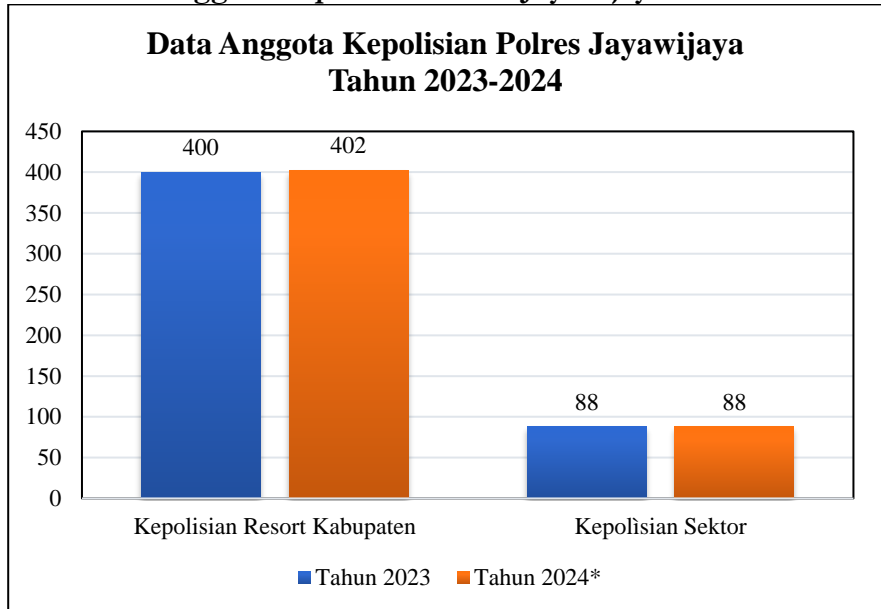


mendukung investasi, pendidikan, dan kegiatan ekonomi lainnya, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, Polres Jayawijaya tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Melalui berbagai program dan kegiatan, Polres Jayawijaya berupaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, membangun kepercayaan, dan bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Jayawijaya.

Adapun data sektoral yang disajikan sebagai berikut:

1. Data Anggota Kepolisian Polres Jayawijaya;
2. Jumlah Kriminalitas;
3. Jumlah Kasus Unjuk Rasa di Kabupaten Jayawijaya;
4. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas;
5. Jumlah Kecelakaan lalu Lintas; dan
6. Perkembangan Gangguan Keamanan.

8.1.1. Data Anggota Kepolisian Polres Jayawijaya



Gambar 91. Data Anggota Kepolisian Polres Jayawijaya



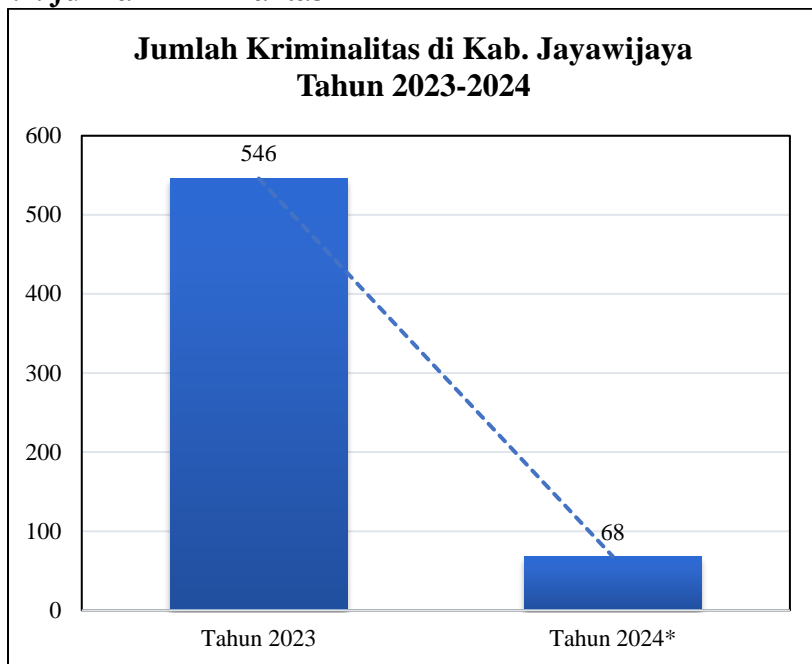
Diagram di atas menunjukkan data jumlah anggota Kepolisian Polres Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Terdapat dua kategori dalam data ini: “Kepolisian Resor Kabupaten” dan “Kepolisian Sektor.” Pada tahun 2023, jumlah anggota di “Kepolisian Resor Kabupaten” adalah 400 orang, sedangkan di “Kepolisian Sektor” hanya 88 orang. Untuk tahun 2024, jumlah anggota di “Kepolisian Resor Kabupaten” sedikit meningkat menjadi sekitar 402 orang, sementara jumlah anggota di “Kepolisian Sektor” tetap konstan di angka 88 orang. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat konsentrasi yang lebih besar dari anggota kepolisian di tingkat resor kabupaten dibandingkan dengan sektor. Stabilitas jumlah anggota di tingkat sektor menunjukkan tidak adanya perubahan dalam alokasi atau perekrutan di tingkat ini, sementara ada sedikit peningkatan di tingkat resor kabupaten dari tahun 2023 ke 2024.

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa Polres Jayawijaya mungkin memprioritaskan penguatan kehadiran kepolisian di tingkat kabupaten. Hal ini bisa disebabkan oleh kebutuhan untuk menangani masalah keamanan yang lebih kompleks atau volume kejahatan yang lebih tinggi di tingkat kabupaten dibandingkan dengan sektor. Dengan adanya peningkatan jumlah anggota di tingkat resor kabupaten, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban di wilayah tersebut.

Peningkatan jumlah anggota kepolisian di tingkat resor kabupaten dapat berkontribusi pada peningkatan keamanan secara keseluruhan. Dengan lebih banyak sumber daya yang tersedia, Polres Jayawijaya dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti patroli, penyelidikan, dan penanganan tindak pidana. Hal ini pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat Jayawijaya, mendukung visi dan misi kabupaten untuk mencapai kesejahteraan dan ketertiban.



8.1.2. Jumlah Kriminalitas



Gambar 92. Jumlah Kriminalitas

Diagram di atas menunjukkan data jumlah kriminalitas di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan grafik tersebut, jumlah kasus kriminalitas pada tahun 2023 tercatat sebanyak 546 kasus, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya menurun drastis menjadi 68 kasus. Penurunan ini sangat signifikan dan menunjukkan perubahan yang mencolok dalam tingkat kriminalitas di wilayah tersebut.

Analisis komprehensif dari data ini dapat mencakup beberapa aspek. Pertama, penurunan jumlah kasus kriminalitas dari 546 kasus pada tahun 2023 menjadi 68 kasus pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan kejahatan oleh Polres Jayawijaya. Hal ini bisa jadi hasil dari

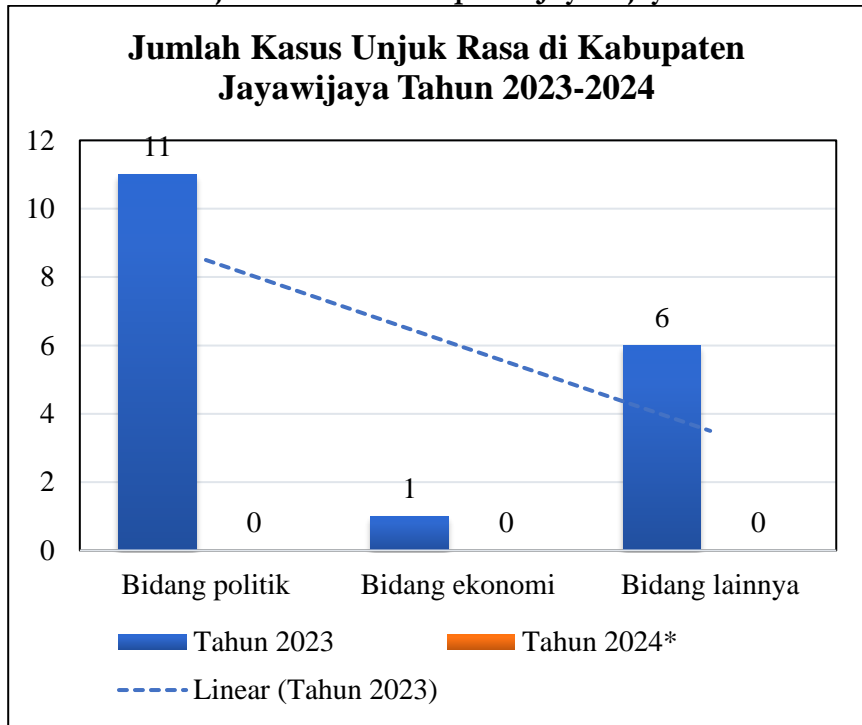


berbagai strategi yang diterapkan oleh kepolisian, seperti peningkatan patroli, sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Kedua, penurunan ini juga bisa mencerminkan efektivitas program-program yang dijalankan oleh Polres Jayawijaya dalam rangka menekan angka kriminalitas. Misalnya, program-program pencegahan kejahatan yang melibatkan masyarakat, peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota kepolisian, serta penggunaan teknologi dalam mendeteksi dan menangani tindak kejahatan. Ketiga, data ini juga bisa menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika sosial dan ekonomi di Kabupaten Jayawijaya yang berkontribusi pada penurunan angka kriminalitas. Misalnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Kesimpulannya, penurunan drastis jumlah kasus kriminalitas dari tahun 2023 ke 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dari Polres Jayawijaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Dengan jumlah kasus yang menurun, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam pencegahan dan penanganan kejahatan telah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat Jayawijaya. Hal ini tentunya mendukung visi dan misi Kabupaten Jayawijaya untuk mencapai kesejahteraan dan ketertiban yang lebih baik.



8.1.3. Kasus Unjuk Rasa Di Kabupaten Jayawijaya



Gambar 93. Jumlah Kasus Unjuk Rasa

Diagram di atas menunjukkan data jumlah unjuk rasa di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Diagram ini mengkategorikan unjuk rasa ke dalam tiga sektor: politik, ekonomi, dan lainnya. Pada tahun 2023, terdapat 11 kasus unjuk rasa di sektor politik, sementara sektor ekonomi dan lainnya tidak mencatatkan kasus. Pada tahun 2024, jumlah kasus unjuk rasa di sektor politik menurun drastis menjadi hanya 1 kasus, dan sektor ekonomi serta lainnya tetap tidak mencatatkan kasus.

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, penurunan jumlah unjuk rasa di sektor politik dari 11 kasus pada tahun 2023 menjadi 1 kasus pada tahun 2024 menunjukkan

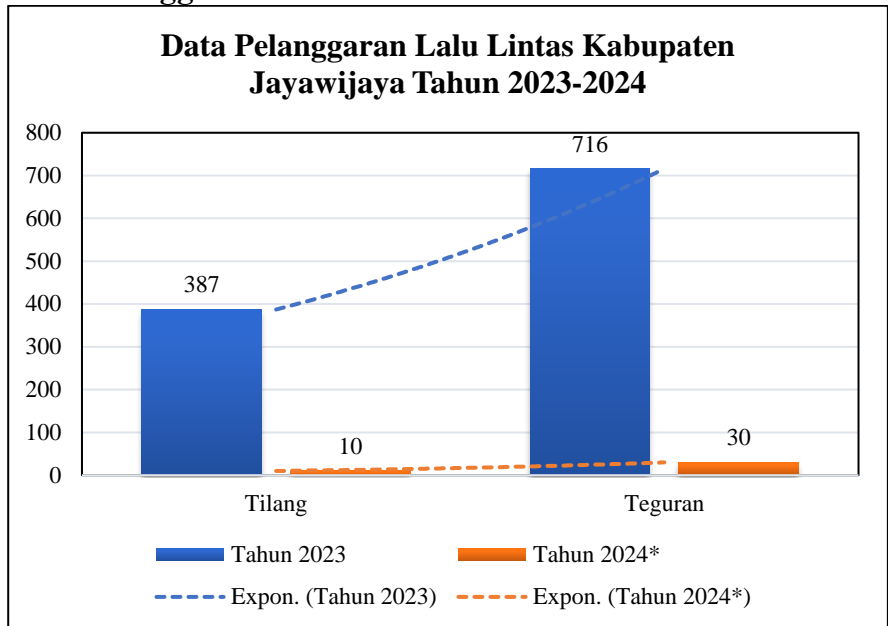


adanya peningkatan dalam pengelolaan dan penanganan isu-isu politik oleh Polres Jayawijaya. Hal ini bisa jadi hasil dari pendekatan yang lebih efektif dalam menangani aspirasi politik masyarakat, baik melalui dialog, mediasi, maupun tindakan preventif lainnya. Kedua, tidak adanya kasus unjuk rasa di sektor ekonomi dan lainnya selama dua tahun berturut-turut menunjukkan stabilitas di bidang ekonomi dan sosial di Kabupaten Jayawijaya. Ini bisa mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dan Polres Jayawijaya dalam menjaga kondisi ekonomi dan sosial yang kondusif, sehingga tidak memicu ketidakpuasan yang berujung pada unjuk rasa.

Kesimpulannya, data ini menunjukkan tren positif dalam kinerja Polres Jayawijaya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Penurunan drastis jumlah unjuk rasa di sektor politik menunjukkan bahwa Polres Jayawijaya berhasil mengelola isu-isu politik dengan baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas dan ketertiban umum di Kabupaten Jayawijaya. Hal ini mendukung visi dan misi kabupaten untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi masyarakatnya.



8.1.4. Pelanggaran Lalu Lintas



Gambar 94. Data Pelanggaran Lalu Lintas

Diagram di atas menunjukkan data jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Diagram ini menggunakan dua jenis batang, satu berwarna biru untuk tahun 2023 dan satu lagi berwarna oranye untuk tahun 2024. Selain itu, terdapat dua garis tren eksponensial yang ditandai dengan titik-titik, satu berlabel “Expon. (Tahun 2023)” berwarna biru dan satu lagi “Expon. (Tahun 2024)” berwarna oranye. Pada tahun 2023, jumlah pelanggaran lalu lintas tercatat sekitar 387 kasus, dengan garis tren eksponensial yang dimulai dari titik tersebut. Pada tahun 2024, jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat signifikan menjadi sekitar 716 kasus, dengan garis tren eksponensial yang dimulai lebih rendah dari batang tahun 2023 tetapi kemudian melampaui jumlah tersebut pada tahun 2024.



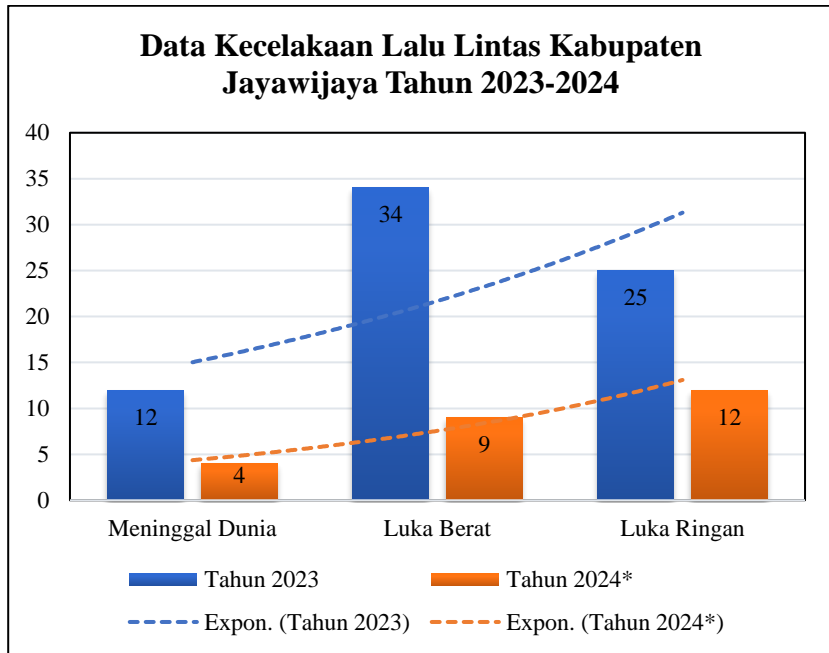
Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun 2023 ke 2024. Garis tren eksponensial menunjukkan bahwa jika tren saat ini berlanjut tanpa intervensi, pelanggaran lalu lintas bisa terus meningkat tajam. Hal ini bisa mengindikasikan tantangan yang dihadapi oleh Polres Jayawijaya dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas atau mencerminkan perubahan seperti peningkatan populasi atau penggunaan kendaraan yang memerlukan adaptasi strategi dan sumber daya oleh Polres Jayawijaya.

Peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas menunjukkan perlunya peningkatan upaya penegakan hukum dan edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas. Polres Jayawijaya mungkin perlu mengimplementasikan strategi baru atau memperkuat program-program yang ada untuk mengatasi peningkatan pelanggaran ini. Misalnya, peningkatan frekuensi patroli lalu lintas, kampanye keselamatan berlalu lintas, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar lalu lintas.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Polres Jayawijaya perlu terus beradaptasi dan meningkatkan upaya mereka dalam menjaga ketertiban lalu lintas untuk mengurangi jumlah pelanggaran dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Hal ini penting untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Jayawijaya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi seluruh masyarakat.



8.1.5. Kecelakaan Lalu Lintas



Gambar 95. Data Kecelakaan Lalu Lintas

Gambar yang Anda berikan menunjukkan data jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Grafik ini menggunakan dua set batang, satu untuk setiap tahun, yang menunjukkan jumlah kecelakaan fatal, cedera serius, dan cedera ringan. Batang untuk tahun 2023 berwarna solid, sedangkan batang untuk tahun 2024 memiliki pola isian. Selain itu, terdapat dua garis tren eksponensial yang ditandai dengan titik-titik, satu berlabel “Expon. (Tahun 2023)” berwarna biru dan satu lagi “Expon. (Tahun 2024)” berwarna oranye. Untuk tahun 2023:

- Kecelakaan fatal: 12
- Cedera serius: 34
- Cedera ringan: 9



Untuk tahun 2024:

- Kecelakaan fatal: 4
- Cedera serius: 25
- Cedera ringan: 12

Dari data ini, terlihat adanya penurunan jumlah kecelakaan fatal dan cedera serius dari tahun 2023 ke 2024, namun terdapat peningkatan dalam jumlah cedera ringan.

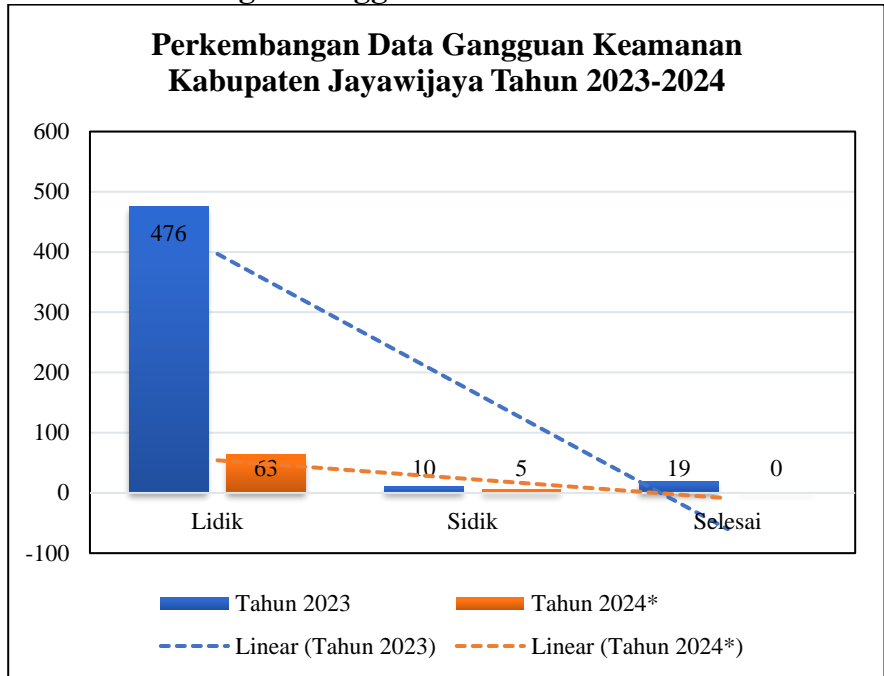
Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, penurunan jumlah kecelakaan fatal dari 12 kasus pada tahun 2023 menjadi 4 kasus pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan dalam keselamatan jalan atau respons darurat yang lebih baik. Penurunan jumlah cedera serius dari 34 kasus menjadi 25 kasus juga menunjukkan tren positif dalam pengelolaan keselamatan lalu lintas. Namun, peningkatan jumlah cedera ringan dari 9 kasus pada tahun 2023 menjadi 12 kasus pada tahun 2024 mungkin menunjukkan bahwa meskipun kecelakaan yang lebih parah berhasil dikurangi, masih ada peningkatan dalam insiden kecelakaan yang lebih ringan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan jumlah kendaraan di jalan atau perubahan dalam pelaporan kecelakaan.

Penurunan jumlah kecelakaan fatal dan cedera serius menunjukkan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum dan program keselamatan jalan yang dijalankan oleh Polres Jayawijaya. Ini bisa mencakup peningkatan patroli lalu lintas, kampanye keselamatan, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran lalu lintas. Namun, peningkatan jumlah cedera ringan menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam upaya pencegahan kecelakaan yang lebih ringan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Polres Jayawijaya telah berhasil mengurangi kecelakaan lalu lintas yang lebih parah, tetapi perlu terus meningkatkan upaya mereka untuk mengurangi semua jenis kecelakaan lalu lintas. Hal ini penting untuk mendukung visi



dan misi Kabupaten Jayawijaya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi seluruh masyarakat.

8.1.6. Perkembangan Gangguan Keamanan



Gambar 96. Perkembangan Data Gangguan Keamanan

Gambar yang Anda berikan menunjukkan data perkembangan gangguan keamanan di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Grafik ini menggunakan tiga kategori pada sumbu x: “Lidik” (penyelidikan), “Sidik” (penyidikan), dan “Selesai” (kasus selesai). Untuk tahun 2023, yang diwakili oleh batang solid, terdapat nilai tinggi sebesar 476 untuk kategori “Lidik,” nilai yang jauh lebih rendah sebesar 63 untuk kategori “Sidik,” dan tidak ada batang untuk kategori “Selesai,” yang menunjukkan nilai nol. Untuk tahun 2024, yang diwakili oleh garis



putus-putus dengan penanda, terdapat nilai sekitar 10 untuk “Lidik,” sekitar 5 untuk “Sidik,” dan 19 untuk “Selesai.”

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, jumlah kasus yang masih dalam tahap penyelidikan (“Lidik”) pada tahun 2023 sangat tinggi, yaitu 476 kasus, sementara hanya 63 kasus yang masuk ke tahap penyidikan (“Sidik”), dan tidak ada kasus yang selesai (“Selesai”). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, banyak kasus yang belum mencapai tahap penyelesaian. Namun, data untuk tahun 2024 menunjukkan perubahan signifikan. Jumlah kasus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan menurun drastis, dengan nilai 10 untuk “Lidik” dan 5 untuk “Sidik.” Selain itu, terdapat peningkatan jumlah kasus yang selesai menjadi 19 kasus pada tahun 2024. Penurunan jumlah kasus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta peningkatan jumlah kasus yang selesai menunjukkan adanya perbaikan dalam efisiensi penanganan kasus oleh Polres Jayawijaya.

Kesimpulannya, tren ini menunjukkan peningkatan kinerja Polres Jayawijaya dalam menangani gangguan keamanan. Penurunan jumlah kasus yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta peningkatan jumlah kasus yang selesai menunjukkan bahwa Polres Jayawijaya berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan kasus-kasus keamanan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di Kabupaten Jayawijaya, mendukung visi dan misi kabupaten untuk mencapai kesejahteraan dan ketertiban bagi masyarakatnya.

8.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayawijaya adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana di wilayah Jayawijaya. BPBD memiliki tugas pokok untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi. Fungsi utama BPBD meliputi penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, pelaksanaan mitigasi dan kesiapsiagaan, serta



penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana. Selain itu, BPBD juga berperan dalam edukasi dan pelatihan masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana.

Dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Jayawijaya, BPBD memainkan peran penting dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan penanggulangan bencana selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Visi Kabupaten Jayawijaya yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan didukung oleh BPBD melalui upaya mitigasi risiko bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, BPBD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh terhadap bencana.

Adapun data sektoral yang disajikan sebagai berikut:

1. Jumlah Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana;
2. Jumlah Sistem Peringatan Dini;
3. Jumlah Kawasan Rawan Bencana;
4. Total Jumlah Korban Bencana;
5. Jumlah Pengungsi Akibat Banjir;
6. Jumlah Pengungsi Akibat Longsor;
7. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Sosial;
8. Jumlah Kerugian Akibat Bencana;
9. Jenis dan Jumlah Kebutuhan Umum.

8.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana

Tabel 39. Jumlah Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana

<i>Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana</i>	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Satuan	Sumber Data
Kategori Transportasi Jenis Angkutan Darat					
1. Kendaraan Roda 2	9	9	9	Unit	BPBD
2. Kendaraan Roda 4	1	1	1	Unit	BPBD
3. Kendaraan Roda > 4	0	0	0	Unit	BPBD



Jenis Angkutan Laut

1. Kapal Penyelamat

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

2. Speedboat

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

3. Jenis Angkutan Udara / Helikopter

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

Kategori Peralatan Kesehatan

1. Mobil Ambulance

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

2. Tandu

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

3. Tabung Oksigen

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

4. Peralatan Kesehatan Lainnya

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

Kategori Peralatan Air Bersih

1. Mobil Tangki Air

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

2. Tangki Air

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

3. Peralatan Air Bersih Lainnya

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

4. Mobil MCK

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

Kategori Alat Berat

1. Beco

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

2. Bulldozer

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

3. Peralatan Alat Berat Lainnya

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

Kategori Peralatan Hunian Sementara

1. Tenda

2	2	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

2. Dapur Umum

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

3. Generator

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

4. Peralatan Hunian Sementara Lainnya

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

Kategori Kebakaran

1. Mobil Pemadam Kebakaran

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

2. Pos Pemadam Kebakaran

0	0	0	Unit	BPBD
---	---	---	------	------

Jumlah Kejadian Kebakaran

0	0	0	Kasus	BPBD
---	---	---	-------	------



Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayawijaya memiliki berbagai jenis sarana dan prasarana tanggap bencana hingga tahun 2023. Tabel tersebut mencakup kategori seperti kendaraan, fasilitas kesehatan, fasilitas sanitasi, dan tempat penampungan sementara. Setiap kategori memiliki subkategori yang lebih spesifik, misalnya kendaraan roda empat dan ambulans di bawah kategori kendaraan. Data menunjukkan jumlah setiap jenis sarana dan prasarana dari tahun 2021 hingga 2023, serta sumber data yang digunakan untuk pengadaan tersebut.

Secara umum, terlihat bahwa beberapa jenis sarana dan prasarana mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun, sementara yang lain tetap konstan. Misalnya, jumlah kendaraan roda empat dan ambulans menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan upaya BPBD dalam memperkuat kapasitas tanggap darurat mereka. Namun, ada juga beberapa jenis sarana yang jumlahnya tidak bertambah, seperti fasilitas sanitasi dan tempat penampungan sementara, yang mungkin menunjukkan area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Analisis komprehensif terhadap data ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Jayawijaya telah melakukan investasi yang baik dalam beberapa aspek penting dari tanggap bencana, terutama dalam hal mobilitas dan respons medis. Namun, untuk ke depannya, disarankan agar BPBD meningkatkan jumlah fasilitas sanitasi dan tempat penampungan sementara. Fasilitas sanitasi yang memadai sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit selama dan setelah bencana, sementara tempat penampungan sementara yang cukup akan memastikan bahwa korban bencana memiliki tempat yang aman dan layak untuk tinggal sementara waktu.

Selain itu, BPBD juga perlu mempertimbangkan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta memastikan bahwa semua sarana dan prasarana yang ada dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan saja. Dengan demikian, BPBD Kabupaten Jayawijaya dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan mendukung visi serta misi Kabupaten Jayawijaya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh terhadap bencana.



8.2.2. Jumlah Sistem Peringatan Dini

Tabel 40. Jumlah Sistem Peringatan Dini

Sistem Peringatan Dini		2021	2022	2023	Satuan	Sumber Data
a.	Jumlah Sistem Peringatan Dini Banjir	0	0	0	Unit	BPBD
	1. Jumlah Sistem Elektronik	0	0	0	Unit	BPBD
	2. Jumlah Peringatan dini Tradisional	0	0	0	Unit	BPBD
b.	Jumlah Sistem Peringatan dini Gunung Meletus	0	0	0	Unit	BPBD
	1. Jumlah Sistem Elektronik	0	0	0	Unit	BPBD
	2. Jumlah Peringatan Dini Tradisionat	0	0	0	Unit	BPBD
c.	Jumlah Sistem Peringatan Dini Longsor	0	0	0	Unit	BPBD
	1. Jumlah Sistem Elektronik	0	0	0	Unit	BPBD
	2. Jumlah Peringatan Dini Tradisional	0	0	0	Unit	BPBD
d.	Jumlah Sistem Peringatan Dini Gempa	0	0	0	Unit	BPBD
	1. Jumlah Sistem Elektronik	0	0	0	Unit	BPBD
	2. Jumlah Peringatan Dini Tradisional	0	0	0	Unit	BPBD
e.	Jumlah Sistem Peringatm Dini Tsunami	0	0	0	Unit	DPBD
	1. Jumlah Sistem Elektronik	0	0	0	Unit	BPBD
	2. Jumlah Peringatan Dini Tradisional	0	0	0	Unit	BPBD
f.	Jumlah Sistem Peringatan Dini Lainnya	0	0	0	Unit	BPBD
	1. Jumlah Sistem Elektronik	0	0	0	Unit	BPBD
	2. Jumlah Peringatan Dini Tmdisional	0	0	0	Unit	BPBD

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2023 belum memiliki sistem peringatan dini untuk



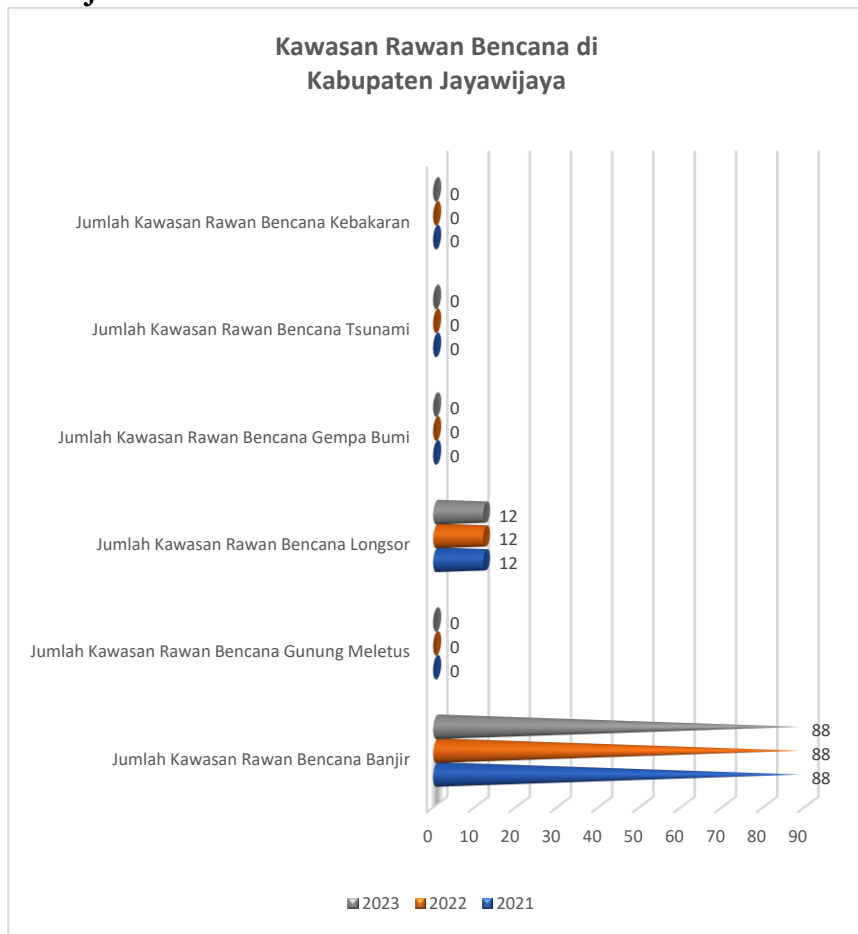
berbagai jenis bencana alam. Tabel tersebut mencakup kategori seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, dan kekeringan. Setiap kategori memiliki subkategori yang lebih spesifik, seperti sistem peringatan tradisional dan elektronik. Namun, data menunjukkan bahwa semua kategori dan subkategori memiliki angka 0, yang berarti BPBD Jayawijaya belum memiliki satu pun sistem peringatan dini untuk bencana alam hingga tahun 2023.

Analisis komprehensif terhadap data ini menunjukkan bahwa ketiadaan sistem peringatan dini dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan daerah dalam menghadapi dan merespons bencana. Tanpa sistem peringatan dini, masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan evakuasi atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi diri dan harta benda mereka dari bencana yang akan datang. Hal ini dapat meningkatkan risiko korban jiwa dan kerugian materi yang lebih besar saat bencana terjadi.

Untuk pengembangan ke depan, sangat disarankan agar BPBD Kabupaten Jayawijaya mulai berinvestasi dalam pengadaan sistem peringatan dini, baik tradisional maupun elektronik, untuk berbagai jenis bencana alam. Prioritas dapat diberikan pada jenis bencana yang paling sering terjadi di wilayah tersebut berdasarkan data historis. Selain itu, implementasi program edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana dan penggunaan sistem peringatan dini juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini yang memadai, BPBD Jayawijaya dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dan mengurangi dampak negatif dari bencana alam.



8.2.3. Jumlah Kawasan Rawan Bencana



Gambar 97. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel, jumlah kawasan rawan bencana di Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2021 hingga 2023 mencakup lima kategori utama: kebakaran, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Setiap kategori menunjukkan jumlah kawasan rawan bencana yang teridentifikasi setiap tahunnya. Untuk kategori kebakaran, tsunami, dan gempa bumi, data menunjukkan bahwa tidak ada kawasan



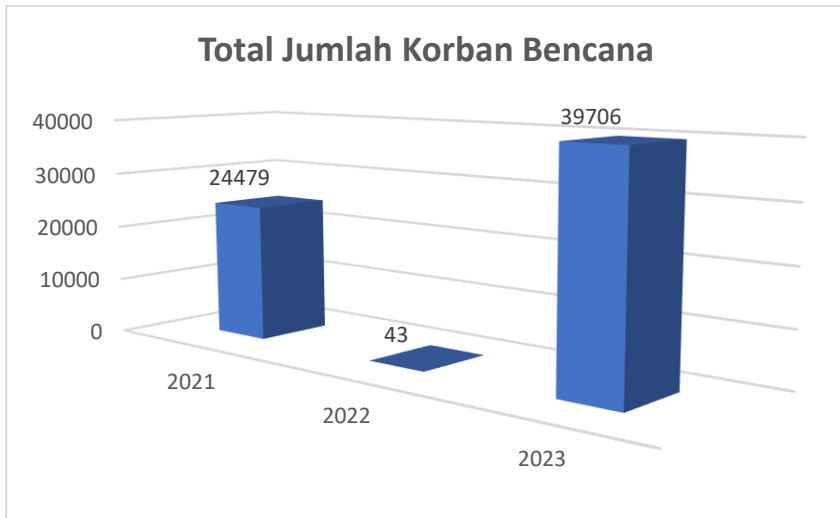
yang teridentifikasi sebagai rawan bencana tersebut dari tahun 2021 hingga 2023, dengan angka tetap di 0. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peralatan sistem peringatan dini sangat penting, BPBD Jayawijaya belum memiliki satu pun sistem peringatan dini untuk bencana-bencana tersebut hingga tahun 2023. Namun, untuk kategori tanah longsor dan banjir, data menunjukkan adanya kawasan rawan yang teridentifikasi. Pada kategori tanah longsor, terdapat 12 kawasan rawan yang konstan dari tahun 2021 hingga 2023. Sementara itu, untuk kategori banjir, terdapat 88 kawasan rawan yang juga konstan dari tahun 2021 hingga 2023.

Analisis komprehensif terhadap data ini menunjukkan bahwa BPBD Jayawijaya telah mengidentifikasi dan memantau kawasan rawan tanah longsor dan banjir secara konsisten. Namun, ketiadaan sistem peringatan dini untuk kebakaran, tsunami, dan gempa bumi dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan daerah dalam menghadapi dan merespons bencana. Tanpa sistem peringatan dini, masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan evakuasi atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi diri dan harta benda mereka dari bencana yang akan datang. Hal ini dapat meningkatkan risiko korban jiwa dan kerugian materi yang lebih besar saat bencana terjadi.

Untuk pengembangan ke depan, sangat disarankan agar BPBD Kabupaten Jayawijaya mulai berinvestasi dalam pengadaan sistem peringatan dini untuk semua jenis bencana, termasuk kebakaran, tsunami, dan gempa bumi. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan masyarakat dalam menghadapi bencana juga sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Dengan adanya sistem peringatan dini yang memadai dan kesiapsiagaan masyarakat yang baik, BPBD Jayawijaya dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dan mengurangi dampak negatif dari bencana alam.



8.2.4. Jumlah Total Korban Bencana



Gambar 98. Jumlah Korban Bencana

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam diagram, jumlah korban bencana di Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021, jumlah korban bencana mencapai sekitar 24.479 jiwa. Angka ini kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2022, dengan jumlah korban hanya sekitar 43 jiwa. Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan yang sangat signifikan dengan jumlah korban mencapai sekitar 39.706 jiwa.

Analisis komprehensif terhadap data ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang sangat tajam dalam jumlah korban bencana dari tahun 2021 ke 2022. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti berkurangnya frekuensi atau intensitas bencana, peningkatan efektivitas sistem penanggulangan bencana, atau keberhasilan program mitigasi dan kesiapsiagaan yang diterapkan oleh BPBD Jayawijaya. Namun, lonjakan jumlah korban yang sangat tinggi

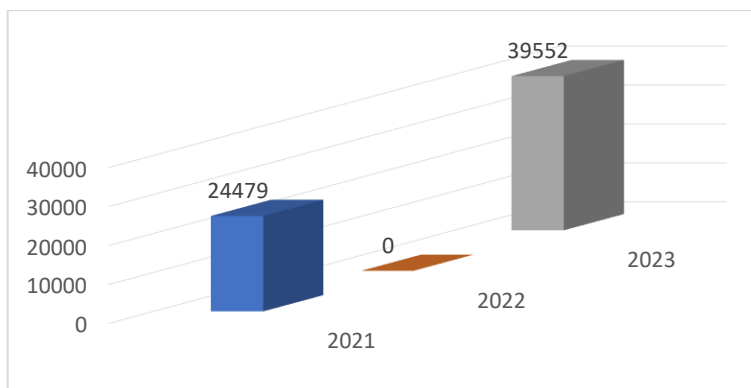


pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan frekuensi atau intensitas bencana yang signifikan, atau mungkin adanya kelemahan dalam sistem penanggulangan bencana yang perlu segera diatasi.

Untuk pengembangan ke depan, sangat penting bagi BPBD Jayawijaya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab lonjakan jumlah korban bencana pada tahun 2023. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan investasi dalam sistem peringatan dini untuk berbagai jenis bencana, seperti kebakaran, tsunami, dan gempa bumi, yang saat ini belum dimiliki. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pelatihan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta memastikan bahwa semua sarana dan prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan saja.

Dengan adanya sistem peringatan dini yang memadai dan kesiapsiagaan masyarakat yang baik, BPBD Jayawijaya dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dan mengurangi dampak negatif dari bencana alam. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal, juga sangat penting untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Jayawijaya.

8.2.5. Jumlah Pengungsi Akibat Banjir



Gambar 99. Jumlah Pengungsi Akibat Banjir



Berdasarkan data yang ditampilkan dalam diagram, jumlah pengungsi akibat banjir di Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021, tidak ada pengungsi yang tercatat akibat banjir, yang dapat diartikan bahwa tidak ada kejadian banjir besar atau data tidak tersedia. Namun, pada tahun 2022, jumlah pengungsi akibat banjir meningkat drastis menjadi sekitar 24.479 jiwa. Lonjakan ini menunjukkan adanya kejadian banjir besar yang memaksa banyak penduduk untuk mengungsi. Pada tahun 2023, jumlah pengungsi akibat banjir kembali meningkat tajam menjadi sekitar 39.552 jiwa, menunjukkan peningkatan sekitar 61% dibandingkan tahun sebelumnya.

Analisis komprehensif terhadap data ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengungsi akibat banjir dari tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan intensitas dan frekuensi banjir, perubahan iklim, kerusakan infrastruktur, atau kurangnya sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat. Lonjakan jumlah pengungsi yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa upaya penanggulangan banjir yang ada saat ini mungkin belum cukup efektif dalam melindungi masyarakat dari dampak banjir.

Untuk pengembangan ke depan, sangat penting bagi BPBD Jayawijaya untuk meningkatkan upaya mitigasi dan penanggulangan banjir. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan investasi dalam sistem peringatan dini untuk banjir, pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendalian banjir seperti tanggul dan saluran drainase, serta peningkatan kapasitas dan pelatihan masyarakat dalam menghadapi banjir. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami penyebab utama peningkatan jumlah pengungsi akibat banjir dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengurangi risiko tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini yang memadai, infrastruktur yang kuat, dan kesiapsiagaan masyarakat yang baik, BPBD Jayawijaya dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari dampak banjir dan mengurangi jumlah pengungsi akibat bencana ini di masa mendatang.



Gambar 100. Jumlah Pengungsi Akibat Longsor

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam diagram, jumlah pengungsi akibat longsor di Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada tahun 2021 dan 2022, tidak ada pengungsi yang tercatat akibat longsor, dengan angka tetap di 0 jiwa. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang signifikan dengan jumlah pengungsi mencapai 184 jiwa.

Analisis komprehensif terhadap data ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengungsi akibat longsor pada tahun 2021 dan 2022 mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya kejadian longsor besar, efektivitas sistem penanggulangan bencana yang ada, atau kurangnya pelaporan dan pencatatan data. Namun, lonjakan jumlah pengungsi pada tahun 2023 menunjukkan adanya kejadian longsor yang signifikan yang memaksa banyak penduduk untuk mengungsi. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, kerusakan lingkungan, atau pembangunan yang tidak memperhatikan aspek mitigasi bencana.

Untuk pengembangan ke depan, sangat penting bagi BPBD Jayawijaya untuk meningkatkan upaya mitigasi dan penanggulangan



bencana longsor. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan investasi dalam sistem peringatan dini untuk longsor, pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendalian longsor seperti dinding penahan tanah dan saluran drainase, serta peningkatan kapasitas dan pelatihan masyarakat dalam menghadapi longsor. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami penyebab utama peningkatan jumlah pengungsi akibat longsor dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengurangi risiko tersebut.

Dengan adanya sistem peringatan dini yang memadai, infrastruktur yang kuat, dan kesiapsiagaan masyarakat yang baik, BPBD Jayawijaya dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari dampak longsor dan mengurangi jumlah pengungsi akibat bencana ini di masa mendatang.

8.2.6. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Sosial



Gambar 101. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Sosial

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam diagram, jumlah pengungsi akibat bencana sosial di Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan variasi yang signifikan. Pada tahun 2021,



tidak ada pengungsi yang tercatat akibat bencana sosial, yang dapat diartikan bahwa tidak ada kejadian bencana sosial besar atau data tidak tersedia. Namun, pada tahun 2022, jumlah pengungsi akibat bencana sosial meningkat menjadi sekitar 43 jiwa. Lonjakan ini menunjukkan adanya kejadian bencana sosial yang memaksa sejumlah penduduk untuk mengungsi. Pada tahun 2023, tidak ada pengungsi yang tercatat akibat bencana sosial, menunjukkan bahwa tidak ada kejadian bencana sosial besar yang memaksa penduduk untuk mengungsi pada tahun tersebut.

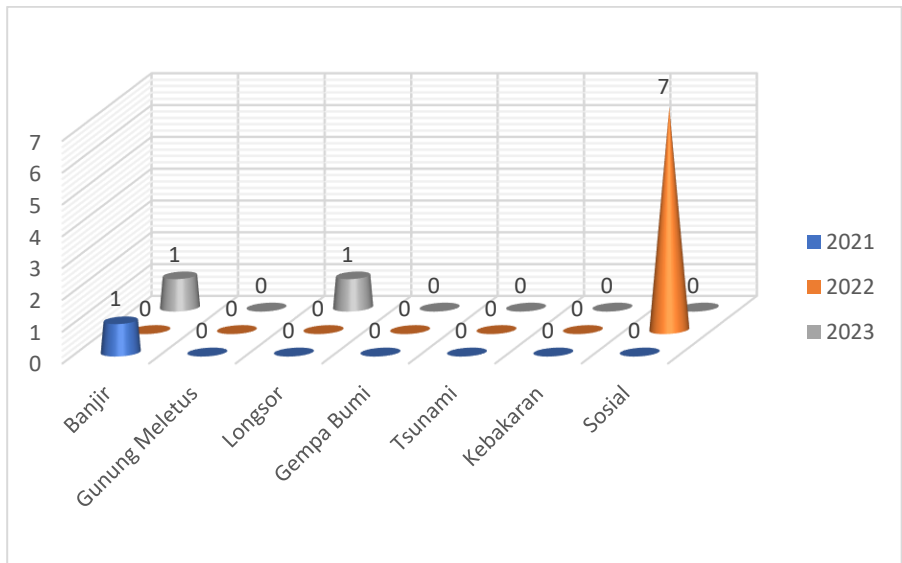
Analisis komprehensif terhadap data ini menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah pengungsi akibat bencana sosial pada tahun 2022, yang kemudian kembali menurun menjadi nol pada tahun 2023. Peningkatan pada tahun 2022 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk konflik sosial, kerusakan, atau kejadian lain yang memaksa penduduk untuk meninggalkan rumah mereka. Berdasarkan pencarian informasi, tidak ditemukan kejadian bencana sosial yang signifikan di Jayawijaya pada tahun 2023 yang menyebabkan pengungsian.

Untuk pengembangan ke depan, sangat penting bagi BPBD Jayawijaya untuk meningkatkan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana sosial. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan investasi dalam sistem peringatan dini untuk bencana sosial, pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendalian bencana sosial, serta peningkatan kapasitas dan pelatihan masyarakat dalam menghadapi bencana sosial. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami penyebab utama peningkatan jumlah pengungsi akibat bencana sosial pada tahun 2022 dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengurangi risiko tersebut di masa mendatang.

Dengan adanya sistem peringatan dini yang memadai, infrastruktur yang kuat, dan kesiapsiagaan masyarakat yang baik, BPBD Jayawijaya dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana sosial dan mengurangi jumlah pengungsi akibat bencana ini di masa mendatang.



8.2.7. Jumlah Kerugian Bencana



Gambar 102. Jumlah Kerugian Bencana

Diagram tersebut menunjukkan data jumlah kerugian akibat bencana di Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2021 hingga 2023 dalam satuan miliar. Pada tahun 2021, kerugian akibat banjir tercatat sebesar 1 miliar, sementara pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan dengan kerugian akibat banjir mencapai 7 miliar. Pada tahun 2023, kerugian akibat banjir kembali turun menjadi 1 miliar. Selain itu, pada tahun 2023, kerugian akibat longsor juga tercatat sebesar 1 miliar. Tidak ada kerugian signifikan yang tercatat untuk bencana lainnya seperti gunung meletus, gempa, tsunami, kebakaran, dan sosial dalam periode tersebut.

Analisis data ini menunjukkan bahwa kerugian akibat banjir mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dengan puncak kerugian terjadi pada tahun 2022. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti intensitas curah hujan yang tinggi, kurangnya infrastruktur penanggulangan banjir, atau perubahan iklim yang mempengaruhi pola cuaca. Sementara itu, kerugian akibat longsor yang tercatat hanya pada



tahun 2023 menunjukkan bahwa bencana ini mungkin terjadi secara sporadis namun tetap memiliki dampak finansial yang signifikan.

Untuk pengembangan ke depan, penting bagi pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk fokus pada peningkatan infrastruktur penanggulangan banjir, seperti pembangunan dan perbaikan sistem drainase, serta peningkatan kapasitas waduk dan tanggul. Selain itu, perlu dilakukan upaya mitigasi risiko bencana melalui program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat tentang tindakan pencegahan dan respons terhadap bencana. Penggunaan teknologi seperti sistem peringatan dini juga dapat membantu mengurangi kerugian akibat bencana di masa mendatang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kerugian akibat bencana dapat diminimalisir dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.

8.2.8. Jumlah dan Jenis Kebutuhan Umum

Tabel 41. Jumlah dan Jenis Kebutuhan Umum

Kebutuhan Umum		2021	2022	2023	Satuan	Sumber Data
a.	Dana	0	7	2	Milyar	BPBD
b.	Beras	100	0	150	Ton	BPBD
c.	Mie Instan	500	0	800	Kardus	BPBD
d.	Minyak Goreng	200	0	300	Liter	BPBD
e.	Garam	500	0	700	Kardus	BPBD
f.	Sardines	500	0	800	Kardus	BPBD
g.	Gula	250	0	350	KG	BPBD
h.	Daun Teh	100	0	150	Kardus	BPBD
i.	Kopi	100	0	150	Kardus	BPBD
j.	Biskuit Sari Gandum	150	0	200	Kardus	BPBD

Tabel tersebut menunjukkan data jumlah kebutuhan umum yang dibutuhkan ketika terjadi bencana di Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2021 hingga 2023. Kebutuhan umum yang tercatat meliputi dana, beras,



mie instan, minyak goreng, garam, sarden, gula, daun teh, kopi, dan biskuit sari gandum.

Pada tahun 2021, dana yang tersedia untuk penanggulangan bencana adalah 0 miliar, sementara pada tahun 2022 meningkat drastis menjadi 7 miliar, dan pada tahun 2023 turun menjadi 2 miliar. Kebutuhan beras tercatat sebesar 100 ton pada tahun 2021, tidak ada permintaan pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 150 ton pada tahun 2023. Mie instan menunjukkan kebutuhan sebesar 500 karton pada tahun 2021, tidak ada permintaan pada tahun 2022, dan melonjak menjadi 800 karton pada tahun 2023. Minyak goreng dibutuhkan sebanyak 200 liter pada tahun 2021, tidak ada permintaan pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 300 liter pada tahun 2023. Garam menunjukkan kebutuhan sebesar 500 kardus pada tahun 2021, tidak ada permintaan pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 700 kardus pada tahun 2023. Sarden dibutuhkan sebanyak 500 kardus pada tahun 2021, tidak ada permintaan pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 800 kardus pada tahun 2023. Gula menunjukkan kebutuhan sebesar 250 kilogram pada tahun 2021, tidak ada permintaan pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 350 kilogram pada tahun 2023. Daun teh dibutuhkan sebanyak 100 kardus pada tahun 2021, tidak ada permintaan pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 150 kardus pada tahun 2023. Kopi menunjukkan kebutuhan sebesar 100 kardus pada tahun 2021, tidak ada permintaan pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 150 kardus pada tahun 2023. Biskuit sari gandum dibutuhkan sebanyak 150 kardus pada tahun 2021, tidak ada permintaan pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 200 kardus pada tahun 2023.

Analisis data ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan beberapa barang seperti beras, mie instan, minyak goreng, garam, sarden, gula, daun teh, kopi, dan biskuit sari gandum mengalami fluktuasi yang signifikan selama tiga tahun. Pada tahun 2022, tidak ada permintaan untuk semua barang tersebut, yang mungkin menunjukkan adanya perubahan dalam distribusi atau ketersediaan barang-barang tersebut selama bencana. Lonjakan kebutuhan pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan permintaan untuk barang-barang tersebut selama bencana. Kebutuhan dana yang meningkat pada tahun 2022 dan



kemudian menurun pada tahun 2023 menunjukkan adanya fluktuasi dalam anggaran yang tersedia untuk penanggulangan bencana.

Untuk pengembangan ke depan, penting bagi pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk memastikan ketersediaan dan distribusi yang efisien dari kebutuhan dasar seperti beras, mie instan, minyak goreng, garam, sarden, gula, daun teh, kopi, dan biskuit sari gandum. Selain itu, peningkatan permintaan untuk barang-barang tersebut menunjukkan perlunya fleksibilitas dalam penyediaan bantuan pangan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan untuk menyimpan stok barang-barang tersebut untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi selama bencana. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan respons terhadap bencana dapat lebih efektif dan efisien, serta kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.

8.3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jayawijaya

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jayawijaya adalah perangkat daerah yang memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta penegakan peraturan daerah (Perda). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP memiliki tugas pokok untuk menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP Kabupaten Jayawijaya melaksanakan berbagai fungsi, termasuk penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparaturnya lainnya. Selain itu, Satpol PP juga bertugas melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

Sementara itu, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jayawijaya bertanggung jawab untuk menangani dan mengendalikan kebakaran serta melakukan penyelamatan dalam situasi darurat lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, tugas pokok Pemadam Kebakaran meliputi pencegahan,



pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3). Fungsi utama dari Pemadam Kebakaran adalah melakukan deteksi dini dan pencegahan kebakaran, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran, serta melakukan tindakan pemadaman dan penyelamatan saat terjadi kebakaran atau bencana lainnya.

Tugas dan fungsi Satpol PP serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jayawijaya sangat relevan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Jayawijaya yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan menjaga ketertiban dan ketentraman umum, serta memastikan penanganan kebakaran yang efektif, kedua satuan ini berkontribusi langsung terhadap terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah. Penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP memastikan bahwa setiap kebijakan daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Melalui peran aktifnya dalam perlindungan masyarakat dan penanganan kebakaran, Satpol PP serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan turut serta dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga Kabupaten Jayawijaya, yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Adapun data sektoral yang disajikan sebagai berikut:

1. Jumlah Anggota Aparat Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (PNS);
2. Jumlah Anggota Aparat Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Non-PNS);
3. Jumlah Pelanggaran K3;
4. Jumlah Kejadian Kebakaran;
5. Estimasi Kecepatan Waktu Tindakan Pemadaman.



Gambar 103. Jumlah Anggota Aparat Pamong Praja dan Pemadam (PNS)

Diagram di atas menunjukkan data jumlah anggota aparat pamong praja dan pemadam kebakaran di Kabupaten Jayawijaya yang berstatus sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, jumlah anggota ASN/PNS mencapai 69 orang, sementara pada tahun 2024 jumlah ini menurun menjadi 60 orang. Penurunan ini menunjukkan adanya pengurangan sekitar 13% dalam satu tahun. Penurunan jumlah ASN/PNS ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pensiun, mutasi, atau kebijakan pengurangan pegawai.

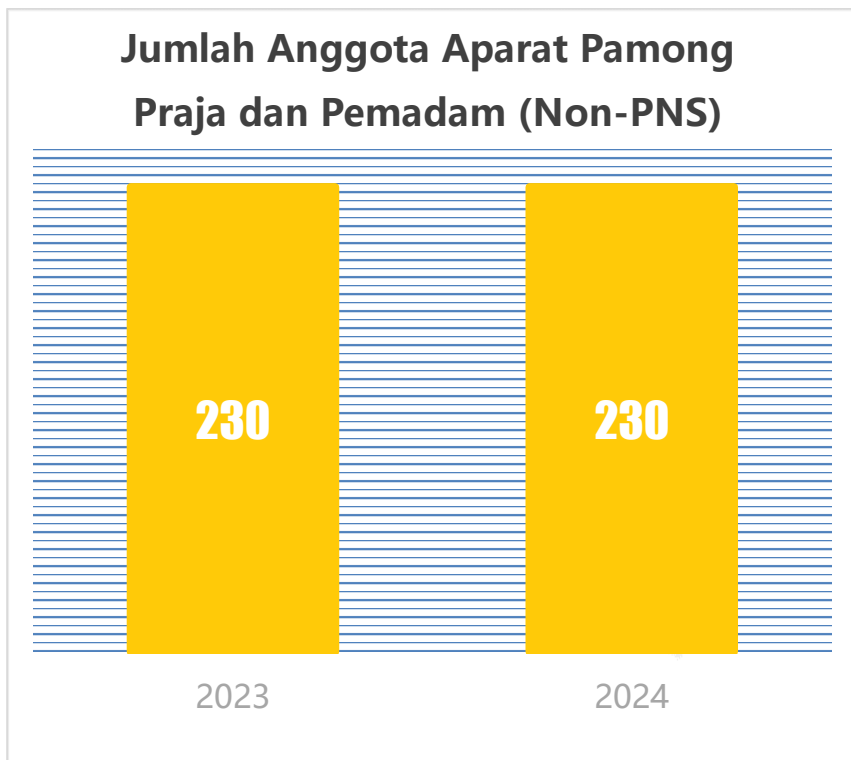
Penurunan jumlah pegawai ini dapat berdampak signifikan terhadap kinerja Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jayawijaya. Dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit, efisiensi operasional mungkin menurun jika tidak ada penyesuaian dalam



distribusi tugas dan tanggung jawab. Selain itu, kualitas dan kecepatan pelayanan publik, terutama dalam penegakan peraturan daerah dan respons terhadap kebakaran, dapat terpengaruh. Beban kerja per pegawai mungkin meningkat, yang dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan produktivitas.

Dalam konteks pencapaian visi dan misi Kabupaten Jayawijaya, yang kemungkinan besar mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, keamanan, dan ketertiban umum, kinerja optimal dari Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sangat penting. Untuk mengatasi penurunan jumlah pegawai dan tetap mencapai visi dan misi tersebut, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan keterampilan dan kapasitas pegawai yang ada melalui pelatihan dan pengembangan, adopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta peningkatan kerjasama dengan komunitas lokal dan lembaga lain untuk mendukung tugas dan fungsi dinas.

Dengan strategi yang tepat, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jayawijaya dapat terus berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi kabupaten meskipun ada penurunan jumlah pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam jumlah sumber daya manusia, dengan manajemen yang baik dan inovasi, tujuan dan misi besar tetap dapat dicapai.



Gambar 104. Jumlah Anggota Aparat Pamong Praja dan Pemadam (Non-PNS)

Diagram di atas menunjukkan data jumlah anggota aparat pamong praja dan pemadam kebakaran di Kabupaten Jayawijaya yang berstatus non-ASN/PNS untuk tahun 2023 dan 2024. Kedua tahun tersebut menunjukkan jumlah yang sama, yaitu 230 orang. Stabilitas jumlah anggota non-ASN/PNS ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam jumlah tenaga kerja non-ASN/PNS di kedua tahun tersebut.

Stabilitas jumlah anggota non-ASN/PNS ini dapat diartikan sebagai indikasi bahwa kebutuhan operasional Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jayawijaya telah terpenuhi dengan baik oleh tenaga kerja non-ASN/PNS yang ada. Tidak adanya



penurunan atau peningkatan jumlah pegawai non-ASN/PNS menunjukkan bahwa dinas tersebut mungkin telah menemukan keseimbangan yang tepat dalam hal jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif.

Kinerja Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sangat bergantung pada jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia. Dengan jumlah pegawai non-ASN/PNS yang stabil, dinas ini dapat mempertahankan tingkat pelayanan yang konsisten dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan respons terhadap kebakaran. Stabilitas ini juga memungkinkan dinas untuk fokus pada peningkatan kualitas pelayanan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan pegawai yang ada.

Visi dan misi Kabupaten Jayawijaya mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan jumlah pegawai non-ASN/PNS yang stabil, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dapat terus berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendukung pencapaian ini meliputi peningkatan keterampilan dan kapasitas pegawai non-ASN/PNS melalui program pelatihan yang berkelanjutan, adopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta peningkatan kerjasama dengan komunitas lokal dan lembaga lain untuk mendukung tugas dan fungsi dinas.

Dengan strategi yang tepat, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jayawijaya dapat terus berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi kabupaten, meskipun ada tantangan dalam jumlah sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa dengan manajemen yang baik dan inovasi, tujuan dan misi besar tetap dapat dicapai.



Gambar 105. Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban dan Ketenteraman)

Diagram di atas menunjukkan data jumlah pelanggaran K3 (ketertiban dan ketenteraman) di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, jumlah pelanggaran K3 mencapai 63 kasus, sementara pada tahun 2024 jumlah ini menurun drastis hingga nol. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan adanya peningkatan yang luar biasa dalam ketertiban dan ketenteraman di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Penurunan jumlah pelanggaran K3 ini dapat diartikan sebagai hasil dari upaya yang efektif dari Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jayawijaya dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Dengan jumlah pelanggaran yang menurun drastis, dapat disimpulkan bahwa dinas ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban dan ketenteraman, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan respons terhadap pelanggaran.

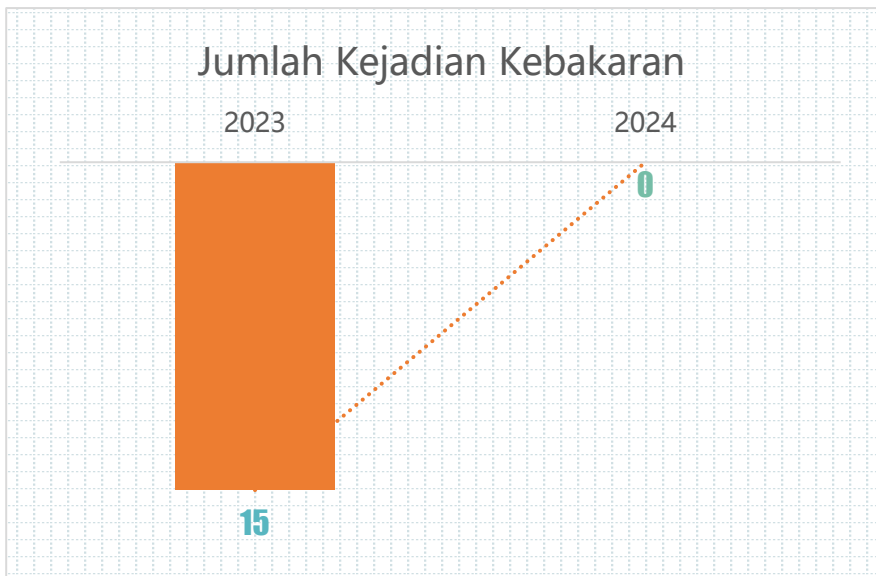
Kinerja Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang baik ini sangat penting dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Jayawijaya, yang kemungkinan besar mencakup peningkatan kesejahteraan



masyarakat, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan menurunnya jumlah pelanggaran K3, masyarakat dapat merasakan lingkungan yang lebih aman dan tertib, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ketertiban dan ketentraman, peningkatan kapasitas dan keterampilan pegawai melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta adopsi teknologi baru untuk mendukung operasional dinas. Selain itu, kerjasama dengan komunitas lokal dan lembaga lain juga penting untuk mendukung tugas dan fungsi dinas dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.

Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jayawijaya dapat terus berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi kabupaten, memastikan bahwa ketertiban dan ketentraman tetap terjaga dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman.



Gambar 106. Jumlah Kejadian Kebakaran



Diagram di atas menunjukkan data jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, jumlah kejadian kebakaran mencapai 15 kasus, sementara pada tahun 2024 jumlah ini menurun drastis hingga nol. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan adanya peningkatan yang luar biasa dalam pencegahan dan penanganan kebakaran di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Penurunan jumlah kejadian kebakaran ini dapat diartikan sebagai hasil dari upaya yang efektif dari Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jayawijaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran, serta meningkatkan efektivitas penegakan peraturan dan respons terhadap insiden kebakaran. Dengan jumlah kejadian kebakaran yang menurun drastis, dapat disimpulkan bahwa dinas ini telah berhasil mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang efektif, seperti kampanye edukasi, inspeksi rutin, dan peningkatan kesiapsiagaan operasional.

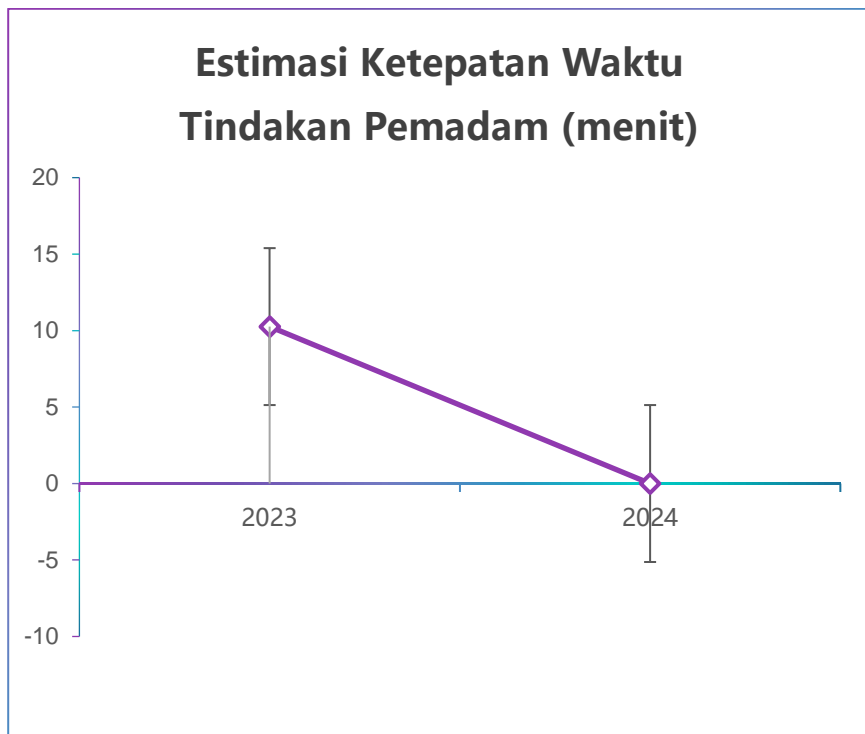
Kinerja Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang baik ini sangat penting dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Jayawijaya, yang kemungkinan besar mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan menurunnya jumlah kejadian kebakaran, masyarakat dapat merasakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari risiko kebakaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan kebakaran, peningkatan kapasitas dan keterampilan pegawai melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta adopsi teknologi baru untuk mendukung operasional dinas. Selain itu, kerjasama dengan komunitas lokal dan lembaga lain juga penting untuk mendukung tugas dan fungsi dinas dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.

Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jayawijaya dapat terus berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi



kabupaten, memastikan bahwa ketertiban dan ketentraman tetap terjaga dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman.



Gambar 107. Estimasi Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Permenit

Diagram di atas menunjukkan data estimasi ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran adalah 10,8 menit, sementara pada tahun 2024 waktu ini menurun drastis hingga nol menit. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan adanya peningkatan yang luar biasa dalam respons dan penanganan kebakaran di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.



Penurunan waktu respons ini dapat diartikan sebagai hasil dari berbagai faktor pendukung yang telah diimplementasikan oleh Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jayawijaya. Beberapa faktor pendukung yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan ini meliputi peningkatan infrastruktur dan peralatan, di mana investasi dalam peralatan pemadam kebakaran yang lebih canggih dan infrastruktur yang lebih baik dapat mempercepat waktu respons. Selain itu, program pelatihan yang berkelanjutan untuk petugas pemadam kebakaran dapat meningkatkan keterampilan dan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi situasi darurat. Implementasi sistem komunikasi yang lebih efisien antara petugas pemadam kebakaran dan masyarakat juga dapat mempercepat respons terhadap laporan kebakaran. Peningkatan kerjasama dengan komunitas lokal dalam hal pencegahan dan penanganan kebakaran juga dapat membantu mengurangi waktu respons. Namun, ada juga beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan anggaran yang dapat membatasi kemampuan dinas untuk melakukan investasi dalam peralatan dan pelatihan. Kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah Kabupaten Jayawijaya juga dapat memperlambat waktu respons meskipun ada peningkatan infrastruktur. Kendala logistik seperti akses jalan yang buruk atau cuaca ekstrem juga dapat mempengaruhi kecepatan respons.

Kinerja Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang baik ini sangat penting dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Jayawijaya, yang kemungkinan besar mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan menurunnya waktu respons pemadaman kebakaran, masyarakat dapat merasakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari risiko kebakaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan kebakaran, peningkatan kapasitas dan keterampilan pegawai melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta adopsi teknologi baru untuk mendukung operasional dinas. Selain itu, kerjasama dengan



komunitas lokal dan lembaga lain juga penting untuk mendukung tugas dan fungsi dinas dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.

Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jayawijaya dapat terus berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi kabupaten, memastikan bahwa ketertiban dan ketentraman tetap terjaga dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman.

BAB IX

TELEKOMUNIKASI, PARIWISATA, DAN BKPSDMD

JAYAWIJAYA 2023-2024



BAB IX

TELEKOMUNIKASI, PARIWISATA, DAN BKPSDMD

9.1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jayawijaya memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan informasi dan teknologi komunikasi. Diskominfo bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, termasuk pengelolaan sumber daya dan perangkat pos, penyelenggaraan layanan pos dan informatika, serta penatakelolaan aplikasi informatika dan informasi publik.

Visi Diskominfo Kabupaten Jayawijaya adalah "Terwujudnya pelayanan transportasi, komunikasi, dan informatika yang optimal menuju masyarakat Jayawijaya yang berkualitas, berbudaya, mandiri, dan sejahtera"⁶. Untuk mencapai visi ini, Diskominfo menjalankan beberapa misi utama, antara lain peningkatan kualitas manusia Indonesia, pembangunan ekonomi yang produktif dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.

Dalam kinerjanya, Diskominfo Kabupaten Jayawijaya berfokus pada peningkatan akses informasi dan teknologi bagi masyarakat, penyediaan layanan internet yang lebih luas, serta pengembangan aplikasi dan layanan digital yang mendukung transparansi dan efisiensi pemerintahan. Diskominfo juga berperan dalam mengelola informasi publik dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu.

Peran Diskominfo sangat krusial dalam mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan komunikasi dan informatika, Diskominfo membantu

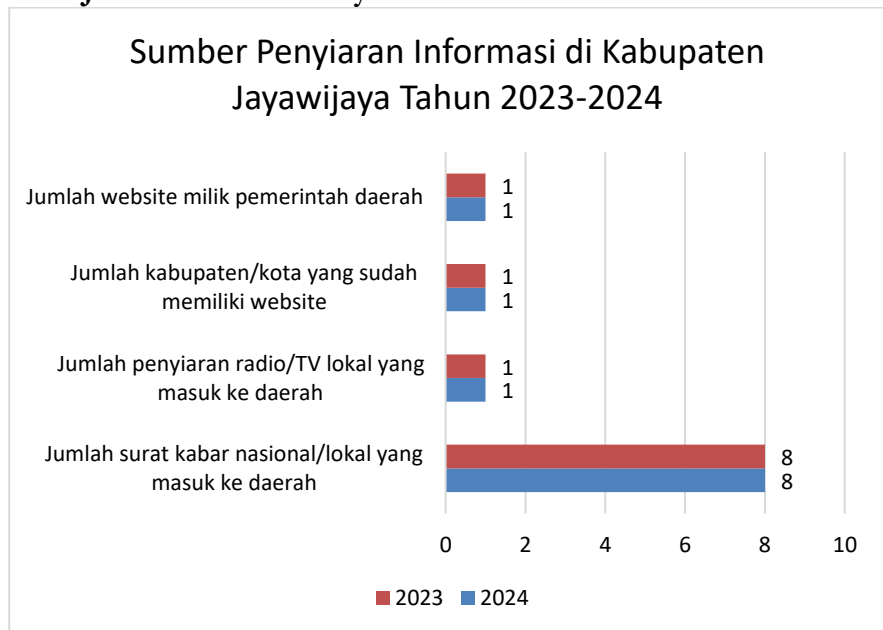


menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi dan berdaya saing. Selain itu, melalui pengelolaan informasi yang baik, Diskominfo mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, Diskominfo berkontribusi signifikan dalam mewujudkan masyarakat Jayawijaya yang berkualitas, berbudaya, mandiri, dan sejahtera.

Adapun data sektoral yang disajikan sebagai berikut:

1. Jumlah Sumber Penyiaran Informasi;
2. Jumlah Layanan Internet;
3. Jumlah Kantor Pos dan Stasiun Radio;
4. Perkembangan Jumlah Layanan Diskominfo

9.1.1. Jumlah Sumber Penyiaran Informasi



Gambar 108. Jumlah Sumber Penyiaran Informasi

Diagram tersebut menunjukkan data sumber penyiaran informasi di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Terdapat empat



kategori yang diukur: jumlah website milik pemerintah daerah, jumlah kabupaten/kota yang sudah memiliki website, jumlah penyiar radio/TV lokal yang masuk ke daerah, dan jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah. Pada tahun 2023, semua kategori kecuali surat kabar nasional/lokal menunjukkan angka yang sama, yaitu satu. Sementara itu, jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah mencapai angka delapan. Data untuk tahun 2024 menunjukkan tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya, dengan semua kategori tetap pada angka yang sama.

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa surat kabar nasional/lokal merupakan sumber informasi yang paling dominan di Kabupaten Jayawijaya, jauh melampaui sumber informasi lainnya seperti website pemerintah daerah, website kabupaten/kota, dan penyiar radio/TV lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa media cetak masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat Jayawijaya dalam mendapatkan informasi.

Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan investasi dalam pengembangan platform digital seperti website pemerintah dan website kabupaten/kota. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas penyiar radio dan TV lokal juga perlu dipertimbangkan untuk memperluas jangkauan informasi dan memberikan alternatif sumber informasi yang lebih beragam bagi masyarakat. Dengan diversifikasi sumber informasi ini, diharapkan masyarakat Jayawijaya dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang akurat dan terkini.



9.1.2. Jumlah Layanan Internet



Gambar 109. Jumlah Layanan Internet

Diagram tersebut menunjukkan data jumlah layanan internet di Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2023 dan 2024. Terdapat dua kategori yang diukur: "Jumlah Desa Terlayani" dan "Jumlah Desa Belum Terlayani." Setiap kategori memiliki dua bar, satu untuk setiap tahun, dengan warna biru untuk tahun 2023 dan merah untuk tahun 2024.

Pada kedua tahun tersebut, "Jumlah Desa Terlayani" tetap konstan di angka 118, sementara "Jumlah Desa Belum Terlayani" juga tetap konstan di angka 210. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam jumlah desa yang terlayani atau belum terlayani oleh layanan internet dari tahun 2023 ke 2024. Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara jumlah desa yang memiliki akses internet dan yang tidak. Stagnasi angka ini mengindikasikan bahwa tidak ada perkembangan atau perluasan layanan internet yang diharapkan terjadi dalam rentang waktu tersebut.



Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar pemerintah daerah dan pihak terkait mengimplementasikan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur internet di daerah-daerah yang belum terlayani. Ini bisa melibatkan investasi dalam peningkatan teknologi, perubahan kebijakan untuk memberikan insentif kepada penyedia layanan agar memperluas jangkauan mereka ke daerah-daerah yang kurang menguntungkan, atau kemitraan dengan pemerintah lokal atau organisasi untuk memfasilitasi pertumbuhan ini. Dengan adanya peningkatan infrastruktur internet, diharapkan lebih banyak desa di Kabupaten Jayawijaya dapat terhubung dengan layanan internet, yang pada gilirannya akan meningkatkan akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

9.1.3. Jumlah Kantor Pos dan Stasiun Radio



Gambar 110. Jumlah Kantor Pos dan Stasiun Radio

Diagram tersebut berjudul “Jumlah Kantor Pos dan Stasiun Radio di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023-2024.” Diagram ini



membandingkan jumlah kantor pos dan stasiun radio di Jayawijaya untuk dua tahun berturut-turut. Terdapat tiga kategori yang diukur: “Jumlah Stasiun Radio Swasta,” “Jumlah Stasiun Radio Pemerintah,” dan “Jumlah Kantor Pos.” Setiap kategori memiliki dua bar yang berdampingan, menunjukkan data untuk dua tahun yang berbeda, yaitu 2023 dan 2024.

Pada tahun 2023, jumlah stasiun radio swasta adalah sekitar 0,5, jumlah stasiun radio pemerintah sedikit di bawah 1, dan jumlah kantor pos sekitar 2,5. Pada tahun 2024, terdapat peningkatan di semua kategori dengan jumlah stasiun radio swasta naik menjadi hampir 1, jumlah stasiun radio pemerintah meningkat sedikit di atas 1, dan jumlah kantor pos tumbuh menjadi hampir 4.

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan adanya pertumbuhan infrastruktur terkait layanan komunikasi di Kabupaten Jayawijaya dari satu tahun ke tahun berikutnya. Peningkatan jumlah kantor pos dan stasiun radio, baik swasta maupun pemerintah, mengindikasikan adanya upaya untuk memperbaiki layanan komunikasi dan logistik di daerah ini.

Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar upaya ini terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

1. **Diversifikasi Layanan Radio:** Dengan meningkatnya jumlah stasiun radio swasta, penting untuk mendorong keberagaman program yang dapat memenuhi berbagai minat dan kebutuhan komunitas. Ini bisa mencakup program pendidikan, kesehatan, dan hiburan.
2. **Modernisasi Kantor Pos:** Peningkatan jumlah kantor pos harus diiringi dengan modernisasi fasilitas dan layanan. Ini termasuk penerapan teknologi terbaru untuk mempercepat proses pengiriman dan penerimaan barang, serta menyediakan layanan tambahan seperti pembayaran tagihan dan layanan perbankan.
3. **Kolaborasi dengan Pemerintah:** Stasiun radio pemerintah yang meningkat jumlahnya bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi penting dan program-program pemerintah secara lebih



efektif. Kolaborasi antara stasiun radio pemerintah dan swasta juga bisa dipertimbangkan untuk memperluas jangkauan informasi.

4. **Investasi Infrastruktur:** Terus berinvestasi dalam infrastruktur komunikasi untuk memastikan bahwa semua daerah, termasuk yang terpencil, mendapatkan akses yang memadai. Ini bisa melibatkan pembangunan menara pemancar baru atau peningkatan kapasitas jaringan yang ada.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Jayawijaya dapat terus meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan logistiknya, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

9.1.4. Perkembangan Jumlah Layanan Informasi

Tabel 42. Perkembangan Jumlah Layanan Informasi

Jenis Layanan	Satuan	2023
Jumlah BTS yang terpasang	BTS	118
Jumlah WIFI yang terpasang	*	194
Jumlah Pembagian Bandwidth ke OPD	Mbps	20/30
Jumlah Bandwidth yang di kelola	Mbps	100
Jumlah Penyedia Akses internet	provider	1
Jumlah Aplikasi pendukung yang telah terpasang di OPD	Aplikasi	58
Jumlah Aplikasi di OPD	Aplikasi	67
1. Aplikasi Umum	Aplikasi	9
2. Aplikasi Khusus	Aplikasi	58
Jumlah aplikasi yang terintegrasi	Aplikasi	54
Sub Domain yang telah terdaftar	Sub Domain	34
Jumlah Perangkat Daerah dan Bagian yang terhubung dengan internet	OPD	35
Jumlah aplikasi yang di kelola baik secara online	Aplikasi	26
Jumlah aplikasi yang di kelola baik secara off line	Aplikasi	10
Jumlah SSB yang telah terpasang	SSB	7
Jumlah Perda yang telah di terbitkan	Perda	1
Jumlah Menara telkomsel yang masuk dalam distribusi pemma	Menara	3



Jumlah Konten Media yang telah diamankan
CCTV Pemda yang terpasang perkantoran
CCTV Pemda yang terpasang layanan umum
Jumlah berita yang telah di terbitkan dalam media sosial Pemda
Jumlah berita Vidiotrone yang di tayangkan
Jumlah Survei data statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS
Jumlah OPD dan vertikal yang mengembalikan Format Data statistik sektoral secara manual
Jumlah OPD yang mengupload data di aplikasi SIMANIS
Jumlah Produk buku statistik sektoral

Konten	0
unit	7
unit	0
Berita	104
Berita	43
Format data	0
OPD	32
OPD	0
buku	3

Tabel di atas menunjukkan data perkembangan layanan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2022 hingga 2024. Data ini mencakup berbagai aspek layanan, seperti jumlah BTS yang berfungsi, jumlah bandwidth internet di OPD, jumlah aplikasi yang digunakan di OPD, dan lain-lain.

Secara umum, tabel ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa area. Misalnya, jumlah BTS yang berfungsi tetap stabil di angka 118 dari tahun 2023 hingga 2024, menunjukkan bahwa infrastruktur dasar telekomunikasi telah mencapai titik stabilitas. Jumlah WiFi yang terpasang juga tetap konstan di angka 194, yang menunjukkan bahwa akses internet di berbagai lokasi telah terjaga dengan baik. Namun, ada beberapa area yang menunjukkan stagnasi atau bahkan penurunan. Misalnya, jumlah aplikasi yang terintegrasi meningkat dari 54 pada tahun 2023 menjadi 67 pada tahun 2024, tetapi jumlah aplikasi yang dikelola secara online tetap di angka 26, dan yang dikelola secara offline tetap di angka 10. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam integrasi aplikasi, pengelolaan aplikasi masih memerlukan perhatian lebih.

Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar Dinas Kominfo Kabupaten Jayawijaya fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan aplikasi, baik yang dikelola secara online maupun offline. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan jumlah BTS dan WiFi yang terpasang untuk memastikan akses internet yang lebih luas dan merata.



Investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga penting untuk memastikan bahwa staf dapat mengelola dan memanfaatkan teknologi yang ada dengan efektif. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa area yang menunjukkan kemajuan, masih ada ruang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut untuk memastikan bahwa layanan Kominfo dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

9.2. Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya

Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, yang juga dikenal sebagai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut. Dinas ini bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengelola, dan mengembangkan potensi pariwisata serta budaya lokal. Tugas pokok Dinas Pariwisata meliputi penyusunan program kerja, perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi wisata, industri pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta fasilitasi pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan strategis. Fungsi utama Dinas ini adalah sebagai penyelenggara kegiatan pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan kepada pelaku pariwisata dan budaya, serta koordinasi dengan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) terkait.

Dalam konteks pencapaian visi dan misi Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pariwisata berperan sebagai motor penggerak utama dalam mempromosikan dan mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu unggulan daerah. Visi Kabupaten Jayawijaya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing melalui pengembangan potensi lokal, termasuk pariwisata. Misi yang diemban mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, dan peningkatan infrastruktur. Dinas Pariwisata mendukung pencapaian visi dan misi ini dengan mengembangkan destinasi wisata yang menarik, meningkatkan kualitas layanan pariwisata, dan mempromosikan budaya lokal sebagai daya tarik wisata. Selain itu, Dinas ini juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata, sehingga dapat



menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berbagai program dan kebijakan yang dijalankan, Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya berupaya untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. Melalui pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan dan promosi budaya lokal, diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Dinas ini juga terus berinovasi dalam menciptakan produk wisata baru dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga dapat bersaing dengan destinasi wisata lainnya di Indonesia.

9.2.1. Jumlah Objek Wisata



Gambar 111. Jumlah Objek Wisata

Diagram di atas menunjukkan data jumlah objek wisata di Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2024. Berdasarkan diagram tersebut, berikut adalah identifikasi data angka untuk setiap kategori objek wisata: Bupati memiliki 1 objek wisata, Cagar Alam memiliki 5 objek wisata,



Perairan memiliki 3 objek wisata, Gunung memiliki 8 objek wisata, Sejarah memiliki 13 objek wisata, Alam Liar memiliki 1 objek wisata, Religi memiliki 3 objek wisata, Kultur memiliki 9 objek wisata, dan Belanja memiliki 4 objek wisata.

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa objek wisata dengan kategori Sejarah memiliki jumlah terbanyak, yaitu 13 objek wisata. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Jayawijaya memiliki kekayaan sejarah yang signifikan yang dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Kategori Kultur dan Gunung juga memiliki jumlah objek wisata yang cukup banyak, masing-masing 9 dan 8 objek wisata, yang menunjukkan potensi besar dalam wisata budaya dan alam. Kategori Cagar Alam dan Belanja memiliki jumlah objek wisata yang sedang, masing-masing 5 dan 4 objek wisata, yang menunjukkan bahwa ada potensi untuk pengembangan lebih lanjut di sektor ini. Kategori Perairan dan Religi memiliki jumlah objek wisata yang lebih sedikit, masing-masing 3 objek wisata, yang menunjukkan bahwa sektor ini mungkin memerlukan perhatian lebih untuk pengembangan.

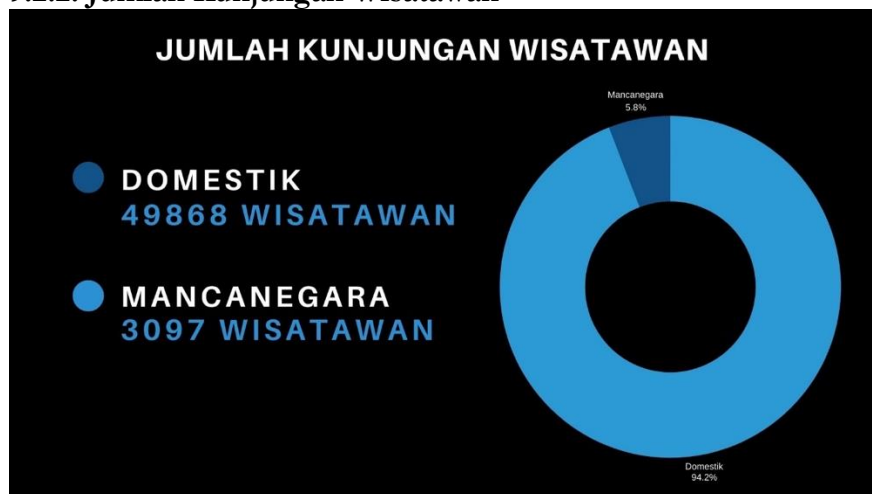
Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat dari upaya mereka dalam mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai jenis objek wisata. Fokus pada objek wisata sejarah dan budaya menunjukkan upaya yang kuat dalam mempromosikan kekayaan lokal dan warisan budaya. Namun, ada beberapa area yang memerlukan perhatian lebih, seperti objek wisata perairan dan religi, yang memiliki potensi tetapi belum dikembangkan secara optimal. Dinas Pariwisata telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mengembangkan destinasi wisata yang menarik dan meningkatkan kualitas layanan pariwisata, namun masih ada ruang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Untuk pengembangan ke depan, Dinas Pariwisata dapat fokus pada diversifikasi objek wisata dengan mengembangkan lebih banyak objek wisata di kategori yang saat ini memiliki jumlah yang lebih sedikit, seperti perairan dan religi. Ini dapat menarik segmen wisatawan yang berbeda dan meningkatkan daya tarik keseluruhan Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, peningkatan infrastruktur di sekitar objek wisata yang ada, seperti akses jalan, fasilitas umum, dan akomodasi, dapat



meningkatkan kenyamanan dan pengalaman wisatawan. Meningkatkan upaya promosi dan pemasaran, baik secara lokal maupun internasional, juga penting untuk menarik lebih banyak wisatawan. Penggunaan media sosial dan platform digital dapat menjadi alat yang efektif dalam hal ini. Memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata dan layanan pariwisata dapat meningkatkan kualitas layanan dan memberdayakan masyarakat setempat. Terakhir, meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta untuk investasi dalam pengembangan objek wisata baru dan peningkatan fasilitas yang ada dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Dengan langkah-langkah ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya dapat terus meningkatkan kinerjanya dan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah.

9.2.2. Jumlah Kunjungan Wisatawan



Gambar 112. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Diagram di atas menunjukkan data jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2024. Berdasarkan diagram tersebut, terdapat dua segmen utama: wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Wisatawan domestik mendominasi dengan



persentase sebesar 94,2%, yang setara dengan 49.868 wisatawan. Sementara itu, wisatawan mancanegara hanya menyumbang 5,8% dari total kunjungan, dengan jumlah 3.097 wisatawan.

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya lebih populer di kalangan wisatawan domestik dibandingkan wisatawan internasional. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk promosi yang lebih efektif di dalam negeri, aksesibilitas yang lebih mudah bagi wisatawan lokal, serta daya tarik wisata yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Di sisi lain, rendahnya jumlah wisatawan mancanegara menunjukkan bahwa ada potensi besar yang belum dimanfaatkan dalam menarik wisatawan internasional. Faktor-faktor seperti kurangnya promosi di pasar internasional, keterbatasan infrastruktur yang mendukung wisatawan asing, serta kurangnya informasi yang tersedia dalam bahasa asing mungkin berkontribusi pada rendahnya angka kunjungan wisatawan mancanegara.

Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya dapat dievaluasi berdasarkan data ini. Dinas Pariwisata tampaknya telah berhasil menarik minat wisatawan domestik, yang merupakan mayoritas pengunjung. Namun, untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, diperlukan strategi yang lebih fokus pada pasar internasional. Ini termasuk peningkatan promosi di luar negeri, partisipasi dalam pameran pariwisata internasional, serta peningkatan fasilitas dan layanan yang ramah bagi wisatawan asing. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang lebih baik, seperti akses transportasi yang lebih mudah dan fasilitas akomodasi yang memenuhi standar internasional, juga penting untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.

Untuk pengembangan ke depan, Dinas Pariwisata dapat mempertimbangkan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan upaya promosi dan pemasaran di pasar internasional melalui kerjasama dengan agen perjalanan global dan penggunaan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi pariwisata yang tersedia dalam berbagai bahasa untuk memudahkan wisatawan asing dalam merencanakan kunjungan mereka. Ketiga, mengembangkan infrastruktur yang mendukung,



seperti peningkatan aksesibilitas ke destinasi wisata utama dan penyediaan fasilitas yang ramah bagi wisatawan asing. Keempat, melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata melalui pelatihan dan pemberdayaan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada wisatawan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, dan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah.

9.2.3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Objek



Gambar 113. Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Objek

Diagram di atas menunjukkan data jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata di Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2024. Berdasarkan diagram tersebut, berikut adalah identifikasi data angka untuk setiap objek wisata: Kunjungan Objek Wisata Budaya oleh Wisatawan Domestik sebesar 43.596 Orang/Kunjungan, sedangkan Wisatawan Mancanegara hanya sebesar 1.043 Orang/Kunjungan. Wisata Bahari memperoleh 0 wisatawan baik dari domestik maupun



mancanegara, Cagar Alam memiliki 54 wisatawan domestik dan tidak ada 12 wisatawan mancanegara, Pertanian memiliki 295 wisatawan domestik dan 81 wisatawan mancanegara, tidak terdapat kunjungan wisata Kuliner baik dari wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, serta Belanja memiliki 1.055 wisatawan domestik dan 381 wisatawan mancanegara.

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata di Kabupaten Jayawijaya, beberapa rekomendasi dapat diberikan. Pertama, peningkatan promosi internasional sangat penting. Dengan meningkatkan promosi wisata budaya dan belanja ke pasar internasional melalui kampanye pemasaran, partisipasi dalam pameran pariwisata global, dan kolaborasi dengan agen perjalanan internasional, daya tarik Jayawijaya di mata wisatawan mancanegara dapat meningkat. Penggunaan media sosial dan platform digital juga dapat membantu mencapai audiens global dengan lebih efektif.

Pengembangan wisata bahari juga perlu menjadi fokus. Dengan mengembangkan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta menciptakan program wisata bahari yang unik dan berkelanjutan, Jayawijaya dapat menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara. Untuk cagar alam, peningkatan aksesibilitas dan penyediaan informasi yang jelas serta pemandu wisata yang berpengetahuan dapat menarik lebih banyak pengunjung. Mengembangkan paket wisata yang mengkombinasikan kunjungan ke cagar alam dengan aktivitas menarik lainnya juga dapat menjadi strategi efektif.

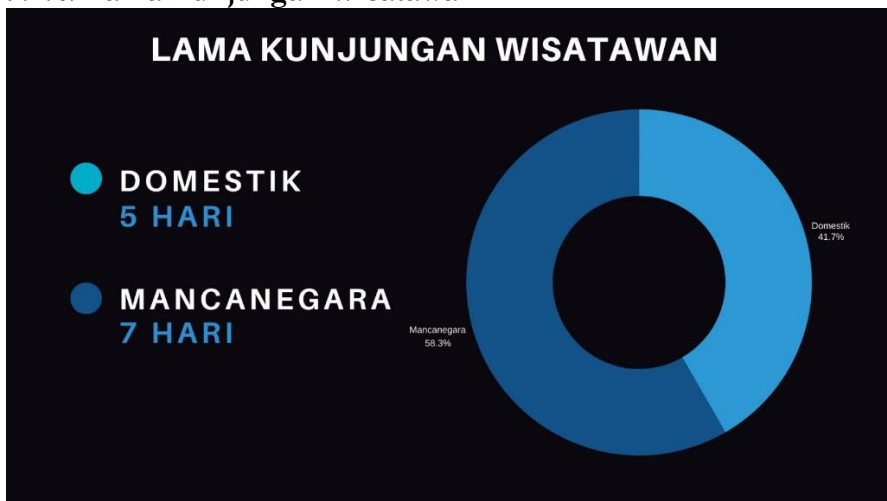
Wisata pertanian bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menawarkan program wisata edukatif seperti tur kebun, workshop, dan pengalaman bertani. Kolaborasi dengan petani lokal untuk menciptakan pengalaman autentik dapat meningkatkan daya tarik wisata ini. Promosi wisata kuliner perlu ditingkatkan melalui festival makanan, event kuliner, dan promosi di media sosial. Kolaborasi dengan restoran lokal dan chef untuk memperkenalkan makanan khas Jayawijaya kepada wisatawan dapat memberikan dampak positif.

Terakhir, untuk wisata belanja, mengembangkan pasar dan pusat belanja yang menampilkan produk lokal unik dan suvenir khas



Jayawijaya serta mengadakan kampanye promosi untuk menarik minat wisatawan mancanegara merupakan langkah yang tepat. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata di Kabupaten Jayawijaya akan meningkat, baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Dinas Pariwisata perlu terus berinovasi dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan strategi yang diterapkan efektif dan memberikan hasil yang diharapkan.

9.2.4. Lama Kunjungan Wisatawan



Gambar 114. Lama Kunjungan Wisatawan

Diagram di atas menunjukkan data jumlah lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2024. Berdasarkan diagram tersebut, wisatawan domestik memiliki rata-rata lama kunjungan selama 5 hari, sedangkan wisatawan mancanegara memiliki rata-rata lama kunjungan selama 7 hari. Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara cenderung menghabiskan waktu lebih lama di Kabupaten Jayawijaya dibandingkan dengan wisatawan domestik. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk jarak perjalanan yang lebih jauh bagi wisatawan mancanegara, sehingga mereka cenderung merencanakan kunjungan



yang lebih panjang untuk memaksimalkan pengalaman mereka. Selain itu, wisatawan mancanegara mungkin lebih tertarik untuk mengeksplorasi berbagai objek wisata dan budaya lokal yang ditawarkan oleh Kabupaten Jayawijaya.

Tren ini menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk meningkatkan lama kunjungan wisatawan domestik dengan menyediakan lebih banyak aktivitas dan atraksi yang dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lebih lama. Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya dapat dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka dalam menarik dan mempertahankan wisatawan untuk tinggal lebih lama. Saat ini, Dinas Pariwisata tampaknya telah berhasil menarik minat wisatawan mancanegara untuk tinggal lebih lama, namun perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan lama kunjungan wisatawan domestik.

Untuk pengembangan ke depan, Dinas Pariwisata dapat mempertimbangkan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan jumlah dan kualitas atraksi serta aktivitas yang dapat dinikmati oleh wisatawan domestik selama kunjungan mereka. Ini bisa termasuk pengembangan paket wisata yang mencakup berbagai jenis objek wisata seperti wisata alam, budaya, dan kuliner. Kedua, meningkatkan promosi dan pemasaran yang menyoroti berbagai aktivitas yang dapat dilakukan di Kabupaten Jayawijaya, sehingga wisatawan domestik tertarik untuk merencanakan kunjungan yang lebih panjang. Ketiga, melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata melalui pelatihan dan pemberdayaan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menyediakan layanan dan pengalaman yang berkualitas bagi wisatawan. Keempat, meningkatkan infrastruktur pendukung seperti akomodasi dan transportasi untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi wisatawan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan lama kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, dan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. Peran masyarakat lokal sangat penting dalam menciptakan pengalaman yang autentik dan menarik bagi



wisatawan, sehingga partisipasi aktif mereka dalam pengembangan pariwisata harus terus didorong dan didukung.

9.2.5. Jumlah Jenis Penginapan

Tabel 43. Jumlah Jenis Penginapan

NO	JENIS	JUMLAH KAMAR
1	Hotel Bintang Lima	0
2	Hotel Bintang Empat	0
3	Hotel Bintang Tiga	0
4	Hotel Bintang Dua	0
5	Hotel Bintang Satu	0
6	Hotel Melati	520

Tabel di atas menunjukkan data jenis penginapan dan jumlah kamar yang ada di Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2024. Berdasarkan diagram tersebut, berikut adalah identifikasi data angka untuk setiap jenis penginapan: Hotel Bintang Lima, Hotel Bintang Empat, Hotel Bintang Tiga, Hotel Bintang Dua, dan Hotel Bintang Satu semuanya memiliki 0 kamar. Sementara itu, Hotel Melati memiliki 520 kamar.

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya saat ini tidak memiliki hotel berbintang, yang biasanya menawarkan fasilitas dan layanan yang lebih mewah dan standar internasional. Sebaliknya, seluruh kapasitas penginapan diwakili oleh Hotel Melati, yang umumnya merupakan hotel kelas ekonomi dengan fasilitas dasar. Dampak positif dari situasi ini adalah bahwa Hotel Melati dapat menarik wisatawan dengan anggaran terbatas, seperti backpacker atau wisatawan yang mencari pengalaman lokal yang lebih autentik. Namun, dampak negatifnya adalah kurangnya pilihan akomodasi yang lebih mewah dapat mengurangi minat wisatawan yang mencari kenyamanan dan layanan premium, yang pada gilirannya dapat



membatasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik kelas atas.

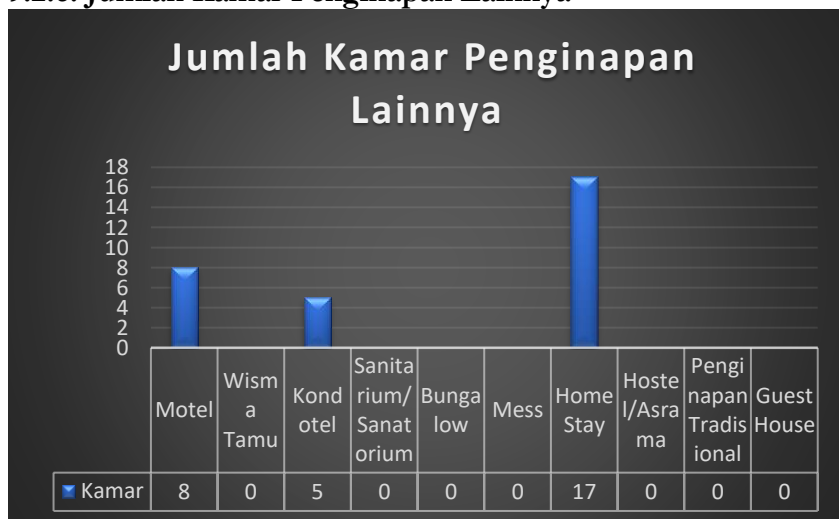
Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya dapat dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka dalam menyediakan berbagai jenis akomodasi yang memenuhi kebutuhan berbagai segmen wisatawan. Saat ini, tampaknya ada kekurangan dalam diversifikasi jenis penginapan, yang dapat mempengaruhi daya tarik keseluruhan Kabupaten Jayawijaya sebagai destinasi wisata. Untuk meningkatkan kinerja dan menarik lebih banyak wisatawan, Dinas Pariwisata perlu mempertimbangkan pengembangan hotel berbintang yang dapat memenuhi standar internasional dan menawarkan kenyamanan lebih bagi wisatawan.

Untuk pengembangan ke depan, Dinas Pariwisata dapat mempertimbangkan beberapa langkah strategis. Pertama, mendorong investasi dalam pembangunan hotel berbintang melalui insentif dan kemudahan perizinan bagi investor. Kedua, meningkatkan promosi dan pemasaran yang menyoroti potensi wisata Kabupaten Jayawijaya, sehingga menarik minat investor dan operator hotel internasional. Ketiga, melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata melalui pelatihan dan pemberdayaan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menyediakan layanan yang berkualitas dan ramah bagi wisatawan. Keempat, mengembangkan infrastruktur pendukung seperti akses transportasi yang lebih baik dan fasilitas umum yang memadai untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan jumlah dan kualitas akomodasi yang tersedia, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan dari berbagai segmen pasar. Peran masyarakat lokal sangat penting dalam menciptakan pengalaman yang autentik dan menarik bagi wisatawan, sehingga partisipasi aktif mereka dalam pengembangan pariwisata harus terus didorong dan didukung. Dengan demikian, sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Jayawijaya.



9.2.6. Jumlah Kamar Penginapan Lainnya



Gambar 115. Jumlah Kamar Penginapan Lainnya

Diagram di atas menunjukkan data jenis penginapan dan jumlah kamar penginapan dengan kategori lainnya atau non-hotel yang ada di Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2024. Berdasarkan diagram tersebut, berikut adalah identifikasi data angka untuk setiap jenis penginapan: Motel memiliki 8 kamar, Wisma Tamu memiliki 0 kamar, Kondotel memiliki 5 kamar, Sanitarium/Sanatorium memiliki 0 kamar, Bungalow memiliki 0 kamar, Mess memiliki 0 kamar, Homestay memiliki 17 kamar, Hostel/Asrama memiliki 0 kamar, Penginapan Tradisional memiliki 0 kamar, dan Guest House memiliki 0 kamar.

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa jenis penginapan non-hotel di Kabupaten Jayawijaya didominasi oleh Homestay dengan 17 kamar, diikuti oleh Motel dengan 8 kamar dan Kondotel dengan 5 kamar. Jenis penginapan lainnya seperti Wisma Tamu, Sanitarium/Sanatorium, Bungalow, Mess, Hostel/Asrama, Penginapan Tradisional, dan Guest House tidak memiliki kamar yang tersedia. Dampak positif dari situasi ini adalah adanya Homestay dapat menyediakan pilihan akomodasi yang lebih terjangkau dan



autentik bagi wisatawan yang mencari pengalaman lokal. Homestay juga dapat memberdayakan masyarakat lokal dengan memberikan mereka kesempatan untuk terlibat langsung dalam industri pariwisata. Namun, dampak negatifnya adalah kurangnya diversifikasi jenis penginapan dapat mengurangi daya tarik Kabupaten Jayawijaya bagi wisatawan yang mencari kenyamanan dan layanan yang lebih mewah atau standar internasional.

Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya dapat dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka dalam menyediakan berbagai jenis akomodasi yang memenuhi kebutuhan berbagai segmen wisatawan. Saat ini, tampaknya ada kekurangan dalam diversifikasi jenis penginapan non-hotel, yang dapat mempengaruhi daya tarik keseluruhan Kabupaten Jayawijaya sebagai destinasi wisata. Untuk meningkatkan kinerja dan menarik lebih banyak wisatawan, Dinas Pariwisata perlu mempertimbangkan pengembangan berbagai jenis penginapan yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan domestik dan mancanegara.

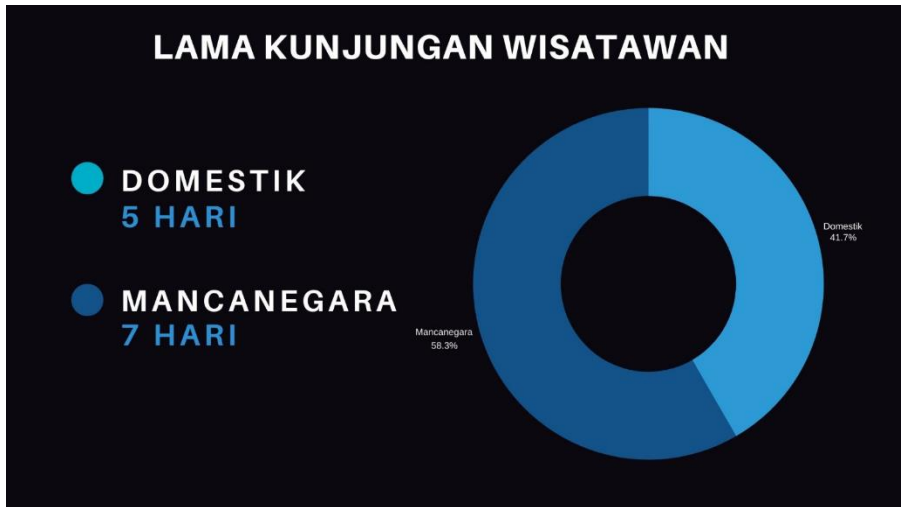
Untuk pengembangan ke depan, Dinas Pariwisata dapat mempertimbangkan beberapa langkah strategis. Pertama, mendorong investasi dalam pembangunan berbagai jenis penginapan non-hotel melalui insentif dan kemudahan perizinan bagi investor. Kedua, meningkatkan promosi dan pemasaran yang menyoroti potensi wisata Kabupaten Jayawijaya, sehingga menarik minat investor dan operator penginapan. Ketiga, melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata melalui pelatihan dan pemberdayaan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menyediakan layanan yang berkualitas dan ramah bagi wisatawan. Keempat, mengembangkan infrastruktur pendukung seperti akses transportasi yang lebih baik dan fasilitas umum yang memadai untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan jumlah dan kualitas akomodasi yang tersedia, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan dari berbagai segmen pasar. Peran masyarakat lokal sangat penting dalam menciptakan pengalaman yang autentik dan menarik bagi wisatawan, sehingga partisipasi aktif mereka dalam pengembangan pariwisata harus terus didorong dan didukung. Dengan demikian, sektor pariwisata dapat



menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Jayawijaya.

9.2.7. Biro Wisata dan Agen Perjalanan Wisata



Gambar 116. Biro Wisata dan Agen Perjalanan Wisata

Diagram di atas menunjukkan data jumlah biro wisata dan agen perjalanan yang ada di Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2024. Berdasarkan diagram tersebut, terdapat 4 agen perjalanan wisata yang mewakili 80% dari total, dan 1 biro wisata yang mewakili 20% dari total. Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa mayoritas layanan pariwisata di Kabupaten Jayawijaya disediakan oleh agen perjalanan wisata. Dampak positif dari situasi ini adalah bahwa agen perjalanan wisata dapat menawarkan berbagai paket wisata yang menarik dan terjangkau bagi wisatawan, sehingga meningkatkan minat wisatawan untuk mengunjungi Kabupaten Jayawijaya. Agen perjalanan juga dapat memberikan layanan yang lebih personal dan fleksibel, yang



dapat meningkatkan kepuasan wisatawan. Namun, dampak negatifnya adalah kurangnya biro wisata dapat membatasi pilihan wisatawan yang mencari layanan yang lebih terorganisir dan profesional, yang biasanya ditawarkan oleh biro wisata.

Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya dapat dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka dalam mendukung dan mengembangkan sektor agen perjalanan dan biro wisata. Saat ini, tampaknya ada ketidakseimbangan dalam jumlah agen perjalanan dan biro wisata, yang dapat mempengaruhi daya tarik keseluruhan Kabupaten Jayawijaya sebagai destinasi wisata. Untuk meningkatkan kinerja dan menarik lebih banyak wisatawan, Dinas Pariwisata perlu mempertimbangkan pengembangan dan dukungan yang lebih besar untuk biro wisata, sehingga dapat menyediakan layanan yang lebih beragam dan berkualitas bagi wisatawan.

Untuk pengembangan ke depan, Dinas Pariwisata dapat mempertimbangkan beberapa langkah strategis. Pertama, mendorong investasi dalam pendirian biro wisata melalui insentif dan kemudahan perizinan bagi investor. Kedua, meningkatkan promosi dan pemasaran yang menyoroti potensi wisata Kabupaten Jayawijaya, sehingga menarik minat investor dan operator biro wisata. Ketiga, melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata melalui pelatihan dan pemberdayaan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menyediakan layanan yang berkualitas dan ramah bagi wisatawan. Keempat, mengembangkan infrastruktur pendukung seperti akses transportasi yang lebih baik dan fasilitas umum yang memadai untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

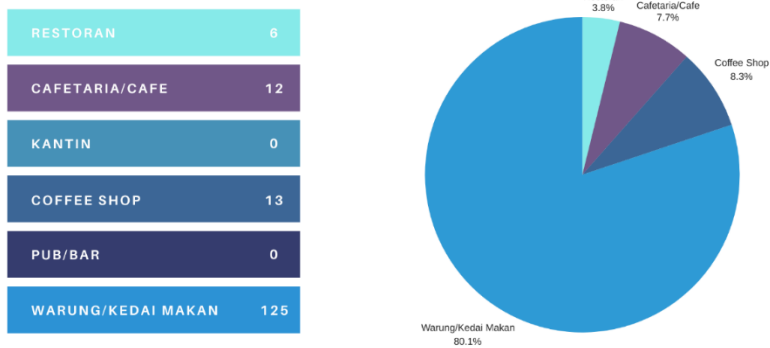
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan jumlah dan kualitas layanan pariwisata yang tersedia, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan dari berbagai segmen pasar. Peran masyarakat lokal sangat penting dalam menciptakan pengalaman yang autentik dan menarik bagi wisatawan, sehingga partisipasi aktif mereka dalam pengembangan pariwisata harus terus didorong dan didukung. Dengan demikian, sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah, memberikan



manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Jayawijaya.

9.2.8. Jenis Usaha Makanan/Minuman

JENIS USAHA JASA MAKANAN/MINUMAN



Gambar 117. Jenis Usaha Makanan/Minuman

Diagram di atas menunjukkan data jumlah usaha makanan/minuman yang ada di Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2024. Berdasarkan diagram tersebut, berikut adalah identifikasi data angka untuk setiap jenis usaha: Restoran memiliki 6 usaha, Cafeteria/Cafe memiliki 12 usaha, Kantin memiliki 0 usaha, Coffee Shop memiliki 13 usaha, Pub/Bar memiliki 0 usaha, dan Warung/Kedai Makan memiliki 125 usaha. Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman di Kabupaten Jayawijaya didominasi oleh Warung/Kedai Makan, yang mencakup 80,1% dari total usaha. Ini menunjukkan bahwa mayoritas penyedia makanan dan minuman adalah usaha kecil yang menawarkan pengalaman kuliner lokal. Coffee Shop dan Cafeteria/Cafe juga memiliki kehadiran yang signifikan, masing-masing dengan 13 dan 12 usaha, sementara Restoran hanya memiliki 6 usaha. Tidak adanya Kantin dan Pub/Bar menunjukkan bahwa jenis usaha ini belum berkembang di daerah ini.



Dampak positif dari dominasi Warung/Kedai Makan adalah bahwa wisatawan dapat menikmati pengalaman kuliner yang autentik dan terjangkau, yang dapat meningkatkan daya tarik Kabupaten Jayawijaya sebagai destinasi wisata budaya. Selain itu, keberadaan banyak Warung/Kedai Makan dapat memberdayakan masyarakat lokal dengan memberikan mereka peluang usaha dan pendapatan. Namun, dampak negatifnya adalah kurangnya diversifikasi jenis usaha makanan/minuman dapat mengurangi daya tarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman kuliner yang lebih beragam dan mewah. Wisatawan yang terbiasa dengan standar internasional mungkin merasa kurang puas dengan pilihan yang terbatas.

Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya dapat dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka dalam mendukung dan mengembangkan sektor usaha makanan/minuman. Saat ini, tampaknya ada ketidakseimbangan dalam jenis usaha yang tersedia, yang dapat mempengaruhi daya tarik keseluruhan Kabupaten Jayawijaya sebagai destinasi wisata. Untuk meningkatkan kinerja dan menarik lebih banyak wisatawan, Dinas Pariwisata perlu mempertimbangkan pengembangan dan dukungan yang lebih besar untuk berbagai jenis usaha makanan/minuman, termasuk restoran, kafe, dan pub/bar.

Untuk pengembangan ke depan, Dinas Pariwisata dapat mempertimbangkan beberapa langkah strategis. Pertama, mendorong investasi dalam pendirian berbagai jenis usaha makanan/minuman melalui insentif dan kemudahan perizinan bagi investor. Kedua, meningkatkan promosi dan pemasaran yang menyoroti potensi kuliner Kabupaten Jayawijaya, sehingga menarik minat investor dan operator usaha makanan/minuman. Ketiga, melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan sektor kuliner melalui pelatihan dan pemberdayaan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menyediakan layanan yang berkualitas dan ramah bagi wisatawan. Keempat, mengembangkan infrastruktur pendukung seperti akses transportasi yang lebih baik dan fasilitas umum yang memadai untuk mendukung pertumbuhan sektor kuliner.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan jumlah dan kualitas usaha makanan/minuman



yang tersedia, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan dari berbagai segmen pasar. Peran masyarakat lokal sangat penting dalam menciptakan pengalaman kuliner yang autentik dan menarik bagi wisatawan, sehingga partisipasi aktif mereka dalam pengembangan sektor kuliner harus terus didorong dan didukung. Dengan demikian, sektor kuliner dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Jayawijaya.

9.2.9. Pusat Penjualan Cenderamata



Gambar 118. Pusat Penjualan Cenderamata

Diagram di atas menunjukkan data jumlah pusat penjualan cenderamata yang ada di Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2024. Berdasarkan diagram tersebut, terdapat dua kategori pusat penjualan cenderamata: Pedagang Cenderamata Non Toko dengan jumlah 15, yang mencakup 65,2% dari total, dan Cenderamata dengan jumlah 8, yang mencakup 34,8% dari total. Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa mayoritas pusat penjualan cenderamata di Kabupaten Jayawijaya adalah pedagang non-toko.



Dampak positif dari situasi ini adalah bahwa pedagang non-toko dapat memberikan pengalaman belanja yang lebih fleksibel dan personal bagi wisatawan. Mereka sering kali menawarkan produk-produk unik dan khas yang mencerminkan budaya lokal, yang dapat meningkatkan daya tarik wisatawan untuk membeli cinderamata sebagai kenang-kenangan. Selain itu, pedagang non-toko biasanya lebih mudah diakses dan dapat ditemukan di berbagai lokasi wisata, sehingga memudahkan wisatawan untuk membeli cinderamata. Namun, dampak negatifnya adalah kurangnya toko cinderamata yang lebih formal dapat mengurangi kepercayaan wisatawan terhadap kualitas dan keaslian produk yang dijual. Wisatawan yang terbiasa dengan standar internasional mungkin merasa kurang nyaman berbelanja di pedagang non-toko, yang dapat mempengaruhi minat mereka untuk membeli cinderamata. Selain itu, pedagang non-toko mungkin menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan dukungan dari pemerintah, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha mereka.

Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya dapat dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka dalam mendukung dan mengembangkan sektor penjualan cinderamata. Saat ini, tampaknya ada ketidakseimbangan dalam jenis pusat penjualan cinderamata yang tersedia, yang dapat mempengaruhi daya tarik keseluruhan Kabupaten Jayawijaya sebagai destinasi wisata. Untuk meningkatkan kinerja dan menarik lebih banyak wisatawan, Dinas Pariwisata perlu mempertimbangkan pengembangan dan dukungan yang lebih besar untuk toko cinderamata yang lebih formal, serta memberikan pelatihan dan pemberdayaan bagi pedagang non-toko.

Untuk pengembangan ke depan, Dinas Pariwisata dapat mempertimbangkan beberapa langkah strategis. Pertama, mendorong investasi dalam pendirian toko cinderamata melalui insentif dan kemudahan perizinan bagi investor. Kedua, meningkatkan promosi dan pemasaran yang menyoroti potensi cinderamata Kabupaten Jayawijaya, sehingga menarik minat wisatawan untuk membeli produk lokal. Ketiga, melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan sektor cinderamata melalui pelatihan dan pemberdayaan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menyediakan produk yang berkualitas dan ramah bagi



wisatawan. Keempat, mengembangkan infrastruktur pendukung seperti akses transportasi yang lebih baik dan fasilitas umum yang memadai untuk mendukung pertumbuhan sektor cinderamata.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan jumlah dan kualitas pusat penjualan cinderamata yang tersedia, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan dari berbagai segmen pasar. Peran masyarakat lokal sangat penting dalam menciptakan pengalaman belanja yang autentik dan menarik bagi wisatawan, sehingga partisipasi aktif mereka dalam pengembangan sektor cinderamata harus terus didorong dan didukung. Dengan demikian, sektor cinderamata dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Jayawijaya.

9.2.10. Kategori Restoran Berdasarkan Jenis Makanan

Tabel 44. Kategori Restoran Berdasarkan Jenis Makanan

NO	JENIS	Jumlah Restoran
1	American Food	0
2	Chinnese Food	0
3	European Food	0
4	Indian Food	0
5	Indonesian Food	0
6	International Food	0
7	Italian Food	0
8	Japanese Food	0
9	Middle Eastern Food	0
10	Sea Food	0
11	Thai Food	0
12	Vegetarian Food	0

Tabel di atas menunjukkan data jumlah restoran berdasarkan jenis makanan yang ada di Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2024. Berdasarkan tabel tersebut, berikut adalah identifikasi data angka untuk setiap jenis makanan: American Food (0 restoran), Chinese Food (0



restoran), European Food (0 restoran), Indian Food (0 restoran), Indonesian Food (0 restoran), International Food (0 restoran), Italian Food (0 restoran), Japanese Food (0 restoran), Middle Eastern Food (0 restoran), Seafood (0 restoran), Thai Food (0 restoran), dan Vegetarian Food (0 restoran).

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa tidak ada restoran yang terdaftar berdasarkan jenis makanan di Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2024. Dampak positif dari situasi ini adalah bahwa ada peluang besar untuk pengembangan sektor kuliner di daerah ini. Wisatawan yang mencari pengalaman kuliner yang beragam mungkin akan tertarik dengan potensi pengembangan restoran yang menawarkan berbagai jenis makanan internasional dan lokal. Namun, dampak negatifnya adalah kurangnya pilihan restoran dapat mengurangi daya tarik Kabupaten Jayawijaya sebagai destinasi wisata, terutama bagi wisatawan yang mencari pengalaman kuliner yang beragam dan berkualitas.

Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya dapat dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka dalam mendukung dan mengembangkan sektor kuliner. Saat ini, tampaknya ada kekurangan dalam diversifikasi jenis restoran yang tersedia, yang dapat mempengaruhi daya tarik keseluruhan Kabupaten Jayawijaya sebagai destinasi wisata. Untuk meningkatkan kinerja dan menarik lebih banyak wisatawan, Dinas Pariwisata perlu mempertimbangkan pengembangan dan dukungan yang lebih besar untuk berbagai jenis restoran, termasuk restoran yang menawarkan makanan internasional dan lokal.

Untuk pengembangan ke depan, Dinas Pariwisata dapat mempertimbangkan beberapa langkah strategis. Pertama, mendorong investasi dalam pendirian berbagai jenis restoran melalui insentif dan kemudahan perizinan bagi investor. Kedua, meningkatkan promosi dan pemasaran yang menyoroti potensi kuliner Kabupaten Jayawijaya, sehingga menarik minat investor dan operator restoran. Ketiga, melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan sektor kuliner melalui pelatihan dan pemberdayaan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menyediakan layanan yang berkualitas dan ramah bagi wisatawan. Keempat, mengembangkan infrastruktur pendukung seperti



akses transportasi yang lebih baik dan fasilitas umum yang memadai untuk mendukung pertumbuhan sektor kuliner.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan jumlah dan kualitas restoran yang tersedia, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan dari berbagai segmen pasar. Peran masyarakat lokal sangat penting dalam menciptakan pengalaman kuliner yang autentik dan menarik bagi wisatawan, sehingga partisipasi aktif mereka dalam pengembangan sektor kuliner harus terus didorong dan didukung. Dengan demikian, sektor kuliner dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Jayawijaya.

9.2.11. Jumlah Penerimaan Daerah dari Pariwisata

Tabel 45. Jumlah Penerimaan Daerah dari Pariwisata

No.	Uraian	JUMLAH
1	Penerimaan Dari Pajak	0
2	Penerimaan Dari Restribusi	Rp. 56.073.000
3	Jumlah pencetakan buku bahasa daerah daerah	2
4	Jumlah putra dan putri pariwisata yang terpilih untuk di tingkat provinsi	2
5	Jumlah pengurus Dewan Kesenian Daerah yang terpilih	30
6	Jumlah grup seni dan tari binaan yang siap pakai	5
7	Jumlah pengurus Dewan Kesenian Daerah yang terpilih	30
8	Jumlah lembaga adat	1
9	Jumlah sanggar yang tersedia	13
10	Jumlah grup seni yang di fasilitasi	10
11	Jumlah kamus bahasa daerah dan buku cerita rakyat yang tersedia	6
12	Jumlah kampung wisata yang tersedia	5
13	Jumlah Masyarakat yang mengikuti festival seni kreasi jayawijaya	2500
14	Jumlah peserta yang mengikuti dialog kebudayaan	30
15	Jumlah masyarakat(grup seni) yang mengikuti festival seni kreasi papua	0



16	Jumlah peserta seminar aktualisasi budaya lokal (LMA)	0
17	Jumlah promosi FBLB	1
18	Jumlah pembangunan Pondok wisata dan jualan ekonomi	6
19	Jumlah pengelola ekonomi kreatif yang bersyarat	15
20	Jumlah kelompok ekonomi kreatif yang terlibat dalam peningkatan pembangunan kepariwisataan	10
21	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemilihan putra putri pariwisata	40

Tabel di atas menunjukkan uraian bagian dari kinerja Dinas Pariwisata di Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2024. Berdasarkan tabel tersebut, berikut adalah identifikasi data angka untuk beberapa indikator kinerja utama:

1. Penerimaan Dari Retribusi: Rp. 56,073,000
2. Jumlah pencetakan buku bahasa daerah tingkat: 2,000
3. Jumlah masyarakat yang mengikuti festival seni kreasi Jayawijaya: 2,500
4. Jumlah pengelola ekonomi kreatif yang bersertifikat: 15

Analisis komprehensif dari data ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata dan budaya lokal. Penerimaan dari retribusi sebesar Rp. 56,073,000 menunjukkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah. Pencetakan 2,000 buku bahasa daerah mencerminkan upaya dalam melestarikan dan mempromosikan budaya lokal. Partisipasi 2,500 masyarakat dalam festival seni kreasi Jayawijaya menunjukkan tingginya antusiasme dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan budaya. Selain itu, adanya 15 pengelola ekonomi kreatif yang bersertifikat menunjukkan peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan ekonomi kreatif.

Dampak positif dari kinerja ini adalah peningkatan minat wisatawan untuk mengunjungi Kabupaten Jayawijaya, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Festival seni dan pencetakan buku bahasa daerah dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap budaya lokal, yang dapat menarik wisatawan yang tertarik dengan pengalaman budaya



yang autentik. Pengelola ekonomi kreatif yang bersertifikat dapat meningkatkan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan kepada wisatawan, sehingga meningkatkan kepuasan wisatawan. Namun, dampak negatifnya adalah adanya kemungkinan tekanan terhadap lingkungan dan budaya lokal akibat peningkatan jumlah wisatawan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hilangnya nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada sektor pariwisata dapat membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi jumlah wisatawan.

Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya dapat dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan kinerja dan menarik lebih banyak wisatawan, Dinas Pariwisata perlu mempertimbangkan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan promosi dan pemasaran yang menyoroti potensi wisata Kabupaten Jayawijaya, sehingga menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara. Kedua, mengembangkan infrastruktur pendukung seperti akses transportasi yang lebih baik dan fasilitas umum yang memadai untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Ketiga, melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata melalui pelatihan dan pemberdayaan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menyediakan layanan yang berkualitas dan ramah bagi wisatawan. Keempat, mengembangkan program-program yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan budaya lokal, sehingga pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan jumlah dan kualitas wisatawan yang datang, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat. Peran masyarakat lokal sangat penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan menarik bagi wisatawan, sehingga partisipasi aktif mereka dalam pengembangan pariwisata harus terus didorong dan didukung. Dengan demikian, sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Jayawijaya.



9.3. BKPSDMD Kabupaten Jayawijaya

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayawijaya adalah lembaga yang bertanggung jawab atas manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. BKPSDM memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di Jayawijaya memiliki kompetensi dan kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya tujuan pemerintahan yang baik dan bersih. Struktur organisasi BKPSDM Kabupaten Jayawijaya terdiri dari beberapa bidang utama, yaitu:

- 1) **Bidang Pengadaan dan Pemberhentian** yang mengelola proses rekrutmen dan pemberhentian ASN;
- 2) **Bidang Pendidikan dan Pelatihan** yang bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan; serta
- 3) **Bidang Pengembangan** yang fokus pada pengembangan karir dan kesejahteraan ASN.

Visi BKPSDM Kabupaten Jayawijaya adalah *"Menjadi Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional untuk Mendukung Terciptanya Pemerintahan yang Baik dan Bersih"*. Untuk mencapai visi tersebut, BKPSDM memiliki beberapa misi, antara lain:

- a. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah daerah melalui rekrutmen yang bermutu dan transparan serta pendidikan dan pelatihan,
- b. Mewujudkan pola pengembangan karir aparatur melalui pengembangan kompetensi dan penempatan sesuai kebutuhan organisasi,
- c. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasi,
- d. Meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan dengan pemberian reward dan punishment, serta meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian.

Dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Jayawijaya, BKPSDM berperan penting dengan cara meningkatkan kualitas ASN melalui rekrutmen yang transparan dan pelatihan yang

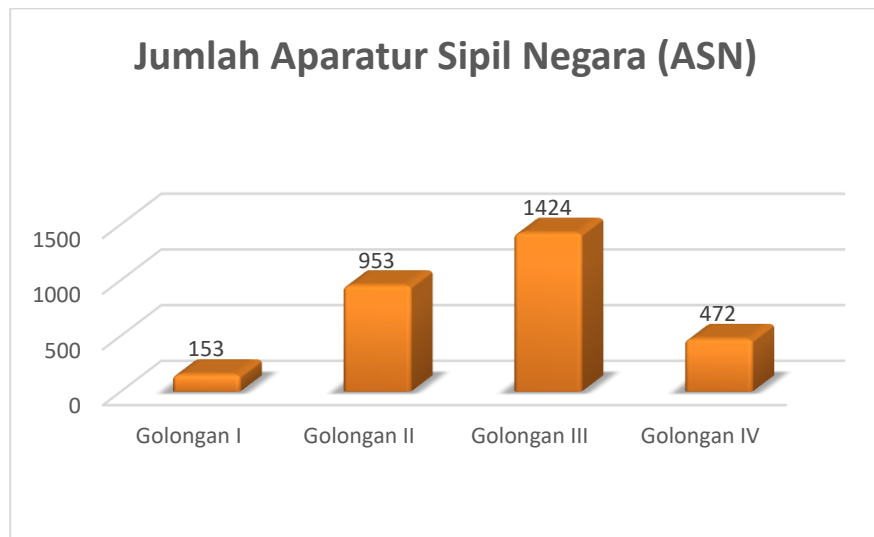


berkelanjutan, menyediakan jalur pengembangan karir yang jelas dan berbasis kompetensi, mengimplementasikan teknologi informasi dalam pengelolaan data kepegawaian, serta melalui program *reward* dan *punishment* yang mendorong kinerja yang baik dan memberikan motivasi kepada ASN untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Dengan demikian, BKPSDM Kabupaten Jayawijaya memainkan peran kunci dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun data sektora yang disajikan sebagai berikut:

1. Jumlah Aparatus Sipil Negara (ASN/PNS);
2. Jumlah Pejabat Struktural;
3. Jumlah ASN menurut Pendidikan;
4. Jumlah ASN menurut Jenis Kelamin.

9.3.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS)



Gambar 119. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Diagram di atas menunjukkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jayawijaya yang dibagi berdasarkan golongan.



Terdapat empat golongan dalam diagram ini: Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV. Dari data yang ditampilkan, terlihat bahwa Golongan III memiliki jumlah ASN terbanyak, yaitu 1424 orang. Ini diikuti oleh Golongan II dengan 953 orang, Golongan IV dengan 472 orang, dan Golongan I dengan jumlah paling sedikit, yaitu 153 orang.

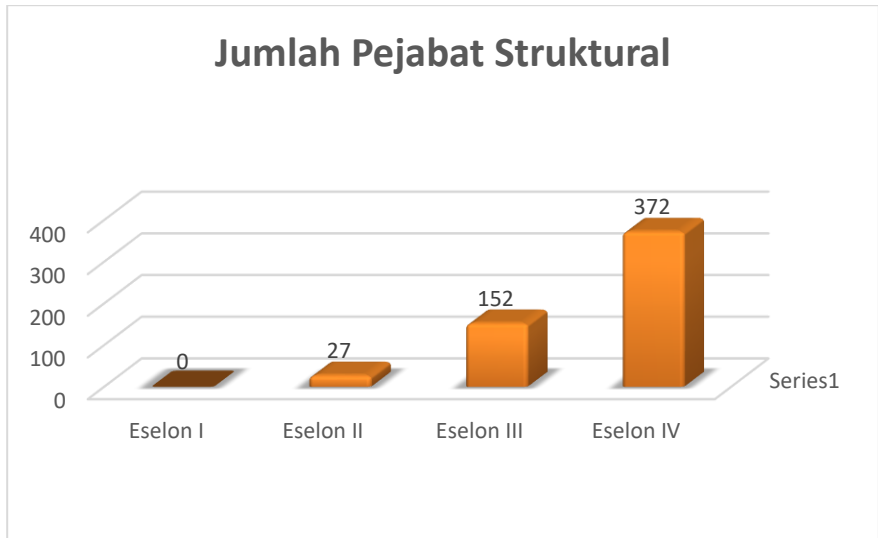
Analisis data ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN di Kabupaten Jayawijaya berada di Golongan III, yang biasanya mencakup posisi manajerial menengah. Hal ini bisa menunjukkan bahwa ada banyak ASN yang telah mencapai tingkat kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk menduduki posisi tersebut. Namun, jumlah ASN yang relatif sedikit di Golongan I dan IV bisa menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi tenaga kerja. Golongan I yang memiliki jumlah paling sedikit mungkin menunjukkan bahwa rekrutmen untuk posisi *entry-level* tidak sebanyak yang diharapkan, atau ada banyak ASN yang cepat naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi. Di sisi lain, jumlah ASN di Golongan IV yang tidak terlalu banyak bisa menunjukkan bahwa ada batasan dalam promosi ke posisi senior atau manajerial tinggi.

Untuk pengembangan ke depan, penting bagi BKPSDM Kabupaten Jayawijaya untuk mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa rekrutmen ASN di Golongan I dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan tenaga kerja. Kedua, program pelatihan dan pengembangan harus terus ditingkatkan untuk memastikan ASN di Golongan II dan III memiliki kesempatan yang cukup untuk naik ke Golongan IV. Ketiga, perlu ada evaluasi terhadap sistem promosi dan pengembangan karir untuk memastikan bahwa ASN yang berpotensi tinggi mendapatkan kesempatan yang adil untuk naik pangkat. Terakhir, implementasi teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian bisa membantu dalam pengelolaan data dan informasi yang lebih efektif, sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan lebih baik dan berbasis data. Dengan langkah-langkah ini, BKPSDM Kabupaten Jayawijaya dapat memastikan bahwa distribusi ASN lebih merata dan setiap ASN



memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam pemerintahan daerah.

9.3.2. Jumlah Pejabat Struktural



Gambar 120. Jumlah Pejabat Struktural

Diagram di atas menunjukkan jumlah pejabat struktural di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, yang dibagi berdasarkan eselon. Terdapat empat kategori eselon dalam diagram ini: Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV. Dari data yang ditampilkan, terlihat bahwa tidak ada pejabat di Eselon I, sementara Eselon II memiliki 27 pejabat. Eselon III memiliki jumlah yang lebih signifikan, yaitu 152 pejabat, dan Eselon IV memiliki jumlah terbanyak, yaitu 372 pejabat.

Analisis data ini menunjukkan bahwa mayoritas pejabat struktural berada di Eselon IV, yang biasanya mencakup posisi manajerial tingkat bawah. Jumlah pejabat yang relatif sedikit di Eselon I dan II bisa menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi tenaga kerja di tingkat manajerial atas. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya promosi ke posisi eselon yang lebih tinggi atau



adanya batasan dalam jumlah posisi yang tersedia di tingkat tersebut. Di sisi lain, jumlah pejabat yang cukup besar di Eselon III dan IV menunjukkan bahwa ada banyak tenaga kerja yang menduduki posisi manajerial menengah dan bawah, yang bisa menjadi indikasi bahwa ada banyak ASN yang sedang dalam proses pengembangan karir.

Untuk pengembangan ke depan, penting bagi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa ada jalur karir yang jelas dan transparan bagi ASN untuk naik ke posisi eselon yang lebih tinggi. Ini bisa dilakukan melalui program pelatihan dan pengembangan yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan keterampilan manajerial. Kedua, perlu ada evaluasi terhadap sistem promosi untuk memastikan bahwa ASN yang berpotensi tinggi mendapatkan kesempatan yang adil untuk naik pangkat. Ketiga, implementasi teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian bisa membantu dalam pengelolaan data dan informasi yang lebih efektif, sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan lebih baik dan berbasis data. Terakhir, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi ASN melalui program reward dan punishment yang adil dan transparan.

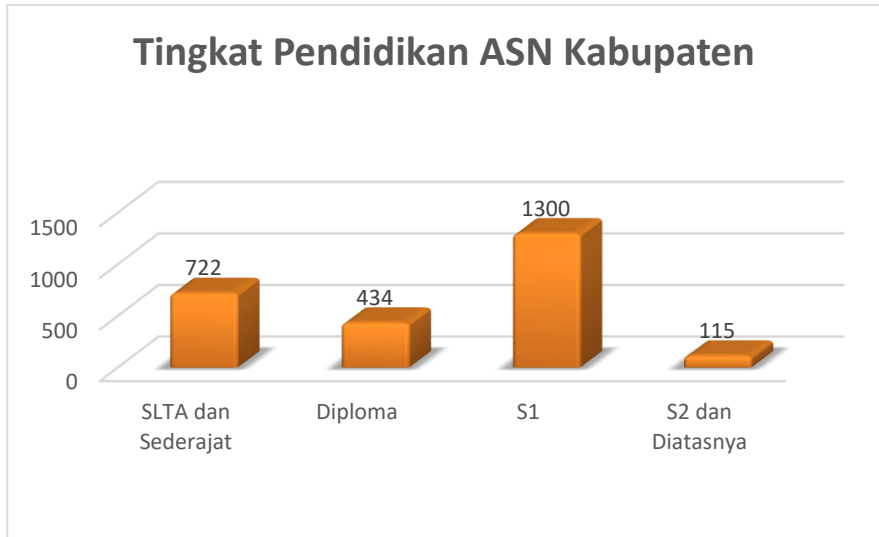
Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat memastikan bahwa distribusi pejabat struktural lebih merata dan setiap ASN memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam pemerintahan daerah. Hal ini akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

9.3.3. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 121 menunjukkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan tingkat pendidikan mereka. Terdapat empat kategori pendidikan dalam diagram ini: SLTA dan Sederajat, Diploma, S1 (Sarjana), dan S2 dan Diatasnya (Magister dan lebih tinggi). Dari data yang ditampilkan, terlihat bahwa jumlah ASN dengan pendidikan S1 adalah yang terbanyak, mencapai 1300 orang. Ini diikuti oleh ASN dengan pendidikan SLTA dan Sederajat



sebanyak 722 orang, Diploma sebanyak 434 orang, dan yang paling sedikit adalah ASN dengan pendidikan S2 dan Diatasnya, yaitu 115 orang.



Gambar 121. Tingkat Pendidikan ASN Kabupaten

Analisis data ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN di Kabupaten Jayawijaya memiliki pendidikan tinggi, dengan gelar Sarjana (S1) sebagai yang paling umum. Hal ini bisa menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Namun, jumlah ASN dengan pendidikan pascasarjana (S2 dan lebih tinggi) yang relatif sedikit menunjukkan adanya potensi untuk pengembangan lebih lanjut dalam hal peningkatan kualifikasi pendidikan.

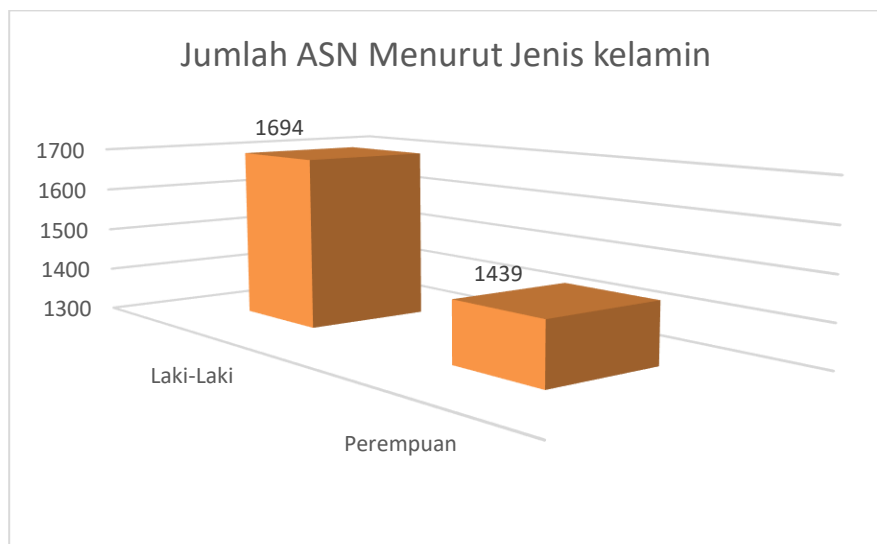
Untuk pengembangan ke depan, penting bagi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, perlu ada program insentif untuk mendorong ASN melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti S2 dan S3. Ini bisa dilakukan melalui beasiswa, cuti belajar, atau kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi. Kedua, program pelatihan dan pengembangan



profesional harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa ASN memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tuntutan pekerjaan mereka. Ketiga, perlu ada evaluasi terhadap kebutuhan tenaga kerja di berbagai bidang untuk memastikan bahwa kualifikasi pendidikan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi. Terakhir, implementasi teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian bisa membantu dalam pengelolaan data dan informasi yang lebih efektif, sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan lebih baik dan berbasis data.

Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat memastikan bahwa ASN memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai dan terus berkembang untuk memenuhi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Hal ini akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

9.3.4. Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin



Gambar 122. Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin



Diagram di atas menunjukkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan jenis kelamin. Terdapat dua kategori dalam diagram ini: Laki-Laki dan Perempuan. Dari data yang ditampilkan, terlihat bahwa jumlah ASN laki-laki adalah 1,694 orang, sementara jumlah ASN perempuan adalah 1,439 orang.

Analisis data ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah yang cukup signifikan antara ASN laki-laki dan perempuan, dengan laki-laki lebih banyak sebanyak 255 orang. Ketidakseimbangan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan rekrutmen, peluang promosi, kondisi lingkungan kerja, atau pengaruh budaya. Penting untuk memahami faktor-faktor ini agar dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mendorong kesetaraan gender di lingkungan kerja pemerintah daerah.

Untuk pengembangan ke depan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat mempertimbangkan beberapa langkah. Pertama, perlu ada kebijakan yang mendorong kesempatan kerja yang setara bagi semua gender. Ini bisa dilakukan melalui program rekrutmen yang inklusif dan transparan, serta memastikan bahwa proses seleksi bebas dari bias gender. Kedua, program mentorship dan pelatihan kepemimpinan khusus untuk perempuan dapat membantu mempersiapkan mereka untuk peran manajerial dan kepemimpinan. Ketiga, perlu ada evaluasi berkala terhadap praktik rekrutmen dan promosi untuk memastikan bahwa mereka adil dan tidak diskriminatif. Terakhir, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keragaman dan inklusi di layanan publik, sehingga tercipta lingkungan kerja yang mendukung dan menghargai kontribusi dari semua ASN, tanpa memandang jenis kelamin.

Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan seimbang, yang tidak hanya mencerminkan masyarakat yang dilayani tetapi juga meningkatkan efektivitas dan responsivitas layanan publik. Hal ini akan membantu membangun pemerintahan yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal.



BAB X

PENUTUP

Buku Statistik Sektoral Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 ini telah disusun dengan penuh dedikasi dan kerjasama dari berbagai pihak terkait dalam upaya menyediakan data yang akurat dan komprehensif. Data yang disajikan dalam buku ini bersumber dari 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jayawijaya, mencakup berbagai sektor penting yang mencerminkan kondisi dan perkembangan selama tahun 2023.

Buku ini dilengkapi dengan analisis komprehensif dan deskriptif yang memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai berbagai aspek yang mempengaruhi perkembangan Kabupaten Jayawijaya selama tahun 2023. Data yang disajikan tidak hanya berfungsi sebagai informasi statistik, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan dan saran bagi para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dari kesimpulan-kesimpulan setiap analisis, diketahui bahwa mungkin tidak semua aspek menunjukkan tren positif. Namun, hal tersebut justru menjadi penting untuk diketahui, karena memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai tantangan yang dihadapi dan area yang memerlukan perhatian lebih. Kami berharap melalui analisis yang mendalam ini, para pembaca dapat memahami tren dan dinamika yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya serta memperoleh wawasan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Data-data yang disajikan dalam buku ini telah dikumpulkan dan diolah dengan prinsip konfidensialitas, netralitas, dan objektivitas. Hal ini penting untuk memastikan integritas dan keandalan data yang disediakan. Namun, kami menyadari bahwa dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, mungkin terdapat kesalahan yang tidak disengaja akibat faktor-faktor tertentu. Untuk itu, kami memohon maaf dengan tulus dan terbuka terhadap masukan yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa penyediaan data statistik yang valid dan terpercaya adalah fondasi dari pembangunan yang berkelanjutan. Oleh



karena itu, penyusunan buku ini juga merupakan bagian dari upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas data dan metodologi yang digunakan. Kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan buku statistik sektoral di masa mendatang.

Dengan hati yang hangat, kami berharap buku statistik sektoral ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh pengguna data. Semoga Kabupaten Jayawijaya terus maju dan berkembang dengan memanfaatkan informasi statistik sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, dan berharap kerjasama yang baik ini terus berlanjut di masa yang akan datang.

Wamena, 08 Oktober 2024

**Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Jayawijaya,**

Arklaus Windesi, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197108061997121001